Peraturan Daerah Kota Pontianak
Nomor 7 Tahun 2025 tentang

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

TAHUN 2025-2029



BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Pontianak

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, kebijakan, strategi pengembangan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis suatu wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis lima tahunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir tahun perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi RPJMD.
17. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2045-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
18. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
20. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak).
23. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.
24. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk memastikan tercapainya target secara efektif.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan menyusun RPJMD.
(3) Dalam rangka penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan.

Pasal 3

(1) Sistematika penulisan RPJMD adalah:
    a. Bab I Pendahuluan;
    b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
    c. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. Bab V Penutup.

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam:
a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan;
b. RKPD tahunan; dan
c. Renja Perangkat Daerah tahunan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:
a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi hasil RPJMD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam RKPD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar di tingkat kota, provinsi dan nasional; dan/atau
   d. merugikan kepentingan nasional yaitu bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, perubahan kebijakan tingkat kota dan provinsi yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan provinsi dan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran Daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171); dan
b. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
RPJMD Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip
Prinsip RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

4. Pendekatan

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan:

a. Teknokratik, yaitu mengandalkan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta data dan informasi yang akurat dalam merumuskan rencana pembangunan. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 bahkan disiapkan sepenuhnya oleh tim teknokrat sebelum adanya kepala Daerah terpilih dan menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala Daerah;
b. Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aspirasi murni dari masyarakat terhadap rencana yang akan disusun. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan;
c. Politis, yaitu mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam RPJMD. Proses politik, terutama antara kepala Daerah dan DPRD, akan memengaruhi arah dan prioritas pembangunan Daerah dalam 5 tahun mendatang;
d. Atas-bawah dan bawah-atas *(Top-down dan bottom-up)*, yaitu
   1) *Top-Down***:** Inisiatif perencanaan berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (misalnya, pemerintah pusat atau provinsi) yang kemudian ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke tingkat Daerah.
   2) *Bottom-Up***:** Perencanaan dimulai dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah (desa/kelurahan) yang kemudian diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi melalui forum seperti Musrenbang.
e. Holistik-tematik, yaitu Memandang pembangunan secara menyeluruh dan lintas sektor, mempertimbangkan berbagai aspek dan dampaknya. Pembangunan difokuskan pada tema-tema prioritas yang relevan dengan kebutuhan Daerah dan nasional;
f. Integratif, yaitu Mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, tingkatan pemerintahan, dan pemangku kepentingan; dan
g. Spasial, yaitu Memperhatikan dimensi ruang atau wilayah dalam perencanaan, mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan spesifik di berbagai wilayah Daerah.

5. Tahapan

Tahapan penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 terdiri dari:

a. persiapan penyusunan;
b. pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
c. penyusunan Rancangan Awal;
d. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
e. pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD;
f. pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD;
g. konsultasi Rancangan Awal RPJMD;
h. penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada Perangkat Daerah;
i. penyusunan Rancangan RPJMD;
j. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD;
k. perumusan Rancangan Akhir RPJMD;
l. reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir RPJMD;

m. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD;
n. pembahasan Ranperda RPJMD;
o. evaluasi Ranperda RPJMD; dan
p. penetapan Peraturan Daerah.

6. Muatan.
Muatan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 terdiri dari:
a. visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
b. strategi pembangunan Daerah;
c. arah kebijakan keuangan Daerah;
d. kebijakan umum;
e. program Perangkat Daerah;
f. program lintas Perangkat Daerah;
g. program kewilayahan;
h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang telah disusun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

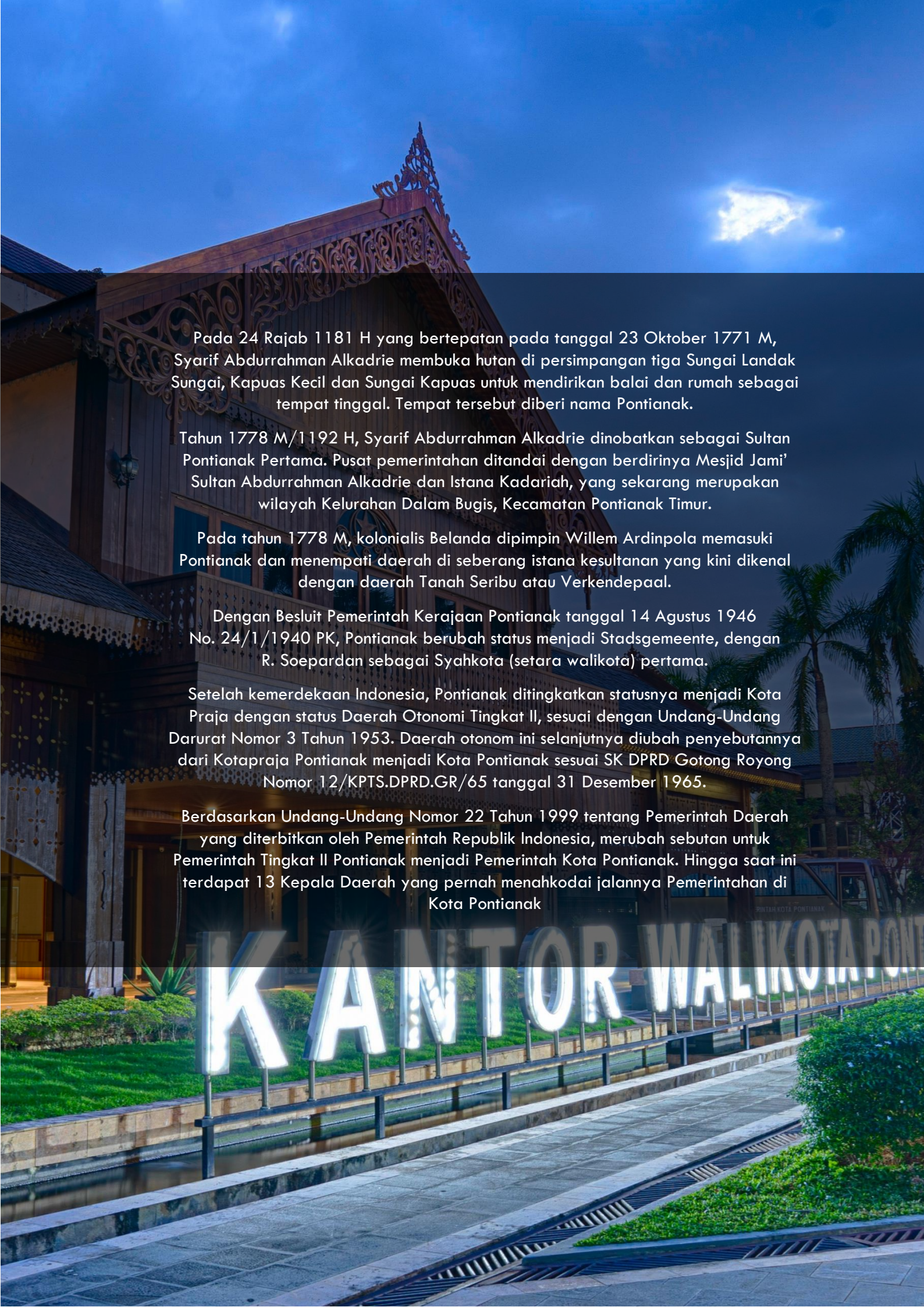
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 234

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



Pada 24 Rajab 1181 H yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 M, Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Sungai, Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Tempat tersebut diberi nama Pontianak.

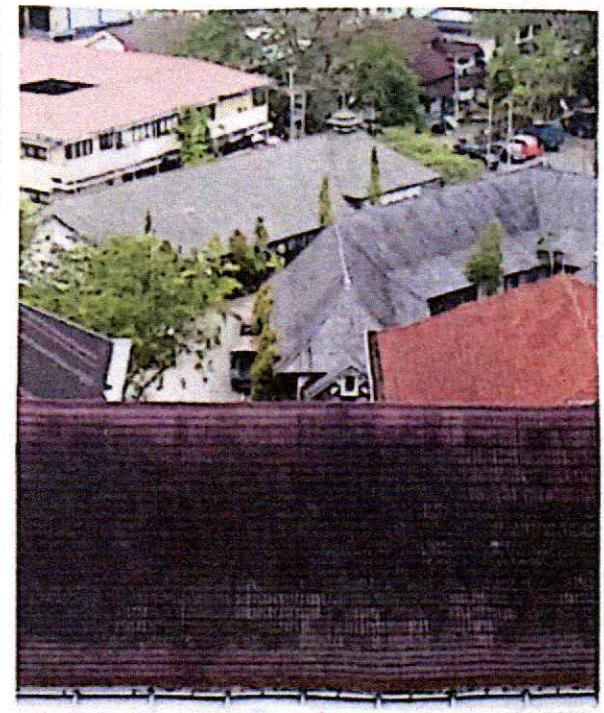
Tahun 1778 M/1192 H, Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Pertama. Pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Mesjid Jami' Sultan Abdurrahman Alkadrie dan Istana Kadariah, yang sekarang merupakan wilayah Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.

Pada tahun 1778 M, kolonialis Belanda dipimpin Willem Ardinpola memasuki Pontianak dan menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.

Dengan Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK, Pontianak berubah status menjadi Stadsgemeente, dengan R. Soepardan sebagai Syahkota (setara walikota) pertama.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pontianak ditingkatkan statusnya menjadi Kota Praja dengan status Daerah Otonomi Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Daerah otonom ini selanjutnya diubah penyebutannya dari Kotapraja Pontianak menjadi Kota Pontianak sesuai SK DPRD Gotong Royong Nomor 12/KPTS.DPRD.GR/65 tanggal 31 Desember 1965.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, merubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi Pemerintah Kota Pontianak. Hingga saat ini terdapat 13 Kepala Daerah yang pernah menahkodai jalannya Pemerintahan di Kota Pontianak





KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun. Dokumen rencana ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi berbagai pihak dalam merumuskan visi dan strategi pembangunan yang akan mengarahkan masa depan Kota Pontianak yang **"MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS"**

Sebagai Kota yang terus berkembang, Pontianak menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Memerlukan perencanaan yang matang dan terarah. RPJMD ini akan memberikan arah dan landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan Kota secara berkelanjutan. Diharapkan dokumen rencana dapat menjadi panduan yang efektif bagi para *stakeholders*, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

Dokumen ini disusun berlandaskan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif ini, rencana strategis yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Akhir kata, diharapkan dokumen rencana ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kota Pontianak dan seluruh warganya. Semoga dengan komitmen penuh dan kerja keras, kita dapat bersama-sama mewujudkan Pontianak sebagai Kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah berkontribusi dengan penuh dedikasi dalam penyusunan dokumen rencana ini.

Pontianak, 2025

WALI KOTA PONTIANAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK		ix
DAFTAR SINGKATAN		x
DAFTAR ISTILAH		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	6
1.4.	Maksud Dan Tujuan	9
1.5.	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	12
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.1.1	Aspek Geografi Dan Demografi	12
2.1.1.1	Karakteristik Wilayah	12
2.1.1.2.	Potensi Sumber Daya Alam	16
2.1.1.3.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	20
2.1.1.4.	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	28
2.1.1.5.	Lingkungan Hidup Berkualitas	32
2.1.1.6.	Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	33
2.1.1.7.	Demografi	37
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
2.1.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	41
2.1.2.2	Kesehatan Masyarakat	50
2.1.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	53
2.1.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	55
2.1.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	56
2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	57
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	58
2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	58
2.1.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	59
2.1.3.3	Transformasi Digital	62
2.1.3.4	Integritas Ekonomi Domestik dan Global	62
2.1.3.5	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	62
2.1.3.6	Stabilitas Ekonomi Makro	64
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	66

2.1.4.1	Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif	66
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, keamanan Nasional yang Tanggguh dan Demokrasi Subtansial	68
2.1.4.3	Ketergantungan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	69
2.1.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	69
2.1.5.	BUMD yang berkontribusi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah	116
2.1.6.	Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)	122
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	127
2.2.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	128
2.2.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	128
2.2.1.2	Neraca Daerah	139
2.2.2	Kerangka Pendanaan	144
2.2.2.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	144
2.2.2.2	Proyeksi Pembiayaan Daerah	147
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	152
2.3.1	Permasalahan	152
2.3.2	Isu Strategis	175
2.3.2.1	Isu Internasional	175
2.3.2.2	Isu Nasional	180
2.3.2.3	Isu Strategis Kota Pontianak	186
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	220
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Pontianak	220
3.1.1	Visi, Misi Kota Pontianak	220
3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	228
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	235
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	235
3.2.2	Program-program Prioritas Daerah	255
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	329
4. 1.	Program Perangkat Daerah	329
4. 2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	396
4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	396
4.2.2	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)	400
BAB V	PENUTUP	448

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Kota Pontianak Tahun 2024	12
Tabel 2.2	Sebaran Gambut Kota Pontianak	14
Tabel 2.3	Gambaran Indikator Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.4	Produksi Padi Kota Pontianak Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.5	Produksi Tanaman Hortikultura Pontianak Tahun 2022-2024 (Kuintal)	30
Tabel 2.6	Produksi Perikanan Kota Pontianak Tahun 2022-2024	30
Tabel 2.7	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.8	Prioritas Penanganan Resiko Bencana	34
Tabel 2.9	Gambaran Indikator Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.10	Persebaran Penduduk Kota Pontianak Tahun 2024	37
Tabel 2.11	Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan kelompok umur Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Pontianak Tahun 2024	38
Tabel 2.13	Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2024	39
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2020-2024	40
Tabel 2.15	Penduduk Kota Pontianak	40
Tabel 2.16	Gambaran Indikator Kesejahteraan Ekonomi Tahun 2020-2024	41
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pontianak ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	42
Tabel 2.18	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.19	Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional	44
Tabel 2.20	Rasio Gini Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional	46
Tabel 2.21	IPM Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional	46
Tabel 2.22	TPT Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional	47
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Kesehatan Untuk Semua Tahun 2020-2024	50
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Pendidikan Berkualitas yang Merata Tahun 2020-2024	53

Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Perlindungan Sosial yang Adaptif Tahun 2020-2024	55
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Tahun 2020-2024	57
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.28	Gambaran Indikator Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.29	Perkembangan Hasil Evaluasi Impelmentasi Smart City Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.30	Perkembangan Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Perekonomian Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.31	Gambaran Perkembangan Infrastruktur dan Akses Hunian Layak Terjangkau Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.32	Gambaran Indikator Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2020-2024	64
Tabel 2.33	Gambaran Indikator Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif	67
Tabel 2.34	Perkembangan Ketergantungan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gentar Kawasan Tahun 2020-2024	69
Tabel 2.35	Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	70
Tabel 2.36	Capaian IKK Outcome Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	72
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	72
Tabel 2.38	Capaian IKK Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	75
Tabel 2.39	Kinerja Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	77
Tabel 2.40	IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	77
Tabel 2.41	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	78
Tabel 2.42	Capaian IKK Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	79
Tabel 2.43	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	79
Tabel 2.44	Capaian IKK Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	80
Tabel 2.45	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024	81
Tabel 2.46	Capaian IKK Outcome Urusan Sosial Tahun 2020-2024	81
Tabel 2.47	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun2020-2024	82
Tabel 2.48	Capaian IKK Outcome Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	82
Tabel 2.49	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tahun 2020-2024	83
Tabel 2.50	Capaian IKK Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan	84

Tabel 2.51	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024	84
Tabel 2.52	Capaian IKK Outcome Urusan Pangan Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.53	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	85
Tabel 2.54	Capaian IKK Outcome Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024	86
Tabel 2.55	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	86
Tabel 2.56	Capaian IKK Outcome Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	87
Tabel 2.57	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil	87
Tabel 2.58	Capaian IKK Outcome Urusan Administrasi dan Pencatatatan Sipil Tahun 2020-2024	88
Tabel 2.59	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	89
Tabel 2.60	Capaian IKK Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.61	Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.62	Capaian IKK Outcome Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.63	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	91
Tabel 2.64	Capaian IKK Outcome Urusan Perhubungan	92
Tabel 2.65	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	92
Tabel 2.66	IKK Outcome Urusan Komunikasi dan Informatika	93
Tabel 2.67	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2020-2024	94
Tabel 2.68	Capaian IKK Outcome Urusan Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan	94
Tabel 2.69	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024	95
Tabel 2.70	Capaian IKK Outcome Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024	95
Tabel 2.71	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024	96
Tabel 2.72	IKK Outcome Urusan Kepemudaan dan Olahraga	96
Tabel 2.73	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	97
Tabel 2.74	Capaian IKK Outcome Urusan Statistik Tahun 2020-2024	97
Tabel 2.75	Capaian IKK Outcome Urusan Persandian Tahun 2020-2024	98
Tabel 2.76	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024	98
Tabel 2.77	Data objek pemajuan kebudayaan Kota Pontianak	98
Tabel 2.78	Data Warisan Budaya Takbenda Kota Pontianak (Intangible)	99
Tabel 2.79	Data Cagar Budaya Kota Pontianak (Tangible)	100
Tabel 2.80	Data Kekayaan Budaya Kota Pontianak Yang Telah Terdaftar Sebagai HKI	103

Tabel 2.81	Capaian IKK Outcome Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024	104
Tabel 2.82	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024	104
Tabel 2.83	Capaian IKK Outcome Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	105
Tabel 2.84	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024	105
Tabel 2.85	Capaian IKK Outcome Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024	106
Tabel 2.86	Capaian Indikator Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	106
Tabel 2.87	Capaian IKK Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	107
Tabel 2.88	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	107
Tabel 2.89	Capaian IKK Outcome Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	107
Tabel 2.90	Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	108
Tabel 2.91	Capaian IKK Outcome Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	108
Tabel 2.92	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	108
Tabel 2.93	Capaian IKK Outcome Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	109
Tabel 2.94	Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	109
Tabel 2.95	Capaian IKK Outcome Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024	110
Tabel 2.96	Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	111
Tabel 2.97	Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	111
Tabel 2.98	Capaian Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	111
Tabel 2.99	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024	112
Tabel 2.100	Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang	113
Tabel 2.101	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2025	113
Tabel 2.102	Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024	113
Tabel 2.103	Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024	114
Tabel 2.104	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	114
Tabel 2.105	Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Pengawasan	115
Tabel 2.106	Capaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Unsur Kewilayahan Tahun 2020-2024	115
Tabel 2.107	Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024	116
Tabel 2.108	Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2020-2024	118
Tabel 2.109	Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2020-2024	120
Tabel 2.110	Rekap Data Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain	123
Tabel 2.111	Rekap Data Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	124
Tabel 2.112	Rekap Data Sinergi	126
Tabel 2.113	Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2020-2024	129
Tabel 2.114	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	141

Tabel 2.115	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 - 2030	149
Tabel 2.116	Permasalahan di Kota Pontianak	153
Tabel 2.117	Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Pontianak	187
Tabel 3.1	Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	223
Tabel 3.2	Dukungan Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Asta Cita/ Prioritas Nasional	227
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak	229
Tabel 3.4	Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	236
Tabel 3.5	Keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Pontianak	246
Tabel 3.6	Tema Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025-2029	249
Tabel 3.7	Sinkronisasi Arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan Rekomedasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029	250
Tabel 3.8	Program-Program Prioritas Daerah Kota Pontianak 2025-2030	257
Tabel 3.9	Rencana Waktu Pelaksanaan Proyek Strategis/Multiyears Tahun 2025-2030	323
Tabel 3.10	Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Nasional	325
Tabel 4.1	Rencana Program Perangkat Daerah	330
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pontianak Tahun 2025-2030	397
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pontianak tahun 2025-2030	401

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya	9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Pontianak	13
Gambar 2.2	Peta DDDTTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak	21
Gambar 2.3	Peta DDDTLH Penyediaan Pangan Kota Pontianak Kinerja Efisiensi dan Pemanfaatan SDA	22
Gambar 2.4	Peta Persebaran Wilayah Persawahan di Kota Pontianak	23
Gambar 2.5	Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Pontianak	24
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Pontianak	25
Gambar 2.7	Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak	26
Gambar 2.8	Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Biodiversitas Kota Pontianak	27
Gambar 2.9	Megatren Global 2045	175
Gambar 2.10	Rata-Rata Total Factor Productivity Index	180
Grafik 2.1	Perubahan Rata-Rata Curah Hujan dan Suhu Tahun 2024-2024	15
Grafik 2.2	Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak	21
Grafik 2.3	Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Pontianak	22
Grafik 2.4	Distribusi Luasan DDDTLH Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana	24
Grafik 2.5	Grafik Distribusi Luasan DDDTLH Jasa Eskosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak	26
Grafik 2.6	Proporsional DDDTLH Jasa Ekosistem Biodiversitas Kota Pontianak	27
Grafik 2.7	Indeks Per Prioritas Kota Pontianak Tahun 2025	36
Grafik 2.8	Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Bank Kalbar Tahun 2020-2024	121
Grafik 2.9	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari Dividen Bank KalbarTahun 2020-2023	121
Grafik 2.10	*Total Factor Productivity Index* 2010-2019	181
Grafik 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (Tahun 1985-2024)	181
Grafik 2.12	Kontribusi Manufaktur terhadap PDB	182
Grafik 2.13	Produktivitas Pertanian	183

DAFTAR SINGKATAN

AI	: *Artificial Intelligence*
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BaU	: *Business as Usual*
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBDC	*: Central Bank Digital Currency*
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DLT	: *Distributed Ledger Technology*
GPN	: *Global Production Network*
GVC	: *Global Value Chain*
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKD	: Indeks Ketahanan Daerah
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IoT	: *Internet of Things*
IPALD	: Instalasi Pengolahan Air Limbah Daerah
IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPEF	: *Indo-Pacific Economic Framework*
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPTEKIN	: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KLA	: Kota Layak Anak
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
RCEP	: *Regional Comprehensive Economic Partnership*
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
RPA	: *Robotic Process Automation*
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SLOC	: *Sea Lines of Communication*
SPBE	: Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
TFP	: *Total Factor Productivity*
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISTILAH

Aging Population	:	Penuaan penduduk yakni kondisi dimana jumlah penduduk yang lansia semakin bertambah.
Air baku	:	Sumber air yang digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan lainnya.
Aksesibilitas	:	Kemampuan seseorang untuk mengakses dan menggunakan suatu fasilitas, layanan, atau informasi tanpa adanya hambatan fisik maupun non-fisik.
Alih fungsi lahan atau konversi lahan	:	Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Angkatan Kerja	:	Penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja atau sedang mencari kerja.
Baseline	:	Titik awal atau referensi yang digunakan sebagai dasar perbandingan atau evaluasi.
Big Data Analytics	:	Proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, trend, dan wawasan yang berharga. Proses ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan bukti data
Bencana Hidrometeorologi	:	Suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi) yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan social dan ekonomi.
Blockchain	:	Teknologi penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi dan terdesentralisasi.
Bonus Demografi	:	Keuntungan ekonomi yang didapat karena bertambahnya usia produktif sebagai akibat penurunan fertilitas jangka panjang.
Birokrasi	:	Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Cascading	:	Proses penjabaran dan penyelarasan target-target kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis.
Cryptocurrency	:	Mata uang digital yang menggunakan kriptografi dan *blockchain* untuk transaksi terdesentralisasi dan aman.
Cyber security	:	Perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet dari berbagai ancaman dunia maya.

Daya beli	:	Kemampuan seseorang atau bisnis dalam membeli suatu barang ataupun jasa.
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup	:	Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Debit	:	Volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui penampang lintang tertentu dalam satuan waktu.
Deforestasi	:	Proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan.
Demografi	:	Studi ilmiah tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas.
Dependency ratio	:	Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi.
Dinamika	:	Tingkah laku yang langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok.
Diplomasi	:	Metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku dalam hubungan internasional melalui dialog atau negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara.
Disharmoni	:	Ketidakselarasan.
Disrupsi	:	Perubahan mendasar yang terjadi secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengubah pola hidup yang lama menjadi baru.
Diversifikasi	:	Penganekaragaman.
Domestik	:	Rumah tangga.
Drainase	:	Sistem atau proses pengelolaan air yang bertujuan untuk mengatur aliran air dari suatu area atau permukaan tertentu.
Dutch disease	:	Istilah yang menggambarkan fenomena ekonomi ketika eksploitasi sumber daya alam memicu kelemahan di sektor lain, terutama manufaktur.
Efektivitas	:	Kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh.
Efisiensi	:	Cara untuk mencapai tujuan yang optimal dengan meminimalkan sumber daya, seperti tenaga, uang, dan waktu.
Ekologi	:	Studi tentang hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya, serta struktur dan fungsi ekosistem.
Ekonomi Digital	:	kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital, seperti internet dan kecerdasan buatan (AI).
Ekonomi Hijau	:	Ekonomi hijau merupakan sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Eksodus	:	Perbuatan meninggalkan tempat asal oleh penduduk secara besar-besaran.
Emerging economies	:	Ekonomi negara berkembang yang mulai terlibat dengan pasar global seiring perkembangannya.
Emisi	:	Pelepasan zat atau substansi ke lingkungan yang dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia.
Epidemiologi	:	Ilmu yang mengkaji cara penyakit menyebar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam populasi.
Episentrum	:	Titik atau pusat.
Fintech	:	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan
Fluktuasi	:	Suatu perubahan yang berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam waktu tertentu.
Friksi	:	Pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat atau perpecahan.
Good Governance	:	Konsep yang mencakup proses pengambilan keputusan, tindakan pemerintah, serta cara pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan
Geoekonomi	:	Kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya.
Geopolitik	:	Metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.
Hibah	:	Pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup.
Hilirisasi	:	Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas yang dimiliki sebuah negara.
Hinterland	:	Wilayah sekitar Kota yang fungsinya memasok kebutuhan harian Kota tersebut.
Imersif	:	Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara alami di metaverse simulasi seakan nyata.
Infertilitas	:	Kondisi medis yang menggambarkan ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk hamil setelah berusaha mencapai kehamilan.
Inflasi	:	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Inklusi sosial	:	Peningkatan persyaratan di mana individu bisa mengambil bagian dalam masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan, kesempatan, juga martabat mereka.
Inklusi	:	Pendekatan yang membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
Insentif	:	Tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.

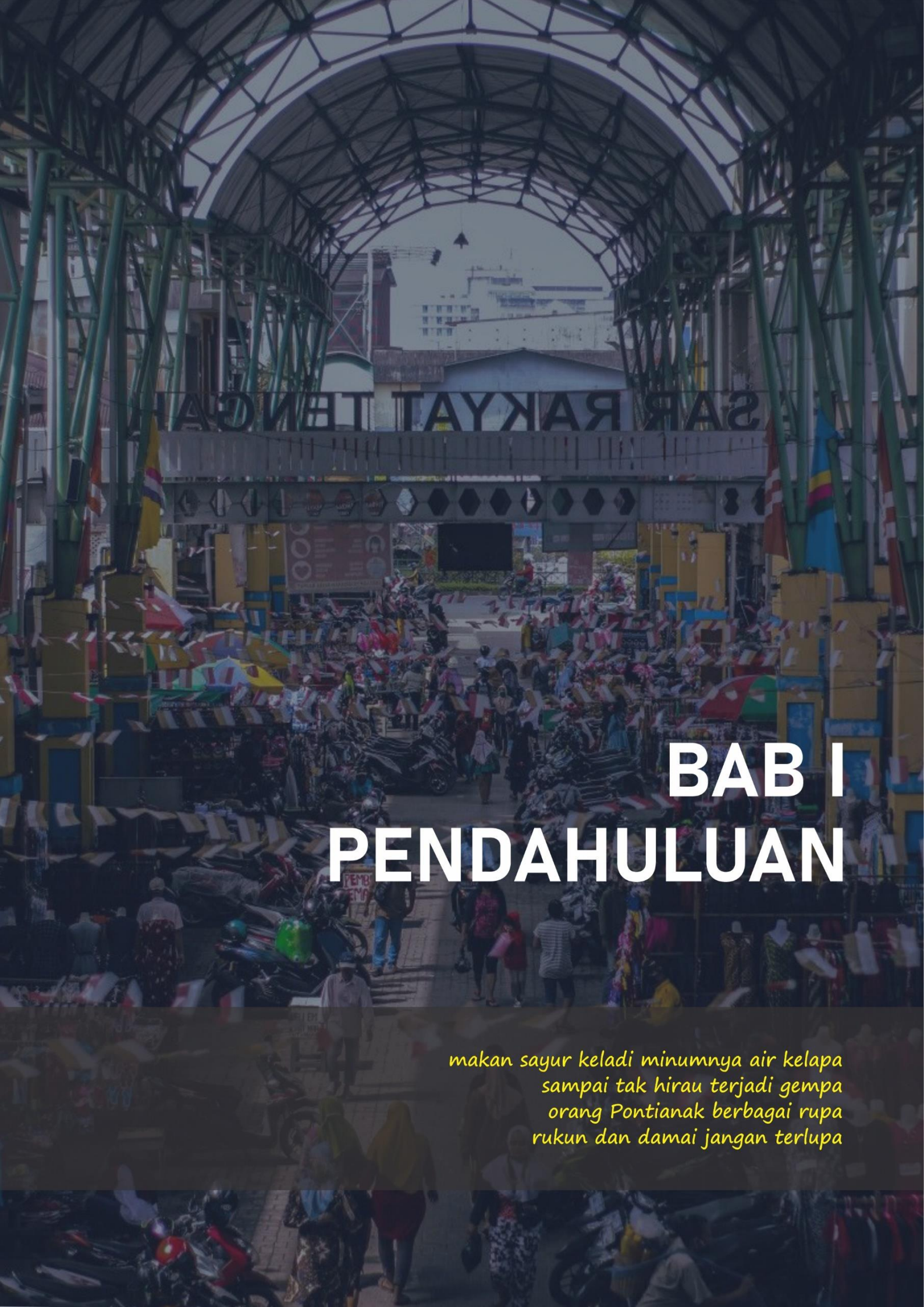
Intangible	:	Aset yang tidak berwujud dan sulit untuk diukur secara konkret, seperti hak paten, merek dagang, kekayaan intelektual, dan *goodwill.*
Jabatan fungsional	:	Jabatan yang diberikan kepada pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dengan keterampilan atau keahlian tertentu.
Jasa ekosistem	:	Keseluruhan manfaat yang diberikan oleh ekosistem kepada kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kerentanan bencana	:	Sebuah kondisi atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan atau proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan seseorang atau masyarakat dalam menghadapi bencana atau acaman bencana.
Keterpaparan	:	Kondisi terbukanya orang atau masyarakat yang berada dalam pengaruh atau interaksi dengan unsur penyebab penyakit.
Komprehensif	:	Sifat yang berarti menjelaskan informasi secara lengkap, luas, dan lebih rinci.
Konektivitas (digital)		Kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi dengan perangkat atau jaringan lain.
Konektivitas (transportasi)	:	Terhubungnya wilayah dalam suatu negara dengan berbagai transportasi dan infrastruktur.
Kontinuitas	:	Kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, atau keadaan kontinu.
Kredibel	:	Dapat dipercaya.
Logistik	:	Pengadaan, perawatan, distribusi dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan dan ketenagaan.
Madya	:	Bagian tengah.
Mahadata	:	Pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data yang beragam sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen dan mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut.
Makro ekonomi	:	cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, yang meliputi pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah.
Manajemen risiko	:	Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi.
Marginal	:	Berhubungan dengan batas atau tepi yang tidak terlalu menguntungkan
Megatren	:	Kecenderungan besar pada gaya atau model mutakhir.

Metropolitan area	:	Sebuah wilayah yang terdiri dari aglomerasi perkotaan padat penduduk, kawasan industri, kawasan komersial, jaringan transportasi, infrastruktur, dan area perumahan.
Mitigasi	:	Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan, akibat dari suatu peristiwa, yang umumnya adalah bencana.
Migrasi	:	Aktivitas perpindahan.
Motorisasi	:	Pengubahan (penggantian) sesuatu yang tidak menggunakan motor menjadi bermotor; pemakaian motor sebagai tenaga penggerak.
Multipplier effect	:	Pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi.
Nanoteknologi	:	Satu ilmu atau teknologi yang mempelajari obyek yang ukurannya sangat kecil.
Neonatal	:	Masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran.
Nindya	:	Predikat kedua pada penghargaan Kota Layak Anak.
Oleochemicals	:	Bahan kimia apapun yang berasal dari lemak.
Otomasi	:	Penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa.
Outer ring	:	Jaringan Lingkar Luar.
Output ekonomi	:	Jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali
Pagu anggaran indikatif	:	Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.
Paradigma	:	Kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan ataupun mendefinisikan batas-batas.
Partisipatif	:	Menekankan partisipasi luas dari semua *stakeholder*s dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Pasar kerja	:	Pasar tempat para pengusaha mencari karyawan dan karyawan mencari pekerjaan.
Paten	:	Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Peak hour	:	Jam sibuk, biasanya saat penduduk berangkat dan pulang bekerja.
Pemanfaatan lahan	:	Modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.
Penatausahaan	:	Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peneplain	:	Dataran dengan relief rendah yang terbentuk akibat erosi yang berkepanjangan.
Penetrasi pasar	:	Cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut.
Perlindungan sosial	:	Upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan.
Petrochemicals	:	Bahan kimia yang berasal dari minyak bumi atau gas alam.
Plagiarisme	:	Aktivitas pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri atau karangan sendiri.
Pola ruang	:	Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
Prasarana	:	Fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.
Pratama	:	Yang pertama atau yang utama.
Prevalensi	:	Proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam periode waktu tertentu.
Produktivitas	:	Ukuran efisiensi produktif. Suatu pembanding antara hasil keluaran dan masukan.
Promotif-preventif	:	Upaya atau tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan.
Prostitusi	:	Kejahatan terhadap kesusilaan atau moral.
Pusat Pelayanan Kota	:	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
Reformasi	:	perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Representasi	:	Perwakilan.
Replacement level	:	Tingkat kesuburan di mana suatu populasi secara tepat mengganti dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Risiko bencana	:	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya

		rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Rekayasa	:	Penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan (seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien).
Retensi/retensi pekerja	:	Sebuah kemampuan atau upaya sebuah perusahaan untuk mempertahankan karyawan di tempat kerja.
Sanitasi	:	Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan.
Scientific temper	:	Perangai bertualang guna menggali kebenaran dan pengetahuan baru yang melibatkan sikap keterbukaan seseorang untuk berani mengubah pendapat lamanya berdasar bukti baru, menolak menerima gagasan tanpa pembuktian, berpijak pada fakta yang dapat teramati, dan memiliki kedisiplinan menggunakan akal.
Sektor informal	:	sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar.
Sensus	:	cara untuk mendapatkan data deskriptif mengenai jumlah populasi.
Sport-science	:	Cabang keilmuan yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan hasil olahraga.
Stagnan	:	Tetap atau tidak berubah.
Stakeholder	:	Pemangku kepentingan.
Start-up	:	Perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi.
Struktur ruang	:	Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi.
Stunting	:	Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Supremasi	:	Kekuasaan tertinggi.
Surplus	:	Kelebihan.
Taraf hidup	:	Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang.
Tata ruang	:	Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Teknokratik	:	Menyangkut pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya.
Topografi	:	Kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah.
Transformasi	:	Proses Perubahan berkelanjutan dan menyeluruh.

Turap	:	Struktur konstruksi batu kali yang berbentuk dinding dan berguna untuk menahan tekanan dan pergerakan tanah yang kurang stabil.
Underemployment	:	Ukuran jumlah orang dalam suatu perekonomian yang bekerja pada pekerjaan bergaji rendah atau paruh waktu.
Urbanisasi	:	Perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Utilitas	:	Secara umum dalam KBBI artinya faedah, kegunaan, manfaat. Sementara dalam infrastruktur yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
Vektor penyakit	:	organisme hidup yang dapat menularkan patogen menular antarmanusia, atau dari hewan ke manusia.
Virtual-metaverse	:	istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia virtual yang terhubung dan berkesinambungan, di mana pengguna dapat berinteraksi, bermain, bekerja, dan berkreasi dengan menggunakan avatar digital.
Vokasional	:	Bentuk pendidikan yang mengajarkan siswa untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu.



BAB I
PENDAHULUAN

makan sayur keladi minumnya air kelapa
sampai tak hirau terjadi gempa
orang Pontianak berbagai rupa
rukun dan damai jangan terlupa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Akhir yang berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program perangkat daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Kota Pontianak dan dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70 ayat (2), menyatakan bahwa penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 20205-2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Nasional, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan partisipatif, pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *top-down.* Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.

Pendekatan Politik menggunakan metode mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam dokumen RPJMD. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang. Pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *top-down* merupakan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi.

Pendekatan yang berorientasi pada substansi mencakup pendekatan holistic-tematik, pendekatan integrative dan pendekatan spasial. Pendekatan holistic-tematik dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 RPJMD harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari.

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 hingga Tahun 2029 serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD Kota Pontianak juga menjadi acuan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 8-328/2024);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
36. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan Nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan bahwa RPJMD 2025-2029 terintegrasi dengan kebijakan nasional dan daerah serta selaras dengan arah pembangunan nasional, dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. RPJMN Tahun 2025-2029
   Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.
2. RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
   Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, hal ini bertujuan agar RPJMD Kota dapat sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan tercipta keselarasan dalam pencapaian visi,misi dan program pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi, pembangunan di Kota Pontianak dapat lebih terarah dan menghindari tumpang tindih kebijakan demi terciptanya efektivitas dan efisiensi pembangunan, sinkronisasi program dan anggaran serta peningkatan sinergi antar wilayah terutama dalam proyek pembangunan yang melibatkan lebih dari satu Daerah.
3. RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045
   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Pontianak selama periode Tahun 2025-2045, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak untuk 4(empat) periode per-lima tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kota Pontianak.

4. KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029
   Tujuan pembangunan KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar pemikiran dengan melakukan pengkajian capaian pelaksanaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam menyusun RPJMD harus dipastikan bahwa rencana pembangunan daerah memperhatikan dampak lingkungan dan berorientasi pada pemeliharaan alam sehingga penyusunan RPJMD 2025-2029 harus memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.

5. RTRW
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan di dalam penyusunan RPJMD. Di dalam Dokumen RTRW ditetapkan pola dan struktur wilayah, dan pemanfaatan ruang dalam jangka panjang, sehingga penyusunan arah pembangunan di dalam RPJMD berjalan sesuai dengan kebijakan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, terintegrasi, efisien dan berkelanjutan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

6. Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029
   Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, karena Rancangan Teknokratik RPJMD disusun berdasarkan kajian akademis, data statistik, dan analisis ilmiah. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD didasarkan pada kondisi objektif daerah, bukan sekadar kepentingan politik. Rancangan teknokratik memberikan arah pembangunan yang lebih sistematis dan terencana, sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat selaras dengan visi pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan perencanaan nasional (RPJMN).

7. RIPJPID
   RIPJPID atau Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi arahan, kebijakan, dan langkah-langkah strategis untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di suatu daerah, serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan daerah.

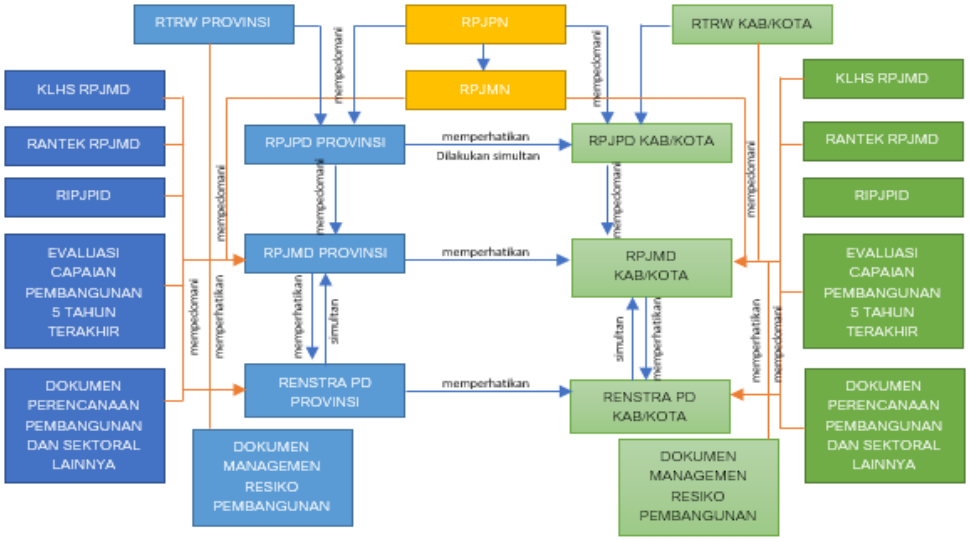
8. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir.
   Penyusunan RPJMD harus memperhatikan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir yang menjadi *baseline* dalam penetapan target proyeksi. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana target RPJMD periode sebelumnya telah tercapai dan mengidentifikasi keberhasilan serta kegagalan program sebelumnya. Dengan menganalisis data pembangunan sebelumnya, pemerintah daerah dapat melihat permasalahan

yang belum terselesaikan, kendala apa saja yang ditemukan dalam implementasi program, tantangan yang mungkin akan muncul, pembangunan apa saja yang harus berkelanjutan serta apakah alokasi anggaran sebelumnya sudah berjalan optimal ataukah perlu perbaikan. Hasil pencapaian pembangunan sebelumnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif untuk lima tahun ke depan.

9. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya
   Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya adalah berbagai dokumen yang berisi rencana dan strategi untuk pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta rencana-rencana dari berbagai sektor, termasuk diantaranya RAD-PG Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen FSVA Kota Pontianak 2024. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Pontianak dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan dalam skema pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya



Sumber : Kemendagri

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini sebagai penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kota Pontianak 2025-2029 dengan berpedoman pada visi, misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan

lainnya, perumusan isu strategis Daerah, serta rekomendasi. Dokumen ini disusun juga dimaksudkan untuk mendukung target nasional dan provinsi di berbagai sektor yang menjadi prioritas.

Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data dan informasi yang relevan dan penting terkait gambaran umum kondisi daerah baik pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum;
2. Menelaah, dan menyajikan hasil evaluasi rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD) untuk memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana tahunan (RKPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun;
3. Menyajikan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang unutk peningkatan kualitas dan kapasitas pendanaan pembangunan daerah;
4. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan Urusan;
5. Menelaah dan menganalisis kekuatan dan potensi khas Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai refleksi cita-cita bersama masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan, mengidentifikasi dasar hukum penyusunan, menjelaskan secara singkat hubungan antara Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029, RTRW serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan, serta menjelaskan sistematika penulisan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing. Aspek Pelayanan Umum. Gambaran umum kondisi daerah juga memuat penjelasan tentang BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta memuat pelaksanaan kerjasama daerah.

Selain gambaran umum kondisi daerah, bab ini memuat penjelasan tentang kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yaitu penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta Gambaran Proyeksi Keuangan Daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu Tahun Anggaran 2025-2029 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis.

Pada Bab ini juga menguraikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia serta memuat perumusan identifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini memuat visi masa depan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Pontianak dalam jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih. Misi yang merupakan penjabaran dari visi yang dituangkan ke dalam serangkaian kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih serta pendekatan teknokratik agar sesuai dengan kaidah penyusunan misi. Juga memuat tujuan yang diturunkan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 tahun, serta sasaran yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Bab ini juga menjelaskan tentang strategi yang merupakan rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pada bab ini juga menjelaskan arah kebijakan yang merupakan rangkaian kerja penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD, serta penjelasan mengenai program prioritas yang dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

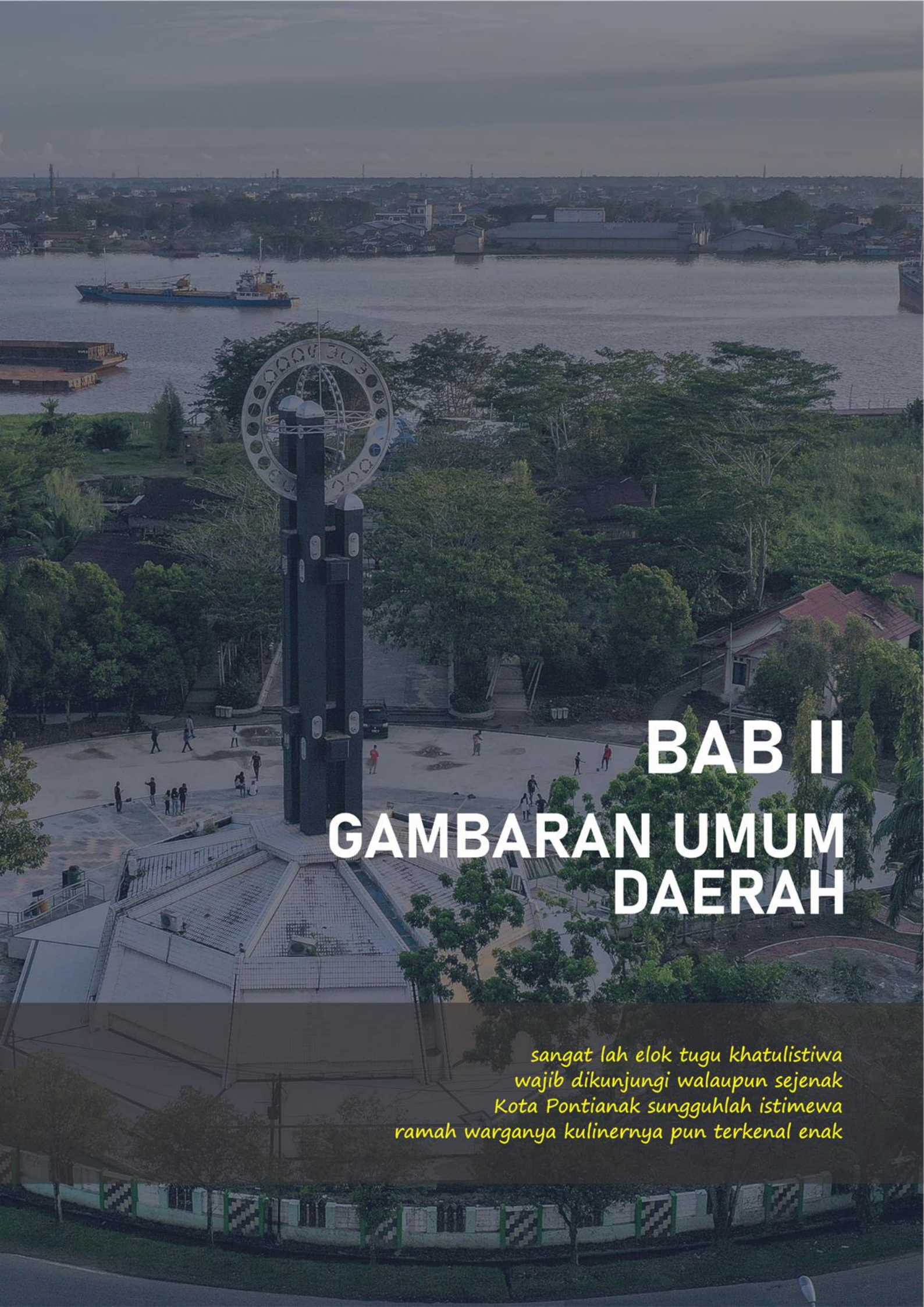
BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2026 hingga Tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Pada Bab ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.



BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

sangat lah elok tugu khatulistiwa
wajib dikunjungi walaupun sejenak
Kota Pontianak sungguhlah istimewa
ramah warganya kulinernya pun terkenal enak

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

A. Letak Geografis

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat cukup strategis karena dilalui oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kota ini dikenal sebagai "Kota Khatulistiwa" karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Secara astronomis terletak di antara 0°02'19,868" Lintang Utara dan 0°05'53,292" Lintang Selatan dan antara 109°16'22,758" Bujur Timur sampai dengan 109°23'9,618" Bujur Timur.

Karena dilalui oleh garis khatulistiwa menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 kecamatan dan 29 kelurahan.

Luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km^2 dengan rincian luas setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Wilayah Kota Pontianak Tahun 2024

Kecamatan	Luas (Km^2)
Pontianak Selatan	16,471*
Pontianak Tenggara	16,180*
Pontianak Timur	12,061
Pontianak Barat	16,383
Pontianak Kota	16,016
Pontianak Utara	41,097
Kota Pontianak	**118,209**

Sumber: * Peraturan Wali Kota No. 36 Tahun 2022
Kota Pontianak Dalam Angka, 2025

Adapun batas wilayah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Bagian Selatan : Desa Pal IX dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Desa Sungai Raya dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

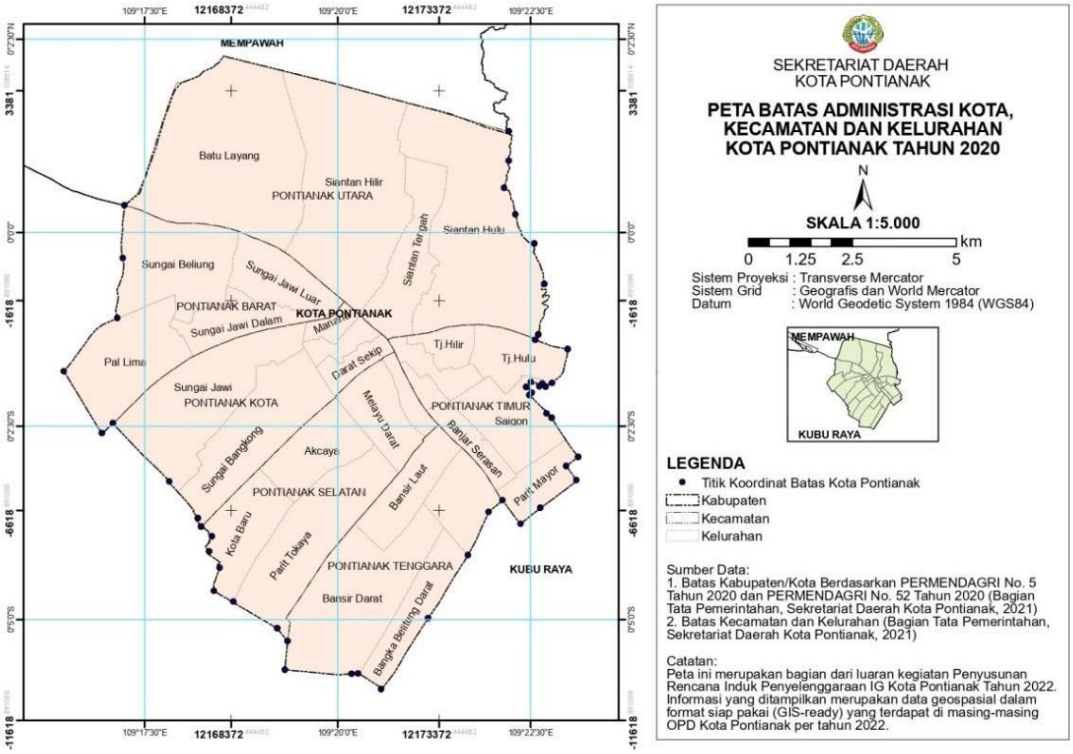
Bagian Timur : Desa Mega Timur, Desa Sungai Malaya dan Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan Desa Kapur dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Barat: Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

Berikut ini merupakan peta dasar dan peta administrasi Kota Pontianak:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Pontianak



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2022

B. Topografi

Topografi adalah istilah yang berkaitan dengan kontur lahan atau kemiringan suatu area. Wilayah Kota Pontianak seluruhnya terletak pada ketinggian 0,8 – 1,5 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan berkisar 0 – 2 persen. Dengan ketinggian permukaan wilayah tersebut maka Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang. Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman air antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter.

C. Geologi

Geologi secara umum membahas mengenai batuan, mineral, lapisan tanah, serta sejarah geologis bumi melalui waktu, termasuk fenomena seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan proses erosi.

Kota Pontianak memiliki kondisi geologi yang unik. Wilayah ini termasuk dalam kategori peneplain dan sedimen alluvial, yang sebagian besar terdiri dari tanah liat. Jenis tanah ini merupakan gambut bekas endapan lumpur dari Sungai Kapuas.

Karena karakteristik ini, tanah di Pontianak sangat labil dan memiliki daya dukung yang rendah. Kondisi Geologi di Kota Pontianak adalah berjenis Talus Deposit. Talus berarti pergeseran tanah atau semacam rayapan tanah dari atas ke bawah yang terjadi akibat gaya gravitasi, sedangkan deposit berarti merupakan akumulasi atau kumpulan yang terjadi akibat penumpukan atau sedimentasi, sehingga dapat disimpulkan apabila talus deposit merupakan kumpulan tanah yang terbentuk akibat dari aktivitas sedimentasi.

Endapan/sedimentasi disinyalir terjadi karena Kota Pontianak merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dibagi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Selain itu, Kota Pontianak memiliki wilayah gambut dengan klasifikasi gambut berkanal (Zona Budidaya), kubah gabut berkanal (Zona Lindung), dan kubah gambut tidak berkanal (zona lindung). Berikut ini merupakan sebaran gambut di Kota Pontianak.

Tabel 2.2 Sebaran Gambut Kota Pontianak

Klasifikasi	Kecamatan	Luas (Ha)
Gambut Berkanal (Zona Budidaya)	Pontianak Selatan	1,58
	Pontianak Tenggara	5,14
	Pontianak Timur	344,14
	Pontianak Kota	90,83
	Pontianak Utara	1.337,81
Kubah Gambut Berkanal (Zona Lindung)	Pontianak Selatan	0,13
	Pontianak Tenggara	652,24
Kubah Gambut Tidak Berkanal	Pontianak Tenggara	22,2
Total		**2454,08**

Sumber: Revisi RTRW Kota Pontianak Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, kecamatan yang memiliki luasan lahan gambut terbesar adalah di Kecamatan Pontianak Utara dengan luas 1.337,81 Ha. Luasan terbesar selanjutnya adalah di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Dengan demikian pengembangan di kawasan ini harus memperhatikan kemampuan lahannya.

D. Hidrologi

Hidrologi secara Umum adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air.

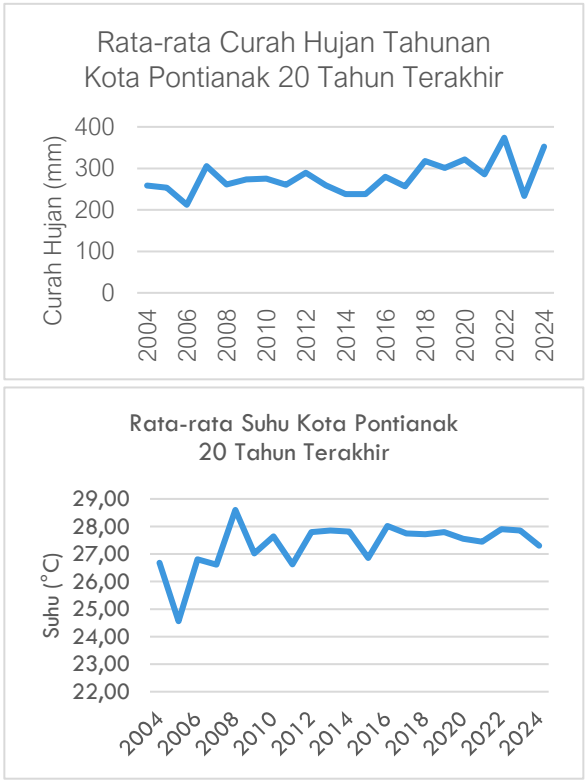
Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Jumlah sungai dan parit di wilayah Kota Pontianak adalah sebanyak 61 sungai/parit yang sebagian masih dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Adapun dalam sistem drainase regional terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka di bagian selatan yang dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Beliung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

E. Klimatologi

Klimatologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia.

Kota Pontianak mempunyai temperatur rata-rata berkisar 27,9°C dengan temperatur minimum rata-rata 23,5°C dan temperatur maksimum rata-rata 34,0°C. Rata-rata kelembaban udara 83% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juli yaitu 100% dan kelembaban udara paling rendah 78% pada bulan Juli. Di sisi lain, jumlah hari hujan terbanyak adalah pada bulan Januari yakni sebanyak 24 hari dengan curah hujan sebanyak 228 mm, dan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Mei yaitu 528.

Grafik 2.1 Perubahan Rata-Rata Curah Hujan dan Suhu Udara Tahun 2024-2024



Sumber : BPS Kota Pontianak

Kondisi klimatologi dalam dua puluh tahun terakhir telah mengalami perubahan. Kota Pontianak telah mengalami peningkatan suhu ±1°C dalam 20 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan suhu rata-rata di tahun 2004 sampai Tahun 2024 berada di angka 26,68°C – 27,30°C.

Sedangkan rata-rata curah hujan di Kota Pontianak cenderung stabil dalam 20 tahun terakhir, yaitu di angka 253,83 – 352,33 mm.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Meskipun Kota Pontianak tidak memiliki banyak potensi sumber daya alam, lokasinya yang berada di garis khatulistiwa serta di sepanjang Sungai Kapuas memberikan peluang tersendiri. Dengan pemanfaatan yang tepat, aspek geografis ini dapat dikembangkan menjadi keunggulan daerah, baik dalam sektor pariwisata, perdagangan, maupun transportasi air.

a. Sumber Daya Alam

Pontianak terletak di muara Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, yang menjadi salah satu aset utama dalam sektor perdagangan dan perikanan. Di bidang perdagangan, Sungai Kapuas berperan penting dalam mendukung transportasi sungai, memperlancar distribusi barang dari Pontianak ke berbagai kabupaten/kota di sekitarnya, serta ke berbagai pulau di Indonesia. Hal ini menjadikan pelabuhan Pontianak sebagai potensi besar dalam pengembangan perdagangan regional dan nasional. Sementara itu, sektor perikanan juga mendapat manfaat dari keberadaan Sungai Kapuas dan pesisir kota yang kaya akan berbagai jenis ikan, udang, serta biota laut lainnya. Selain itu, kedekatan Pontianak dengan Laut Natuna semakin memperkuat potensinya sebagai pusat perikanan yang menjanjikan.

b. Potensi Energi

Potensi energi terbarukan di Pontianak juga mulai berkembang. Salah satunya adalah potensi energi surya, mengingat kota ini terletak di daerah yang memiliki sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Selain itu, meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan, Pontianak memiliki potensi energi dari biomassa dan mikrohidro dari sungai-sungai kecil di sekitar kota.

c. Pariwisata Alam

Pontianak memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata alam, terutama karena keunikan ekosistem Kalimantan. Berada tepat di garis khatulistiwa, kota ini menawarkan destinasi yang khas, seperti Tugu Khatulistiwa yang menjadi ikon geografis, serta hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keindahan alamnya menarik wisatawan yang mencari petualangan dan eksplorasi ekosistem yang unik. Selain itu, Sungai Kapuas—salah satu sungai terpanjang di Indonesia—menyimpan potensi luar biasa sebagai daya tarik wisata, mampu meningkatkan jumlah kunjungan dari wisatawan domestik maupun mancanegara.

d. Transportasi dan Pergudangan

Pontianak memiliki performa sektor transportasi dan pergudangan yang unggul, tumbuh lebih cepat, dan memberikan kontribusi ekonomi lebih signifikan dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Keunggulan ini menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah.

Potensi utama sektor transportasi dan pergudangan yang ada dikota Pontianak, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan logistik terpadu dimana terminal kijing akan menciptakan kapasitas besar sekaligus menjadi penggerak industri hilir.
2. Gerbang internasional dan industri kargo dimana supadio membuka peluang ekspor kargo bernilai tinggi sekaligus mengundang investor.
3. Konektivitas regional dan intrnasional dimana akses darat melintas perbatasan dan udara ke ASEAN memperkuat posisi strategis kota.
4. Kenaiikan volume dan efisiensi dimana pertumbuhan throughput pelabuhan dan kapasitas penanganan cargo bandara menunjukkan momentum kuat.

Rekomendasi untuk sektor transportasi dan pergudangan yang ada dikota Pontianak, adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat konektivitas darat dimana akses lebih baik ke terminal kijing, pelabuhan, dan bandara termasuk jalan told an intermodal logistik.
2. Ekosistem industri pendukung dimana bangun kawasan industri, pergudangan modern di sekitar pelabuhan.
3. Digitaslisasi logistik dimana manfaatkan smart porn, tracking, otomatisasi dan single-window logistik.
4. Promosi lintas batas dimana tingkat rute komersial internasional (Kuching, kuala lumpur).
5. Koordinasi multilevel dimana sinergi pusat,provisi,kabupaten,paralel dengan pengembangan trans Kalimantan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota Pontianak memilki keuntungan kompetitif yang kuat dalam sektor transportasi dan pergudangan disbanding kabipaten/kota lain dikalimantan barat. Didukung oleh pertumbuhan ekonomi local, pelabuhan modern, bandara international dan konektivitas lintas darat, Pontianak berada diposisi optimal untuk menjadi hubungan logistic utama regional. Pemberdayaan lebih lanjut dengan pengembangan insfratruktur, industri pendukung dan strategi digital akan memperkuat kota Pontianak sebagai pusat perdagangan,distribusi dan konektivitas regional bahkan internasional.

e. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kota Pontianak memiliki performa yang kuat pada sektor hospitality dan kuliner dibandingkan kabupaten/kota lain, sektor ini berkembang jauh lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya daya tarik yang lebih kuat dalam hal akomodas.

Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum di Kota Pontianak memiliki potensi yang sangat kuat dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Pertumbuhan PDRB yang cepat, dukungan event budaya dan kuliner, serta arus wisatawan domestik yang melonjak menjadi landasan utama. Meski begitu, tantangan seperti tingkat hunian hotel rendah dan durasi inap pendek perlu diatasi melalui inovasi strategi, peningkatan layanan, dan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Dengan pendekatan yang tepat, Pontianak bisa menjadi pusat hospitality dan kuliner unggulan di Kalimantan Barat, bahkan menembus skala regional maupun nasional.

f. Jasa Pendidikan

Kota Pontianak menunjukkan kekuatan dan momentum yang baik dalam sektor pendidikan, mengungguli daerah lain dalam provinsi.

Potensi Utama sektor penyediaan akomodasi & makan minum di Kota Pontianak adalah:

1. Pontianak sebagai pusat pendidikan regional — dengan banyak institusi tinggi dan sekolah berkualitas, kota ini menjadi magnet pendidikan di Kalbar.
2. Pengembangan SDM unggul — lulusan dari berbagai fakultas (kedokteran, teknik, pendidikan, hukum) siap memasuki dunia kerja, menambah kontribusi ekonomi lokal.
3. Urbanisasi pelajar-orang tua dan pelajar dari daerah lain cenderung merantau ke Pontianak untuk kuliah dan sekolah menengah unggul, mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa (akomodasi, transportasi, retail, dsb.).

Rekomendasi Strategis sektor penyediaan akomodasi & makan minum di Kota Pontianak:

1. Perkuat kolaborasi antara kampus–industri: kembangkan riset, inkubator startup berbasis kampus, serta pelatihan kerja berbasis kompetensi lokal.
2. Tingkatkan kualitas pendidikan menengah: dorong akreditasi “A” untuk sekolah di luar Pontianak melalui program peningkatan kualitas guru dan fasilitas.
3. Jadikan Pontianak sebagai ‘city of education’ regional: promosikan beasiswa, program pertukaran, seminar internasional, dan summer school untuk menarik mahasiswa dari wilayah lain.
4. Dorong industri berbasis pendidikan: seperti pendidikan bahasa asing, kursus profesional, training center, dan modernization digital learning.
5. Perluas akses digital pendidikan: implementasi e-learning di luar kota, pelatihan guru jarak jauh, dan platform pendidikan blended untuk inklusivitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota Pontianak jelas menunjukkan keunggulan kompetitif dalam sektor Jasa Pendidikan dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. PDRB yang kuat, infrastruktur pendidikan yang lengkap, dan kualitas SDM yang meningkat menjadi fondasi yang kokoh. Jika ditunjang dengan strategi inklusif dan digitalisasi, Pontianak berpeluang menjadi pusat pendidikan unggulan regional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan keterampilan.

g. Jasa lainnya

Rekomendasi Pengembangan Strategis untuk memaksimalkan potensi sektor Jasa Lainnya di Pontianak, beberapa inisiatif bisa dipertimbangkan:

1. Pengembangan Klaster Seni dan Hiburan
   Fasilitasi studio tari, tempat pameran seni, teater lokal, dan festival musik budaya.
2. Penguatan Event dan Wisata Hiburan
   Dorong event kreatif seperti malam budaya, food bazaar tematik, atau pameran kreatif rutin.
3. Inkubator Ekonomi Kreatif & Pelatihan
   Bimbing pelaku usaha seperti wedding planner, event organizer, spa/beauty salon, dan jasa personal dengan pelatihan, akses permodalan, dan sertifikasi.
4. Promosi Wisata Alternatif
   Pakai platform digital untuk memasarkan pengalaman kota unik (kuliner, street art, tur heritage) kepada wisatawan.
5. Digitalisasi Layanan
   Telkomsel atau e-commerce lokal bisa menyediakan platform booking event, galeri virtual, dan promosi digital untuk pelaku kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor jasa lainnya di Kota Pontianak memiliki prospek yang menjanjikan—sebagaimana tercermin dari Regional Shift positif. Distrik ini sebaiknya dikembangkan melalui strategi kreatif yang menjembatani budaya, pariwisata, dan ekonomi urban. Dengan pendekatan yang efektif, Pontianak berpeluang menetapkan diri sebagai pusat hiburan, budaya, dan lifestyle di Kalimantan Barat.

h. Informasi dan Komunikasi

Pertumbuhan yang cukup signifikan, ditambah nilai *Regional Shift* positif, menunjukkan bahwa sektor TIK di Pontianak tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di Kalbar.

Potensi & Rekomendasi Strategis sektor TIK di Pontianak:

1. Posisi sebagai hub digital regional: Dukungan infrastruktur dan pemerintah memperkuat Pontianak.
2. Populasi muda digital-native: Menjadi penggerak utama inovasi startup, aplikasi, game lokal
3. Integrasi data dan e-services unggul: Mempermudah investor, mempercepat pelayanan publik.
4. Ekosistem kreatif mulai tumbuh: Forum-forum seperti PDKF dan Developer Day memicu ekraf digital.

Rekomendasi penguatan sektor TIK di Pontianak:

1. Perluasan jaringan internet dan 4G/5G: Percepat pengurangan blankspot di kota dan pinggiran.

2. Fokus inovasi sub-sektor: Misalnya aplikasi smart tourism, fintech lokal, ekosistem kreatif berbasis budaya Pontianak (Pantun, Bahasa Melayu Pontianak yang terdaftar sebagai warisan budaya).
3. Kolaborasi kampus–industri: Melibatkan Politeknik Negeri, universitas swasta untuk riset dan inkubasi startup digital.
4. Program akselerator & inkubasi: Fokus ke digital kreatif, fintech, smart city solutions.
5. Perluasan inklusi nontunai ke UMKM desa: Mendorong pemanfaatan QRIS hingga ke sektor informal dan kabupaten.

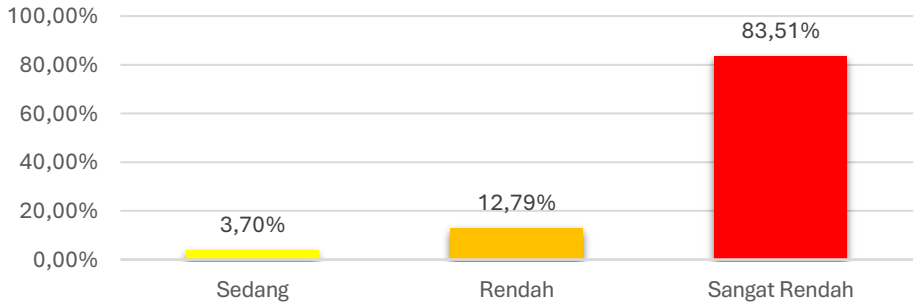
Dengan demikian dapat disimpulkan sektor informasi & komunikasi di Kota Pontianak saat ini berada dalam lini pertumbuhan yang kuat di Kalimantan Barat. Kekuatan Pontianak terletak pada infrastruktur digital yang berkembang, ekosistem kreatif yang mulai tumbuh, serta kebijakan proaktif pemerintah daerah. Berdasarkan nilai *Regional Shift* yang besar dalam tabel, Pontianak jelas unggul dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalbar.

Jika dikelola dan didukung lebih lanjut-melalui investasi infrastruktur, penguatan ekosistem teknologi lokal, dan pengembangan industri digital kreatif-Pontianak berpotensi menjadi sentra TIK terdepan di Kalimantan Barat, bahkan provinsi tetangga.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Kota Pontianak ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak. Definisi operasional dari Daya Dukung Penyediaan Air bersih adalah Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.
Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan. Berikut adalah distribusi luasan dari DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak:

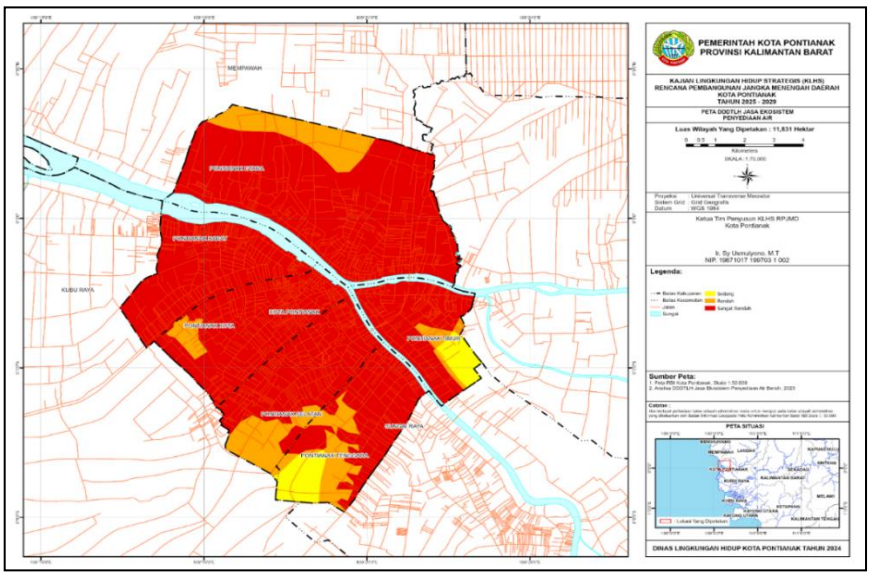
Grafik 2.2 Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dominasi dari fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Kota Pontianak di dominasi dengan kelas sangat rendah dengan presentase terhadap fungsi jasa ekosistem tersebut seluas 85.31%, kelas rendah seluas 12.79% dan Kelas sedang 3.70%. Lokasi wilayah kelas sangat rendah berada di wilayah permukiman sehingga kemampuan lingkungan terhadap penyediaan air bersih sangat rendah. Berikut adalah peta dari DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak:

Gambar 2.2 Peta DDDTTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Pontianak
Kinerja Layanan jasa Ekosistem



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

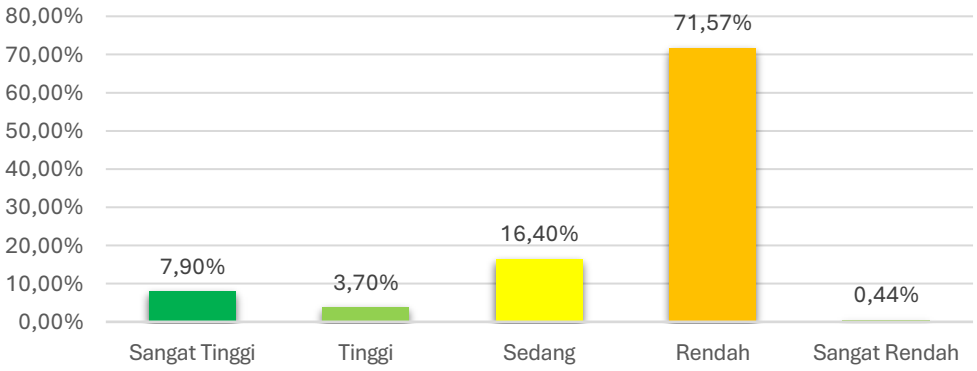
Kajian mengenai kinerja layanan jasa ekosistem ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Pontianak. Definisi operasional dari Daya Dukung Penyediaan Pangan (P1) adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil laut, perkebunan untuk pangan, hasil pertanian dan hasil peternakan.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya.

Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Berikut adalah distribusi persebaran DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Pontianak:

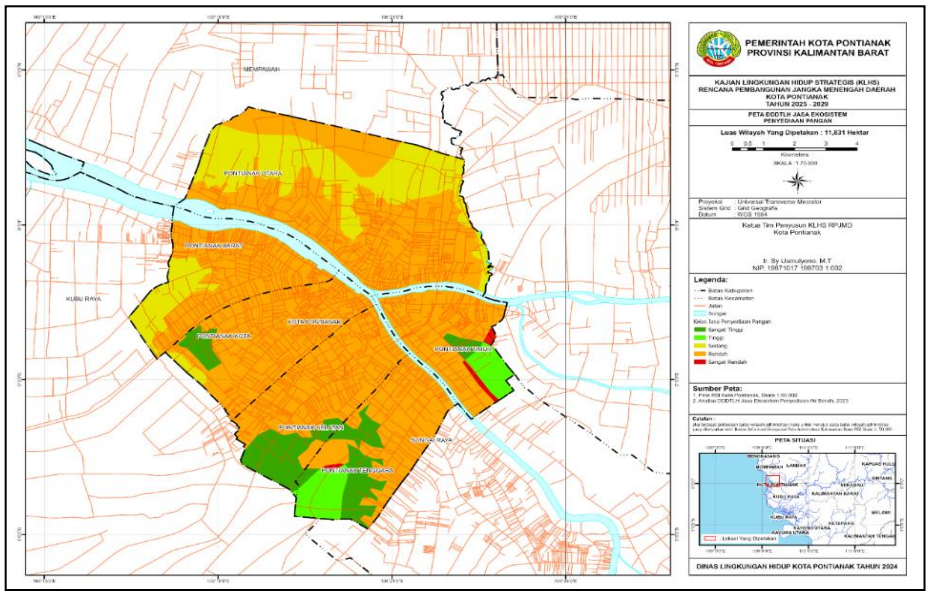
Grafik 2.3 Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, distribusi luasan jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Pontianak di dominasi oleh kualitas rendah seluas 71.57% dan disusul oleh kelas sedang seluas 16.40% dan kelas sangat tinggi seluas 7.90%. Kelas rendah berada pada wilayah lahan terbangun. Berikut adalah peta daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem Kota Pontianak terhadap penyediaan pangan:

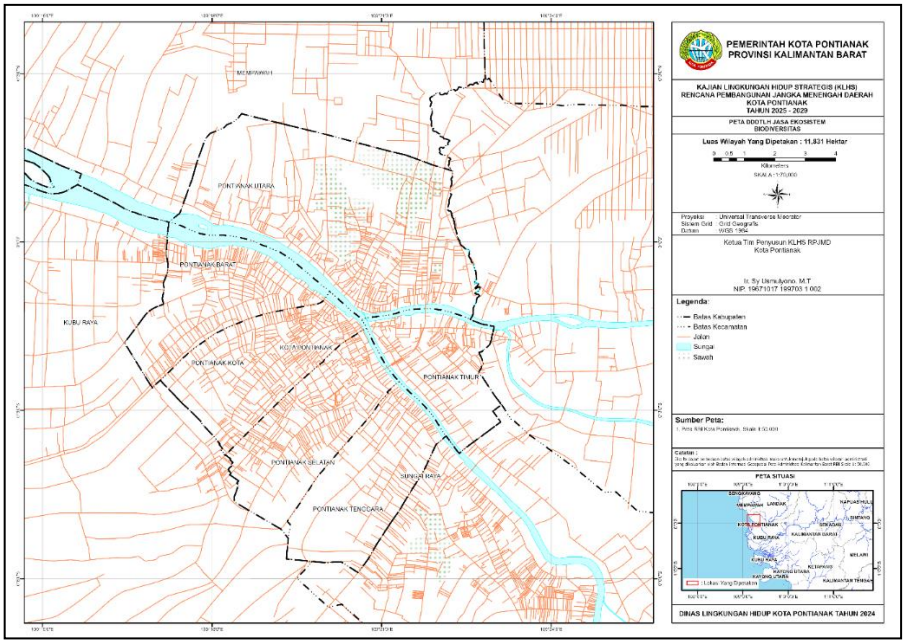
Gambar 2.3 Peta DDDTLH Penyediaan Pangan Kota Pontianak
Kinerja Efisiensi dan Pemanfaatan SDA



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Kajian mengenai kinerja efisiensi dan pemanfaatan SDA ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap Wilayah Persawahan di Kota Pontianak. Berikut adalah persebaran wilayah persawahan menurut RBI Kota Pontianak :

Gambar 2.4 Peta Persebaran Wilayah Persawahan di Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan peta persebaran tersebut wilayah persawahan di Kota Pontianak terdapat di Pontianak Utara dengan luasan sebesar 670.53 Hektar. Persebaran wilayah persawahan juga terdapat pada kecamatan lain yaitu Pontianak Kota, Pontianak Barat dan Pontianak Tenggara.

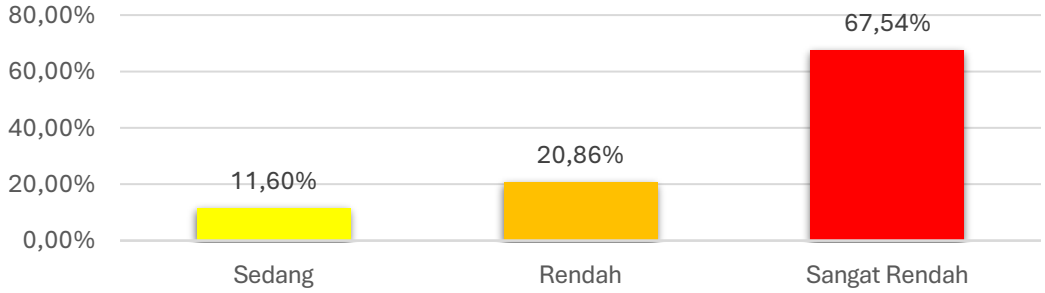
Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup

Kajian mengenai Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup Kota Pontianak ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap DDDTLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Pontianak serta wilayah Kawasan banjir. Definisi operasional Daya Dukung Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana adalah infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam.

Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat- tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan

dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami.
Distribusi luasan Daya Dukung Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

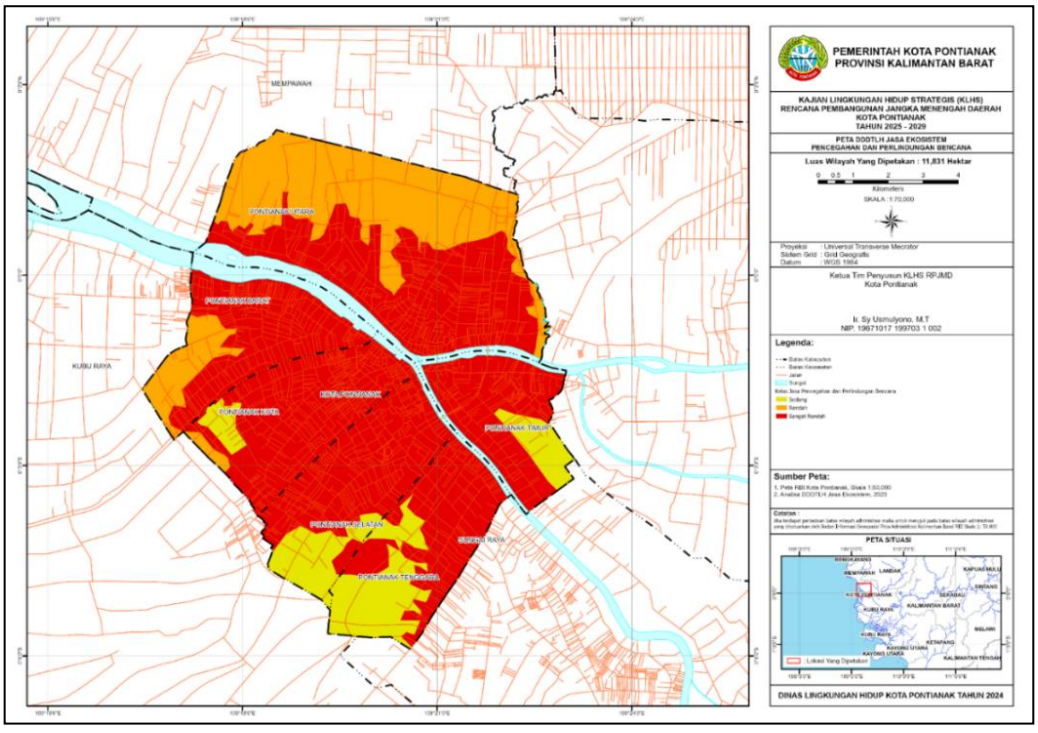
Grafik 2.4 Distribusi Luasan DDDTLH Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan distribusi luasan fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana Kota di Kota Pontianak didominasi oleh 67.54% kelas sangat rendah. Kelas rendah seluas 20.86% dan Kelas Sedang seluas 11.60%. Berikut adalah peta dari DDDTLH Jasa Ekosistem Perlindungan Bencana Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

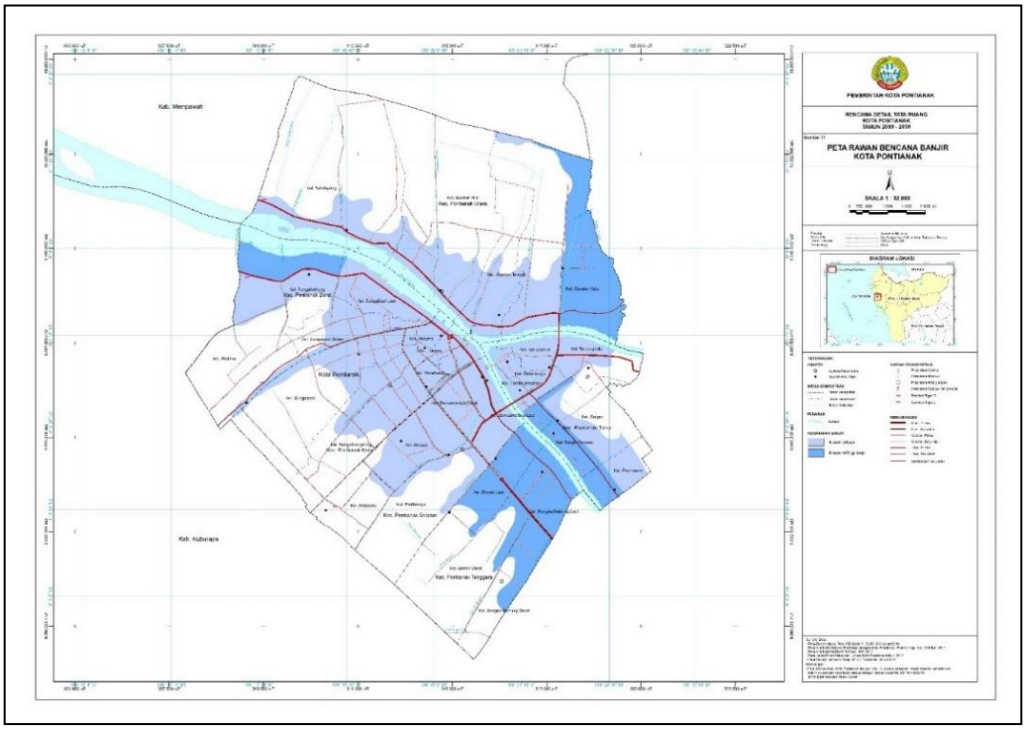
Gambar 2.5 Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Selain itu juga ditinjau terhadap Kawasan banjir Kota Pontianak. Berikut adalah peta Kawasan Banjir Kota Pontianak:

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-

Perubahan Iklim

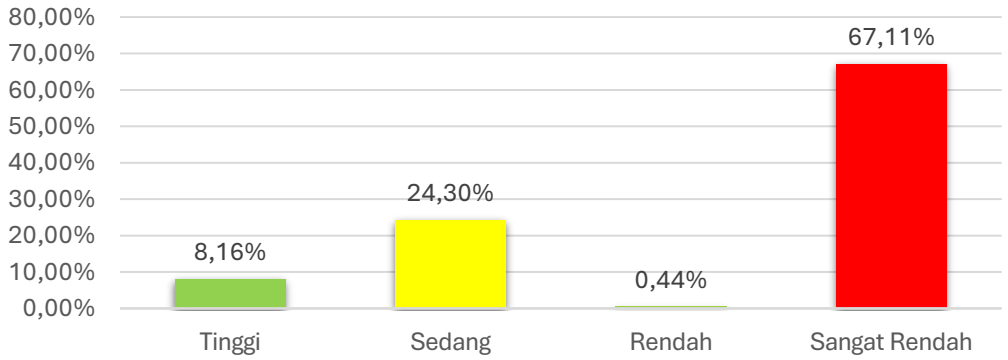
Kajian mengenai Perubahan Iklim di Kota Pontianak ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap DDDTLH Pengaturan Iklim di Kota Pontianak. Definisi operasional daya dukung pengaturan iklim adalah Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon. Jasa ekosistem Pengaturan (regulating) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat 8 (delapan) jenis jasa ekosistem pengatur, yang pertama dan akan dipaparkan dalam pembahasan ini adalah jasa ekosistem pengatur iklim.

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan.

Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Pada kajian ini berfokus pada jasa ekosistem pengaturan iklim global dan iklim regional.

Berikut adalah distribusi dari luasan DDDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak :

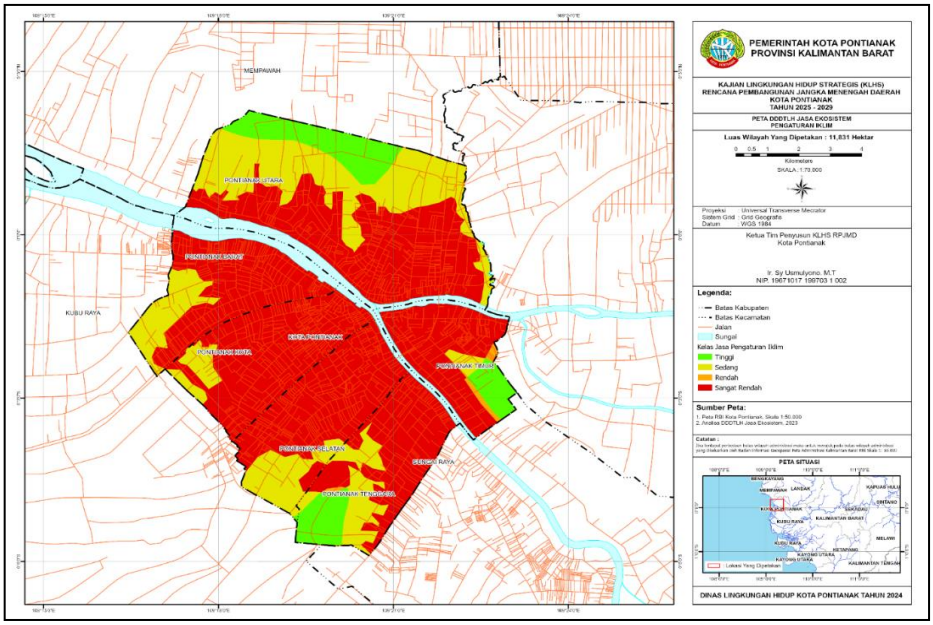
Grafik 2.5 Grafik Distribusi Luasan DDDTLH Jasa Eskosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisa yang dilakukan fungsi DDDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak didominasi oleh kelas sangat rendah dengan persentase 67.11%. Kemudian pada kelas sedang seluas 24.30%, kelas tinggi seluas 8.16% dan kelas rendah 0.44%. Berikut adalah peta dari DDDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak:

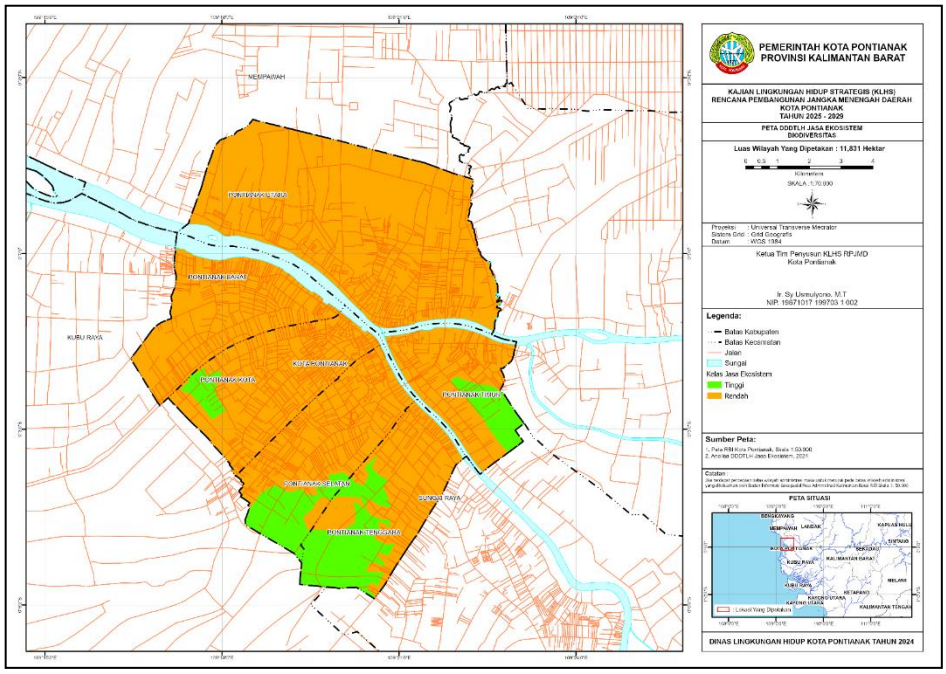
Gambar 2.7 Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Pontianak Keanekaragaman Hayati



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

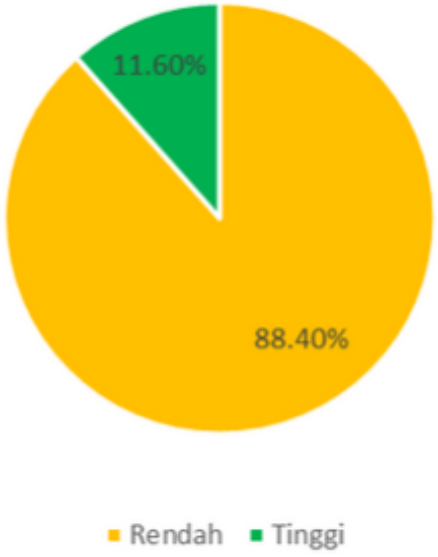
Kajian mengenai Keanekaragaman Hayati di Kota Pontianak ditinjau dengan Analisa Spasial menggunakan Analisa terhadap DDDTLH Biodiversitas di Kota Pontianak. Berikut adalah Analisa DDDTLH Biodiversitas Kota Pontianak:

Gambar 2.8 Peta DDDTLH Jasa Ekosistem Biodiversitas Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Grafik 2.6 Proporsional DDDTLH Jasa Ekosistem Biodiversitas Kota Pontianak



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Berdasarkan Analisa tersebut Kota Pontianak didominasi oleh kelas Rencah terhadap Biodiversitas dan 11.60 % masuk dalam kelas tinggi. Tingkat keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan cukup sulit untuk dilakukan. Kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah di Kota Pontianak sangat lah tinggi. Sehingga untuk menjaga wilayah jasa ekosistem Tingkat tinggi sangat kecil dan bisa terancam hilang dan berubah menjadi kelas rendah atau sangat rendah.

2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Energi sangat penting bagi suatu wilayah karena memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, pembangunan berlekanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan Air adalah kemampuan suatu wilayah dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lingkungan, serta sektor ekonomi, baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi tekanan seperti perubahan iklim atau bencana alam.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri, dengan mengutamakan produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan sistem pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kemandirian pangan penting bagi suatu wilayah karena berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.3 Gambaran Indikator Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	63,81	66,57	64,81	71,15	72,55
B	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	1.611,20	1.690,77	1.752,20	1.858,21	1.838,70
C	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan (%)	83,55	86,98	86,28	87,78	93,16
D	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	9,47	12,54	12,36	9,71	7,05

Sumber data: Hasil pengolahan Bapperida Kota Pontianak, 2025

A. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP mencakup beberapa indikator yang mengukur ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Skor IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan dan gizi suatu wiayah.

Dari tabel 2.3, dapat dilihat gambaran indeks ketahanan pangan Kota Pontianak dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 angka tersebut mencapai peningkatan, dimana tahun 2020 mencapai angka 63,81 dan meningkat di Tahun 2024 mencapai 72,55 (Kategori Tinggi). Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui program-program pemeritah atau inisiatif masyarakat dalam mengolah sumber daya pangan.

Kota Pontianak sebagai wilayah perkotaan memiliki lahan pertanian yang terbatas untuk memproduksi hasil pertanian dibandingkan dengan kebutuhan penduduk. Selain sayuran daun yang mampu dijual sampai keluar kabupaten di Kalimantan Barat, kebutuhan komoditi pertanian lainnya didatangkan dari luar daerah atau perdagangan antar pulau.

Adapun tantangan utama ketahanan pangan di Kota Pontianak adalah ketersediaan dan distribusi pangan, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan seperti harga yang fluktuatif, keterbatasan daya beli masyarakat, serta konsumsi pangan yang belum beragam bergizi seimbang dan aman. Sementara itu tantangan sektor pertanian di Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan diantaranya keterbatasan lahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bercocok tanam, masih terbatasnya penggunaan teknologi, perubahan iklim, dan budaya masyarakat. Beberapa upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yakni peningkatan infrastruktur, pengembangan pertanian perkotaan dengan mendorong urban farming melalui edukasi dan dukungan teknis, diversifikasi pangan, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, pengembangan teknologi pertanian dan dukungan kebijakan.

Konsep urban farming meski kecil skalanya, konsep ini menunjukan bahwa dengan dukungan kebijakan dan ruang yang memadai, kota dapat ikut serta dalam menciptakan ketahanan pangan. Selain pertanian kota, solusi lain yang potensial adalah pengembangan pasar lokal dan pusat distribusi pangan di perkotaan. Konsep ini menghubungkan petani lokal dengan konsumen atau pasar tanpa rantai distribusi panjang, meningkatkan akses pangan segar sekaligus menekan biaya logistik.

Beberapa kota di dunia telah menunjukkan bahwa inisiatif seperti ini bisa mengurangi jejak karbon dari transformasi pangan dan menjaga harga stabil. Langkah-langkah seperti ini selaras dengan perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global. Adapun Ketersediaan lahan baku sawah (LBS) tanaman padi Kota Pontianak adalah seluas 184 Hektar.

Beberapa Program Penguatan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Pontianak yakni :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
4. Program bidang pertanian.

Hasil produksi padi, tanaman hortikultura dan perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Produksi Padi Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Kecamatan	Padi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pontianak Selatan	0	0	0	0	0
Pontianak Tenggara	44	52	0	0	0
Pontianak Timur	63	74	44	37	57
Pontianak Barat	154	530	443	403	289
Pontianak Kota	48	48	48	44	30
Pontianak Utara	268	237	199	184	177
Jumlah	**575**	**941**	**734**	**668**	**553**

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.5 Produksi Tanaman Hortikultura Pontianak Tahun 2022-2024 (Kuintal)

Tanaman Hortikultira	2022	2023	2024	Rata-Rata 3 tahun
Bayam	11.163	16.173	16.815	14.717
Bawang Daun	1.212	420	604	745
Kangkung	22.946	22.192	19.335	21.491
Cabe Rawit	441	1.567	4.600	2.236
Sawi	17.210	19.579	23.265	20.018
Tomat	3.032	496	242	1.254
Buncis	835	0	0	278
Cabai Besar	0	60	40	33
Jamur Tiram	170	0	0,95	57
Kacang Panjang	.656	15	0	557
Terung	1.354	0	0	451
Ketimun	2.078	300	170	849

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.6 Produksi Perikanan Kota Pontianak Tahun 2022-2024

Perikanan	2022	2023	2024
Ikan Tangkap	700,81	796,60	789,93
Ikan Budidaya	225,34	228,67	248,97
Jumlah	**926,15**	**1.025,27**	**1.038,90**

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

B. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah rata-rata listrik yang dikonsumsi oleh setiap individu di Kota Pontianak dalam jangka waktu satu tahun. Angka ini mencerminkan tingkat penggunaan energi listrik dalam suatu populasi dan sering digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi, standar

hidup, serta efisiensi energi suatu negara atau daerah. Konsumsi listrik per kapita di tahun 2024 menurun sedikit menjadi 1.838,70 kWh/kapita dari tahun 2023 yang sebesar 1.858,21 kWh/kapita.

C. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan dimana tingkat atau proporsi rumah tangga di daerah perkotaan yang sudah terhubung dengan jaringan pipa air bersih dan dapat dengan mudah mengakses air bersih langsung dari keran di rumah masyarakat. Pada tahun 2020 dan 2024 terjadi peningkatan dimana tahun 2020 mencapai 83,55% meningkat di Tahun 2024 mencapai 93,16% selanjutnya meningkat menjadi 89,31% di tahun 2024.

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan persentase penduduk yang mengkonsumsi makanan dengan nilai energi yang kurang dari standar kecukupan energi minimum untuk bisa hidup sehat dan aktif. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Pontianak tahun 2021 : 12,54; tahun 2022 : tahun 12,36; tahun 2023 : 9,71; tahun 2024 : 7,05. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator penting dalam SDGs yang berkaitan dengan upaya penghapusan kelaparan.

Berdasarkan angka Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurut kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2024, Kota Pontianak dengan angka terkecil yakni 7,05.Sementara itu berdasarkan hasil analisis FSVA Kalimantan Barat untuk Kota Pontianak tahun 2024 tidak terdapat kecamatan yang rentan pangan. Hal ini selaras dengan hasil analis FSVA tingkat kelurahan di Kota Pontianak dimana tidak terdapat kelurahan yang rentan pangan.

Terkait dengan indikator stunting, berdasarkan hasil analisis FSVA Provinsi Kalimantan Tahun 2024, Semua kecamatan di Kota Pontianak tidak ada yang termasuk kategori rentan.

Untuk mencapai hasil penurunan prevalensi stunting, pemerintah Kota Pontianak merancang lima langkah strategis sebagai berikut:

1. Memperbaiki status gizi masyarakat yang diukur dengan penurunan persentase prevalensi stunting, underweight, dan wasting yang buruk maupun sangat buruk.
2. Meningkatkan akses terhadap pangan yang beragam yang diukur dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH).
3. Meningkatkan pengembangan kualitas dan keamanan pangan yang diukur melalui peningkatan inspeksi makanan dan pelatihan tentang keamanan pangan.
4. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yang diukur dengan peningkatan persentase rumah tangga yang mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat.

5. Memperkuat peran lembaga pangan dan gizi dengan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait.

Berkenaan dengan zona produksi dan distribusi pangan lokal, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumberdaya lokal, termasuk menetapkan kebijakan ekonomi mendukung pengembangan industri pangan lokal.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas adalah kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan seimbang, di mana ekosistem dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang berkualitas memungkinkan manusia memperoleh air bersih, udara segar, tanah subur, serta sumber daya alam yang dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,60	62,27	63,25	60,71	N/A
B	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,87	5,99	5,98	6,24	6,39
C	Persentase Luasan ruang terbuka hijau (RTH)	18,75	18,75	18,75	31,30	31,30

Sumber data: DLH, DPUPR Kota Pontianak

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan. IKLH dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan dari indikator IKLH dengan capaian 60,60 di Tahun 2020 dan 60,71 di Tahun 2023. Untuk tahun 2024 kami masih menunggu perbaikan data dari kementrian lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kota Pontianak telah membuat kemajuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup secara lebih efektif.

B. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (*safely managed*) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya ART sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem

pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan dimana tahun 2020 tercatat 5,87% meningkat di tahun 2024 mencapai 6,39%.

C. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang didominasi oleh vegetasi alami atau tanaman buatan yang berfungsi sebagai penyedia udara bersih, pengatur suhu, serta pelindung ekosistem di perkotaan dan pedesaan. RTH berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Persentase RTH Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan RTH Tahun 2020, sehingga sudah sesuai dengan luas RTH yang dipersyaratkan.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merujuk pada kemampuan sistem, masyarakat, atau individu untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari bencana dan perubahan iklim, mengatasi gangguan akibat bencana dan perubahan iklim, menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang disebabkan oleh bencana dan perubahan iklim serta melakukan perubahan mendasar untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan jangka Panjang.

Kota Pontianak merupakan daerah yang rawan bencana. Mengacu pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Pontianak Tahun 2024–2028, telah ditetapkan empat jenis bencana sebagai prioritas utama dalam penanggulangan bencana daerah, yaitu: (1) Kebakaran Hutan dan Lahan, (2) Banjir, (3) Cuaca Ekstrem, dan (4) Kekeringan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada tingkat risiko dan tingkat kerawanan (hazard) yang tinggi, serta jumlah penduduk yang terpapar terhadap masing-masing jenis bencana. Seluruh bencana prioritas tersebut memiliki indeks risiko yang signifikan dan memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, mitigasi, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Dalam rangka efektivitas penanggulangan risiko bencana, klasifikasi prioritas penanganan dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

Bencana Prioritas, ditunjukkan dengan warna merah, mencakup jenis bencana dengan tingkat risiko tinggi maupun sedang, yang memiliki kecenderungan meningkat atau tetap.

Bencana Non-Prioritas, ditunjukkan dengan warna kuning dan hijau, mencakup bencana dengan tingkat risiko tinggi namun kecenderungan menurun, risiko sedang dengan kecenderungan tetap atau menurun, serta risiko rendah dengan berbagai kecenderungan (meningkat, tetap, atau menurun). Klasifikasi ini bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dan intervensi pada jenis bencana dengan potensi dampak terbesar terhadap masyarakat dan lingkungan. Hasil analisis lengkap terkait kategori bencana prioritas dan non-prioritas di Kota Pontianak disajikan pada Tabel dibawah ini, yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana.

Tabel 2.8 Prioritas Penanganan Resiko Bencana

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISKO BENCANA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT	• Kebakaran Hutan dan Lahan		
	TETAP	• Banjir	• Cuaca Ekstrim	
	MENURUN			• Kekeringan

Sumber: Dokumen KRB Kota Pontianak 2023-2027

Keterangan:
I = Prioritas Pertama
II = Prioritas Kedua
III = Prioritas Ketiga

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global yang semakin nyata dan berdampak pada kondisi sumber daya alam serta kehidupan masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak perlu merumuskan strategi penanggulangan yang komprehensif. Perubahan iklim, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas curah hujan, telah memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini diperparah oleh praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi permukiman, perkebunan skala besar, maupun infrastruktur lainnya, yang mengakibatkan degradasi lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis wilayah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan mitigasi risiko bencana yang mencakup pendekatan struktural, seperti pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana yang adaptif, dan pendekatan nonstruktural, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan regulasi tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem peringatan dini menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi kebencanaan dan mempercepat respons saat terjadi bencana, sehingga dapat meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim dan tekanan ekologis. Isu strategis penanggulangan bencana di Kota Pontianak pada periode 2024–2028 mencerminkan berbagai tantangan yang perlu segera direspons secara terencana dan terpadu. Isu strategis kebencanaan di Kota Pontianak meliputi tingginya tingkat kerawanan dan keterpaparan bencana pada aspek fisik, ekonomi, jumlah penduduk, serta kelompok rentan; rendahnya kapasitas kesiapsiagaan, program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dan penanganan darurat yang inklusif; belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana; terbatasnya jaringan prasarana dan kapasitas sistem peringatan dini; serta belum optimalnya sistem pemulihan pasca bencana yang komprehensif mencakup seluruh aspek pembangunan.

Tabel 2.9 Gambaran Indikator Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A	Indeks Risiko Bencana (IRB)	85,66	85,66	90,63	96,20	84,19
B	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	0,2	0,2	0,43	0,55

Sumber data: BPBD Kota Pontianak

A. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator nasional yang digunakan untuk menilai tingkat risiko bencana pada setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk sebagai capaian penurunan risiko bencana secara agregat di tingkat daerah maupun provinsi. Indeks ini dihitung berdasarkan kombinasi tiga komponen utama, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Nilai IRB menggambarkan tingkat risiko bencana yang dihadapi oleh suatu daerah baik secara individu maupun kumulatif terhadap berbagai jenis ancaman bencana yang ada. Berdasarkan sejarah kejadian bencana dan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB Tahun 2019-2024, Kota Pontianak tercatat memiliki kecenderungan bencana meningkat hingga tetap. Bencana cuaca ekstrem dapat dikatakan rutin terjadi setiap tahun di Kota Pontianak dengan jumlah kejadian yang bervariasi. Jumlah kejadian terbanyak terjadi di tahun 2020 selama 5 tahun terakhir. Bencana banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan tetap. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga terjadi setiap tahun, dengan jumlah kejadian terbanyak terjadi di tahun 2020 sebanyak 2 kejadian. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, kecenderungan yang ditunjukkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan adalah meningkat. Hal ini dijadikan sebagai baseline dalam evaluasi kebijakan penanggulangan bencana. Informasi IRB dari DIBI-BNPB menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kelembagaan, perencanaan kegiatan, pengembangan sistem statistik kebencanaan, hingga pelaksanaan program penanggulangan bencana secara operasional.
Lebih lanjut, kecenderungan (tren) nilai IRB Kota Pontianak dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran dinamika risiko serta capaian program penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Tren ini dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur efektivitas intervensi penurunan risiko yang telah dilaksanakan di tingkat daerah.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 IRB Kota Pontianak mencapai 85,66. Namun di Tahun 2024 IRB menurun menjadi 84,19 (sedang). Hal ini menunjukkan Kota Pontianak telah membuat kemajuan dalam mengurangi risiko bencana.

B. Indeks Ketahanan Daerah

Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Kota Pontianak dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap risiko bencana. Kapasitas dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menguasai sumber daya, metode, serta ketahanan yang diperlukan untuk melakukan upaya kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, penanggulangan, perlindungan diri, serta pemulihan secara cepat pasca-bencana. Penilaian kapasitas dilakukan melalui pendekatan identifikasi terhadap bentuk kemampuan serta hasil dari berbagai upaya peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan dalam periode kajian tertentu.

Untuk menghitung IKD, dibutuhkan 71 indikator, 7 prioritas, dan 284 pertanyaan. Jawaban-jawaban tersebut didapatkan dari berbagai instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil pengukuran IKD dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana.Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 tercatat mengalami kenaikan.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Pontianak dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren perubahan yang cukup signifikan, dengan peningkatan yang menonjol pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program penanggulangan bencana yang telah diimplementasikan, serta mulai optimalnya upaya peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Capaian indikator ketahanan daerah secara visual dapat dilihat pada Grafik dibawah ini, yang menggambarkan perkembangan kapasitas penanggulangan bencana sebagai dasar evaluasi sekaligus acuan perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Grafik 2.7 Indeks Per Prioritas Kota Pontianak Tahun 2025



Sumber: BPBD Kota Pontianak, Tahun 2025

Berdasarkan hasil kajian ketahanan daerah tahun 2024, Kota Pontianak memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,55, yang mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana berada pada kategori Sedang. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan terkait dalam pengurangan risiko bencana, yang telah diwujudkan melalui kebijakan dan program penanggulangan bencana yang bersifat sistematis.

Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu menurunkan dampak serta risiko bencana secara signifikan. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penguatan kapasitas yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat, guna mewujudkan ketahanan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.7 Demografi

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan wilayah administrasi, terdapat enam kecamatan di Kota Pontianak. Meskipun luas wilayahnya bukan yang paling besar namun penduduk paling banyak di tahun 2024 ada di Kecamatan Pontianak Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 152.880 jiwa atau 22,25% dari total populasi yang ada di Kota Pontianak dan yang terkecil adalah Kecamatan Pontianak Tenggara, dengan jumlah penduduk sebanyak 50.039 jiwa atau 7,28% dari keseluruhan penduduk di Kota Pontianak.

Tabel 2.10 Persebaran Penduduk Kota Pontianak Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk
Pontianak Selatan	93.741	13,64 %
Pontianak Tenggara	50.039	7,28 %
Pontianak Timur	110.916	16,14 %
Pontianak Barat	152.880	22,25 %
Pontianak Kota	129.762	18,89 %
Pontianak Utara	149.693	21,79 %
Total Kota Pontianak	**687.031**	**100,00 %**

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Pontianak, 2025

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, time series jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan kelompok umur Tahun 2020-2024

UMUR	Total				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	48.091	48.388	38.483	48.866	47.605
5-9	61.790	61.070	59.238	59.835	59.683
10-14	58.938	59.825	61.165	61.275	62.143
15-19	59.036	58.376	57.637	57.844	58.257
20-24	56.716	57.180	58.885	59.000	59.659
25-29	53.371	54.271	55.210	55.272	55.439
30-34	53.897	52.783	52.328	51.802	51.790
35-39	56.475	54.938	52.094	50.814	50.867
40-44	51.909	52.092	54.157	53.447	53.492
45-49	44.562	45.688	45.294	45.184	46.254
50-54	37.770	37.740	39.891	39.616	40.222
55-59	29.173	30.028	31.733	31.405	32.859
60-64	23.366	23.154	24.992	24.527	25.235
65-69	15.284	16.052	17.987	17.568	18.369
70-74	10.136	10.096	11.417	11.076	11.938
>75	11.084	11.046	12.889	12.287	13.219
JUMLAH	671.598	672.727	673.400	679.818	687.031

Sumber: : Bapperida kota Pontianak.Diolah, 2025

Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Pontianak Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	24.762	22.843	47.605
5-9	30.832,00	28.851,00	59.683
10-14	31.897,00	30.246,00	62.143
15-19	29.917,00	28.340,00	58.257
20-24	30.060,00	29.599,00	59.659
25-29	27.490,00	27.949,00	55.439
30-34	25.787,00	26.003,00	51.790
35-39	24.862,00	26.005,00	50.867
40-44	26.274,00	27.218,00	53.492
45-49	23.136,00	23.118,00	46.254
50-54	20.026,00	20.196,00	40.222
55-59	16.079,00	16.780,00	32.859
60-64	12.281,00	12.954,00	25.235
65-69	8.630,00	9.739,00	18.369
70-74	5.623,00	6.315,00	11.938
75+	5.601,00	7.618,00	13.219
Total Kota Pontianak	343.257	343.774	687.031

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Pontianak, 2025

Dari segi kelompok umur, kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 62.143 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur di atas 70-74 tahun, yaitu sebanyak 11.938 jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu dengan rasio jenis kelamin 99,8 secara keseluruhan. Di Kota Pontianak semakin muda kelompok umurnya (kelompok umur dibawah 30 tahun), jumlah laki-lakinya lebih banyak dibandingkan perempuan. Demikian juga dengan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, semakin bertambahnya kelompok umur (diatas 30 tahun), rasio jenis kelamin semakin menurun. Berikut ini merupakan tabel dan piramida penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Dari piramida penduduk terlihat bahwa dasar piramida yaitu kelompok umur 0-4 tahun mulai mengecil daripada beberapa kelompok umur di atasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kelahiran empat tahun terakhir mulai berkurang daripada tingkat kelahiran tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian kelompok umur terlebar adalah pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 62.143 jiwa.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Pontianak Tahun 2024 adalah 5.760 jiwa per km^2. Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya (9.336 jiwa/km^2) diikuti Kecamatan Pontianak Barat dengan tingkat kepadatan penduduknya 9.262 jiwa tiap km^2. Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah (3.049 jiwa tiap km^2). Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk	Luas (km2)	Kepadatan Pendudukr (Jiwa/km2)
Pontianak Selatan	93.741	16,471	5.691
Pontianak Tenggara	50.039	16,180	3.093
Pontianak Timur	110.916	12,061	9.196
Pontianak Barat	152.880	16,383	9.332
Pontianak Kota	129.762	16,016	8.102
Pontianak Utara	149.693	41,097	3.642
Kota Pontianak	**687.031**	**118,209**	**5.812**

Sumber: DISDUKCAPIL dan BAPPERIDA, 2025

D. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk didapatkan dengan rumus berikut ini:

$$Pt = P0\ (1+r)^t$$

Pt : Jumlah penduduk
P0 : Jumlah penduduk pada tahun dasar
t : Jangka waktu (tahun)
r : Laju pertumbuhan penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 berada pada angka 0,59%. Tahun 2020-2023 laju pertumbuhan penduduk dibawah 1%. Berdasarkan data dari Disdukcapil kecilnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap perempuan kawin (*Total Fertility Rate*) serta lebih banyaknya penduduk yang keluar dari Kota Pontianak dibandingkan yang masuk.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2020	671.598	-
2021	672.727	0,17
2022	673.400	0,10
2023	679.818	0,95
2024	687.031	1,06
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2025		**0.57**

Sumber: DISDUKCAPIL Kota Pontianak, 2025

E. Tren Demografi

Tren demografi penduduk Kota Pontianak berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15 Penduduk Kota Pontianak

2020	2021	2022	2023	2024
671.598	672.727	673.400	679.818	687.031

Sumber : Disdukcapil,2025

Jumlah penduduk kota Pontianak menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 671.598 jiwa. Kemudian meningkat menjadi 687.031 jiwa ditahun 2024. Peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir ini adanya peningkatan dalam faktor yang mempengaruhi seperti meningkatnya angka migrasi atau meningkatnya tingkat kelahiran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat yang akan dijelaskan pada bagian ini terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini serta Indeks Pembangunan Manusia. Berikut ini merupakan dinamika kondisi dan kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Pontianak menggunakan beberapa indikator utama ekonomi.

Tabel 2.16 Gambaran Indikator Kesejahteraan Ekonomi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,96	4,60	4,98	4,76	5,03
Tingkat Kemiskinan (%)	4,70	4,58	4,46	4,45	4,20
PDRB per kapita (Rp Juta)	57,157 juta	60,571 juta	66,169 juta	70,891 juta	75,420 juta
Rasio Gini (Indeks)	0,327	0,337	0,363	0,347	0,361
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,10	80,59	81,10	81,63	82,22
Tingkat pengangguran terbuka (%)	12,36	12,38	9,92	8,92	8,29
Kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi (%)	17,44	17,38	17,33	17,45	17.11
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,847	0,288	0,246	0,252	0,210
Proporsi jumlah usaha mikro (%)	86,43	79,55	59,69	78,62	80,56
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,98	18,16	17,22	15,69	15,50
Pencapaian skor pola pangan harapan	79,20	79,20	77,60	82,00	88,60
Rasio penduduk yang bekerja	87,63	87,63	90,08	91,08	91,70
Indeks kepuasan masyarakat	88,534	88,651	88,687	88,487	90,197

Sumber data: BPS Kota Pontianak, 2025

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran seberapa cepat perekonomian suatu negara atau wilayah berkembang dari waktu ke waktu. Ini dihitung sebagai persentase perubahan dalam nilai total barang dan jasa yang diproduksi, sering disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya diukur dalam periode tahunan. Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah. Jika angka ini positif, berarti ekonomi sedang tumbuh, sedangkan angka negatif menunjukkan kontraksi atau penurunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan

menyediakan lebih banyak sumber daya untuk digunakan dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Laju pertumbuhan ekonomi didapatkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang dibandingkan dengan PDRB sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Tahun 2023 laku pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,76 persen dan meningkat menjadi 5,03 persen di Tahun 2024.

Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pontianak ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian,kehutanan dan perikanan	5,75	1,57	-1,13	-4,34	-0,12
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	-2,17	4,77	0,53	0,05	2,29
D	Pengadaan Listrik dan gas	25,56	3,69	3,53	9,06	9,18
E	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan daur ulang	8,54	5,38	5,14	4,46	2,58
F	Konstruksi	-4,21	5,57	1,06	2,22	1,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-13,50	4,97	12,09	6,80	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,36	-4,77	16,41	5,47	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-20,11	8,89	9,15	7,82	4,93
J	Informasi dan Komunikasi	17,19	7,13	6,88	8,07	7,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	3,50	0,08	4,12	3,72
L	Real Estate	0,69	1,03	0,50	10,05	8,74
M,N	Jasa Perusahaan	-5,16	0,47	11,90	6,23	5,30
O	Administrasi Pemerintahan,Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	-1,08	-2,59	2,57	8,67
P	Jasa Pendidikan	-8,90	4,99	3,05	5,01	10,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,50	38,11	6,41	15,26	5,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya.	-13,36	0,59	9,26	10,27	5,20
PDRB		**-3,96**	**4,6**	**4,98**	**4,76**	**5,03**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi kota Pontianak tahun 2024 meningkat tajam pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 10,09%, kemudian disusul pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 9,18%. Meskipun secara keseluruhan ekonomi kota Pontianak tumbuh positif namun masih terdapat lapangan usaha ditahun 2024 yang tumbuh negatif diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -0,12%. Jika dilihat pertumbuhan dua tahun

terakhir tahun 2023 dan 2024 tercatat ada sektor yang tumbuh melambat seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi makan dan minum da nada pula sektor yang mengalami kenaikkan diantaranya industry pengolahan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib.

B. Tingkat Kemiskinan

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang pangan
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut ditandai dengan kerentanan pada tingkat ekonomi, ketidakberdayaan dalam berusaha, serta keterisolasian dan ketidakmampuan mengemukakan aspirasi untuk mengaktualisasikan diri dalam meningkatkan taraf hidup. Selain itu kemiskinan juga ditandai dengan adanya kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf, lingkungan yang buruk, dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Secara umum, penyebab kemiskinan terjadi di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha
2. Keterbatasan akses terhadap faktor produksi
3. Rendahnya kepemilikan aset/kepemilikan terhadap aset tertentu
4. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan
5. Terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi
6. Lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial

Berdasarkan Konsep Kebutuhan Dasar, Badan Pusat Statitistik mendefinisikan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan). Dan Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Pontianak terus mengalami penurunan. Jika di Tahun 2020 persentase

penduduk miskin sebesar 4,70 persen dari seluruh penduduk, selanjutnya di Tahun 2024 menurun menjadi 4,20 persen. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.18 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)	95,30	95,42	95,54	95,55	95,80
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	30,70	30,11	29,61	29,92	28,56

Sumber data: BPS Kota Pontianak,2025

Pendataan penduduk miskin di Kota Pontianak mengacu kepada hasil pendataan Survey Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS Kota Pontianak. Tabel 2.10 menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Pontianak lebih baik dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berada di angka 7-8%, sedangkan kemiskinan di Kota Pontianak pada Tahun 2024 adalah 4,20%, turun 0,25 poin dari Tahun 2023.

Komitmen pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan telah diupayakan selama ini. Selain itu, dengan adanya komitmen TPB dalam menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, upaya untuk mengatasi permasalahan inipun menjadi lebih kuat.

Tabel 2.19 Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Pontianak	Kalbar	Indonesia
2020	4,70	7,17	10,14
2021	4,58	7,15	9,71
2022	4,46	6,73	9,54
2023	4,45	6,71	9,36
2024	4,20	6,32	9,03

Sumber: BPS Kota Pontianak

Selama periode 2020–2024, persentase penduduk miskin di Kota Pontianak menurun dari 4,70% menjadi 4,20%. Penurunan sebesar 0,50 poin ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan.

Tingkat kemiskinan 2024, Kota Pontianak 4,20%, Provinsi Kalimantan Barat: 6,32%, Indonesia: 9,03%. Berdasarkan data tersebut Kota Pontianak menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan

provinsi maupun nasional. Penurunan kemiskinan di Kota Pontianak mencerminkan kinerja ekonomi yang baik. Kedepan yang dapat dilakukan adalah memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan efektivitas program sosial, dan morong investasi padat karya lokal.

C. PDRB per Kapita

Perkembangan per kapita PDRB Kota Pontianak secara umum mengalami kenaikan yang signifikan, seperti yang tergambar pada tabel 2.11. Pada Tahun 2020, PDRB perkapita Kota Pontianak adalah sebesar Rp.57.157.077,64 mengalami penurunan sebesar 2.701.512,79 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai Rp.59.858.590,44. Kondisi ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang pertama kali melanda Indonesia pada bulan Maret 2020.

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai *physical distancing* dan karantina mandiri sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga menyebabkan kondisi ekonomi global relatif melambat, sehingga berdampak pula pada pertumbuhan PDRB di Kota Pontianak. Tapi perekonomian berangsur-angsur membaik mulai Tahun 2021 dengan peningkatan PDRB Perkapita kembali sebesar Rp. 60.571.902,38 dan terus meningkat hingga Tahun 2024 mencapai Rp. 75.420.268,78.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB Perkapita pada tabel 2.11 dapat dihitung rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 7,18%.

D. Rasio Gini

Rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi Rasio Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan antara kelompok-kelompok masyarakat.

Sebaliknya, semakin rendah Rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan tersebut. Rasio gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Rasio gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Secara matematis, Rasio Gini dihitung berdasarkan kurva Lorenz, yang menggambarkan distribusi kumulatif dari pendapatan atau kekayaan di suatu populasi. Jika kurva Lorenz semakin melengkung jauh dari garis kesejahteraan yang merata, maka Rasio Gini akan lebih tinggi, menunjukkan ketimpangan yang lebih besar.

Rasio Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Semakin besar nilai rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar.

Rasio Gini Kota Pontianak cukup stabil di 0,3 yang menunjukkan ketimpangan tersebut berada pada ketimpangan sedang (0,3-0,5) pada setiap tahunnya. Strategi yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan Rasio Gini antara lain adalah: meningkatkan akses pendidikan, pemerataan akses kesehatan, pemerataan infrastruktur dan akses ekonomi, peningkatan upah dan perlindungan pekerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta kebijakan sosial yang inklusif.

Tabel 2.20 Rasio Gini Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Pontianak	Kalbar	Indonesia
2020	0,327	0,317	0,381
2021	0,337	0,313	0,384
2022	0,363	0,140	0,384
2023	0,347	0,321	0,388
2024	0,361	0,310	0,381

Sumber: BPS Kota Pontianak

Gini rasio Kota Pontianak lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional, tapi lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini cukup wajar sebagai daerah perkotaan dikarenakan besarnya jumlah penduduk berpenghasilan tinggi.

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia disuatu daerah. IPM mengukur tiga dimensi utama yaitu usia harapan hidup, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Tabel 2.21 IPM Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pontianak	80,10	80,59	81,10	81,63	82,22
Provinsi Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19
Indonesia	71,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kota Pontianak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. IPM meningkat dari 80,10 pada tahun 2020 menjadi 82,22 pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 2,12 poin ini mencerminkan kemajuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pada Tahun 2024 Kota Pontianak mencatat IPM sebesar 82,22, Provinsi Kalimantan Barat 71,19 dan Indonesia 75,02. Berdasarkan data tersebut Kota Pontianak unggul 11,03 poin dibandingkan provinsi dan 7,2 poin dari rata-rata nasional. Ini menunjukkan Kota Pontianak berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Kedepannya yang menjadi tantangan adalah menjaga momentum pertumbuhan IPM, mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja produktif.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak tertinggi berada di Tahun 2020 yaitu sebesar 12,38 %. Seperti diketahui, Tahun 2020 dan 2021 merupakan periode dimana pandemi covid-19 melanda dan berakibat pada melemahnya aktivitas ekonomi. Setelah 2020 perlahan-lahan pengangguran menurun setiap tahunnya dan di Tahun 2024 merupakan yang terendah yaitu sebesar 8,29 %.

Tabel 2.22 TPT Kota Pontianak dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

Tahun	Pontianak	Kalbar	Indonesia
2020	12,36	5,81	7,07
2021	12,38	5,82	6,49
2022	9,92	5,11	5,86
2023	8,92	5,05	5,32
2024	8,29	4,86	4,91

Sumber: BPS Kota Pontianak

Selama lima tahun terakhir ini data Tingkat Pengangguran terbuka Kota Pontianak Kota Pontianak lebih tinggi dari Provinsi kalimantan Barat dan Nasional. Analisis penyebab tingginya pengangguran Kota Pontianak adalah

pertumbuhan penduduk urban lebih besar dari lapangan kerja, pencari kerja yang berpendidikan rendah, dominasi sektor jasa & informal, mismatch pendidikan vs dunia kerja, kurangnya industri padat karya, dan investasi terbatas di wilayah perkotaan.

Strategi penurunan Tingkat Pengganggguran Terbuka yang dapat dilakukan adalah reformasi pendidikan & vokasi, program pelatihan kerja berbasis industri, kolaborasi SMK & dunia usaha (link and match), dorong UMKM & wirausaha muda, akses modal, pelatihan, dan inkubasi bisnis, tarik investasi, sederhanakan perizinan, dan bangun kawasan industri kecil potensial.

G. Kontribusi PDRB Kota Terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Pontianak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di Kota Pontianak di bandingkan dengan total nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian di Provinsi kalimantan Barat.

Sepanjang kurun waktu 2020 – 2024 rata-rata kontribusi PDRB Kota Pontianak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat berda di kisaran 17 persen dan menunjukkan adanya penurunan kontribusi. Jika di Tahun 2020 kontribusinya sebesar 17,60 persen maka di Tahun 2024 telah menurun menjadi 17,11 persen.

H. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar koperasi berkontribusi terhadap PDRB.

Dari tabel 2.11 menunjukkan bahwa, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Tahun 2020 mencapai 0,847% dan 0,210% di Tahun 2024. Menunjukan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas usaha koperasi dan meningkatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

I. Proporsi Jumlah Usaha Mikro

Proporsi jumlah usaha mikro adalah perbandingan jumlah usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro di Kota Pontianak dibandingkan dengan seluruh jumlah usaha yang ada.

Dari tabel 2.11 menunjukkan bahwa, pada Tahun 2020 proporsi jumlah usaha mikro mencapai 86,43% dan 80,56% di Tahun 2024, penurunan proporsi jumlah usaha mikro dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti

meningkatnya persaingan dari usaha lain, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi usaha mikro, hal ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan terhadap usaha mikro dan meningkatkan kemampuan usaha mikro untuk bersaing dengan usaha lain.

J. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. indikator ini menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian regional. Tabel ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Pontianak dalam periode 2019-2023. Penurunan ini mengindikasikan peran yang semakin melemah dari sektor industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

K. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor PPH merupakan angka yang menunjukkan tingkat keberagaman dan keseimbangan gizi dalam suatu wilayah atau kelompok penduduk. Skor ideal nya adalah 100, yang menunjukkan konsumsi pangan yang sangat beragam dan bergizi seimbang. Capaian PPH Tahun 2023 : 82; dan Tahun 2024 : 88,6. Capaian tahun 2024 merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam kualitas konsumsi pangan masyarakat khususnya dikota Pontianak.

L. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio penduduk yang bekerja adalah 87,63%. Kemudian meningkat menjadi 90,08%daitahun 2022, 91,08 ditahun 2023. Dan sedikit menurun ditahun 2024 adalah 91,07%. Secara keseluruhan rasio penduduk yang bekerja menunjuukan tren peningkatan dalam penyerapan tenaga kerjaatau partisispasi kerja.

M. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masayarakt (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kebijakan disuatu wilayah tertentu. Indeks ini biasa diukur melelui survey. IKM menunjukkan fluktuasi selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Tahun 2024 IKM mencapai 90,197 lebih tinggi jika dibandingkan ditahun sebelumnya 88,534 ditahun 2020. Peningkatan ditahun 2024 bisa disebebkan adanya perbaikan dalam pelayanan,kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2.2 Kesehatan Masyarakat

A. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tabel dibawah ini menggambarkan perkembangan indikator kesehatan untuk semua Tahun 2020-2024.

Tabel 2.23 Perkembangan Indikator Kesehatan Untuk Semua Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,30	74,44	74,72	75,07	75,46
B. Prevalensi stunting (SSGI) (%)	N/A	24,40	19,70	16,70	22,30
C. Angka kematian ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	72,12	53,30	61,47	91,42	118,57
D. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (%)	69	100	99	91	117
E. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	94	91	89	90	89,38
F. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	61,67	70,90	76,74	85,50	89,61

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Pontianak,2025

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merujuk pada perkiraan rata-rata usia yang dapat dijangkau oleh seorang bayi baru lahir jika kondisi kesehatan dan pola hidup di suatu wilayah tetap seperti pada tahun-tahun yang relevan dengan data yang digunakan. Secara sederhana, harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani seseorang dari saat lahir berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat dan faktor-faktor lain pada suatu periode waktu tertentu. Harapan hidup yang tinggi di Kota Pontianak menunjukkan akses yang baik ke layanan kesehatan, sanitasi yang memadai, pola hidup sehat, serta pendidikan kesehatan yang lebih baik.

Usia harapan hidup masyarakat Kota Pontianak semakin meningkat setiap tahunnya artinya kesempatan hidup masyarakat semakin panjang. Peningkatan UHH dapat dilakukan dengan upaya antara lain: perbaikan layanan kesehatan, program imunisasi dan pengendalian penyakit menular, perbaikan gizi dan akses ke pangan sehat, peningkatan infrastruktur sanitasi dan air bersih, penyuluhan dan edukasi kesehatan serta program kesehatan ibu dan anak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 usia harapan hidup mencapai 74,30 tahun, pada Tahun 2024 usia harapan hidup meningkat menjadi 75,46 tahun. Menunjukkan bahwa rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai pada usia 75,46 tahun. Peningkatan usia harapan hidup menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masayarakat tentang pentingnya kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang sehat.

B. Prevalensi Stunting

Data Tahun 2020 belum tersedia, karena pengukuran secara nasional melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes baru dimulai tahun 2021. Pada Tahun 2021 angka stunting tercatat sebesar 24,4%, kemudian turun menjadi 19,7% pada Tahun 2022, dan naik lagi mencapai 22,30% pada Tahun 2024. Kenaikan prevalensi stunting di Pontianak mungkin juga merupakan artefak dari perbaikan sistem pengukuran dan pelaporan. Dengan adanya sistem manajemen data stunting digital, kasus stunting yang sebelumnya tidak terdeteksi mungkin kini tercatat, sehingga menciptakan kesan kenaikan prevalensi. Selain itu, jika pengukuran di posyandu tidak seragam atau alat antropometri tidak terstandar, ini dapat memengaruhi akurasi data.Untuk itu pemerintah dan seluruh pihak perlu terus berkomitmen untuk mencapai terget penurunan stunting yang lebih cepat. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan dapat mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas dan produktif.

C. Angka kematian ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan selama masa kehamilan atau 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat kesehatan ibu di suatu wilayah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 AKI mencapai 72,21 per 100.000 kelahiran hidup, pada Tahun 2024 AKI meningkat menjadi 118,5 per 100.000 kelahiran hidup yang menunjukkan bahwa kematian ibu semakin meningkat. Peningkatan AKI dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 disebabkan adanya perubahan sistem pencatatan kematian ibu, yang di catat dan dilaporkan sesuai dengan KTP, sehingga mengakibatkan lonjakan mencapai 118,5 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan memerlukan perhatian yang lebih serius. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil, dan meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang memadai.

D. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah indikator keberhasilan program penanggulangan tuberkulosis. Indikator ini menghitung jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan jumlah kasus yang diperkirakan ada.

Dari data cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat diihat bahwa pada Tahun 2020 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC mencapai 69% meningkat di Tahun 2024 menacapi 117%, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengendalian TBC. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian TBC telah efektif dan perlu dilanjutkan untuk mencapai tujuan pengendalian TBC yang lebih baik.

E. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TBC) adalah persentase pasien TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dari total pasien TBC yang diobati. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan TBC di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan TBC merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas program pengobatan TBC. Dari tabel 2.13 pada Tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 94% dan menurun 89,38% di Tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya resistensi obat TBC, kurangnya kesadaran pasien tentang pentingnya pengobatan TBC. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pasien dalam hal meningkatkan pengawasan dan pengendalian resistensi TBC.

F. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN. Angka Universal Health Coverage (UHC) Kota Pontianak di Tahun 2024 sudah menyentuh 89,61 persen. Artinya 610.111 warga Kota Pontianak telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas dan merata adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk mengembangkan potensi mereka, tanpa memandang latar belakang.

Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Pendidikan Berkualitas yang Merata Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama Sekolah	10,17	10,43	10,44	10,45	10,47
Harapan lama Sekolah	15,00	15,01	15,02	15,04	15,06
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional					
Literasi membaca	-	64,02	65,59	73,21	74,88
Numerasi	-	37,34	47,10	63,20	39,09
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional					
Literasi membaca	-	35,59	37,47	52,47	54,43
Numerasi	-	6,52	10,38	30,04	39,09
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	51,82	75,39	82,55

Sumber data: Disdikbud, Disperpusip Kota Pontianak,2025

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pemerintah dan masyarakat perlu mengambil berbagai langkah strategis yang dapat mendorong anak-anak dan orang dewasa untuk mengakses pendidikan lebih lama antara lain dengan meningkatkan akses pendidikan, program bantuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, program pendidikan alternatif serta dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada Tahun 2020 rata-rata lama sekolah mencapai 10,17 tahun dan meningkat menjadi 10,47 tahun di Tahun 2024.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak dalam menjalani pendidikan formal sejak usia tertentu, biasanya sejak usia 7 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses dan peluang pendidikan.

Semakin tinggi HLS, semakin baik peluang generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Data pada Tabel diatas merupakan angka harapan lama sekolah di Kota Pontianak. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Pontianak semakin meningkat setiap tahunnya.

Harapan lama sekolah merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada Tahun 2020 harapan lama sekolah mencapai 15,00 tahun dan meningkat 15,06 tahun di Tahun 2024. Peningkatan ini menujukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas pendidikan, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.

C. Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Kota Pontianak mengalami tren meningkat, baik literasi dari 64,02 di Tahun 2021(rilis data pertama) meningkat hingga 74,88 di Tahun 2024, dan numerasi dari 37,34 di Tahun 2021 meningkat menjadi 39,09 di Tahun 2024, hal ini menunjukkan meningkatnya kualitas literasi dan numerasi peserta didik Kota Pontianak.

D. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Kota Pontianak mengalami tren meningkat, baik literasi dari 35,59 di Tahun 2021 (rilis data pertama) meningkat hingga 54,43 di Tahun 2024, dan numerasi dari 6,52 di Tahun 2021 meningkat menjadi 39,09 di Tahun 2024, hal ini menunjukkan meningkatnya kulitas literasi dan numerasi satuan pendidikan Kota Pontianak.

E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah evaluasi terhadap inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memajukan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang masa.
Data capaian indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Pontianak tersedia mulai Tahun 2022 sebesar 51,82 hingga Tahun 2024 sebesar 82.55. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari Tahun 2022 ke 2024.

Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari Tahun 2022 ke 2024 agar strategi pembangunan literasi yang efektif dapat diidentifikasi dan diterapkan secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) adalah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi guncangan dan mengurangi kerentanan. PSA juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak semakin terjerat dalam kemiskinan. Data dibawah Tahun 2023 tidak tersedia karena belum pernah dilakukan pengukuran.

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Perlindungan Sosial yang Adaptif Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	66,69	70,94	76,85	49,97	40,86
B. Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	N/A	N/A	N/A	8,82	8,70
C. Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,50	0,68	0,49	0,49	0,58
D. Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,20	0,09	0,08	0,14

Sumber data: BPS Kota Pontianak, Sekretariat Daerah kota Pontianak , Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, 2025

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko pasar tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta ketika: memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tantangan dalam kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial masih menjadi isu signifikan. Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh, terutama dalam pelaporan upah dan jumlah tenaga kerja.

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Sebagai catatan, cakupan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 sebanyak 66,69% dan di Tahun 2024 menurun menjadi 40,86% yang disebabkan perubahan sistem pencatatan.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah Kota Pontianak telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan kerja disektor formal. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tahun 2023 mencapai 8,82% dan sedikit menurun di Tahun 2024 mencapai 8,70%. Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas disektor formal masih stagnan. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas disektor formal. Data dibawah Tahun 2023 tidak tersedia karena belum pernah dilakukan pengukuran.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan indikator yang mengukur tingkat kesenjangan antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan. Pada tahun 2020 capaian indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,50 dan meningkat ditahun 2024 dengan capaian 0,58. Hal ini direkomendasikan pertama dalam meningkatkan program penaggulangan kemiskinan. Kedua meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, ketiga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan.

D. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan antara masyarakat miskin. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan pendapatan diantara masyarakat miskin. Tahun 2020 mencapai 0,09 dan meningkat ditahun 2024 mencapai 0,14. Hal ini pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan keparahan kemiskinan sehingga pemerintah dapat mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang harmonis, maju dan berdaya saing, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Ini merupakan fondasi yag kuat dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Indikator indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Kota Pontianak Tahun 2023 dan Tahun 2024 mencapai 75,55%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari IKUB yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kota Pontianak dalam kondisi yang baik. Data dibawah Tahun 2023 tidak tersedia karena belum pernah dilakukan pengukuran.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender menjamin hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, dan perlindungan dari kekerasan.

Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
A. Indeks perlindungan anak	-	63,64	63,47	66,04	N/A
B. Indeks pembangunan keluarga	-	51,82	56,61	62,66	63,15
C. Indeks Ketimpangan gender	0,454	0,425	0,339	0,286	0,239
D. Indeks pembagunan gender	94,46	94,81	94,10	94,65	94,80

Sumber data: Disporapar Kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, 2025

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi dalam suatu negara atau wilayah. Indeks ini mengukur efektivitas kebijakan, program, dan lingkungan sosial dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memastikan kesejahteraan mereka.

IPA biasanya mencakup beberapa aspek utama, seperti: keamanan dan perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi, lingkungan keluarga dan pengasuhan, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, pencegahan pekerja anak dan perkawinan anak.

Indeks Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam tren meningkat dari data 63,64 di Tahun 2021 sebagai tahun pertama perhitungan meningkat hingga 66,04 di Tahun 2023. Data Indeks Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024 hingga saat ini belum dirilis.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dengan mengukur kualitas keluarga melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, indeks pembangunan keluarga tahun 2021 mencapai 51,82 dan meningkat 63,15 di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam pembangunan keluarga baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG merupakan salah satu indikator pembangunan yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, indeks ketimpangan gender menunjukkan penurunan dari Tahun 2020 yang mencapai 0,454 terus menurun hingga 0,239 Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kota Pontianak, dan IKG di Kota Pontianak nilainya paling kecil se-Kalimantan Barat.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender merupakan indikator untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia disuatu wilayah. Berdasarkan dari data diatas bahwa tahun 2020 telah mencapai 94,46 dan sedikit meningkat 94,80 ditahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang lebih seimbang dalam mencapai pembangunan manusia, termasu dalam aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia adalah kemampuan SDM untuk bersaing dan memberikan nilai tambah bagi suatu wilayah.

Tabel 2.27 Perkembangan Angka Ketergantungan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	44,03	44,28	42,60	44,98	44,92

Sumber data: DISDUKCAPIL Kota Pontianak, 2025

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah sebuah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dalam suatu populasi. Angka ini digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung penduduk usia non-produktif.

Dengan adanya trend peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak yang berusia lebih dari 65 tahuhn , maka *dependency ratio* juga akan meningkat. Pada Tahun 2024 *dependency ratio* Kota Pontianak adalah 45, artinya pada Tahun 2024, 100 penduduk produktif akan menanggung 45 penduduk non-produktif di Kota Pontianak.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi adalah tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Produktivitas ekonomi dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien.

Tabel 2.28 Gambaran Indikator Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	2,93	3,01	3,10	3,17	3,19
2	Rasio kewirausahaan daerah	4,05	3,44	5,08	4,24	4,90
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,05	61,94	64,82	63,47	64,53
4	Indeks Inovasi daerah	52,00	56,10	55,10	55,81	61,29
5	Jumlah wisatawan macanegara yang berkunjung ke Kota Pontianak	12.998	11.392	14.350	29.978	34.715
6	Retun on asset (BUMD)	2,56	3,31	4,25	5,62	5,58
7	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	57,39	60,23	61,88	65,45	65,70
8	Rasio PDRB Perdagangan	15,71	15,66	17,03	17,92	18,48
9	Rasio PDRB Pertanian dan perikanan	1,40	1,35	1,24	1,13	1,06

Sumber data: Diskumdag, BPS Kota Pontianak, 2025

A. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian wilayah tersebut.

Sektor akomodasi dan makan minum mencakup jasa penginapan; restoran, kafe, rumah makan dan usaha kuliner lainnya serta layanan katering dan penyedian jasa makanan lainnya.

Tabel 2.28 menunjukkan adanya peningkatan kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap perekonomian Kota Pontianak dalam periode 2020-2024. Peningkatan ini mengindikasikan peran yang semakin meningkat dari sektor sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

B. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah wirausahawan dibandingkan dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja

di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan dan potensi pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mandiri. Menurut standar global, rasio kewirausahaan yang ideal adalah sekitar 4% dari total penduduk usia kerja. Dan rasio kewirausahaan Kota Pontianak telah mencapai standar ideal karena di Tahun 2024 telah mencapai 4,90%.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Pontianak. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di Kota Pontianak.

TPAK di Kota Pontianak sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi setiap tahunnya dengan TPAK terendah di Tahun 2020 sebesar 60,05 persen dan tertinggi di Tahun 2022 sebesar 64,82 persen.

D. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat atau metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemajuan ekonomi serta sosial suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini biasanya mencakup sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat inovasi, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, keberhasilan dalam menerapkan teknologi baru, dan kesiapan dalam mengadopsi perubahan.

Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan membandingkan kemajuan inovasi antara daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inovasi. Hal ini membantu merencanakan kebijakan dan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah atau wilayah tersebut.

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian terakhir indeks inovasi di Tahun 2024 adalah 61,29 dengan kategori “Kota Sangat Inovatif”. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak memiliki potensi yang besar dalam bidang inovasi. Adanya peningkatan setiap tahun tersebut harus menjadi pendorong bagi pemerintah Kota Pontianak untuk semakin mengembangkan inovasi daerah, bagi kemajuan Kota Pontianak sendiri. Adapun inovasi yang paling banyak adalah pelayanan publik kesehatan.

E. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pontianak adalah jumlah orang asing yang melakukan perjalanan wisata ke Pontianak. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, terlihat bahwa di Tahun 2024 merupakan tahun terbanyak wisatawan mancanegara datang ke pontianak yaitu sebanyak 34.715 orang. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya event yang diselenggarakan di Kota Pontianak di Tahun 2024.

F. Return on Asset (ROA)

Return on asset (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. ROA merupakan indikator penting untuk menilai kinerja perusahaan. ROA dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada periode waktu tertentu. ROA BUMD Kota Pontianak selama 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dimana mencapai 2,56% ditahun 2020 dan 5,58% ditahun 2024.

G. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pekerja formal adalah mereka yang bekerja dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor formal dalam suatu wilayah memiliki berbagai dampak ekonomi dan sosial yang signifikan diantaranya peningkatan pendapatan dan daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi,meningkatnya kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

H. Rasio PDRB Perdagangan

Rasio PDRB perdangan adalah proporsi kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio perdagangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 15,71% meningkat ditahun 2024 mencapai 18,48%. Peningkatan ini menunjukkan sektor perdagangan semakin berperan penting dalam perekonomian regional.

I. Rasio PDRB Pertanian dan Perikanan

Rasio PDRB pertanian dan perikanan adalah proporsi kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio PDRB pertanian dan perikanan mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai 1,40% menurun 1,06% ditahun 2024. Penurunan ini bias disebabkan perubahan pola produksi.

2.1.3.3 Transformasi Digital

Smart city atau kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Konsep ini bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan informasi yang tepat.

Tabel 2.29 Perkembangan Hasil Evaluasi Impelmentasi *Smart City* Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai *Smart City*	2,86	3,43	3,39	3,34	3,36

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, 2025

2.1.3.4 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang juga disebut investasi, didefinisikan sebagai perolehan aset produksi (termasuk pembelian aset bekas), termasuk produksi aset tersebut oleh produsen untuk penggunaan sendiri, dikurangi pelepasan.

Tabel 2.30 Perkembangan Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Perekonomian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,21	29,85	28,73	30,33	30,03

Sumber data: BPS Kota Pontianak,2025

2.1.3.5 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indikator perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan dan kinerja ekonomi kota dalam mewujudkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini capaian perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.31 Gambaran Perkembangan Infrastruktur dan Akses Hunian Layak Terjangkau Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infratruktur Kota	-	-	-	-	77,77
Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	-	-	-	93,78	85,78

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (Km/Jam)	N/A	N/A	N/A	N/A	26,36

Sumber data: BAPPERIDA dan DPRKP Kota Pontianak

A. Indeks Infrastruktur Kota

Pada Tahun 2020, indeks insfratruktur mencapai 63,67, peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2024 mencapai 81,77.

Formulasi baru menghitung indeks dengan menjumlahkan tiga komponen berbobot, yaitu: (1) Infratruktur jalan, jembatan dan drainase 50%, (2) Infratruktur lingkungan permukiman 40%, (3) Insfratruktur perlengkpan jalan 10%.

B. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian, Layak Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang memiliki tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan dapat bertahan lama. Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*) 2) memiliki akses terhadap air minum layak 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Di Kota Pontianak rumah tangga yang terkategori sebagai rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan semakin meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2024 tercatat sebesar 97,00 persen, hal ini berarti terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 93,78 persen. Data ini diambil dari prosentase rumah layak huni Kota Pontianak.

C. Rata-Rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota

Rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota adalah rata-rata kecepatan dalam melakukan perjalanan tanpa memperhitungkan perubahan kecepatan selama perjalanan, berdasarkan jarak yang ditempuh dan total waktu untuk melakukan perjalanan dengan satuan Km/Jam. Indikator ini baru akan digunakan pertama pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Utuk tahun 2024 rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota mencapai 26,36 km/jam dari batas kota yang mewakili 6 kecamatan menuju pusat kota yaitu tugu adipura.

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Mkro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi perekonomian yang stabil dan tidak mengalami fluktuasi berlebihan. Stabilitas ekonomi makro penting karena dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.32 Gambaran Indikator Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	0,54	0,572	0,73	0,802	0,75
2	Rasio kemandirian keuangan daerah	26,00	30,00	31,54	31,64	30,65
3	Tingkat inflasi	2,11	1,16	6,35	2,09	1,58
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	0	0	0	0	6,04
5	Rasio PDRB Perdagangan	15,71	15,66	17,03	17,92	18,84
6	Rasio PDRB Pertanian dan Perikanan	1,40	1,35	1,24	1,13	1,06
7	Angka Kriminalitas	17,34	16,77	16,11	19,17	19,74
8	Total dana pihak ketiga / PDRB	85,29	85,14	83,71	84,12	N/A
9	Total kredit /PDRB	90,50	86,57	87,15	N/A	N/A

Sumber data: Hasil Pengolahan Data BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini juga disebut *local tax ratio*.

Rasio ini menujukkan seberapa besar pajak daerah berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Dari tabel diatas pada Tahun 2020 rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai 0,54% dan 0,75% di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah telah berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Peningkatan ini menujuukan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan dalam mengelola pajak daerah, sehingga ada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

B. Indeks Kemandirian Keuangan Daerah

Indeks Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian juga menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan luar.
Rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Pontianak mengalami kenaikan di tahun 2022-2023.

C. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur inflasi di Indonesia dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). ika perubahan IHK bernilai positif maka terjadi inflasi, sebaliknya jika perubahan IHK bernilai negatif maka terjadi deflasi.
Inflasi yang tinggi dapat berdampak besar pada daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian, dan meningkatkan investasi.

Inflasi di Kota Pontianak selama lima tahun terakhir cukup rendah. Hanya di Tahun 2022 inflasi tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 6,35 persen yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Inflasi di Tahun 2024 sebesar 1,58 persen dan merupakan terendah kedua selama lima tahun terakhir.

D. Indeks Akses Keuangan daerah (IKAD)

Indeks akses keuangan daerah (IKAD) merupakan indeks yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih konfrehensif sehingga dapat memperkuat TPAKD ditingkat kab/kota. Tujuan IKAD Adalah sebagai basis informasi yang memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan daerah berbasis data dan informasi, memperluat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD, serta dapat melengkapi survey nasional literasi dan inklusi keuangan. IKAD merupakan tahun pertama digunakan RPJMD Tahun 2025-2029. Tahun 2020 hingga tahun 2023 indikator ini belum digunakan. Baseline Tahun 2024 IKAD mencapai 6,04. Angka tersebut bersumber dari bappenas.

E. Rasio PDRB Perdagangan

Rasio PDRB perdagangan merupakan indikator yang mengukur kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data rasio PDRB perdagangan dari tahun 2020 mencapai 15,71% dan terus meningkat ditahun 2024 mencapai 18,48%. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional.

F. Rasio PDRB Pertanian dan Perikanan

Rasio PDRB pertanian dan perikanan menunjukkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data, rasio PDRB pertanian dan perikanan mengalami penurunan dari 1,04% pada tahun 2020 mennjadi 1,06% pada tahun 2024. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan antara lain dari perubahan struktur ekonomi bergeser dari sektor lain seperti industri dan jasa.

G. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan risiko terkena tindak kriminal disuatu wilayah. Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan disuatu wilayah. Dengan metode perhitungan jumlah seluruh tindak kriminalitas pada tahun n dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun n dikali seratus. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 angka kriminalitas dikota Pontianak semakin meningkat 17,34% ditahun 2020 dan 19,74% ditahun 2024. Hal ini terjadi peningkatan dikarenakan pemili serentak ditahun 2024.

H. Total dana pihak ketiga / PDRB

Total dana pihak ketiga / PDRB memberikan informasi tentang proporsi dana yang dihimpun bank dari masyarakat terhadap total output ekonomi suatu wilayah. Secara umum, rasio ini menunjukkan seberapa besar simpanan masyarakat yang beredar di suatu daerah dibandingkan dengan total produksi di daerah tersebut.

Total dana pihak ketiga / PDRB Kota Pontianak diperoleh dari data OJK, dengan data yang cukup fluktuatif dan data terakhir Tahun 2023 adalah sebesar 84,12%.

I. Total kredit /PDRB

Total kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah rasio yang menunjukkan proporsi kredit yang diberikan kepada total nilai ekonomi suatu daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan ekonomi suatu daerah pada sektor kredit. Tren Total kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup fluktuatif dengan data terakhir Tahun 2022 sebesar 87,15, sedangkan data 2023 dan 2024 masih dalam konfirmasi karena terdapat anomali.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatan kepercayaan masyarakat, regulasi dan tatakelola yang berintegritas dan adaptif merupakan salah satu prioritas utama. Regulasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi birokrasi dan meningkatkan kinerja pemeruntahan. Berikut ini tabel indikator dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.33 Gambaran Indikator Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks reformasi hukum	-	-	-	-	77,54
2	Indeks pelayanan publik	3,67	3,93	4,44	4,09	4,35
3	Indeks reformasi birokrasi	67,72	67,90	69,98	77,74	75,89
4	Nilai akuntabiitas kinerja instansi pemerintah	72,54	73,27	72,28	72,58	71,04
5	Indeks pemerintahan berbasis elektronik	3,06	3,31	3,28	3,43	3,49
6	Survey penilaian integritas	-	76,24	27,52	77,80	77,72

Sumber data:Sekretariat Daerah, Diskominfo, Inspektorat Kota Pontianak, 2025

A. Indeks Reformasi Hukum

Pembangunan hukum yang efektif dan efisien merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indeks reformasi hukum merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan hukum di suatu daerah. Pada Tahun 2024, Kota Pontianak mencapai indeks reformasi hukum sebesar 77,54. Namun indeks ini baru ada pada Tahun 2024, sehingga belum ada data yang dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

B. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas dan efektif merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indeks pelayanan publik merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik disuatu daerah. Berdasarkan tabel diatas indeks pelayanan publik dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mengalami kenaikkan yang cukup signifikan dengan nilai 3,67 hingga 4,35 Tahun 2024. Untuk penilaian indeks ini ada beberapa dinas yang menjadi penilaian yaitu Dinas Sosial 4,09, RSUD 4,49 dan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan 4,46 sehingga indeks pelayanan publik Kota Pontianak Tahun 2024 mencapai 4,35.

C. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan reformasi birokrasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang diperoleh Kota Pontianak Tahun 2020 hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 67,72 di Tahun 2020 dan meningkat di Tahun 2023 dengan nilai 77,74. Namun ada penurunan di Tahun 2024 yaitu 75,89 untuk realisasi Tahun 2024.

D. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Dari tabel diatas nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah Kota Pontianak mengalami penurunan di Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Tahun 2020 mencapai 72,74 dan menurun 71,04 di Tahun 2024. Penurunan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan, perubahan struktur organisasi atau perubahan lainnya.

E. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintahan berbasis elektronik (e-government)meruapak salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks pemerintahan berbasis elektronik di Kota Pontianak telah mengalami peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, meningkat dari 3,06 di Tahun 2020 menjadi 3,49 Tahun 2024.

F. Survei Penilaian Integritas

Survei penilaian integritas merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat integritas disuatu daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa survey penialian integritas di Kota Pontianak telah mengalami peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, meningkat dari 3,06 di Tahun 2020 menjadi 77,72 Tahun 2024.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial

Pembangunan hukum keamanan dan demokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai dan sejahterah. Ada beberapa yang termasuk golongan hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial.

Indikator yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan indikator Angka Konflik. Adapun realisasi Tahun 2020 hingga Tahun 2024 setiap tahun mencapai nol. Dengan struktur penduduk yang multi etnis di Kota Pontianak, keadaan yang aman dan tentram merupakan kerja keras seluruh eleman masyarakat (warga masyarakat,lembaga adat, aparat penegak hukum dan pemerintah kota). Keadaan Kota Pontianak yang aman dan tenteram sangat berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan dan peningkatan perhubungan ekonomi Kota secara keseluruhan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

2.1.4.3 Ketergantungan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi pemerintah Kota Pontianak dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan daya saing daerah daerah. Berikut ini data ketergantungan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.34 Perkembangan Ketergantungan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gentar Kawasan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	1,59	3,14	3,37	3,79	4,18
Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakkan Hukum PERKADA dan PERDA	100	100	100	100	100
Indeks Kota Tolerans	4,450	5,170	5,450	5,450	5,251

Sumber data:Satpol PP, Kebangpol, Bapperida Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan tabel diatas, bahwa indeks daya saing daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Peningkatan ini dapat dilihat dari 1,59 di Tahun 2020 menjadi 4,18 di Tahun 2024. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan barat dengan nilai 3,40. Peningkatan ini menunjukkan bahwa daerah telah membuat kemajuan yang baik dalam meningkatkan daya saingnya. Di dalam indeks daya saing tersebut ada beberapa komponen yang dinilai diantaranya komponen lingkungan hidup, komponen sumber daya manusia, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi. Sedangkan indeks kota toleran diukur dari beberapa dimensi yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah dan demografi agama. Untuk tahun 2020 kota Pontianak mendapat peringkat 75 dengan nilai 4,450 meningkat nilainya ditahun 2024 mencapai 5,251 dengan mendapatkan peringkat 22.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaraakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui

melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan pemerataan pendidikan seperti: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan. Berikut tabel dari indikator urusan pendidikan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.35 Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka partisipasi murni (%)					
	-SD	98,75	92,17	87,45	89,14	90,98
	-SMP	95,51	86,64	77,46	85,33	80,91
	-SMA	91,64	93,81	86,09	88,78	82,65
2	Angka partisipasi kasar (%)					
	-PAUD	21,26	19,40	27,49	29,93	27,37
	-SD	109,45	97,18	95,86	95,81	96,91
	-SMP	112,77	98,24	97,92	104,62	94,52
	-SMA	109,15	114,70	114,26	114,08	109,69
3	Angka putus sekolah (%)					
	-SD	0,10	0,23	0,23	0,28	0,17
	-SMP	0,13	0,51	0,51	0,06	0,05
	-SMA	0,41	3,25	2,14	0,14	2,14
4	Angka kelulusan (siswa)					
	-SD	12.030	11.820	11.901	12.544	13.064
	-SMP	11.381	11.813	11.720	11.581	11.898
	-SMA	11.139	12.598	12.833	12.254	12.833
5	Angka melanjutkan (%)					
	-SD	45,59	52,68	54,23	56,22	50.24
	-SMP	92,39	112,55	111,55	107,59	101,34
	-SMA	115,19	107,04	134,45	139,23	132,44

Sumber data: Disdikbud Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak Tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A,Paket B,Paket C) turut diperhitungkan.

Tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam sistem pendidikan formal. Jika APM sama dengan 100 artinya seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai usia. Sehingga dapat dikatakan bahwa APM pada jenjang SD, SMP dan SMA di Tahun 2024 masing-masing jenjang SD (90,98), SMP (75,9980,91 dan SMA (82,65) masih dibawah 100%. Artinya masih ada anak di Kota Pontianak yang bersekolah tidak sesuai usia.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan disuatu wilayah. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen artinya menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kota Pontianak angka partisipasi kasar pada jenjang SD dan SMA mempunyai nilai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dengan nilai diatas 100%. Namun untuk jenjang SMP dapat dikatakan masih dibawah 100%. Sedangkan jenjang PAUD masih dibawah 50% yang desbabkan PAUD tidak diwajibkan.

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan indikator untuk melihat seberapa tinggi partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Angka ini menunjukkan persentase siswa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang tertentu. Dengan demikian angka putus sekolah Kota Pontianak dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 disetiap jenjang SD, SMP dan SMA mempunyai nilai yang berfluktuasi dimana pada jenjang SD Tahun 2020 dengan nilai 0,10% meningkat menjadi 0,17% di Tahun 2024, Jenjang SMP Tahun 2020 dengan nilai 0,13 menurun menjadi 0,05% di Tahun 2024 dan Jenjang SMA Tahun 2020 dengan nilai 0,41 meningkat menjadi 0,142,14% di Tahun 2024.

Angka Kelulusan

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sekolah dasar Lulus SD tiap Tahun ajaran 12.030 siswa di Tahun 2020 meningkat menjadi 13.064 siswa di Tahun 2024. Sedangkan jenjang SLTP/MTs lulus SLTP/MTS Tahun 2020 mencapai 11.381 siswa meningkat menjadi 11.898 siswa di Tahun 2024. Jenjang SMA/SMK/MA lulus SMA/SMK/MA Tahun 2020, mencapai 11.139 siswa meningkat di Tahun 2024 mencapai 12.833 siswa. Tujuan dari angka kelulusan sekolah ini diantaranya untuk mengukur kualitas pendidikan dan mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan program pendidikan.

Angka Melanjutkan Sekolah

Lulusan siswa SD/MI yang melanjutkan sekolah menjadi siswa baru disekolah menengah pertama (SLPT/MTs). dan lulusan siswa SLTP/MTs yang melanjutkan sekolah menjadi siswa baru disekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Berdasarkan dari tabel diatas di Tahun 2020 hingga Tahun 2024 pada jenjang SD Tahun 2020 mencapai 45,59% dan Tahun 2024 mencapai 40,93%. sedangkan pada jenjang SLTP/MTs Tahun

2020 mencapai 92,39% dan Tahun 2024 mencapai 101,34%. Sedangkan pada jenjang tingkat SMA telah mencapai melebihi 100%. Tujuan dari angka melanjutkan digunakan untuk mengukur tingkat minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.36 Capaian IKK Outcome Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipsi PAUD	71,27	91,94	46,05	46,22	70,54
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipsi dalam pendidikan dasar	84,57	94,94	82,33	81,02	97,66
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipsi dalam pendidikan menengah pertama	89,06	90,15	64,72	68,86	96,25
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	86,09	87,37	61,38	75,06	17,55

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Berikut ini adalah beberapa indikator bidang kesehatan Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian bayi	2,16	1,87	2,11	7,94	7,75
Angka kematian balita	2,25	2,04	2,18	7,59	7,96
Angka kematian neonatal	2,07	1,87	2,01	7,59	7,78

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	87	99	100	100	100
Inside rate DBD per 100.000 penduduk	4,04	2,38	5,53	18,95	3,66
Persentase penderita hipertensi	25,40	21,00	33,34	44,60	48,69
Persentase wasting balita	3,5	5,19	7,75	2,98	8,20
Angka underweight balita	7,06	9,61	14,74	7,03	17,50
Akreditasi fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100
Ketersediaan fasilitas kesehatan					
- Rumah sakit umum	10	10	12	13	12
- Rumah sakit khusus	1	0	0	0	1
- Rumah sakit bersalin	2	2	2	2	1
- Puskesmas	23	23	23	23	23
- Klinik/balai kesehatan	36	36	36	60	81
- Posyandu	294	293	293	292	300

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi per 1000 KH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Dari tabel diatas bahwa angka kematian bayi di Tahun 2023 mencapai 7,94 per 1000 KH sedikit menurun jika dibandingkan di Tahun 2024 mencapai 7,75 per 1000 KH. Dengan tren kasus kematian bayi di Tahun 2023, mencapai 83 kasus dan sedikit meningkat di Tahun 2024 menjadi 85 kasus. Namun capaian Tahun 2024 masih dibawah Standar Nasional sebesar 16 per 1000 KH. Berdasarkan trend kasus kematian bayi terbanyak disebabkan oleh bayi dengan berat badan lahir rendah, asfiksia, kelainan bawaan infeksi dan lain-lain.

Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2020 hingga Tahun 2024 berfluktuatif dimana Tahun 2020 mencapai 2,25 per 1000 KH meningkat di Tahun 2024 mencapai 7,96 per 1000 KH.

Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dari data diatas angka kematian neonatal diatas dapat

dilihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan di Tahun 2023 dan 2024 masing-masing menacapai 7,59 per 1000 KH dan 7,78 per 1000 KH. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada peningkatan angka kematian neonatal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan neonatal.

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard

Pelayanan deteksi dini HIV merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mencegah penyebaran HIV dan meningkatkan kualitas hidup individu yang terinfeksi. Dari tabel diatas persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard. Tahun 2020 hingga Tahun 2024 terus mengalami peningkatan yatu 85% di Tahun 2020 dan 100% di Tahun 2024. Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa program ini semakin efektif dan efisien, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas program ini serta meningkatkan kesadaran dan akses kepelayanan deteksi dini HIV bagi masyarakat.

Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan pengendalian. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa insiden rate DBD per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 yaitu menurun menjadi 3,66%. Salah satu faktor fluktuasi ini disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca, perubahan perilaku masyarakat.

Persentase Penderita Hipertensi

Realisasi indikator kinerja utama pada persentase penderita hipertensi di Kota Pontianak dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan angka berfluktiatif. Tahun 2020 tercatat sebesar 25,40% atau 41.014 penderita hipertensi dan terus meningkat di Tahun 2024 mencapai 48,69% atau 82.453 penderita hipertensi. Dimana target dinas kesehatan dan standar nasional sebesar 100%. Artinya capaian indikator persentase penderita hipertensi masih dibawah target nasional. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran persentase penderita hipertensi adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat mengenai bahaya dari penyekit degenerasi seperti hipertensi.

Persentase Wasting Balita

Wasting adalah salah satu satu bentuk kekurangan gizi yang mencerminkan berat badan anak terlalu kurus menurut tinggi badannya. Dari tabel diatas persentase wasting balita dari Tahun 2020 hingga

Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana Tahun 2020 mencapai 3,5% dan meningkat di Tahun 2024 mencapai 8,20% atau 610 balita dengan status gizi buruk (Pecatatan laporan berdasarkan e-PPGBM). Peningkatan dengan katagori gizi buruk tersebut dapat dilihat ditingkat puskesmas yaitu puskesmas Perumnas Dua, puskesmas Saigon, puskemas Karya Mulia, puskesmas Telaga Biru dan puskesmas Kampung Bangka.

Angka Underweight Balita

Underweight atau berat badan kurang pada anak adalah kondisi berat badan anak tak kunjung naik dalam waktu lama. Kekurangan gizi pada balita dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti ganguan pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan risiko penyakit. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu perubahan pola makan dan gaya hidup masyarakat atau perubahan akses ke pelayanan kesehatan dan gizi.

Fasyankes Pemerintah yang Terakreditasi

Realisasi indikator kinerja utama pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Tahun 2020 sehingga Tahun 2024 sebesar 100%. Dengan target standar nasional sebesar 100%. Artinya capaian Tahun 2024 sudah lebih baik dengan katagori sangat berhasil.

Angka Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Pada realisasi indikator kinerja angka ketersediaan fasiltas kesehatan, terdapat pengurangan jumlah RS Bersalin di Tahun 2024 menjadi 1 RS Bersalin, karena RS Bersalin “Nabasa” sekarang berubah menjadi kategori Rumah Sakit Khusus (Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)). Kedepannya Pemerintah Kota Pontianak akan memfokuskan pada pengembangan RSUD di Pontianak Utara.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan kesehatan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.38 Capaian IKK Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,22	0,29	2,94	2,66	2,76

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47,54	36,33	100	100	100
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,22	29,71	100	100	100
Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	51,82	56,91	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuia standard	100	100	100	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase orang dengan risiko terinfesi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD Kota Pontianak,2025

Terdapat beberapa IKK Outcome yang mengalami penurunan di Tahun 2024, ini disebabkan adanya perbedaan cara pengukuran dengan Tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya dihitung dengan menggunakan sasaran Pusdatin, sedangkan di Tahun 2024 sudah menggunakan sasaran dari Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan insfratruktur. Insfratruktur yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Berikut ini beberapa indikator yang mendukung urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.39 Kinerja Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kualitas jalan diperkotaan dalam kondisi mantap	87,54	88,83	89,73	90,35	90,64
Persentase panjang saluran berfungsi baik	50,12	52,06	53,03	53,21	53,96
Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87,71	89,84	89,08	92,35	93,16
Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	64,62	66,15	80,96	81,78	84,86
Persentase sesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW	84,30	84,30	88,50	87,17	87,17
Pengurangan luas daerah banjir	47	50	50	43	26,3

Sumber data: DPUPR Kota Pontianak, 2025

Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terdapat peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator yang terkait dengan infrastruktur dan penataan ruang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan penataan ruang semakin baik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan pekerjaan umum dan penatan ruang merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.40 IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi insfratruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	52,15	58,68	26,29	26,29	29,29
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	87,71	89,84	89,08	92,35	93,16

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota					
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	97,58	99,64	99,65	98,82	98,42
Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	71,50	91,03	57,58	65,37	97,69
Tingkat kemantapan jalan Kab/Kota	87,54	88,83	89,73	90,58	90,64
Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	67,62	67,37	43,85	54,20	60,48

Sumber data: LPPD Kota Pontiana, 2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman. Berikut ini beberapa indikator urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2020 - Tahun 2024.

Tabel 2.41 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah layak huni	99,25	99,65	99,59	99,73	99,71
2	Persentase kawasan tidak kumuh	97,61	99,16	98,45	98,86	99,07

Sumber data: DPRKP Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase rumah layak huni dan persentase kawasan tidak kumuh meningkat secara konsisten dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Persentase rumah layak huni meningkat dari 99,25% pada Tahun 2020 menjadi 99,71% pada Tahun 2024, sedangkan persentase kawasan tidak kumuh meningkat dari 987,61% pada Tahun 2020 menjadi 99,07% pada Tahun 2024.

Peningkatan persentase rumah layak huni dan kawasan tidak kumuh ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan telah berhasil. Upaya ini merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah, masyarakat lainnya dalam meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.42 Capaian IKK Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	100	100	100	100	100
Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota	100	100	100	100	100
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani	17,22	35,30	26,26	18,39	77,99
Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	0,75	0,35	0,41	0,27	0,29
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	90,50	91,50	91,80	92,30	92,70

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025,* angka sementara

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Berikut ini indikator dari urusan ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.43 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kejadian kebakaran yang ditanggulangi	100	100	100	100	100

Sumber data: Satpol PP Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi dengan angka yang sama yaitu 0% dari Tahun 2020 samapai Tahun 2024. Namun, persentase kejadian kebakaran yang dapat ditanggulangi memiliki nilai 100% dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semua kejadian kebakaran yang dapat ditanggulangi dengan efektif selama periode tersebut.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.44 Capaian IKK Outcome Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
Waktu tanggap (respon time tanggap penanganan kebakaran)	15 menit	8,83 menit	9 menit	8,33 menit	7,92 m menit
Jumlah warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	466.275	458.093	472.221	473.236	474.074
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	670,859	670,859	1.265	524	951
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	232	0	255	88	243

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pemerintahan bidang sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memerlukan perlindungan dan bantuan sosial. Berikut ini tabel bidang sosial dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.45 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	84,97	106	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	100	97,92	115,26	100	100

Sumber data: Dinas Sosial Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) meningkat dari 84,97% pada Tahun 2020 menjadi 100% Tahun 2024 dan persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa potensi sumber kesejahteraan sosial terus dapat dimanfaatkan secara optimal.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan sosial merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.46 Capaian IKK Outcome Urusan Sosial Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	97,92	100	100	100
Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD,2025

D. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pemerintahan bidang tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerjaan/buruh, pemerintah telah melakukan upaya, termasuk penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan hubungan kerja melalui perjanjian bersama, serta meningkatkan pertisipasi pekerja/buruh dalam program jaminan sosial melalui BPJS. Berikut ini indikator dari urusan bidang tenaga kerja dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	59,45	100	86,00	81,48	39,00
2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS	66,69	70,94	76,85	72,24	23,97

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan hubungan kerja. Indikator ke dua besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta aktif BPJS ini menunjukkan bahwa masih ada kesadaran yang kurang (pekerja/buruh) tentang pentingnya menjadi peserta aktif BPJS dan yang ketiga indikator rasio penduduk bekerja ini menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam meningkatkan rasio penduduk bekerja.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan tenaga kerja merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.48 Capaian IKK Outcome Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat produktivitas tenaga kerja	9,26	8,77	14,60	14,60	19,93
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	70	58,33	100	81,25

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100	13,13	61,65	2,11	0,57
Persentase perusahaan yang merapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	70,01	66,14	113,79	100	66,12
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	39,59	26,99	10,90	50,57	30,16

Sumber data: LPPD,2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan berbasis hak asasi manusia, pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Berikut ini data dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan tingkat capaian Kota layak anak. Dimana indikator capaian Kota layak anak mendapatkan predikat pratama di Tahun 2020 dan meningkat dengan predikat nindya di Tahun 2024.

Tabel 2.49 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat capaian Kota layak anak	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya

Sumber data: DP2KBP3A Kota Pontianak,2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK Outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.50 Capaian IKK Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,80	35,07	39,16	27,58	20,44
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	100	100	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,09	8,92	7,72	10	4,07

Sumber data: DP2KBP3A, 2025

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas pola pangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah melakukan upaya, termasuk peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan ketersediaan energi dan protein per kapita, serta peningkatan skor pola pangan harapan. Berikut ini tabel yang menjelaskan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	142,55	140,18	147,13	114,65	103,83
Ketersediaan energi	2,910	2,910	2,962	3,383	3,210
Ketersediaan protein	103,21	100,23	107,63	106,59	109,09
Produktivitas tanaman pangan					
Padi (kuintal/ha)	27,49	37,05	36,94	34,42	28,60
ubi kayu (kuintal/ha)	201,99	208,27	219,69	259,15	223,46
Keladi (kuintal/ha)	140	140	140	140	143

Sumber data: Dinas Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas, bahwa ketersediaan energi dan protein per kapita masih belum mencukupi dan mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, namun pola pangan harapan telah meningkat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Produktivitas tanaman pangan juga mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 -2024 dari jenis padi, ubi kayi dan keladi. Fluktuasi produktivitas tanaman pangan beberapa tahun terakhir diakibatkan oleh faktor cuaca ekstream, air pasang, banjir rob dari Kabupaten lain, curah hujan yang tinggi, kekeringan pada lahan, yang berdampak pada produksi pertanian beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pangan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas pangan, pertanian dan perikanan kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.52 Capaian IKK Outcome Urusan Pangan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	167,24	196,05	139,20	104,19	105,52

Sumber data: LPPD,2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Konflik, sengketa, dan masalah pertanahan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Berikut ini tabel urusan bidang pertanahan Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persetase penurunan konflik, sengketa dan masalah pertanahan	50	75	83	67	75

Sumber data: DPRKP Kota Pontianak,2025

Dari data tersebut, persentase penurunan konflik, sengketa dan masalah pertanahan dari Tahun 2020 mencapai 50% meningkat di Tahun 2024 mencapai 75%. Dikarenakan adanya sengketa tanah dipengadilan negeri dan masalah pembayaran ganti rugi lahan serta permohonan kepemilikan lahan yang di sampaikan masyarakat kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang Pertanahan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian IKK Outcome Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfataan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	100	100	100	100	100
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan faasilitas umum	88,99	86,36	100	100	100
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100	100	100	100
Tersedianya tanah obyek landrefrom (TOL) yang siap diredribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	-
Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	100
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	86,67	100	100	100

Sumber data: LPPD,2025, *angka sementara

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Berikut ini adalah capaian indikator urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.55 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kualitas air (IKA)	55,56	56,05	59,84	51,40	N/A
Indeks kualitas udara (IKU)	79,91	85,75	85,68	81,76	N/A
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	33,55	29,52	27,64	37,75	N/A
Persentase penanganan sampah	77,92	75,94	73,47	75,62	74,81
Persentase sampah yang dikelola	86,22	98,61	96,98	99,97	99,84

Sumber data: DLH Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, persentase penanganan sampah serta persentase sampah yang ditangani mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Dimana indeks kualitas air di Tahun 2020 mencapai 55,56 menurun di Tahun 2024 menjadi 54,91.

Indeks kualitas udara mencapai 79,91 meningkat menjadi 84,62 di Tahun 2024. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan mencapai 33,55 di Tahun 2020 dan meningkat menjadi 57,31 di Tahun 2024. Urusan bidang lingkungan hidup juga menangani persampahan, dimana persentase penanganan sampah di Tahun 2020 mencapai 77,92% dan menurun di Tahun 2024 menjadi 74,81% pada disemester dua. Sedangkan persentase sampah yang ditangani Tahun 2020 mencapai 86,22% meningkat menjadi 99,84% di Tahun 2024.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang lingkungan hidup merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian IKK Outcome Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	86,22	98,61	96,98	99,97	99,84
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	19,76	43,66	8,06	35,51	41,32

Sumber data: LPPD, 2025

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar warga negara. Pengelolaan data kependudukan yang akurat dan kompreshensif menjadi kunci utama dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang efektif. Berikut ini tabel urusan bidang administrasi dan pencatatan sipil dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.57 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga KK	96,00	98,02	99,81	99,99	99,98
Persentase keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP)	96,11	99,40	96,31	97,93	98,45

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA	22,11	33,20	48,02	53,76	65,00
Persentase penduduk non permanen yang memiliki surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen	96,60	97,56	100	100	-
Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	98,01	96,42	99,98	99,30	98,10
Persentase penduduk yang memiliki akta perkawainan	63,05	61,00	99,78	70,93	71,93
Persentase penduduk yang memiliki akta cerai	81,43	74,65	44,14	76,95	77,49
Persentase penduduk meninggal yang memiliki akta kematian	32,61	98,22	94,43	88,21	100
Peresentase pemanfataan database SIAK untuk kepentingan pembangunan	100	100	100	100	100
Indeks kepuasan masyarakat terhadap DISDUKCAPIL	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2025

Secara keseluruhan, administrasi kependuduan dan pencatatan sipil menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan beberapa capaian yang sangat memuaskan seperti kepemilikan KK, kepemilikan KTP dan kepemilikan akat kematianyang hamper mencapai 100%. Peningkatan kualitas layanan tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang meningkat dari katagori baik menjadi katagori sangat baik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang administrasi dan pencatatan sipil merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.58 Capaian IKK Outcome Urusan Administrasi dan Pencatatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP elektronik	96,11	99,40	96,31	97,95	98,29
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,16	33,20	48,02	53,76	62,73

No	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
3	Kepemilikan akta kelahiran	98,01	96,42	90,98	99,30	96,46
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan pejanjian kerjasama	63,16	53,33	76,19	80,95	80.95

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan hal yang penting dalam pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya. Berikut ini tabel bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.59 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase LPM aktif	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
2	Persentase posyandu aktif	-	-	88,00	88,00	84,00

Sumber data: DP2KBP3A Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan data diatas, persentase LPM aktif mencapai 3,44% di Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Setiap tahun hanya ada 1 LPM kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan. Sementara untuk indikator persentase posyandu aktif tahun 2022 dan 2023 mencapai 88,00% . dan menurun mencapai 84,99% dtahun 2024.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian,Penduduk,KB,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.60 Capaian IKK Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan aspek strategis dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk menjadi indikator kunci yang mencerminkan efektivitas program serta menggambarkan dinamika demografis.

Tabel 2.61 Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,81	1,02	0,96	0,92	1,06

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Penurunan yang signifikan terjadi antara Tahun 2022 dan Tahun 2023, dimana pada tahun 2024 mencapai 1,06. Capaian tersebut lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan keberhasilan implementasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.62 Capaian IKK Outcome Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
TFR (angka kelahiran total)	1,87	1,74	2,06	1,67	1,93

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	70,40	70,50	69,88	69,68	63,11
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,93	11,13	12,70	13,65	12,49

Sumber data: LPPD,2025

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan pemerintahan bidang perhubungan salah satu aspek penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan pengguna, tetapi juga pada produktivitas dan daya saing suatu daerah. Berikut ini tabel yang menggambarkan indikator pada urusan bidang perhubungan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.63 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota (jam)	0,049	0,044	0,03	0,037	0,038
2	Tingkat kinerja pelayanaan kelancaran lalu lintas kota pontianak (nilai)	B	75,90 B	75,00 B	81,25 B	90,91
3	Tingkat kinerja pelayanan pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan (%)	80	80	80	80,56	80,56

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2025

Rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota di Tahun 2024 mencapai 0,038. Dari tingkat kinerja pelayanan kelancaran lalu lintas ada peningkat di Tahun 2020 sampai tahun 2024 ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang jelas dalam manajemen lalu lintas dan infratruktur yang mendukung kelancaran perjalanan. Namun tingkat kinerja pelayanan pelabuhan sungai dan dermaga penyeberangan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 meningkat sedikit mencapai 80% di Tahun 2020 menjadi 80,56% di Tahun 2024.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang perhubungan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.64 Capaian IKK Outcome Urusan Perhubungan

No	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kab/kota	0,805	0,805	0,901	0,901	0,949
2	V/C ratio dijalan kab/kota	0.48	0.422	0.55	0.38	0.60

Sumber data: LPPD,2025

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam era digital saat ini, perangkat daerah untuk dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyampaian informasi serta layanan kepada masyarakat. Bidang komunikasi dan informatika menjadi salah satu pilar penting dalam upaya tersebut. Berikut ini capaian indikator urusan bidang komunikasi dan informatika.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah (OPD) yang terintegrasi ke-E-goverment	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan online yang bisa diakses masyarakat	100	100	100	100	100
Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	100	100	100	100	100
Indeks layanan informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100	100
Indeks kepuasan masyarakat Diskominfo	92,75	86,75	85,66	88,25	88,79

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, 2025

Berdasarkan data diatas, bahwa persentase yang Perangkat Daerah yang terintegrasi ke *E-Government* menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan realisasi mencapai 100% dari tahun 2020 hingga Tahun 2024. Hal ini mununjukkan kinerja perangkat daerah terkait teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.

Persentase pelayanan online yang bisa diakses masyarakat mencapai 100% dalam periode yang sama. Ini mununjukkan kemajuan yang signifikan dalam memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat. Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah telah berhasil menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat.

Indeks layanan informasi dan komunikasi publik tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100% disetiap periode. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi standard yang ditetapkan dalam hal komunikasi dengan masyarakat.

Terakhir indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka yang bervariasi 92,75 di Tahun 2020 dan sedikit menurun di Tahun 2024 mencapai 88,79, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat baik dengan layanan yang diberikan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas Dinas kominikasi dan informatika kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.66 IKK Outcome Urusan Komunikasi dan Informatika

No	IKK Out come	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi perangkat daerah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	-	-	25,81	25,81	75,00
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	46,51	47,73	47,73
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota	100	100	67,30	68,98	96,48

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan perdagangan merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembanguan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini capaian indikator bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	23,61	7,17	4,48	40,00	44,31
2	Persentase koperasi aktif	94,36	94,90	94,72	94,72	94,32

Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak,2025

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dlihat, bahwa pertumbuhan usaha mikro menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 mencapai 23,61% meningkat 44,31% di Tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan pemulihan ekonomi yang lebih baik untuk usaha mikro, baik dari pemerintahan maupun sektor swasta. Disisi lain, persentase koperasi aktif menunjukkan stabilitas yang cukup baik. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi,persentase koperasi aktif tetap berada diangka diatas 94% selama periode tersebut. Hal ini mununjukkan bahwa koperasi aktif berfungsi dengan baik dan mampu mempertahankan ditengah tantangan yang ada.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.68 Capaian IKK Outcome Urusan Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan

N o	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi yang berkualitas	64,00	73,00	72,55	71,15	83,08
2	Persentase usaha mikro yang jadi wirausaha	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD,2025

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan aspek krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas pelayanan terpadu dalam bidang penanaman modal menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik minat investor. Indeks pelayanan terpadu menjadi tolok ukur penting yang menggambarkan pelayanan

yang diberikan kepda investor. Berikut ini tabel urusan penanaman modal tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP	88,43	86,09	87,20	97,57	99,28

Sumber data: DPMPTSP Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa untuk indikator urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dimana Tahun 2020 hinnga Tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari nilai 88,43 di Tahun 2020 meningkat menjadi 99,28 di Tahun 2024. Dimana jika di lihat Tahun 2024 realisasi PMA Rp. 208.587.739.418 dan realisasi PMDN Rp.1.458.334.921.606 ini menunjukkan nilai investasi PMDN lebih tinggi dari nilai investasi PMA. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan semakin baik dan ada kepuasan dari masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang penanaman modal merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.70 Capaian IKK Outcome Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di kab/kota	4,04	159	142,36	-26,60	97,86

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Dalam mencapai tujuan dari urusan bidang kepemudaan dan olahraga perlu dilakukan pengukuran yang jelas terhadap peningkatan prestasi pemuda, prestasi olahraga baik itu dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional, berikut ini tabel dari urusan bidang kepemudaan dan olahraga Tahun 2020 sampai Tahun 2024:

Tabel 2.71 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional	2,62	2,65	2,57	2,69	2,85
Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional	10,19	12,27	13,95	16,75	10,25
Persentase peningkatan pemuda dan olahraga yang berprestasi di tingkat kota/prov/nasional	7,715	8,785	8,26	11,07	9,85
Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat nasional (%)	N/A	N/A	N/A	42,85	45,71

Sumber data: Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa indikator urusan kepemudaan dan olahraga dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan yang menunjukkan semakin baik. Peningkatan ini dapat dikatakan ada upaya dalam peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan kepemudaan dan olahraga merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas kepemudaan,olahraga dan pariwisata kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.72 IKK Outcome Urusan Kepemudaan dan Olahraga

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	17,43	3,54	0,94	2,25	2,30
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.	38,97	34,25	35,14	34,22	32,25
Peningkatan prestassi olahraga (Medali)	33	22	53	39	43

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan akurasi data statistic kota Pontianak telah berupaya untuk meningkatkan integrasi data sektoral dengan portal data, berikut ini tabel capaian indikator Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.73 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal data kota pontianak	100	100	100	100	100
Persentase tingkat terselenggaranya kegiatan statistik kota pontianak	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa dari indikator diatas Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa pemeritah kota Pontianak telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik serta meningkatkan terselenggaranya kegiatan statistik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan statistik merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.74 Capaian IKK Outcome Urusan Statistik Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD,2025

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang persandian merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024

Tabel 2.75 Capaian IKK Outcome Urusan Persandian Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	80,92	96,50	95,66	95,19	95,66

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu aspek dalam menjaga warisan budaya dan sejarah disuatu daerah. Tabel berikut menunjukkan tren persentase cagar budaya yang dilestarikan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.76 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55	55	60	60	70,50

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami tren yang posistif. Peningkatan pada Tahun 2024 mencapai 70,50% menunjukkan bahwa ada upaya pelestarian yang semakin baik.

Beberapa data pengelolaan warisan budaya, pelestarian bahasa daerah dan program strategis penguatan nilai budaya lokal Kota Pontianak, dapat dilihat pada data-data dibawah ini:

1. Data objek pemajuan kebudayaan Kota Pontianak

Tabel 2.77 Data objek pemajuan kebudayaan Kota Pontianak

NO.	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	JUMLAH
1.	Manuskrip	33
2.	Tradisi Lisan	60
3.	Adat Istiadat	58
4.	Ritus	32
5.	Pengetahuan Tradisional	128
6.	Teknologi Tradisional	59
7	Seni	68
8.	Bahasa	8

NO.	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	JUMLAH
9.	Permainan Rakyat	24
10.	Olahraga Tradisional	10
11.	Cagar Budaya	82
	J u m l a h	**562**

Sumber: DISDIKBUD Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, telah melakukan pendataan terhadap objek yang berpotensi sebagai Cagar Budaya peringkat Kota Pontianak. Data-data tersebut kemudian di susun sesuai dengan tingkat urgen, untuk di usulkan sebagai cagar budaya peringkat Kota.
Berdasarkan catatan pendataan yang dilakukan pada tahun 2024, ada 548 kekayaan budaya takbenda Kota Pontianak, jika ditambah dengan jumlah kekayaan budaya bendawi/tangible sebanyak 82, total keseluruhan kekayaan tanggibel dan intangible berjumal 562 (rincian objek kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut pada tabel di atas).

Data Warisan Budaya Takbenda Kota Pontianak (Intangible) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.78 Data Warisan Budaya Takbenda Kota Pontianak (Intangible)

No.	NAMA WARISAN BUDAYA TAK BENDA	PENETAPAN	KETERANGAN
1.	Meriam Karbit	Nomor 63385/MPK.E/KB/2016 Jakarta, 27 Oktober 2016	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2.	Arakan Pengantin Kota Pontianak	Nomor 60104/MPK.E/KB/2017 Jakarta, 4 Oktober 2017	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3.	Saprahan Melayu Kota Pontianak	Nomor 60105/MPK.E/KB/2017 Jakarta, 4 Oktober 2017	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4.	Tenun Corak Insang Kota Pontianak	Nomor 60103/MPK.E/KB/2017 Jakarta, 4 Oktober 2017	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5.	Pacri Nenas Pontianak	Nomor 65716/MPK.E/KB/2018 Jakarta, 10 Oktober 2018	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No.	NAMA WARISAN BUDAYA TAK BENDA	PENETAPAN	KETERANGAN
6.	Sayo' Keladi Pontianak	Nomor 65716/MPK.E/KB/2018 Jakarta, 10 Oktober 2018	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
7.	Ikan Asam Pedas Pontianak	Nomor 103623/MPK.E/KB/2019 Jakarta, 8 Oktober 2019	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
8.	Bahasa Melayu Pontianak	Nomor 129257/MPK.F/KB/2020 Jakarta, Desember 2020	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
9.	Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak	Nomor 3040/F4/KB.09.06/2022 Jakarta, 21 Oktober 2022	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
10.	Jepin Tembung Pendek Pontianak	Nomor 3040/F4/KB.09.06/2022 Jakarta, 21 Oktober 2022	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
11.	Arsitektur Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak	Nomor 2329/Dit.PK/Sertifikat/2023 Jakarta, 25 Oktober 2023	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
12.	Sulam Kalengkang Pontianak	Nomor 2328/Dit.PK/Sertifikat/2023 Jakarta, 25 Oktober 2023	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Sumber: DISDIKBUD Kota Pontianak

2. Data Cagar Budaya Kota Pontianak (Tangible)

Tabel 2.79 Data Cagar Budaya Kota Pontianak (Tangible)

No.	Uraian	Penetapan	Surat Keputusan		Ket
1.	Istana Kadriah Kesultanan Pontianak	3 Oktober 2019	1	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 378/M/2019 tentang Kawasan Cagar Budaya Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dan Masjid Jami Pontianak sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional	Terawat
		30 April 2021	2	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 504/DISDIKBUD/TAHUN 2021 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Pontianak	
2.	Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie	3 Oktober 2019	1	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 378/M/2019 tentang Kawasan Cagar Budya Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dan Masjid Jami Pontianak sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional	Terawat
		30 April 2021	2	Keputusan Walikota Pontianak Nomor 504/DISDIKBUD/TAHUN	

No.	Uraian	Penetapan	Surat Keputusan		Ket
				2021 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Pontianak	
3.	Makam Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie	14 Juli 2021	1	Keputusan Wali Kota Pontianak 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 tentang Cagar Budaya Kota Pontianak	Terawat
4.	Tugu Khatulistiwa	17 Desember 2024	1	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 936/DIKBUD/2024 tentang Pemeringkatan Tugu Khatulistiwa, Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong (Rumah Sakit Perawatan Djiwa Pontianak), Keraton Kerajaan Tayan (Istana Pakunegara Tayan), Keraton Kerajaan Landak (Istana Ismahayana Landak), Keraton Sanggau (Istana Surya Negara Sanggau, Keraton Sambas (Masjid Agung Jami' Sulthan Muhammad Tsafiuddin) Sebagai Benda dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terawat
		14 Juli 2021	2	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 tentang Cagar Budaya Kota Pontianak	
5.	Bangunan Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak	14 Juli 2021	1	Keputusan wali Kota Pontianak Nomor 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 tentang Cagar Budaya Kota Pontianak	Terawat/ Rusak Sedang
6.	Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Suster Pontianak	14 Juli 2021	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 tentang Cagar Budaya Kota Pontianak	Terawat
7.	Kantor Pos Divisi Ekspedisi Pontianak	3 Januari 2022	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor: 28/DISDIKBUD/TAHUN 2022 tentang Penetapan dan Pemeringkatan Kantor Pos Divisi Ekspedisi Pontianak dan Surau Haji Naim (Baitannur) sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat/ Rusak Sedang
8.	Surau Haji Naim (Baitannur)	3 Januari 2022	1	Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 28/DISDIKBUD/TAHUN 2022 tentang penetapan dan Pemeringkatan Kantor Pos Divisi Ekspedisi Pontianak dan Surau Haji Naim (Baitannur) sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat
9.	Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong (Rumah Perawatan Sakit Djiwa Pontianak)	17 Desember 2024	1	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 936/DIKBUD/2024 tentang Pemeringkatan Tugu Khatulistiwa, Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong (Rumah Sakit Perawatan Djiwa Pontianak), Keraton Kerajaan Tayan (Istana Pakunegara Tayan), Keraton Kerajaan Landak (Istana Ismahayana Landak), Keraton Sanggau (Istana	Terawat

No.	Uraian	Penetapan	Surat Keputusan		Ket
				Surya Negara Sanggau, Keraton Sambas (Masjid Agung Jami' Sulthan Muhammad Tsafiuddin) Sebagai Benda dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
		23 Agustus 2023	2	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 827/DISDIKBUD/TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pemeringkatan Gedung Yayasan Kuning Agung dan Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong (Rumah Perawatan Sakit Djiwa Pontianak) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota	
10.	Bangunan Yayasan Kuning Agung	23 Agustus 2023	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 827/DISDIKBUD/TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pemeringkatan Gedung Yayasan Kuning Agung dan Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong (Rumah Perawatan Sakit Djiwa Pontianak) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat
11.	Nekara (Nekara I Selindung)	2 September 2024	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 661/DISDIKBUD/TAHUN 2024 tentang Penetapan Nekara (Nekara 1 Selindung), Nekara (Nekara 2 Selindung), Cap Kesultanan Pontianak (Cap Pangeran Laksamana Sjarief Mohammd Bin Haroen Alkadri) dan pakaian Kebesaran Sultan Pontianak (Pakaian Resmi Sultan Syarif Muhammad Alkadrie) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat
12.	Nekara (Nekara 2 Selindung)	2 September 2024	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 661/DISDIKBUD/TAHUN 2024 tentang Penetapan Nekara (Nekara 1 Selindung), Nekara (Nekara 2 Selindung), Cap Kesultanan Pontianak (Cap Pangeran Laksamana Sjarief Mohammd Bin Haroen Alkadri) dan pakaian Kebesaran Sultan Pontianak (Pakaian Resmi Sultan Syarif Muhammad Alkadrie) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat
13.	Cap Kesultanan Pontianak (Cap Pangeran Laksamana Sjarief Mohammad Bin Haroen Alkadri)	2 September 2024	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 661/DISDIKBUD/TAHUN 2024 tentang Penetapan Nekara (Nekara 1 Selindung), Nekara (Nekara 2 Selindung), Cap Kesultanan Pontianak (Cap Pangeran Laksamana Sjarief Mohammd Bin Haroen Alkadri) dan pakaian Kebesaran Sultan Pontianak (Pakaian Resmi Sultan Syarif Muhammad Alkadrie) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat

No.	Uraian	Penetapan	Surat Keputusan		Ket
14.	Pakaian Kebesaran Sultan Pontianak (Pakaian Kebesaran Sultan Pontianak Pakaian Resmi Sultan Syarif Muhammad Alkadrie)	2 September 2024	1	Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 661/DISDIKBUD/TAHUN 2024 tentang Penetapan Nekara (Nekara 1 Selindung), Nekara (Nekara 2 Selindung), Cap Kesultanan Pontianak (Cap Pangeran Laksamana Sjarief Mohammd Bin Haroen Alkadri) dan pakaian Kebesaran Sultan Pontianak (Pakaian Resmi Sultan Syarif Muhammad Alkadrie) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota	Terawat

Sumber: DISDIKBUD Kota Pontianak

3. Data Kekayaan Budaya Kota Pontianak Yang Telah Terdaftar Sebagai HKI Kota Pontianak di Kanwil Kemenhum Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.80 Data Kekayaan Budaya Kota Pontianak Yang Telah Terdaftar Sebagai HKI

NO	NAMA KEKAYAAN INTELEKTUAL	KOMUNAL/ NON KOMUNAL	TANGGAL PENCATATAN	JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	JUMLAH
1.	Meriam Karbit Pontianak	Komunal	Nomor EBT612025000121 Tanggal 16 April 2025	Ekspresi Budaya Tradisional	1
2.	Tenun Corak Insang Kota Pontianak	Komunal	Nomor EBT61202200272 Tanggal 2 Oktober 2022	Seni Rupa	1
3.	Adat Saprahan Kota Pontianak	Komunal	Nomor EBT612025000141 Tanggal 2 Mei 2025	Ekspresi Budaya Tradisional	1
4.	Arakan Pengantin Kota Pontianak	Komunal	Nomor EBT612025000142 Tanggal 2 Mei 2025	Ekspresi Budaya Tradisional	1
5.	Rekaman Pergelaran Tari Masal-Pontianak Bejepin 253	Non Komunal	Nomor 000889409 Tanggal 7 November 2024	Karya Rekaman Video	1
6.	Video Promosi Jadwal Tampil Tari Marwah Sulam Kalengkang dalam Kegiatan Indonesia International Arts Festival	Non Komunal	Nomor 000889409 Tanggal 5 Mei 2025	Film Iklan	1
7.	Rekaman Penampilan Tari Marwah Sulam Kalengkang dalam Kegiatan Indonesia Internasional Arts Festifal	Non Komunal	Nomor 000889442 Tanggal 13 Mei 2025	Karya Rekaman Video	1
	JUMLAH TOTAL				7

Sumber: DISDIKBUD Kota Pontianak

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang kebudayaan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dinas pendidikan dan kebudayaan kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.81 Capaian IKK Outcome Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarikannya cagar budaya	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025, *angka sementara

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan bidang perpustakaan dengan indikator persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat. Dan indikator ini digunakan untuk menilai seberapa banyak masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan tempat baca dalam periode tertentu. Berikut ini tabel dengan urusan perpustakaan dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.82 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca	39,49	69,76	72,49	92,41	98,00

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak,2025

Dari analisa diatas dapat dikatakan bahwa, terdapat peningkatan yang signifikan dalam persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca dari Tahun 2020 mencapai 39,49% menjadi 98% di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya membaca dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang perpustakaan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Berikut ini tabek IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024

Tabel 2.83 Capaian IKK Outcome Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	39,49	69,76	24,90	71,46	69,90

Sumber data: LPPD,2025

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan pemerintahan bidang kearsipan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengeloaan kearsipan disuatu instansi. Berikut tabel bidang kearsipan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.84 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kearsipan	70,43	46,59	49,96	73,33	84,78

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas dapat lihat, bahwa indeks kearsipan dari Tahun 2020 mencapai 70,43% meningkat di Tahun 2024 mencapai 84,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan arsip telah ada peningkatan dalam pengelolaan arsip dan juga peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang kearsipan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Berikut ini tabel IKK outcome dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.85 Capaian IKK Outcome Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,alat bukti yang sah dan pertangungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	84,91	72,85	74,65	88,25	90,74
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintaha pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar penting dari sisi perekonomian. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencerminkan potensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut capaian indikator urusan kelautan dan perikanan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Tabel 2.86 Capaian Indikator Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1,40	1,35	1,24	1,13	1,06

Sumber data: BPS Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, terjadi penurunan kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB dari Tahun 2020 mencapai 1,40% menjadi 1,06% di Tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor iklim dan faktor kebijakan pemerintah yang berdampak pada pengelolaan sumber daya perikanan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan merupakan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.87 Capaian IKK Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data one data KKP)	864,50	-	888,69 ton/219 ton	929,44 ton/222 ton	795,19 ton/ 248,97 ton

Sumber data: LPPD Kota Pontianak,2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Pontianak pada saat ini telah cukup mamadai antara lain tingkat jumlah hotel, restoran atau rumah makan serta cafe-cafe yang ada dilingkungan Kota Pontianak. Berikut ini tabel realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2.88 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,98	3,01	3,10	3,17	3,19

Sumber data: BPS Kota Pontianak, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan pariwisata merupakan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2.89 Capaian IKK Outcome Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	62,28	12,36	8,88	108,91	21,27
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	39,84	20,82	12,77	18,52	18,52
Tingkat hunian akomodasi	32,19	36,65	42,88	51,54	56,73
Kontribusi sektor peariwisata terhadap PAD	16,97	18,88	37,00	34,99	23,72

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu untuk urusan pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut tabel kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Tabel 2.90 Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1,40	1,35	1,24	1,13	1,06

Sumber data: BPS Kota Pontianak, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan Pertanian merupakan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.91 Capaian IKK Outcome Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar pertahun	368,45	364,24	410,00	344,01	286
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	100	100	-80,72	-74,29

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat secara konsisten, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berikut ini tabel capaian indikator realisasi Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2.92 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,71	16,66	17,03	17,92	18,84

Sumber data: BPS Kota Pontianak,2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat dari Tahun 2020 mencapai 15,71% dan 18,84% di Tahun 2024. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai seberapa besar peran sektor perdagangan dalam perekonomian disuatu daerah atau wilayah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan perdagangan merupakan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Tabel 2.93 Capaian IKK Outcome Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuia dengan ketentuan (IUPP.SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	99,93	100	100	100	100
Persentase kinerja realisasi pupuk	86,69	87,53	100	100	73,12
Persentase alat-alat ukur, takat,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100	100	100

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran sektor industri sangat penting dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berikut ini table kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Tabel 2.94 Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	15,71	15,66	17,03	15,69	15,50

Sumber data: BPS Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2020 mencapai 15,71% dan Tahun 2024 mencapai 15,50% dari total PDRB. Semakin tinggi kontribusi sektor industri, maka semakin besar pula peran sektor industri dalam perekonomian.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan perindustrian merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Berikut ini table IKK outcome dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Tabel 2.95 Capaian IKK Outcome Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	33,54	34,67	80,82	61,11	23,39
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarjan oleh instannsi terkait	92,00	100	77,08	57,53	20,50
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan indudstri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan jumlah izin yang dikeluarkkan	92,00	100	77,08	57,53	20,50
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	85,00	85,00	85,00	85,00	125

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan dan program. Berikut ini tabel yang menjelasakan realisasi IKM dan LPPD dari Tahun 2020 hingg Tahun 2024.

Tabel 2.96 Capaian Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKM	88,534	88,651	88,687	89,847	90,197
Nilai LPPD	-	3,2700	3,4187	3,1046	-

Sumber data: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan indeks kepuasan masyarakat meningkat secara bertahap dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, sedangkan nilai LPPD kota pontianak Tahun 2021 mencapai 3,2700, menurun jika dibandingkan ditahun 2024 mencapai 3,1046.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.97 Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ketahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,04	0	0	0	0
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,20	1,53	0,43	0,77	0,77
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	59,42	58,30	60,89	60,18	60,30

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

2. Sekretariat DPRD

Dalam rangka meingkatkan kinerja pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat, Sekretariat DPRD melakukan pengukuran IKM yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan. Berikut table yang menjelaskan realisasi IKM dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2.98 Capaian Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKM	N/A	80,89	91,02	93,42	93,49

Sumber data: Sekretariat DPRD Kota Pontianak, 2025

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari Tahun 2021 mencapai 80,89 meningkat di Tahun 2024 mencapai 93,49.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi daerah Kota Pontianak dan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah vital, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan berawal dari perencanaan yang baik.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, demokratik, partisipatif, politis dan *bottom-top down* dilakukan secara simultan sehingga keterlibatan *stakeholder*, legislatif dan masyarakat merupakan keharusan. Urusan perencanaan ini dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 2.99 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase nilai perencanaan kinerja	23,85	23,90	23,06	23,16	22,51

Sumber data: Bapperida Kota Pontianak, 2025

2. Keuangan

Dalam urusan untuk mewujudkan pelayanan administrasi keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu diukur melalui indikator opini BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian WTP dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah. Dari tabel ini memperlihatkan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 mencapai WTP, dimana target RPD 2024-2026 mempunyai target WTP.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan Penunjang merupakan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.100 Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	16,67	50,00	100	88,89	100
Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ini dapat dilihat dari pencapaian indikator indeks profesionalisme ASN dimana suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalisme pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Mulai Tahun 2024 indikator ini akan berubah menjadi indikator sistem merit yang akan digunakan untuk menilai kinerja dan kemampuan seseorang dalam suatu organisasi berdasarkan prinsip meritokrasi. Berikut ini tabel yang memberikan informasi sebagai berikut

Tabel 2.101 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesional ASN	49,81	48,60	49,90	63,44	78,00
Indeks Sistem Merit	-	0,75	0,77	0,80	0,80

Sumber data: BKPSDM Kota Pontianak, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja urusan Penunjang yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Berikut tabel IKK outcome Tahun 2020 hingga Tahun 2024:

Tabel 2.102 Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	268,29	293,44	59,79	73,80	77,42

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,69	6,71	14,73	17,35	21,87
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	49,84	55,82	29,19

Sumber data: LPPD Kota Pontianak, 2025

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak, malalui indikator persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam urusan kebijakan dengan pencapaian sebagaiaman tabel dibawah ini:

Tabel 2.103 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam urusan kebijakan	75,00	60,00	84,62	84,62	100

Sumber data: Bapperida Kota Pontianak, 2025

5. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Urusan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berikut ini tabel yang menjelaskan capaian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.104 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	67,72	67,90	68,98	77,74	75,89

Sumber data: Inpektorat, 2025

Dari realisasi ini indeks reformasi birokrasi selalu terjadi peningkatan dimana Tahun 2023 mencapai predikat BB sangat baik. Dan di Tahun 2024 mencapai 75,89 dengan katagori baik.

Capaian kinerja urusan pengawasan merupakan gambaran dari keberhasilan yang menjadi kewenangan inspektorat. Berikut ini tabel indikator kinerja kunci outcome:

Tabel 2.105 Capaian IKK Outcome Urusan Penunjang Pengawasan

IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	3,0375	3,0375	3,298	3,354	3,384
Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber data: LPPD 2025

6. Unsur Kewilayahan

Pelayanan urusan kewilayahan diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) disetiap wilayaah Kota Pontianak, dengan standar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat. Berikut tabel capaian realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) disetiap kecamatan:

Tabel 2.106 Capaian Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Unsur Kewilayahan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pontianak Tenggara	91,07	92,04	92,10	92,18	91,69
Pontianak Kota	87,48	88,21	90,13	90,43	92,03
Pontianak Timur	80,39	89,78	93,60	94,15	94,15
Pontianak Utara	88,53	88,61	82,82	88,03	88,25
Pontianak Barat	83,20	87,50	88,20	91,25	89,00
Pontianak Selatan	85,75	85,80	85,85	85,90	86,00

Sumber data: Kecamatan, 2025

Untuk capaian realisasi IKM di masing-masing kecamatan tahun 2024 semua kecamatan berkatagori sangat baik.

7. Unsur Pemerintahan Umum

Tingkat kriminalitas dapat menggambarkan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat, sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan serius. Berikut ini tabel angka kriminalitas dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Tabel 2.107 Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024

Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024
Dilaporkan (kasus)	1.142	1.113	1.079	1.295	1.344
Diselesaikan (kasus)	1.058	1.077	1.007	862	879

Sumber data:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, bahwa meningkatnya angka kriminalitas yang dilaporkan dari Tahun 2020 jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan berjumlah 1142, meningkat di Tahun 2024 berjumlah 1344. Sedangkan angka kriminalitas yang diselesaikan dari Tahun 2020 berjumlah 1058 dan menurun di Tahun 2020 berjumlah 879.

2.1.5 BUMD yang Berkontribusi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20214 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemda. Oleh karena itu, Pemda harus mengoptimalkan peran BUMD.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengeturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih rigid mengenai tata Kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usahan Milik Daerah (PP BUMD).

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Saat ini ada 2 (dua) BUMD di bawah naungan pemerintah Kota Pontianak, yaitu Perusahanan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa (PDAM) dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak.

A. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa resmi didirikan pada Tahun 1975 melalui Perda No. 03 Tahun 1975. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mendapatkan sumber air untuk didistribusikan ke setiap rumah yang ada di Kota Pontianak dengan menjadikan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadi sumber utamanya dan dengan cadangan air dari waduk dengan luas waduk kurang lebih dua hektar dengan tampungan 54.000 meter kubik.

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memiliki aset berupa pipa-pipa yang tertanam disekeliling Kota Pontianak sebagai fasilitas distribusi air bersih kerumah-rumah penduduk Kota Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah memiliki 7 (tujuh) instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang tersebar dibeberapa titik di Kota Pontianak. Lokasi titik IPAM ini berada disekitaran Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak dan Kapuas Besar. Hal ini menandakan bahwa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menjadikan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak menjadi bahan baku utama dan sumber persediaan air untuk disebarkan ke tiap rumah yang ada di Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Khatulis Kota Pontianak turut memberikan kontribusi pada peningkatan PAD Kota Pontianak dalam bentuk dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak. Penyertaan modal dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Tabel 2.108 Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PENYERTAAN MODAL PEMKOT	253.475.192.026,00	260.975.192.026,00	294.641.575.086.00	324.884.947.535.00	32.884.947.535,00
ASSET	386.815.452.324,00	392.933.241.523,00	433.129.840.946.00	480.136.043.472.00	488.961.190.492,00
PENDAPATAN					
Pendapatan Utama	184.788.843.100,00	196.632.507.124,00	222.430.849.116.00	246.857.426.643.00	249.750.966.152,00
Pendapatan Lain-lain	2.227.203.696,00	1.290.482.415,00			1.171.003.285,00
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	6.145.313.405,00	13.878.542.334,00	23.023.729.495.00	32.245.089.993.00	32.665.700.022,00
BAGIAN LABA UNTUK DAERAH	3.379.922373,00	10.200.728.615,49	13.000.000.00	16.690.219.806.00	14.372.908.009,68
SETOR PAD	9.715.511.927,00	3.677.970.073,00	10.200.728.615.00	14.200.000.000.00	16.690.219.806,00
CAKUPAN LAYANAN					
Cakupan Layanan_KEPMEN DAGRI	83,35%	87,80%	86.28%	89.80%	90,66%
Cakup Layanan _BPP SPAM	83,35%	87,80%	89.14%	89.80%	93,05%

Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

B. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak

Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak adalah perusahaan yang dimilik oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang bergerak dibidang jasa keuangan khususnya di Bidang perbankan. Perumda BPR Khatulistiwa didirikan pada tanggal 18 Desember Tahun 1963 dengan landasan Perda Nomor 12 Tahun 1963 yang hingga saat ini sudah beberapa kali mengalami penyempurnaan dengan dilakukannya perubahan Perda.

Dalam menjalankam operasionalnya, Perumda BPR Khatuistiwa beralamatkan di Jalan Zainuddin No. 10 Kelurahan Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat 78111, Telp (0561) 7324514. Dalam menjalankan usahanya Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak memiliki perizinan berdasarkan Nomor Pokok Wajib pajak No. 01.110.640.8.701.000 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktoral Pajak Kantor Wilayah DJP Kalbar Kantor Pelayanan Pajak Pontianak.

Usaha yang dijalankan oleh Perumda BPR Khatulistiwa adalah sebagai Berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah.
3. Melakukan kerjasama antar lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
4. Menjalankan usaha-usaha perbangkan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank perkreditan rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan didirikannya Perusahaan daerah ini adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Tabel 2.109 Perkembangan Kondisi Keuangan dan Kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Asset	63.761.825.032,00	89.005.851.552,00	105.901.468.948.00	109.493.898.012.00	114.305.555.986
Total Penyertaan Modal Pemkot	20.497.301.247,00	35.987.000.000,00	35.987.000.000.00	36.987.000.000.00	39.487.000.000
Pendapatan Operasional	9.636.212.063,00	11.053.303.734,00	13.313.388.250.00	13.910.477.218.00	10.998.348.150
Pendapatan Non Operasional	14.471.466,00	25.360.482,00	8.000.000.00	5.000.000.00	29.041.670
Laba/Rugi Tahun Berjalan	1.698.754.152,00	1.801.274.762,00	2.426.684.825.00	2.570.442.971.00	1.008.910.850
Bagian Laba Untuk Daerah	385.122.570,62	1.408.776.991,17	1.801.813.483.00	1.908.553.906.00	0
Setoran PAD	780.850.943,00	385.122.571,00	1.408.776.991.00	1.801.813.483.00	1.908.553.906

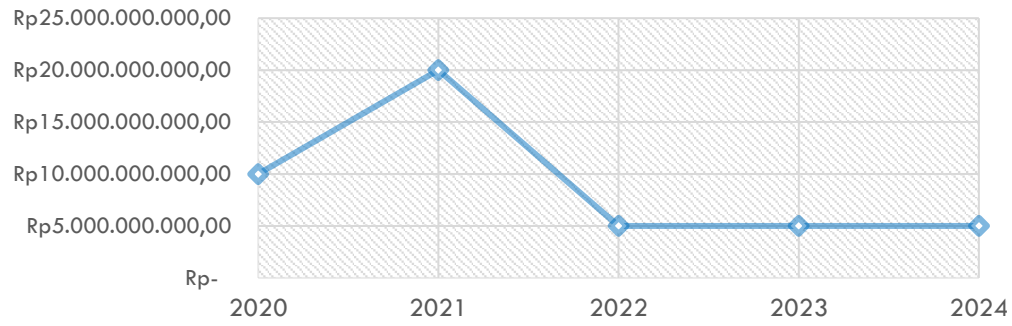
Sumber : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Selain kedua BUMD diatas, Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki saham pada BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yakni pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat. BPD Kalbar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992.

Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutanya berdasakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseorangan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar.

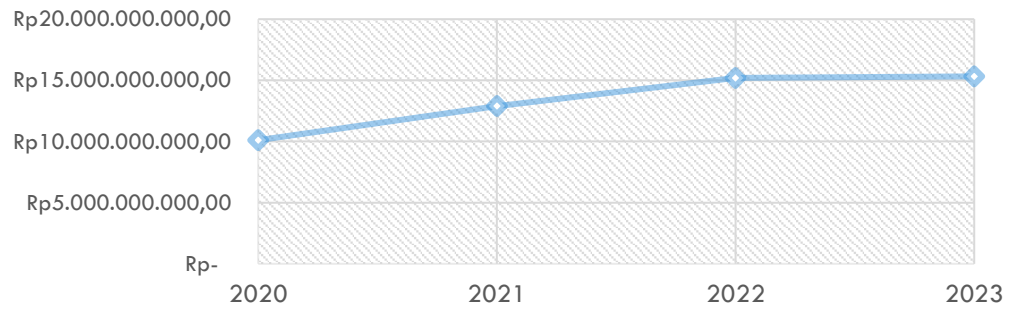
Dalam rangka memberikan dukungan kepada Bank Kalbar untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD *Regional Champion*, Pemerintah Kota Pontianak turut memberikan penyertaan modal. Dari hasil penyertaan modal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan dividen yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Grafik 2.8 Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Bank Kalbar Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Tahunan Bank Kalbar Tahun 2025

Grafik 2.9 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari Dividen Bank KalbarTahun 2020-2023



Sumber : Laporan Tahunan Bank Kalbar Tahun 2025

2.1.6 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)

Upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat mash banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan Kesepakatan Bersama (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Daerah lain.

Adapun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rekap Data Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1.	Kota Pontianak	Kota Surakarta Prov Jawa Tengah	Wajib	Keputusan Wali Kota Ponianak Nomor : 140/PEM/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pontianak	2 Januari 2018	masih berlaku	Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan	1.1/SP-III/2024	5 Maret 2024	2 Tahun	Pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan	Nomor : 1.1/SP-III/2024	5 Maret 2024	2 Tahun	Pariwisata	Masih berlaku	Meningkatnya pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan	Para pihak
2	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	Wajib	Keputusan Wali Kota Ponianak Nomor : 140/PEM/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pontianak	2 Januari 2018	masih berlaku	Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Nomor :30/SP-XII/2020	15 Desember 2020	5 Tahun	PKS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemrintah Kota Pontianak tentang Pelayanan Rawat Inap Pasien dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari Dinas Sosial Kota pontianak	Nomor : 415.4/01/SP-I/2024	16 Januari 2024	3 Tahun	Sosial	Masih berlaku	Meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanankesehatan jiwa kepada pasien dengan gangguan jiwa	Para pihak

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Tabel 2.111 Rekap Data Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG									URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KESBER		JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	Kota Pontianak	Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak	Keputusan Wali Kota Ponianak Nomor : 140/PEM/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pontianak	2 Januari 2018	masih berlaku	Pengelolaan Keuangan Daerah	Nomor :9.1/SP-II/2024	30 Juli 2024	3 Tahun	1.	PKS antara Pemrintah Kota Pontianak dengan PT. Bank Kalbar tentang Penyimpanan Uang Daerah	415.4/01/SP-1/2025	2 Januari 2025	1 Tahun	Urusan Pemerintahan Wajib	Masih Berjalan		Para Pihak
2	Kota Pontianak	Universitas Tanjungpura	Keputusan Wali Kota Ponianak Nomor : 140/PEM/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pontianak	2 Januari 2018	masih berlaku	Pengembangan dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi	Nomor :9.1/SP-III/2024	12 Maret 2021	3 Tahun	1	PKS antara Pemkot dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjugpura tentang pemanfaatan hasil reset dan inovasi	415.4/02/SP-II/2024	27 Februari 2024	3 Tahun	Urusan Pemerintahan Wajib	Masih Berjalan		Para Pihak
										2	PKS antara Pemkot dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura	415.4/02/SP-II/2024	27 Februari 2024	3 Tahun	Urusan Pemerintahan Wajib	Masih Berjalan		Para Pihak

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG									URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KESBER		JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS				
											Pontianak tentang pemanfaatan hasil reset dan inovasi							
										3	PKS Pemkot dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura tentang Pemanfaatan Hasil Riset dan inovasi bidang ekonomi dan bisnis	415.4/4/SP-II/2024	27 Februari 2024	3 Tahun	Urusan Pemerintahan Wajib	Masih Berjalan		Para Pihak
										4	PKS Pemkot dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura tentang pemanfaatan hasil reset dan inovasi	415.4/5/SP-II/2024	27 Februari 2024	3 Tahun	Urusan Pemerintahan Wajib	Masih Berjalan		Para Pihak

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

Tabel 2.112 Rekap Data Sinergi

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Pontianak	Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi ketua rukun tetangga , ketua rukun warga , kader posyandu, pekerja sosial keagamaan menerima insentif dan relawan TIM reaksi cepat bencana di Kota Pontianak	3/SP-IV/2024	01 April 2024	1 Tahun	Tenaga Kerja	Masa Berlaku		Para Pihak
3	Direktorat Jendral Cipta Karya	Pembangunan sistem Penyediaan air minum melalui kegiatan National Urban Water Supply Project	4/SP-IV/2024	17 April 2024	1 Tahun	Energi dan Sumber daya mineral	Masih berjalan		Para Pihak
4	Komado distik Militer 1027	Pelaksanaan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kota Pontianak	5/SP-V2024	2 Mei 2024	1 Tahun	Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih berjalan		Para Pihak
5	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distiribusi Kalbar Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ptk	Kemitraan Strategis pelayanan ketenaga listrikan di Wilayah Kota Pontianak	6/SP-V/2024	30 Mei 2024	1 Tahun	Perhubungan	Masih berjalan		Para Pihak
6	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	8/SP-VII/2024	24 Juli 2024	3 Tahun	Tenaga Kerja	Masih berjalan		Para Pihak

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak, 2025

a. Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah telah mencapai hasil yang signifikan. Berbagai program kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui proyek-proyek inovatif yang melibatkan sektor publik dan swasta.

Hasil ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Capaian Kerja Sama Daerah Kota Pontianak telah melaksanakan kerjasama Daerah sebanyak 3 buah, dengan rincian sebanyak 4 buah Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, 44 buah Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan 8 buah Sinergi Perencanaan dan Pembangunan Pusat dan Daerah.

b. Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan signifikan.

Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Mengatasi ini diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Belum adanya kajian yang mengkaji tentang pengembangan potensi kerjasama antar daerah. Sehingga sebelum merumuskan objek yang akan dikerjasamakan, tiap daerah akan mengerti tentang peran, risiko dan dampak dari pelaksanaan kerjasama tersebut;
2. Lemahnya koordinasi antar level pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Koordinasi akan lebih sulit dilakukan bila semangat egosentris dihinggapi oleh Pemerintah Daerah dengan dalih otonomi daerah.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerja sama daerah Kota Pontianak.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan

keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Adapun pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah guna membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Adapun kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pedapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah dianggap baik jika pendapatan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya khususnya dari sisi pendapatan asli daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.113 Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No		Uraian	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN		**1.547.166.420.990**	**1.573.721.427.451**	**1.704.897.506.231**	**1.816.677.082.052**	**1.937.581.220.070**
	A.	**Pendapatan Asli Daerah**	**403.176.698.953**	**413.401.936.270**	**537.797.747.856**	**574.760.971.716**	**593.775.839.763**
		Pajak Daerah	258.665.538.687	273.921.641.197	349.602.716.908	384.191.012.780	384.846.153.659
		Retribusi Daerah	40.077.915.923	36.789.417.802	44.571.099.429	48.713.318.777	52.027.912.565
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	30.040.837.513	33.920.975.184
		Lain-lain PAD yang Sah	83.696.398.770	88.520.653.925	119.121.124.588	111.815.802.646	122.980.798.355
	B.	**Pendapatan Transfer**	**1.062.590.864.860**	**1.090.807.268.181**	**1.159.599.758.375**	**1.234.416.110.336**	**1.343.805.380.307**
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772	1.135.872.093.748
		- Dana Bagi Hasil Pajak	43.287.511.372	56.546.961.563	52.912.047.820	50.259.473.133	60.713.950.000
		- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.940.963.692	27.014.995.944	26.855.429.193	26.119.422.762	25.568.390.000
		- Dana Alokasi Umum	658.270.110.000	646.760.997.000	641.217.989.619	710.591.805.000	808.808.396.021
		- Dana Alokasi Khusus	159.192.193.382	150.524.807.681	224.679.808.669	203.760.988.877	240.781.357.727
		- Dana Penyesuaian	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	12.840.204.000	
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.272.117.414	178.052.626.993	180.277.804.074	230.844.216.564	207.933.286.559
		- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	230.011.253.607	207.633.286.559
		- Bantuan Keuangan	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	832.962.957	300.000.000
	C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**81.398.857.177**	**69.512.223.000**	**7.500.000.000**	**7.500.000.000**	**-**
		Pendapatan Hibah	81.398.857.177	69.512.223.000	7.500.000.000	7.500.000.000	

No		Uraian	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.547.166.420.990**	**1.573.721.427.451**	**1.704.897.506.231**	**1.816.677.082.052**	**1.937.581.220.070**
2	**BELANJA**		**1.677.097.767.991**	**1.638.258.591.232**	**1.668.494.785.328**	**1.705.137.526.179**	**1.928.760.907.470**
	A.	**Belanja Operasi**	**1.213.761.565.057**	**1.246.476.217.669**	**1.221.444.695.727**	**1.256.314.000.755**	**1.391.705.403.274**
		Belanja Pegawai	651.470.924.422	670.797.755.032	622.528.393.122	648.643.269.442	713.383.802.207
		Belanja Barang dan Jasa	528.057.946.860	549.562.092.162	543.140.713.659	533.056.216.528	584.273.329.113
		Belanja Bunga	-	803.250.000	1.017.745.067	982.342.740	
		Belanja Hibah	28.234.367.804	21.457.197.141	48.302.130.176	67.871.725.152	86.596.150.481
		Belanja Bantuan Sosial	5.998.325.971	3.855.923.334	6.455.713.703	5.760.446.892	7.452.121.473
	B.	**Belanja Modal**	**423.849.901.785**	**388.559.816.896**	**446.328.310.367**	**447.356.084.004**	**533.193.026.078**
	C.	**Belanja Tak Terduga**	**37.829.006.148**	**3.222.556.667**	**621.779.234**	**1.467.441.420**	**3.862.478.118**
	D.	**Belanja Transfer**	**1.657.295.000**		**100.000.000**		
		JUMLAH BELANJA	**1.677.097.767.991**	**1.638.258.591.232**	**1.668.494.785.328**	**1.705.137.526.179**	**1.928.760.907.470**
		SURPLUS/DEFISIT	**- 129.931.347.001**	**- 64.537.163.781**	**36.402.720.903**	**111.539.555.873**	**8.820.312.600**
3	**PEMBIAYAAN**						
	A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**185.943.982.885**	**127.816.887.133**	**32.781.036.314**	**23.009.957.216**	**59.223.488.188**
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	59.223.488.188
		Pencairan Dana Cadangan	-				
		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	91.800.000.000			
		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	18.345.000	4.854.849	1.313.037	6.200.000	
	B.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000.000**	**30.500.000.000**	**46.180.000.000**	**75.438.308.145**	**7.500.000.000**

No		Uraian	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	13.500.000.000	7.500.000.000
		Pembayaran Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo			33.680.000.000	61.938.308.145	
		PEMBIAYAAN NETO	**165.943.982.885**	**97.316.887.133**	**- 13.398.963.686**	**- 52.428.350.929**	**51.723.488.188**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak 2025

A. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

1. Pajak Daerah, yang terdiri atas :
    1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2
    2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
    3) PBJT atas :
        a. Makanan dan/ atau Minuman
        b. Tenaga Listrik
        c. Jasa Perhotelan
        d. Jasa Parkir
        e. Jasa Kesenian dan Hiburan
    4) Pajak Reklame
    5) Pajak Sarang Burung Walet
    6) Opsen PKB
    7) Opsen BBNKB
2. Retribusi Daerah, yang terdiri atas :
    1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
        a. Pelayanan Kesehatan
        b. Pelayanan Kebersihan
        c. Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
        d. Pelayanan Pasar
    2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
        a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
        b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
        c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
        d. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila
        e. Pelayanan rumah pemotongan ternak
        f. Pelayanan jasa kepelabuhan
        g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga

h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
a. Persetujuan Bangunan Gedung
b. Penggunaan tenaga kerja asing

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, meliputi:
1) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal kepada BUMN
2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal kepada BUMD, terdiri atas:
a. Bagian laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa
b. Bagian laba dari BPR Khatulistiwa
c. Bagian laba dari PT. BPD Bank Kalbar

4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
2) Hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan
3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
4) Hasil kerjasama Daerah
5) Jasa Giro
6) Hasil pengelolaan dana bergulir
7) Pendapatan bunga
8) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
9) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain
10) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
11) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
12) Pendapatan denda pajak Daerah
13) Pendapatan denda retribusi Daerah
14) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
15) Pendapatan dari pengembalian
16) Pendapatan BLUD
17) Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan

Dari tabel 2.99 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 menunjukkan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,81%. Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh Pajak Daerah. Pada tabel juga dapat dihitung Rasio PAD Kota Pontianak dari tahun 2020 sebesar 26,05% menjadi

tahun 2024 sebesar 30,64%, ini menunjukkan Pemerintah Kota Pontianak semakin besar untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer

Untuk realisasi pendapatan transfer yang diterima Kota Pontianak Tahun 2020-2024 bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah provinsi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meliputi :
    - Dana Perimbangan, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanan desentralisasi, yang terdiri dari :
        - Dana transfer umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
        - Dana transfer khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik
    - Dana Insentif Fiskal, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
2. Pendapatan transfer antar daerah, meliputi :
    - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat , yang terdiri atas :
        - DBH Pajak Kendaraan Bermotor
        - DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
        - DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
        - DBH Pajak Air Permukaan
        - DBH Pajak Rokok
    - Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lainnya yang penggunaannya sesuai peruntukkannya.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah dengan proporsi terbesar, disusul dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Pendapatan Hibah
2. Pendapatan Dana Darurat
3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pelaksanaan APBD Tahun 2018 – 2021, terdapat Pendapatan Hibah dana BOSNAS dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi semenjak APBD Tahun 2022 pendapatan tersebut telah dialihkan rekeningnya menjadi Pendapatan DAK Non Fisik (BOS), sehingga tampak penurunan yang cukup drastis di Tahun 2022.

Pendapatan hibah lainnya yang rutin diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah Hibah untuk program sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan syarat Pemerintah Daerah menganggarkan dan memberikan penyertaan modal kepada PDAM untuk pelaksanaan pemasangan sambungannya. Anggaran yang rutin diterima Pemerintah Kota Pontianak dari Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 7,5 Milyar, dan berakhir pada tahun 2023.

Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

1. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pendapatan Asli Daerah
2. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas SDM Pengelola PAD
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan regulasi / kebijakan
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data PAD
4. Meningkatkan kualitas pelayanan PAD
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah

Pengukuran kinerja APBD suatu daerah juga dapat dilihat dari besaran realisasi belanja daerah yang telah terserap selama tahun anggaran APBD bersangkutan. Semakin banyak belanja yang terserap maka semakin bagus pula kinerja suatu daerah. Penting bagi suatu daerah untuk merasionalisasikan belanja yang dikeluarkan agar belanja dapat efektif dan efisien, maka formulasi kebijakan umum belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas. Baik dalam rangka pemenuhan atas mandatory yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maupun belanja prioritas lainnya untuk mengatasi permasalahan dan pencapaian target kinerja lainnya yang telah direncanakan.

Belanja Pemerintah dalam APBD Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terdiri dari:

Belanja Operasi

Secara rinci belanja operasi yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak pada APBD Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, yang terdiri dari :
   Belanja Pegawai sebagai mana tersebut di atas terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
   Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Termasuk di dalam tunjangan yaitu iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penganggaran gaji dan tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi adanya penambahan ASN baru di Tahun anggaran yang direncanakan.

b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
   Dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan kelangkaan profesi, dan berdasarkan prestasi kerja.
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif;
   Termasuk didalamnya lainnya adalah tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan (tamsil) guru untuk guru yang belum berserifikasi, insentif pajak, insentif retribusi, jasa pelayanan kesehatan, honorarium pengelola keuangan daerah, honorarium pengadaan barang/jasa serta honorarium pengelola barang milik daerah.
d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

2. Belanja Barang dan Jasa
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Untuk tahun 2021, 2022, 2023 belanja bunga yang direalisasikan adalah kepada PT. BPD Bank Kalbar dalam rangka pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah yang dilakukan pada Tahun 2021.

4. Belanja Hibah
   Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum Belanja Hibah yang biasa direalisasi oleh Pemerintah Kota Pontianak kurun Tahun 2020 sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia;
   b. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat;

c. Belanja Hibah BOP PAUD;
d. Belanja Hibah kepada KPU;
e. Belanja Hibah Kepada Bawaslu;
f. Belanja Hibah untuk Pengamanan Pilkada;
g. Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan;
h. Belanja Hibah Ormas yang berbadan hukum;
i. Belanja Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS);
j. Belanja Hibah untuk Partai Politik;

5. Belanja Bantuan Sosial

   Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang meliputi :

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja bangunan dan gedung;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi :

1. Bencana alam non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi :

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan;
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah danl atau masyarakat.

Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan penganggaran dalam APBD yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan, sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari dua pos pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :
1. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

Untuk pelaksanaan APBD dari Tahun 2020 – 2024, komponen yang menjadi sumber dari penerimaan pembiayaan daerah adalah SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pinjaman daerah kepada PT. BPD Bank Kalbar sebesar Rp. 91,8 Milyar yang skema pembayarannya telah dilunasi paling lambat pada APBD Tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Pokok Hutang.

Pengeluaran pembiayaan daerah yang rutin dibiayai adalah penyertaan modal kepada BUMD. Khusus untuk pembayaran pokok utang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 kepada PT BPD Bank Kalbar atas utang yang dilakukan pada Tahun 2021.

Untuk penyertaan modal daerah yang biasa diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah untuk PDAM Tirta Khatulistiwa (program hibah sambungan air bersih dari pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah), kepada BPR Khatulistiwa, dan kepada PT. BPD Bank Kalbar.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

A. Aset

Dalam periode Tahun 2020-2024 jumlah total aset lancar memperlihatkan tren kenaikan setiap tahunnya. Aset tetap Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama Tahun 2020 sampai dengan 2024 memperlihatkan kecendurangan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 3,84 persen dengan total nilai asset tetap sebesar 9.244.735.125.692,- pada Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan pada pos Aset Lainnya, penyumbang terbesar perkembangan nilai aset lainnya adalah Aset Lain-lain.

Secara kumulatif, jumlah aset Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,21 persen dan jumlah aset pada tahun 2024 adalah senilai Rp.10.217.984.559.528.

.

B. Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka dan utang belanja serta utang jangka pendek lainnya. Porsi terbesar yang menjadi kewajiban jangka pendek selama lima tahun adalah pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

Kewajiban jangka panjang berupa utang jangka panjang lainnya pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Pontianak memiliki kewajiban finansial terhadap Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp.20.000.000,00. Pada Tahun 2021-2024 tidak ada lagi kewajiban jangka panjang sehingga pemerintah Kota Pontianak dapat focus untuk melaksanakan pembangunan dan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban finansial lainnya.

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 4,13 persen dengan nilai ekuitas senilai Rp. 10.139.763.613.232 pada Tahun 2024. Neraca Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 2.100 dibawah ini:

Tabel 2.54 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar					
	Kas dan Setara Kas	**36.014.770.384**	**32.783.699.452**	**23.003.757.216**	**59.111.204.945**	**60.556.000.333**
	Kas di Kas Daerah	26.076.799.225	20.969.867.045	169.132.707	47.667.155.858	49.865.522.600
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.251.200	4.198.892	29.022.080	27.978.000	3.742.000
	Kas di Bendahara Pengeluaran	130.740.875	26.460.100	8.830.000		66.617.194
	Kas Lainnya di BLUD	5.233.924.734	8.864.906.742	22.105.221.997	8.565.910.142	5.258.888.248
	Kas Dana BOSP				665.727.631	1.002.250.976
	Kas Dana BOK Puskesmas				2.184.433.314	4.358.979.316
	Kas Lainnya	4.572.054.350	2.918.266.673	691.550.433		
	Piutang Pendapatan	**40.166.161.369**	**234.173.830.902**	**224.490.114.407**	**238.940.132.992**	**309.494.403.248**
	Piutang Pajak Daerah	107.438.586.430	129.874.166.832	152.345.201.577	178.659.950.044	194.393.799.309
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	- 68.145.399.489				
	Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.893.301.324			
	Piutang Retribusi Daerah	4.016.588.831	4.381.397.331	13.318.795.931	12.611.538.800	21.755.329.380
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	- 3.143.614.403				
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		53.722.352.807	19.557.466.396	32.568.222.067	31.044.900.640
	Piutang Transfer		33.302.612.608	39.268.650.503	15.100.422.081	62.300.373.919
	Piutang lainnya	**47.883.645.499**	**6.269.260.259**	**6.267.947.222**	**6.261.747.222**	**6.261.747.222**
	Penyisihan Piutang Lainnya	**- 8.218.364.708**	**- 89.313.757.954**	**- 104.450.608.403**	**- 111.609.581.993**	**- 135.348.740.404**
	Penyisihan Piutang Pendapatan		- 83.049.352.544	- 98.182.661.181	- 105.347.834.771	- 129.116.018.182
	Penyisihan Piutang Lainnya	- 8.218.364.708	- 6.264.405.410	- 6.267.947.222	- 6.261.747.222	- 6.232.722.222

No	Uraian		Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024*
		Belanja /Biaya dibayar di muka	**184.255.720**	**162.050.782**	**119.607.998**	**130.705.666**	**102.469.182**
		Persediaan	**83.950.761.019**	**121.431.465.810**	**139.267.557.512**	**97.192.482.025**	**51.592.396.973**
		JUMLAH ASET LANCAR	**199.981.229.283**	**305.506.549.252**	**288.698.375.952**	**290.026.690.858**	**292.658.276.556**
	B.	**Investasi Jangka Panjang**					
		Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
		Investasi Jangka Panjang Permanen	356.386.493.273	412.661.465.248	461.369.005.299	518.859.583.262	525.787.896.234
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	356.386.493.273	412.661.465.248	461.369.005.299	518.859.583.262	525.787.896.234
		Investasi Permanen Lainnya					
		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**356.386.493.273**	**412.661.465.248**	**461.369.005.299**	**518.859.583.262**	**525.787.896.234**
	C.	**Aset Tetap**					
		Tanah	6.175.052.553.737	6.571.310.685.490	6.840.435.506.569	7.010.122.851.649	7.046.088.351.801
		Peralatan dan Mesin	621.608.129.369	631.643.867.831	650.042.328.103	685.627.746.615	766.061.949.182
		Gedung dan Bangunan	1.545.075.862.177	1.603.581.046.648	1.867.678.922.461	1.999.689.316.302	2.161.055.476.278
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.155.301.132.408	3.348.847.761.122	3.553.172.943.180	3.996.714.472.891	4.369.500.023.061
		Aset Tetap Lainnya	50.283.820.234	51.611.834.637	51.915.799.178	57.771.317.233	64.732.576.839
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.258.269.989	129.853.875.718	55.912.230.588	44.598.395.593	6.956.811.254
		Akumulasi Penyusunan Aset Tetap	- 3.632.273.437.792	- 3.933.279.967.461	- 4.265.689.963.202	- 4.780.006.758.507	- 5.175.581.059.838
		JUMLAH ASET TETAP	**7.951.306.330.122**	**8.403.569.103.986**	**8.753.467.766.877**	**9.014.517.341.776**	**9.238.814.128.576**
	D.	**Properti Investasi**					
		Properti Investasi				10.177.612.400	10.177.612.400
		Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					
		JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**-**	**-**	**-**	**10.177.612.400**	**10.177.612.400**
	E.	**Aset Lainnya**					
		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	96.616.481.941	96.616.481.941	96.616.481.941	86.438.869.541	86.438.869.541
		Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	- 12.367.201.756	- 13.691.451.976	- 15.015.702.195	- 16.339.952.415	- 17.664.202.634
		Aset Tak Berwujud	15.903.009.251	17.768.843.939	20.516.593.239	22.833.715.304	24.831.350.343

No	Uraian		Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024*
		Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 11.247.111.969	- 13.633.377.483	- 16.033.620.260	- 18.388.076.532	- 20.831.489.162
		Aset Lain-Lain	232.726.567.379	228.791.095.778	226.724.171.390	225.093.015.269	225.813.328.409
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	- 160.929.195.833	- 156.970.625.432	- 155.765.440.417	- 154.608.686.795	- 155.286.628.795
		Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	6.804.003.695	29.385.787.000	57.980.000
		JUMLAH ASET LAINNYA	**160.702.549.013**	**158.880.966.768**	**163.846.487.393**	**174.414.671.373**	**143.359.207.702**
	JUMLAH ASET		**8.668.376.601.692**	**9.280.618.085.253**	**9.667.381.635.521**	**10.007.995.899.669**	**10.210.797.121.467**
2	**KEWAJIBAN**						
	A.	Kewajiban Jangka Pendek					
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.738.100	3.976.100			12.199.546
		Utang Bunga		4.803.261.147			
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		40.196.738.853	61.938.308.145		
		Pendapatan Diterima di Muka	5.193.731.780	5.399.463.985	5.480.356.228	3.192.086.731	4.083.412.413
		Utang Belanja	35.223.168.700	101.503.812.664	93.425.957.677	56.317.056.815	60.683.107.037
		Utang Jangka Pendek Lainnya		-	910.167.034	6.278	13.455.474.000
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**40.419.638.580**	**151.907.252.749**	**161.754.789.084**	**59.509.149.825**	**78.234.192.996**
	B.	Kewajiban Jangka Panjang					
		Utang Dalam Negeri	257.111.415	51.603.261.147			
		Utang Jangka Panjang Lainnya	20.000.000	-			
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	277.111.415	**51.603.261.147**	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		**40.696.749.995**	**203.510.513.896**	**161.754.789.084**	**59.509.149.825**	**78.234.192.996**
3	**EKUITAS**		**8.627.679.851.696**	**9.077.107.571.357**	**9.505.626.846.436**	**9.948.486.749.845**	**10.132.562.928.471**
	JUMLAH EKUITAS		**8.627.679.851.696**	**9.077.107.571.357**	**9.505.626.846.436**	**9.948.486.749.845**	**10.132.562.928.471**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**8.668.376.601.692**	**9.280.618.085.253**	**9.667.381.635.521**	**10.007.995.899.669**	**10.210.797.121.467**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

2.2.2 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Pontianak terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber- sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
d. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
g. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
h. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta instansi terkait.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah lainnya. Untuk Kota Pontianak pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus Fisik/non Fisik), dan insentif fiskal. Sedangkan Pendapatan Transfer dari pemerintah daerah lainnya berasal Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program ungulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil dan Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi

dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memeberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejehateraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas- prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Pontianak.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak, diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabel

   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja daerah tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

3. Prioritas

   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

4. Tolok Ukur dan Target Kinerja

   Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

2.2.2.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dari belanja, sedangkan surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan daerah adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan;
2. SiLPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program;
3. Komponen penerimaan laba dari BUMD diasumsikan tidak dimasukkan dalam kerangka penerimaan pembiayaan karena akan dimasukkan kembali sebagai bentuk penyertaan modal yang dipisahkan ke dalam neraca keuangan BUMD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara umum proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2026-2030 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.115 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 - 2030

No		Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN		1.937.306.132.531	2.266.978.317.434	2.316.201.229.567	2.367.400.672.975	2.392.341.676.975	2.414.710.648.524
	A.	Pendapatan Asli Daerah	593.403.340.224	821.081.220.819	859.034.235.884	899.485.025.308	966.882.192.625	987.129.940.656
		Pajak Daerah	384.847.925.659	581.236.574.131	607.591.372.355	636.089.290.973	680.959.450.474	697.174.855.817
		Retribusi Daerah	52.859.680.665	165.967.228.565	172.943.542.625	179.465.689.853	192.075.193.447	193.684.210.828
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	33.920.975.184	38.465.892.800	41.143.437.440	44.023.559.312	49.123.687.278	50.459.371.641
		Lain-lain PAD yang Sah	121.774.758.715	35.411.525.323	37.355.883.464	39.906.485.170	44.723.861.426	45.811.502.370
	B.	Pendapatan Transfer	1.343.902.792.307	1.445.897.096.615	1.457.166.993.683	1.467.915.647.667	1.425.459.484.350	1.427.580.707.868
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.135.969.505.748	1.264.305.814.000	1.267.584.714.000	1.268.936.714.000	1.206.618.014.000	1.208.387.614.000
		- Dana Bagi Hasil (DBH)	86.281.447.000	68.882.900.000	72.161.800.000	75.596.800.000	81.195.100.000	82.964.700.000
		- Dana Alokasi Umum (DAU)	808.808.396.021	889.827.798.000	889.827.798.000	889.827.798.000	889.827.798.000	889.827.798.000
		- DAK Fisik	56.544.517.576	32.406.828.000	32.406.828.000	32.406.828.000	32.406.828.000	32.406.828.000
		- DAK Non Fisik	184.335.145.151	203.188.288.000	203.188.288.000	203.188.288.000	203.188.288.000	203.188.288.000
		- Dana Insentif Daerah (DID)						
		- HIBAH		70.000.000.000	70.000.000.000	67.917.000.000		
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	207.933.286.559	181.591.282.615	189.582.279.683	198.978.933.667	218.841.470.350	219.193.093.868
		- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	207.633.286.559	181.591.282.615	189.582.279.683	198.978.933.667	218.841.470.350	219.193.093.868
		- Bantuan Keuangan	300.000.000					

No		Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
	C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		0	0	0	0	0
		Pendapatan Hibah						
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.937.306.132.531**	**2.266.978.317.434**	**2.316.201.229.567**	**2.367.400.672.975**	**2.392.341.676.975**	**2.414.710.648.524**
2	**BELANJA**		**1.927.380.528.798**	**2.271.378.570.434**	**2.321.226.498.567**	**2.372.727.640.980**	**2.390.805.640.977**	**2.413.489.851.527**
	A.	Belanja Operasi	1.390.389.247.702	1.616.311.129.939	1.621.573.428.550	1.651.310.206.550	1.691.099.377.550	1.673.846.683.550
		Belanja Pegawai	713.383.729.479	858.852.349.939	846.601.848.550	840.058.626.550	840.037.797.550	838.575.103.550
		Belanja Barang dan Jasa	582.858.904.472	700.000.000.000	720.000.000.000	740.000.000.000	760.000.000.000	780.000.000.000
		Belanja Bunga						
		Belanja Subsidi		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		Belanja Hibah	86.694.492.278	46.371.580.000	45.871.580.000	62.151.580.000	80.961.580.000	46.171.580.000
		Belanja Bantuan Sosial	7.452.121.473	10.587.200.000	9.100.000.000	9.100.000.000	10.100.000.000	9.100.000.000
	B.	Belanja Modal	533.128.802.978	654.573.643.071	699.353.070.017	721.117.434.425	699.406.263.425	739.343.167.974
	C.	Belanja Tak Terduga	3.862.478.118	493.797.424	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	D.	Belanja Transfer						
		JUMLAH BELANJA	**1.927.380.528.798**	**2.271.378.570.434**	**2.321.226.498.567**	**2.372.727.640.980**	**2.390.805.640.977**	**2.413.489.851.527**
		SURPLUS/DEFISIT	**9.925.603.732**	**-4.400.253.000**	**-5.025.269.000**	**-5.326.968.000**	**1.536.036.000**	**1.220.797.000**
3	**PEMBIAYAAN**							
	A.	Penerimaan Pembiayaan	59.111.204.945	28.670.253.000	28.848.269.000	28.775.968.000	28.834.964.000	28.895.203.000
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	59.111.204.945	28.620.253.000	28.798.269.000	28.725.968.000	28.784.964.000	28.845.203.000

No		Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Proyeksi Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Pencairan Dana Cadangan						
		Penerimaan Pinjaman Daerah						
		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	B.	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	24.270.000.000	23.823.000.000	23.449.000.000	30.371.000.000	30.116.000.000
		Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	24.270.000.000	23.823.000.000	23.449.000.000	30.371.000.000	30.116.000.000
		Pembayaran Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo						
		PEMBIAYAAN NETO	**51.611.204.945**	**4.400.253.000**	**5.025.269.000**	**5.326.968.000**	**-1.536.036.000**	**-1.220.797.000**
VOLUME PENERIMAAN (1+3A)			**1.996.417.337.475**	**2.295.648.570.434**	**2.345.049.498.567**	**2.396.176.640.975**	**2.421.176.640.975**	**2.443.605.851.524**
VOLUME PENGELUARAN (2+3B)			**1.934.880.528.798**	**2.295.648.570.434**	**2.345.049.498.567**	**2.396.176.640.975**	**2.421.176.640.975**	**2.443.605.851.524**

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak 2025 (diolah)

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan didapat melalui hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan kekurangan yang tidak diatasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah daerah menjelaskan terkait apa yang menjadi masalah di masa lalu serta gambaran solusi dimasa mendatang tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat Daerah. Berikut merupakan permasalahan yang ada di Kota Pontianak:

Tabel 2.116 Permasalahan di Kota Pontianak

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Aspek Geografi dan Demografi:		
1.Hubungan Antar Wilayah	Kurangnya kerjasama daerah dengan wilayah Kabupaten/Kota sekitar	1. Belum lengkapnya dokumen rencana tata ruang pada wilayah perbatasan kota, terutama wilayah yang di luar wilayah Kota Pontianak
		2. Administrasi kependudukan sebagian warga perbatasan Kota Pontianak dengan kabupaten sekitar
		3. Kurangnya koordinasi pengelolaan wilayah dengan kabupaten sekitar
2. Kebencanaan dan Perubahan Iklim	Perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Letak geografis Kota Pontianak membuat wilayah ini memiliki risiko bencana:
		a. Banjir, terutama di kawasan yang dekat dengan Sungai Kapuas
		b. Kekeringan, dimana pada musim kemarau dan akan berpotensi lebih parah dengan adanya peningkatan suhu ekstrem dari perubahan iklim
		c. Kebakaran hutan dan lahan, risiko bencana lebih tinggi pada musim kemarau dan terutama pada lahan gambut
		d. Cuaca ekstrem/angin puting beliung, risiko bencana lebih tinggi pada transisi dua musim
		2. Adanya perubahan iklim (peningkatan suhu dan penurunan curah hujan) meningkatkan bahaya atau ancaman bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan, cuaca ekstrem/angin puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan
		3. Penanggulangan bencana sedang dalam proses diarahkan agar terintegrasi dengan dimensi pembangunan, dimana kebencanaan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan
		4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana masih dalam proses diupayakan secara optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		5. Adanya risiko bencana banjir yang lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di rumah panggung di atas sungai, karena hal tersebut adalah kearifan lokal
		6. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kehadiran RTRW/RDTR Kota, sehingga masih ada pemanfaatan ruang yang kurang sesuai pada wilayah rawan bencana
		7. Belum optimalnya infrastruktur drainase untuk mencegah banjir karena sering tumpang tindih dengan infrastruktur lain seperti listrik, saluran air bersih, dan jalan
3. Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menurunnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Pertumbuhan penduduk menyebabkan:
		a. Tingginya permintaan sarana prasarana dasar sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dihindari
		b. Meningkatnya limbah domestik serta sampah dari rumah tangga dan kegiatan usaha
		c. Meningkatnya jumlah transportasi pribadi, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca
		2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dari sumbernya
		3. Pesatnya pembangunan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		4. Minimnya Ruang Terbuka Hijau
		5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem di Kota Pontianak sangat rendah akibat pembangunan perkotaan yang masif. Meskipun demikian, daya dukung air masih surplus karena mengandalkan Sungai Kapuas, namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air Sungai Kota Pontianak agar layak digunakan oleh Penduduk.
		1. Adanya tumpang tindih kewenangan untuk percepatan energi terbarukan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	2. Pemanfaatan sampah sebagai pengembangan energi terbarukan yang masih belum maksimal	2. Pengembangan energi terbarukan untuk menambah PAD masih dalam proses
		3. Kolaborasi *stakeholder* dalam pengadaan energi ramah lingkungan yang belum optimal
4. Penggunaan Lahan	Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan dokumen rencana tata ruang	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan regulasi yang berlaku (RTRW/RDTR)
		2. Legalitas lahan milik pribadi yang menyulitkan pemerintah dalam menata ruang
		3. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada sektor atau kepentingan tertentu
		4. Rendahnya penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait tata ruang
5. Kependudukan	Meningkatnya angka ketergantungan	1. Menurunnya angka kelahiran hingga melewati *replacement level*, hal ini dibuktikan dengan penurunan penduduk usia muda
		2. Bertambahnya penduduk lanjut usia
Aspek Kesejahteraan Masyarakat:		
1. Kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin serta akses perlindungan sosial yang belum optimal	1. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat
		2. Terbatasnya lapangan pekerjaan atau kesempatan berusaha
		3. Kualitas dan produktivitas SDM rendah
		4. Data warga miskin belum dimutakhirkan secara sistematis
		5. Tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat cukup tinggi
		6. Penangan fakir miskin, anak terlantar, disabilitas dan gelandangan belum optimal karen hambatan kewenangan daerah
		7. Keterbatasan keuangan daerah
		8. Kolaborasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan
		9. Kolaborasi antar pemerintah daerah perlu ditingkatkan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
2. Kualitas Pendidikan Masyarakat	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. Belum meratanya kualitas satuan pendidikan
		2. Kompetensi tenaga pengajar/Guru PAUD, SD, SMP perlu ditingkatkan secara merata
		3. Masih banyak siswa miskin yang butuh pembiayaan pendidikan
		4. Wajib belajar 13 tahun belum tercapai
3. Kualitas Kesehatan masyarakat	1. Tingginya prevalensi stunting	1. Rendahnya asupan gizi pada calon ibu
		2. Rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama bayi lahir
	2. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Masih adanya prevalensi penyakit menular (TBC)
		2. Prevalensi penyakit tidak menular terus bertambah (Hipertensi, diabetes, dll)
		3. Rendahnya kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat
		4. Kualitas lingkungan yang menurun menyebabkan turunnya kualitas kesehatan
		5. Belum tercapainya universal coverage (BPJS Kesehatan)
		6. Terbatasnya sarana fisik, jumlah dan jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya
		7. Diperlukannya tenaga ahli bidang kesehatan terutama dalam bidang promosi dan perilaku kesehatan, epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, perencanaan kesehatan dan ekonomi kesehatan.
4. Pengangguran	1. Tingginya tingkat pengangguran dan *underemployment* terutama di kalangan pemuda	1. Pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan bisnis cenderung membatasi rekrutmen dan bahkan melakukan PHK, mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat.
		2. Pekerja mungkin tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja
		3. Pergeseran struktur perekonomian

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Krisis keuangan dan ekonomi dapat mengakibatkan pengurangan lapangan kerja, penutupan usaha, dan retensi pekerja yang ada
		5. Perkembangan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja
		6. Kurangnya investasi dalam berbagai sektor ekonomi atau kegagalan usaha untuk berkembang secara signifikan
		7. Regulasi yang buruk atau terlalu rumit dipasar kerja, seperti aturan perburuhan yang kaku atau birokrasi yang berlebihan
		8. Pasar kerja yang tidak efisien, dimana informasi tentang pekerjaan tidak terdistribusi dengan baik atau dimana proses perekrutan tidak efektif
		9. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk tanpa disertai penciptaan lapangan kerja yang cukup
	2. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja	1. Perkembangan teknologi yang cepat mengubah kebutuhan pasar kerja.
		2. Kurangnya sinkronisasi antara pendidikan dan pasar kerja.
		3. Struktur perekonomian yang berubah dengan cepat, seperti transisi dari industri manufaktur ke ekonomi berbasis jasa atau ekonomi digital, dapat menciptakan ketidaksesuaian keterampilan karna keterampilan yang diperlukan di sektor-sektor baru berbeda
		4. Akses yang terbatas atau rendahnya kualitas pendidikan formal atau pelatihan vokasional dapat mengakibatkan kekurangan keterampilan yang diperlukan di pasar kerja.
		5. Sistem pendidikan yang tidak responsif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi
		6. Proses pendidikan yang panjang, seperti gelar akademis yang membutuhkan waktu lama untuk dicapai. Selama waktu ini, kebutuhan pasar kerja dapat berubah secara signifikan.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		7. Banyak tenaga kerja mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang tren pasar kerja, jenis pekerjaan yang paling diminati, atau keterampilan yang akan diminati di masa mendatang.
		8. Perusahaan mungkin tidak menginvestasikan cukup dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan
		9. Perbedaan antara struktur usia, preferensi pekerjaan, dan mobilitas geografis antara populasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja dapat menciptakan kesenjangan keterampilan.
		10. Ketidak terlibatan industri dalam proses pendidikan dan pelatihan menghasilkan kurangnya wawasan tentang apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
	3. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia	1. Otomasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan
		2. Perkembangan teknologi dapat menciptakan kesenjangan keterampilan antara pekerja yang diinginkan oleh pasar kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja
		3. Peralihan pekerjaan dapat sulit bagi sebagian pekerja, terutama yang lebih tua atau tidak memiliki akses ke pelatihan yang diperlukan.
		4. Perkembangan teknologi menghadirkan risiko keamanan dan privasi data yang lebih tinggi.
		5. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat maryarakat dan organisasi rentan terhadap gangguan, kegagalan sistem, atau bencana alam yang mempengaruhi infrastruktur teknologi.
		6. Masyarakat dan negara-negara yang berkurang berkembang mungkin mengalami kesenjangan digital
		7. Hilangnya pekerjaan manusia yang unik yang memiliki elemen kreatif, empati, dan pengambilan keputusan kompleks tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh otomasi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		8. Pekerjaan yang diotomatisasi atau tergantikan oleh teknologi dapat menciptakan krisis identitas bagi individu yang kehilangan pekerjaan mereka, mempengaruhi harga diri dan kesejahteraan psikologis mereka.
		9. Pengenalan teknologi baru, terutama yang sangat canggih, dapat mengakibatkan biaya tinggi.
		10. Pengaruh Sosial dan Budaya memicu kebingungan dan ketidakstabilan sosial, serta tantangan adaptasi budaya dan cepat.
		11. Perubahan teknologi dan transformasi bisnis yang cepat membuat beberapa keterampilan karyawan menjadi usang
	4. Rendahnya lapangan kerja formal bagi penyandang disabilitas	1. Masih rendahnya minat pengusaha untuk merekrut penyandang disabilitas
		2. Lapangan kerja ramah penyandang disabilitas belum menjadi prioritas
5. Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan pemuda dan pengembangan prestasi olahraga	1. Terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai dengan minat pencari kerja sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran pemuda
		2. Masih rendahnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneurship
		3. Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan
		4. Adanya ancaman perilaku berisiko di kalangan pemuda seperti narkoba, pernikahan usia dini, risiko kesehatan reproduksi dan bahaya merokok
		5. Upaya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan sistematis, serta berkelanjutan masih belum optimal
		6. *Sport science* belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga
		7. Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional
		8. Belum mencukupinya fasilitas olahraga berkelas internasional untuk mendukung prestasi olahraga masyarakat

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
6. Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masih rendah	1. Pemajuan objek kebudayaan dan cagar budaya yang masih rendah
		2. Belum adanya paket wisata budaya untuk wisatawan
		3. Kurangnya pelaksanaan even-even budaya masyarakat
Aspek Daya Saing		
1. Daya Saing SDM	1. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	1. Masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan
		2. Masih tingginya angka perceraian
		3. Masih adanya prostitusi anak dan wanita
	2. Literasi masyarakat masih rendah	1. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan
		2. Rendahnya minat baca masyarakat
2. Daya Saing Investasi Daerah	Tidak adanya insentif pada calon investor dan potensi daerah yang belum dipromosikan secara optimal	1. Peta Potensi Investasi belum tersedia
		2. Belum tersedianya regulasi kemudahan berinvestasi
		3. Ketidakstabilan politik atau fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi investor
		4. Data investasi yang tercatat belum menggambarkan kondisi real besarnya investasi di Kota Pontianak karena rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan investasinya
		5. Belum optimalnya promosi potensi daerah dan peluang investasi
3. Daya Saing Ekonomi	1. tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi rendah	Tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir: pasar, pengumpul, grosir dan eceran masih lemah
	2. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan Daerah	1. Belum ada upaya optimal dalam upaya memproduksi, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah
		2. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT, dll
		3. Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Perdagangan luar negeri (ekspor) masih didominasi oleh produk hulu (bahan mentah).
		5. Minimnya lahan dan terjadi konversi lahan lidah budaya ke fungsi lain
	3. Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI	1. Beberapa pasar yang sudah dibangun namun belum memiliki sarana prasarana pendukung
		2. Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional belum optimal.
	4. Pembinaan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi yang belum optimal	1. Keterbatasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar
		2. Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi, rendahnya partisipasi anggota serta rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.
		3. Penataan UMKM dalam suatu kawasan belum terencana
	5. Pemanfaatan destinasi wisata belum dikelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olah raga wisata, dan kebudayaan	4. Profesionalitas pengelolaan pariwisata daerah yang belum optimal. Destinasi wisata sudah ada belum dikelola secara profesional sehingga dapat mempengaruhi citra pariwisata daerah.
		5. Produk wisata unggulan belum memiliki daya jual sehingga tidak membantu penguatan citra pariwisata daerah.
		6. Minat Investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di bidang pariwisata masih rendah sehingga pengembangan pariwisata hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah untuk pengelolaan destinasi wisata.
		7. Penguatan kemitraan yang belum optimal antara para pelaku industri pariwisata dan instansi pariwisata untuk meningkatkan akses terhadap destinasi wisata, produk wisata, promosi dan sinkronisasi event.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		8. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung iklim pariwisata yang kondusif dalam rangka membangun citra pariwisata daerah.
		9. Pemanfaatan teknologi digital perlu dimaksimalkan dalam pengembangan industri pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk pariwisata.
	6. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap	1. Keterbatasan sumber daya (SDM dan SDA) kreatif yang profesional dan kompetitif
		2. Ekonomi kreatif dianggap belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan yang layak, kurangnya apresiasi terhadap ekonomi kreatif
		3. Tingginya biaya produksi akibat mahalnya bahan baku dan mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif
		4. Kualitas produk belum maksimal serta proses produksi yang tidak efisien karena kurangnya inovasi dalam pengembangan produk
		5. Minimnya akses pembiayaan
		6. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri
		7. Infrastruktur belum memadai (Internet)
		8. Kurangnya riset konten dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten
	7. Rasio kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori menuju mandiri	1. Kesadaran masyarakat/usaha membayar pajak masih kurang
		2. Digitalisasi penerimaan pajak belum optimal
		3. Belum sinkronnya produk hukum dalam mendukung kemandirian fiskal daerah
	8. Penguatan Local Taxing Power melalui transformasi akselerasi, integrasi data, digitalisasi pengelolaan pajak daerah, sinergisitas dan kolaborasi belum optimal	1. Updating data pajak daerah belum menyeluruh, pemutakhiran dan akselerasi data belum dimanfaatkan sebagai identifikasi atas potensi PAD
		2. Sinergi pemanfaatan tranformasi digital pengelolaan PAD dengan Bank Pembangunan Daerah dalam mengembangkan inklusi keuangan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		masyarakat yang berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah belum optimal
		3. Perdagangan oleh pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan belum diatur dalam peraturan perundang - undangan menjadi pihak yang berkewajiban memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak daerah yang berasal dari transaksi perdagangan secara elektronik, dan peran bendahara pengeluaran belum sebagai wajib pungut atas pajak daerah melalui belanja APBD/APBN.
		4. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki keahlian khusus dan lambannya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan informasi yang semakin masif.
		5. Keterbatasan sarana prasana masih terbatas terutama sarana prasarana dalam teknologi informasi
		6. Pemanfaatan kerjasama dengan instansi terkait dalam penagihan pajak daerah belum terlaksana, dan kerjasama akselerasi data pertanahan dan fiskal daerah belum optimal disebabkan oleh faktor keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Bapenda.
3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah	1. Belum optimalnya pembangunan *waterfront city* pada seluruh tepian Sungai Kapuas dan sarana prasarana pariwisata lainnya	1. Pendanaan pembangunan sebagian besar masih bergantung kepada bantuan pemerintah pusat
		2. Belum adanya kemudahan investasi untuk keterlibatan pihak swasta dalam membangun fasilitas pendukung pariwisata disekitar kawasan waterfront city
		3. Belum optimalnya pengelolaan dan perizinan bagi pedagang di *Waterfront City* yang menyebabkan ketidakteraturan
		4. Belum optimalnya promosi wisata *waterfront city*

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	2. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada *peak hour*	1. Belum tersedianya transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi, serta ramah lingkungan. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum belum dipersiapkan secara optimal untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi dan motorisasi
		2. Berkurangnya ketersediaan angkutan umum
		3. Ketersediaan sarana prasarana jalan tidak mampu mengimbangi tingginya jumlah kendaraan pribadi
		4. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan transportasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas, belum dapat diwujudkan secara optimal.
		5. Beberapa titik jalan kota yang terendam banjir/genangan pada saat terjadi pasang laut dan hujan dengan intensitas tinggi terjadi bersamaan.
		6. Konektivitas antar wilayah dalam dan luar Kota Pontianak.
	3. Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai	1. Keterbatasan penyediaan sarana prasarana transportasi sungai
		2. Transportasi sungai belum dikembangkan dan masih terbatas untuk angkutan tambang dan komoditas lain
	4. Banjir dan genangan di wilayah Kota Pontianak	1. Rendahnya topografi yang relatif rendah (rata-rata 1 sampai 2 meter diatas permukaan Laut) dan posisi Kota Pontianak yang dekat dengan muara menyebabkan wilayah di Kota Pontianak terpengaruh pasang surut laut
		2. Kontur tanah yang ada relatif datar meyebabkan aliran air tidak laju dan cepat terjadinya sedimen pada saluaran
		3. Semakin berkurangnya daerah resapan dan semakin luasnya areal yang terbangun

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Kapasitas saluran yang ada tidak mampu menahan volume atau debit air, terutama pada saat hujan lebat ditambah dengan terjadinya pasang laut.
		5. Konektivitas antar saluran belum maksimal
		6. Kurangnya sarana prasarana pengendalian genangan/banjir
		7. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian genangan/banjir
Aspek Pelayanan Umum		
1. Pendidikan	Akses pendidikan belum merata	1. Tidak meratanya penyebaran sekolah negeri
		2. Sarana prasarana penunjang pembelajaran pendidikan yang belum terpenuhi
		3. Sumber pembiayaan operasi sekolah yang berasal dari dana BOS belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan
		4. Belum meratanya ketersediaan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus
		5. Kurangnya jumlah tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan di Kota Pontianak
		6. Masih rendahnya kontrol terhadap anak putus sekolah
		7. Beasiswa pelajar hingga ke Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan untuk mencapai wajib belajar 13 tahun
		8. Perlu kolaborasi yang baik antara sekolah swasta dan negeri dalam memberikan akses pendidikan siswa
2. Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan	1. Pelayanan Kesehatan perlu terus dievaluasi pelaksanaannya
		2. Fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan sesuai standar internasional
		3. Jumlah tenaga kesehatan (dokter spesialis) perlu terus ditingkatkan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		4. Penyediaan beasiswa untuk dokter spesialis khusus untuk kebutuhan daerah
3. Air Minum Aman	10. Sumber Air Baku semakin terbatas	1. Pada saat musim kemarau sering terjadi intrusi air laut ke sungai kapuas sebagai sumber air baku PDAM
		2. Belum adanya alternatif air baku selain air Sungai Kapuas
	11. Air PDAM yang ada belum dimanfaatkan oleh warga sebagai air minum sehari-hari	Kualitas keluaran air PDAM belum siap minum
4. Sanitasi Aman	13. belum optimalnya pengembangan dan pembangunan sistem sanitasi lingkungan	1. Sebagian besar penampungan limbah tinja rumah tangga adalah dengan sistem septic tank tanpa pengolahan.
		2. Belum adanya instalasi pengolah lumpur tinja skala kota yang memenuhi persyaratan
		3. belum tersedia nya IPALD, IPLT
5. Perumahan dan Permukiman	5. Kebutuhan perumahan yang tidak sebanding dengan ketersediaan dan penyediaan perumahan	1. Konsep pembangunan perumahan masih menyebar/horizontal
	6. Masih terdapat prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan serta drainase lingkungan yang kondisinya belum baik	1. Pengawasan pembangunan perumahan sesuai ketentuan belum optimal
6. Kawasan Kumuh	8. Masih terdapat Kawasan kumuh di Kota Pontianak	1. Kurangnya pencegahan dan pengawasan terhadap bangunan liar baru
		2. Masih terdapat rumah tidak layak huni
		3. Pemanfaatan rumah susun yang belum optimal
7. Jalan Lingkungan	Kualitas jalan lingkungan belum merata	1. Sebagian jalan terendam apabila terjadi genangan
		2. Jalan lingkungan belum merata dalam kondisi baik/mantap
		3. Penegakan aturan mengenai standar pembangunan jalan lingkungan perlu di pertegas, khusunya di area perumahan.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
8. Lahan Pemakaman	Kapasitas pemakaman yang tersedia hampir mencapai titik jenuh	1. Aset tanah pemerintah Kota Pontianak terbatas
		2. Pembebasan lahan untuk pemakaman belum dilakukan
		3. Belum adanya unit layanan pemakaman skala perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak
9. Ketenagakerjaan	1. Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informal menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan	1. Fleksibilitas dan kebutuhan bisnis yang menyebabkan kontrak yang tidak pasti bagi pekerja
		2. Kontrak jangka panjang atau kontrak dengan banyak manfaat dapat meningkatkan biaya dan kewajiban perusahaan
		3. Ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi pasar, atau perubahan peraturan dapat membuat perusahaan berhati - hati dan memilih kontrak yang lebih fleksibel dan tidak pasti.
		4. Tuntutan keseimbangan hidup dan kerja
		5. Perekonomian yang berubah dari pekerjaan tetap ke kontrak atau proyek dapat menghasilkan lebih banyak kontrak jangka pendek atau gig economy, menciptakan ketidakpastian kontrak kerja.
		6. Banyak perusahaan *start*-up atau wirausaha memulai dengan anggaran terbatas, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan kontrak jangka pendek dan tidak pasti untuk meminimalkan risiko keuangan.
		7. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan
		8. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka pintu bagi pekerjaan jarak jauh dan kontrak jangka pendek.
		9. Pekerja mungkin tidak dapat menemukan atau mempertahankan pekerjaan tetap karena persaingan yang ketat atau kualifikasi yang tidak sesuai.
		10. Tingkat pengangguran yang tinggi
	2. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja	1. Tidak memadainya gaji dan upah
		2. Jam kerja yang berlebihan tanpa adanya kompensasi yang sesuai
		3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kurang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	yang panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan keamanan kerja yang memadai.	4. Diskriminasi dan pelecehan di tempat Kerja
		5. Ketidakpastian kontrak kerja
		6. Ketidakadilan dalam kenaikan jabatan dan kompensasi
		7. Kurangnya akses terhadap perlindungan sosial
		8. Beban kerja yang berlebihan
		9. Kondisi kerja fisik yang buruk.
		10. Pengabaian hak buruh
	3. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi, dan pendapatan yang adil	1. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menyebabkan diskriminasi
		2. Budaya organisasi yang tidak inklusif
		3. Kurangnya Pendidikan
		4. Pengaruh media dan kebudayaan populer karena ada Representasi yang tidak akurat atau stereotipikal dari kelompok tertentu dapat membuat persepsi yang salah
		5. Sifat kepemimpinan yang tidak responsif
		6. Kebijakan dan praktek yang tidak adil
		7. Diskriminasi struktur dan sistematik
		8. Ketimpangan kekuasaan dan akses
		9. Nilai dan norma budaya yang melekat dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara orang memandang dan memperlakukan orang lain, baik secara positif maupun negatif.
		10. Ketidakcukupan Undang-Undang dan penegakan hukum
		1. Ketimpangan ekonomi antara negara-negara dapat mendorong orang untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di negara lain

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	4. Migrasi tenaga kerja yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di negara asal dan negara tujuan	2. Kondisi politik yang tidak stabil, perang, konflik bersenjata, atau kekerasan di suatu negara dapat memaksa orang untuk mencari perlindungan atau peluang di negara lain
		3. Ketidakadilan sosial dan diskriminasi dari negara asal
		4. Adanya tuntutan keseimbangan keluarga
		5. Krisis kesehatan dan bencana alam
		6. Tren demografis, termasuk penuaan penduduk di beberapa negara, dapat menciptakan kebutuhan akan lebih banyak tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, yang dapat diatasi melalui migrasi tenaga kerja.
		7. Perkembangan teknologi dan aksesibilitas global ke informasi memudahkan orang untuk mengetahui tentang peluang di negara lain. Globalisasi juga dapat meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih terampil dan mobilitas tenaga kerja internasional.
		8. Ketidakpastian ekonomi dari negara asal
		9. Kebijakan migrasi yang rumit birokratis, dan sulit diakses dapat menghambat migrasi yang legal dan aman, mendorong orang untuk mencari jalur migrasi yang tidak sah dan berisiko.
		10. Ketidakadilan dalam pembagian kelayakan dan akses negara asal
10. Pangan Pertanian dan Perikanan	1. Akses pangan yang tidak merata dan percepatan penganekaragaman pangan berbasis lokal	1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang terbatas karena sebagian besar bahan pangan berasal dari luar Kota Pontianak
		2. Tingkat pendapatan masyarakat, dimana pola konsumsi masyarakat berdasarkan pendapatannya serta adanya fluktuasi harga pangan
		3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
		4. Kemampuan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		5. Perilaku konsumsi pangan masyarakat yang ingin praktis dengan makanan cepat saji/ tanpa memperhatika menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman
		6. Persepsi yang menganggap makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman membutuhkan harga yang mahal padahal dap diproduksi dari pekarangan sendiri dengan menu sederhana
		7. Kurangnya perhatian terhadap akses pangan bergizi untuk kelompok rentan
		8. Tingginya konsumsi pangan ultra proses yang berdampak pada kesehatan
	2. Penurunan jumlah produksi pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura)	1. Adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan terbangun untuk rumah maupun infrastruktur, akibatnya konversi lahan pertanian tidak dapat dihindari
		2. Rendahnya minat generasi muda pada pertanian
	3. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan	1. Rata-rata pendapatan nelayan Kota Pontianak masih rendah, karena volume hasil tangkapan ikan rata-rata rendah
		2. Sarana dan prasarana perikanan tangkap masih terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama di daerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas
		3. Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah
		4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas
		5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil.
		6. Belum optimalnya pengelolaan pembudi daya ikan kecil

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		7. Belum optimalnya pemberdayaan pembudi daya ikan
	4. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	1. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kota Pontianak masih rendah
		2. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik
		3. Sarana dan Prasarana pengolahan ikan masih Terbatas
		4. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya
	5. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya, sarana dan prasarana di bidang peternakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan	1. Kurangnya pasokan ternak potong yang tersedia akibat wabah penyakit, minimnya stok ternak (pembibitan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak ada pelabuhan dan alat angkut khusus untuk pengangkutan dan pendaratan ternak
		2. Minimnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap rumah pemotongan unggas dan hewan besar (sapi/kambing) yang memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan bersertifikat NKV dan Halal serta rumah potong hewan babi yang ASU (Aman, Sehat, Utuh)
11. Persampahan	Daya tampung (kapasitas) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbatas	1. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir masih open dumping
		2. Kondisi sarana persampahan (alat angkut dan TPS) banyak yang kurang baik, serta belum ada pemilahan sampah pada kontainer di TPS
		3. Luasan yang terbatas sedangkan volume sampah selalu bertambah
		4. Belum optimalnya pengurangan sampah/pengolahan sampah di tingkat Rumah Tangga
		5. Prilaku hidup bersih belum optimal dengan banyaknya sampah di tempat pembuangan, sungai dan jalan.
		6. masih belum optimalnya penegakan perda untuk yang membuang sampah sembarangan
		7. TPST dan TPS3R belum merata diseluruh wilayah kecamatan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		8. Sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya perlu ditingkatkan
		9. Perlu upaya promosi pemanfaatan sampah sebagai sumber penghasilan masyarakat
		10. Bank sampah dan inovasi-inovasi pemberdayaan sampah lainnya perlu ditingkatkan
12. Tata Kelola Pemerintah	1. Implementasi manajemen ASN belum optimal sehingga menciptakan kesan kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang kurang memadai	1. Kompetensi ASN yang belum sesuai dengan kebutuhan
		2. Implementasi Sistem merit untuk manajemen ASN belum optimal
	2. Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien	Akuntabilitas kinerja menurun
	3. Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	1. Penyelarasan regulasi keuangan dan otonomi daerah masih rendah
		2. Infrastruktur dan Literasi digital di sektor keuangan masih rendah
		3. Belum optimalnya penyesuaian core bisnis Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi yang digunakan, antara Pemda dan Bank RKUD.
		4. Rendahnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
	4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset- aset masih belum optimal	1. Terdapat aset aset yang statusnya bermasalah dengan pihak III
		2. Informasi / data yang tersedia terkait pengelolaan aset belum tervalidasi
		3. Cakupan dan rentang kendali dalam pengelolaan aset yang besar
		4. Jumlah sumber daya manusia pengelolaan aset yang tidak memadai
		5. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait data pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang digunakan
		6. Masih terdapat aset yang belum didukung dokumen/data untuk dilakukan proses pensertifikatan tanah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	5. Belum optimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas.	1. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko
		2. Masih lemahnya sistem pengendalian internal Perangkat Daerah
		3. Kurangnya pagu anggaran indikatif pengawasan yang ditetapkan.
	6. Belum optimalnya pembentukan peraturan daerah	1. Belum tersedianya jabatan pelaksana administrasi hukum, analis peraturan dan perundang-undangan dan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang memadai
		2. Peran dan fungsi tenaga ahli DPRD belum optimal
		3. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan kajian perundang-undangan dan penyusunan naskah akademik
		4. Usulan Peraturan Daerah dari Eksekutif/ Perangkat Daerah tidak disertai dengan penjelasan/ keterangan dan/ atau naskah akademik yang memadai
	7. Belum optimalnya pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang perekonomian dan SDM	Belum adanya data kerjasama lokal maupun nasional yang berpotensi dikerjasamakan untuk pembangunan di daerah Kota Pontianak
	8. Belum dilaksanakan kerjasama daerah secara optimal	1. Perangkat Daerah pelaksana kerjasama daerah tidak memberikan laporan pelaksanaan kerjasama dengan tertib dan dilakukan secara tertulis
		2. Tidak tersedianya data potensi wilayah yang bisa dikerjasamakan
	9. Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang update, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal	1. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan layanan publik yang murah dan cepat
		2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dalam satu data kependudukan untuk semua keperluan, seperti pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama dan alamat (By NIK By Name By Address)

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		3. Masih perlunya pembenahan secara menyeluruh terkait masalah infrastruktur disdukcapil meliputi masalah *cyber security* untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi
	10. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam inisiasi inovasi daerah	Upaya promotif inovasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sekitar masih kurang
Keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	1. Rendahnya pendidikan *Parenting* masyarakat
		2. Masalah ekonomi dan komunikasi keluarga
	2. Meningkatnya angka kriminalitas	1. Masalah ekonomi
		2. Peredaran narkoba

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA, 2025

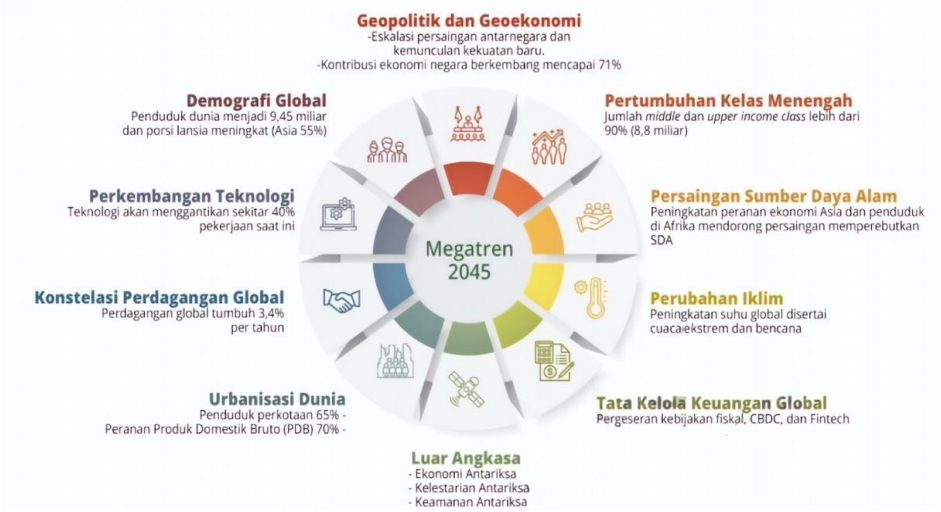
2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang daerah di masa mendatang. Isu Strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun dapat berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat. Hal tersebut dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Pontianak. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

2.3.2.1 Isu Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks dengan adanya perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatrend global. Perubahan global tersebut meliputi perubahan transformative berskala besar, berjangka panjang, dan bersifat massif terutama pada kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence)*. Beberapa faktor tersebut menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat, sehingga menciptakan tatanan kehidupan baru.

Gambar 2.9 Megatren Global 2045



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Terdapat sepuluh *megatrend global* yang akan dihadapi menuju 2045. *Megatrend global* ini memiliki dua sisi, yakni memberikan potensi kemajuan bagi sosial ekonomi global, tetapi disisi lain juga berdampak disrupsi. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

1. Demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Urbanisasi dunia;

5. Konstelasi perdagangan internasional;
6. Tata Kelola Keuangan Global
7. Pertumbuhan kelas menengah
8. Persaingan sumber daya alam
9. Perubahan Iklim
10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Demografi Global

Tantangan terkait penyesuaian, tingginya kebutuhan hidup masyarakat, serta terbatasnya sumber daya alam dan lahan muncul akibat peningkatan penduduk. Berdasarkan data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini berjumlah 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar pada tahun 2050.

Pemenuhan kualitas keluarga dipengaruhi oleh perubahan struktur dan bentuk rumah tangga, perkembangan teknologi digital, dan penetrasi global. Perpindahan penduduk dan pergeseran ideologi berpotensi menimbulkan perbedaan struktur dan bentuk keluarga. Infertilitas, penundaan pernikahan, dan perilaku sesama jenis semakin umum terjadi, menurunkan angka kelahiran.

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dampak dari perkembangan geopolitik yang semakin meluas terhadap seluruh lapisan masyarakat dan tatanan global, tantangan bagi Indonesia adalah meningkatnya persaingan antar negara adidaya yang akan berdampak pada tatanan global.

Kewaspadaan yang semakin meningkat akibat konflik-konflik negara di dunia seperti Perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi menciptakan konflik geopolitik di masa depan di wilayah lain, seperti yang terjadi di Semenanjung Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan. Kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang bagi negara lain, seperti tingginya tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, dan lain-lain. Selain itu, perang mendorong negara-negara untuk mencari cara militer untuk melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya konflik atau perang lagi di kemudian hari.

Geopolitik dan Geoekonomi

Kemunculan kawasan Indo-Pasifik akibat perkembangan dinamika geopolitik yang melibatkan wilayah maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Pasifik telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi memicu persaingan antar negara.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang

ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Negara-negara berkembang semakin mendominasi output dunia. Pada tahun 2015, negara-negara berkembang menyumbang 55% dari total output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang akan mencapai 71% dari total nilai output dunia, dengan negara-negara Asia sebagai pendorong utama menyumbang 54% dari total nilai output global. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita di negara maju masih lebih tinggi dibandingkan negara berkembang.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selama 60 tahun terakhir, sebagian besar negara berkembang mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. 54% ekspor nasional Amerika Latin berbasis komoditas, 81% di Afrika, dan 75% di negara-negara Timur Tengah.Perubahan struktur perekonomian, terutama di negara-negara pengimpor komoditas, telah menurunkan permintaan terhadap komoditas. Tingkat kesiapan menghadapi perubahan komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang terjadi akibat kebijakan makroekonomi yang kredibel berdasarkan prinsip kehati-hatian telah mendukung pertumbuhan selama bertahun-tahun dan akan menjadi salah satu pilar utama di masa depan. Investasi jangka panjang pada peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Reformasi dan perbaikan lingkungan usaha akan mendukung terbentuknya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Perkembangan Teknologi

Manfaat dari perkembangan teknologi digital telah dirasakan oleh masyarakat, seperti *Internet of Things (IoT), blockchain, hyper-connected Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Life Cycle Management,* dan *Robotic Process Automation (RPA)*.

Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi sebagian besar aktivitas industri, seperti: nanoteknologi, *blockchain*; robotika pintar, *IoT*, kecerdasan buatan, dan teknologi imersif; digitalisasi untuk memungkinkan konektivitas: material canggih; rekayasa genetika dan bioteknologi; teknologi

Inovasi dalam proses belajar mengajar berbasis kecerdasan buatan (AI) diperlukan agar transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan dapat terus berjalan tanpa kendala ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan maka penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Kecerdasan buatan kini bahkan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperkirakan sebelumnya. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pengambilan kebijakan, termasuk pengembangan peraturan. Pemanfaatan teknologi membantu tercapainya proses pembentukan undang-undang dan peraturan serta pembangunan lembaga-lembaga nasional yang lebih terencana, lengkap dan sistematis.

Urbanisasi Dunia

Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies.* Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak Kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan Di sisi lain, dampak pandemy COVID-19 di samping.

Konstelasi Perdagangan Internasional

Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Skema *GPN* dan *GVC* menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari *GPN* dan *GVC* tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat *GVC* dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial dan kompetensi SDM industri yang berkualitas. khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Kerja sama Kawasan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* yang beranggotakan negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global investasi.

Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara.

CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT), Computing, Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

Pertumbuhan Kelas Menengah

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses

Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan sumber daya alam (SDA) (energi, air, dan pangan) diperkirakan akan meningkat secara global di masa depan. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi sehingga mendorong persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim global, kerusakan dan polusi lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman (tiga krisis global, tiga krisis planet) diperkirakan akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari. Triple Planet Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan model pembangunan seperti biasa (BaU) yang lama dan beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Banyak negara maju dan berkembang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Promosi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon yang dilakukan Indonesia adalah arah pengembangan kebijakan global di masa depan.

Pemanfaatan Luar Angkasa

Antariksa dianggap sebagai warisan bersama umat manusia, yaitu suatu ruang strategis yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Peraturan bahwa ruang angkasa bukan milik suatu negara tertentu telah mendorong banyak negara untuk mengembangkan industri dirgantara. Dalam jangka panjang, ekonomi antariksa global akan tumbuh secara signifikan.Ekonomi luar angkasa diperkirakan akan mencapai $469 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai $1 triliun pada tahun 2040.

2.3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan.

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.

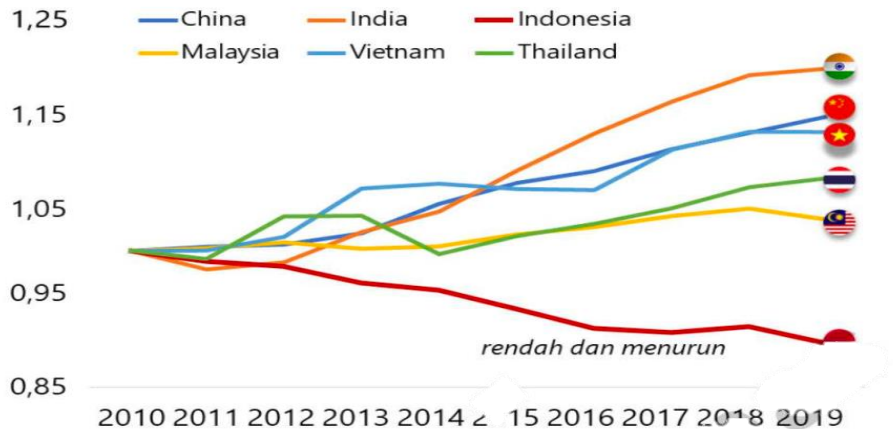
Gambar 2.10 Rata-Rata *Total Factor Productivity Index*



Sumber : APO, 2022

Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

Grafik 2.10 *Total Factor Productivity Index* 2010-2019



Sumber: APO, 2022

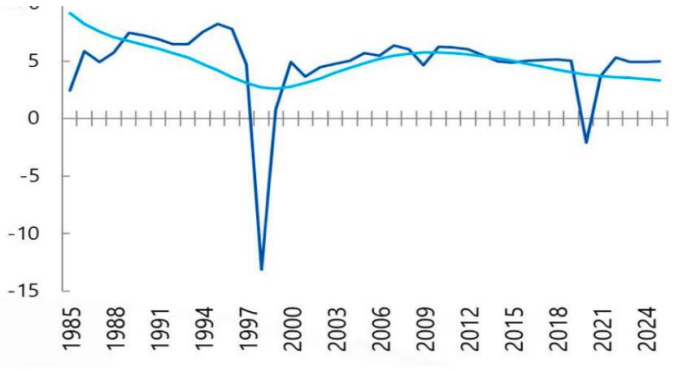
Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata- rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022.

Selain itu, produktivitas yang rendah telah menyebabkan menurunnya ekonomi potensial, dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5%.

2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi disebabkan oleh masih lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari seri anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81). Thailand (1,31), dan Malaysia (1,04) pada tahun 2005.

Grafik 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia (Tahun 1985-2024)



Sumber : Bank Dunia, 2023

3. Kuantitas dan Kualitas SDM Peneliti Belum Memadai,

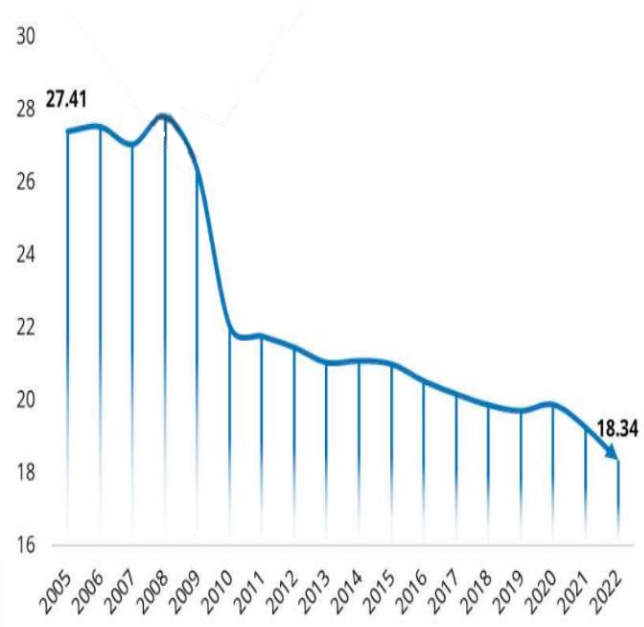
Peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Berikutnya, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional.

Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1.445, jauh tertinggal dari Malaysia (1.863), Singapura (9.766), dan Korea Selatan (267.527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu persoalan lainnya adalah berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

4. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah.

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

Grafik 2.12 Kontribusi Manufaktur terhadap PDB



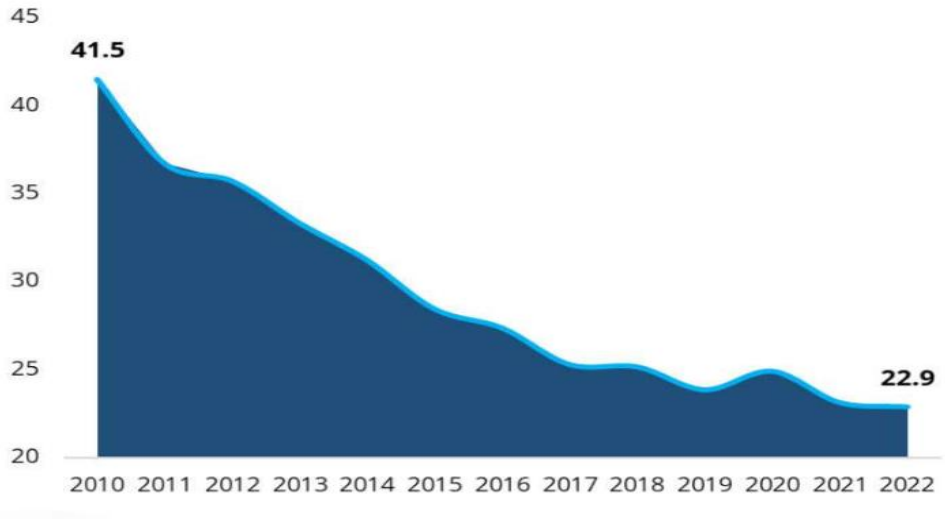
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41% tahun 2005 menjadi hanya 18,34% pada tahun 2022.

Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022 (Grafik 1.2.5).

Grafik 2.13 Produktivitas Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung. masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.

Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication (SLOC)* dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60%.

Rendahnya kontribusi ini juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan emerging sector lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut

dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan antara lain rendahnya penanganan sampah plastik masih tingginya kegiatan illegal unreported, and unregulated fishing (IUUF): serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut. Meskipun demikian, peran kemaritiman dalam perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi ekonomi kelautan yang besar.

6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low-skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

7. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal

Sebesar US$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US$8.449.0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56.3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

8. Visi, Misi, dan Program Prioritas Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Republik, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi yang dinamakan Asta Cita, yaitu:

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi manusia (HAM).

2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Yang diterjemahkan dalam Tujuh Belas Program Prioritas Presiden, yaitu:

1) Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3) Reformasi politik, hukum dan birokrasi.
4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5) Pemberantasan kemiskinan.
6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8) Penguatan pendidikan, sains dan teknoologi, serta digitalisasi.
9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.
11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani.
13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.

14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Serta delapan Program Terbaik Cepat (*Quick Wins*) Presiden, yaitu:

1) Memberi makanan bergizi sehat disekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan, terutama, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

2.3.2.3 Isu Strategis Kota Pontianak

Berdasarkan permasalahan dan analisis akar permasalahan yang ada di Kota Pontianak, berikut ini merupakan proses perumusan isu strategis di Kota Pontianak.

Tabel 2.117 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kota Pontianak

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
Banyaknya Perguruan Tinggi di Kota Pontianak.	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan akses pendidikan belum merata		1. Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu: Pendidikan Berkualitas	1. Peningkatan pelayanan sekolah inklusif. 2. Wajib PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun. 3. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik. 4. Revitalisasi pendidikan nonformal. 5. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6. Adopsi STEAM dan diversifikasi layanan pendidikan berbasis digital. 7. Penguatan pengelolaan guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penerapan sistem pembelajaran sepanjang hayat. 9. Penguatan masyarakat berkarakter ilmiah (*scientific temper*)	Masih rendahnya tingkat pendidikan terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan harapan lama sekolah yang masih di bawah standar nasional	1. Sumber daya manusia kurang berdaya saing

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
				10. Asta cita ke 4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. 11. Program prioritas 8: Penguatan pendidikan, sains dan teknoologi, serta digitalisas. 12. *Quick wins*: 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah	
1. Terdapat Perpustakaan Provinsi dan Tingkat Kota. 2. Rumah baca di setiap Kecamatan. 3. Kemudahan akses internet diseluruh kecamatan.	Literasi masyarakat perlu ditingkatkan			Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi.		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
Telah terbentuk Tim Penanganan Stunting Tingkat Kota Pontianak	Penurunan stunting dan belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Belum tercapainya layanan kesehatan dasar (imunisasi, jaminan kesehatan, angka kematian bayi, ibu, dan neonatal) 3. Belum optimalnya penanganan gizi buruk (malnutrisi, stunting, ketidakcukupan konsumsi pangan)	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu Kehidupan sehat dan sejahtera	1. Penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC, Kusta) 2. Perkuatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. 3. Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan. 4. Jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting. 5. Pendidikan dokter spesialis berbasis RS dan percepatan masa produksi dokter. 6. Pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif thd kesehatan masyarakat. 7. Peningkatan ketahanan keluarga 8. *Quick Wins*: 1)Memberi makanan bergizi sehat disekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2)Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.	1. Prevalensi Stunting masih tinggi. 2. Belum optimalnya peningkatan Umur Harapan Hidup	

1. Tersedia sarana dan prasarana olah raga tingkat Provinsi dan Kota. 2. Kerukunan dan toleransi budaya yang baik di Kota Pontianak	Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan dan pengembangan prestasi olahraga		Masih lemahnya strategi, peran dan prioritas dari *stakeholder* olahraga terhadap olahraga masyarakat	1. Prasarana dan sarana olahraga terbatas dan blm memenuhi standar. 2. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah. 3. Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. 4. Asta cita 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. 5. Program prioritas 17: Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	1. Belum optimalnya peran BUMN dan Pemerintah Daerah dalam mendukung sarana olahraga serta masih kurangnya sinergitas antar organisasi keolahragaan 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga untuk mencapai kebugaran	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Implementasi manajemen talenta belum optimal sehingga menciptakan kesan kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang kurang memadai	Belum tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (antikorupsi, keterwakilan perempuan,penggunaan teknologi dalam pengadaan)	-	1. Penguatan manajemen talenta ASN diseluruh instansi Pemerintah melalui pembangunan talent pool di seluruh K/L/D dengan pemb sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN, perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN. 2. Asta cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberan-tasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. 3. Program prioritas 3: Reformasi politik, hukum dan birokrasi. 4. Pembaharuan hukum kolonial dan adaptif serta penyeder-hanaan regulasi. 5. *Quick wins*:6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	-	2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Belum terciptanya pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB nomor 16 terkait Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan TPB 17 terkait Kemitraan untuk mencapai tujuan;		Perangkat Daerah yang lincah dan dinamis	
	Belum optimalnya profesional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas		-	1. Pembinaan SPIP 2. Pembinaan Kapabilitas APIP	1. Inspektorat sebagai penjamin kualitas untuk menjaga nilai indeks persepsi korupsi (IPK) kurang optimal 2. Pemeriksaan belum berbasis risiko	
	Belum optimalnya pembentukan peraturan daerah		Menguatkan masy yang inklusif dan damai utk pemb berkelanjutan, akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Regulasi yang berlebih *(hyper regulation)* dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang perekonomian dan SDM		Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Asta cita ke 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.	Peningkatan kerjasama antarwilayah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional	
	Kurangnya kerjasama daerah dengan wilayah Kabupaten/Kota sekitar		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 17 Penguatan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Respon kebijakan berskala besar (*extraordinary*) dengan prioritas dan sasaran yang sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi di masing-masing negara	Pemulihan diberbagai sektor pasca covid 19	
Ketersediaan jaringan internet yang merata diseluruh wilayah Kota Pontianak	Adanya tuntutan pelayanan publik berbasis IT dan data yang *update*, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal		Kecepatan Perkembangan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi diberbagai bidang kehidupan masy	Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat	1. Percepatan pemerintah digital	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Kurangnya pelibatan masyarakat dalam inisiasi inovasi daerah				2. Percepatan masyarakat digital	
Terbentuknya Kelurahan tanggap bencana	Perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1. Penanggulangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim. 2. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 3. Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan 4. Mitigasi Terhadap Perlindungan Banjir 5. Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim 6. Perubahan Iklim dan Kerawanan Bencana	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	Meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi		3. Rendahnya ketahanan daerah dan kualitas lingkungan hidup
			Perlunya kerja sama dengan dunia internasional terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlunya dukungan dari pusat terkait aturan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut	Perlu adanya kerjasama pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut antar daerah untuk menjaga kelestariannya	
			Menggabungkan strategi pencegahan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan	Belum efektifnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan		
			Peningkatan kemitraan kerjasama dalam pengurangan risiko bencana	Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar *stakeholder* yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media massa dan NGO		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
		7. Belum Optimalnya Penanganan Risiko Bencana (Indeks Risiko Bencana, lahan kritis)	Perlunya pengembangan teknologi peralatan yang canggih dalam mendeteksi bencana	Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat		
			-	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta sumber daya aparatur penanggulangan bencana		
	Menurunnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup 2. Belum tercapainya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (tutupan hutan, keanekaragaman hayati) 3. Peningkatan Terhadap Penyediaan Air Bersih 4. Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	1. Meningkatnya frekuensi bencana	Penurunan curah hujan dan peningkatan suhu ekstrem	
				2. Penurunan kualitas udara secara nasional, bahkan sempat berdampak ke negara tetangga	Kebakaran hutan dan lahan	
				3. Penurunan beban pencemaran lingk hidup (kualitas air, tanah, udara) 4. Prog. Prioritas 11: Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta terjaganya ekosistem keanekaragaman hayati	
			Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Masih minimnya peraturan dari pemerintah pusat dan program untuk mendukung daerah dalam mendorong Program GRK dan Proklim	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam penanganan Program GRK dan Proklim	
			Keterbatasan sumber daya air	Penurunan Kualitas dan kuantitas Air Permukaan	Penurunan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
			Masih minimnya peran masyarakat internasional dalam mendorong pemenuhan pilar-pilar SDG's pada negara-negara yang sedang berkembang	Kurang konsistensi dan keberlanjutan program pemerintah pusat dalam pemenuhan pilar-pilar SDG's	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam pemenuhan pilar-pilar SDG's	
			Kurang konsistennya pihak internasional dalam membatasi penggunaan bahan bakar fosil yang dpt menyebabkan meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Masih kurangnya inovasi dalam pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan pembangkit listrik	Kurangnya sinkronisasi antara tiap daerah dalam pengurangan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan pembangkit listrik	
			Kurang konsistennya pihak internasional dalam menjaga luasan ruang terbuka hijau untuk negara-negara yang memiliki peran sebagai paru-paru dunia	Masih minimnya peraturan pemerintah pusat bagi daerah yang belum memenuhi standar RTH yang ditetapkan	Kurangnya sinkronisasi antar daerah dalam pemenuhan standart Ruang Terbuka Hijau terutama pada daerah yang berbatasan	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
		1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 2. rlindungan Kawasan Hijau yang Berpotensi Menjadi Wilayah Konservasi untuk Biodiversitas	Meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil	Perlunya inovasi pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk melakukan pengembangan sampah menjadi energi baru terbarukan	Perlu kolaborasi antara Kab/Kota dlm pemanfaatan energi baru terbarukan	
			-	Tahun 2030 tidak diperbolehkan lagi adanya TPA (semuanya harus berubah menjadi TPST), namun jenis produk kemasan yang *Non Biodegradable* (tidak bisa diurai oleh alam) semakin berkembang	1. Rencana TPA Regional terkendala masalah lahan dan pembiayaan	
					2. Pengelolaan sampah dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang tinggi perlu kolaborasi peran serta masyarakat dan pemerintah	
			Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 15 Ekososistem Darat	Berkurangnya Keanekaragaman hayati *(biodiversity)* akibat penggunaan tata guna lahan yang tidak terkendali		
	Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan dokumen rencana tata ruang		Pembangunan berbasis Tata Ruang yang menyeimbangkan urbanisasi dengan meminimalisasi potensi degradasi lingkungan	1. Perkuatan Kebijakan tata ruang dengan terbitnya UU Cipta Kerja seperti perizinan pemanfaatan ruang secara digital	Pembangunan yang berkelanjutan dengan mengacu pada RTRW Kota	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
				2. Asta cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
	Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada *peak hour*	1. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Akses Layanan Publik 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 9 SDG's: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1. Belum optimalnya konektivitas, menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik	1. Konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih menghadapi bebrapa tantangan	4. Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
			Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat.	2. Percepatan Pemanfaatan kendaraan transportasi yang menggunakan energi bersih yang didukung dengan penggunaan sistem penyimpanan enegi secara massal di seluruh wilayah indonesia dalam mewujudkan transportasi hijau	2. Pengembangan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan dan pembangunan serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	
	Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai		Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas	Transportasi Multimoda yang terintegrasi	Pengembangan Transportasi Perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota - kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Banjir dan genangan di wilayah Kota Pontianak		Urbanisasi dan Perubahan Iklim	1. Deforestasi dan penyediaan rumah layak huni	Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur	
	Sumber Air Baku semakin terbatas		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 6: Air Bersih dan sanitasi aman	2. Infrastruktur hijau yang maju dan mutakhir 3. Program Priorotas 13: Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan		
	Air PDAM yang ada belum dimanfaatkan oleh warga sebagai air minum sehari-hari					
	belum optimalnya pengembangan dan pembangunan sistem sanitasi lingkungan					
	Kebutuhan perumahan yang tidak sebanding dengan ketersediaan dan penyediaan perumahan		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan			
	Masih terdapat prasarana perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan serta drainase lingkungan yang kondisinya belum baik	1. Belum tercapainya akses terhadap perumahan layak dan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, perumahan kumuh)				

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Masih terdapat Kawasan kumuh di Kota Pontianak					
	Kualitas jalan lingkungan belum merata					
	Semakin berkurang lahan pemakaman (perkuburan) yang ada					
	Daya tampung (kapasitas) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbatas	1. Mewujudkan Kota yang Bersih, Berwawasan Lingkungan dan Sesuai Tata Ruang		Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan danpemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 1OO persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.	1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 2. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 1/3 daur ulang)	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Pemanfaatan sampah sebagai Pengembangan energi terbarukan yang masih belum maksimal		Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomimenyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadi kompetisi dan persaingan geopolitik.	Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi	Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik	
	Masih adanya penduduk miskin serta akses perlindungan sosial yang belum optimal	1.Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Pengentasan Kemiskinan 3.. Pengurangan Kemiskinan	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan dan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	1. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif 2. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP di seluruh wilayah Kalimantan terutama Kalimantan Barat *Quick wins*: 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha umenghilangkan kemiskinan absolut. 7) utk Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi untuk yang membutuhkan, terutama, masyarakat berpenghasilan rendah	Pembangunan IKN memperbesar kesempatan kerja	5.Kesejahterahan masyarakat belum merata

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Akses Pangan yang Tidak Merata		Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu TPB 2 Tanpa Kelaparan	1. Asta cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. 2. Program Prioritas: Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani 3. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.	Konektivitas distribusi daerah sentra produksi dengan daerah pemasaran/konsumen.	
Bonus Demografi	Meningkatnya angka ketergantungan		Bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.	Peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia produktif bersamaan dengan jumlah penduduk lanjut usia, urbanisasi yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk perkotaan, migrasi yang belum seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah tertentu.	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masy terutama kelmpk marginal melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak akibat ekosistem ekonomi kreatif yang belum siap		Fenomena perkembangan cepat *Artificial Intelligence* mulai merambah industri kreatif menggeser ide kreatifitas manusia.	1. Ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.	1. Belum terjalin relasi regional (antar kawasan) dalam upaya saling mendorong pembangunan ekonomi kreatif	
			Plagiarisme hasi karya industri kreatif semakin mudah dengan berkembangnya TIK dan Sosial Media	2. SDM kreatif eksodus ke Luar Negeri didasari motif ekonomi sehingga berdampak industri lokal kesulitan mendapatkan tenaga kerja kreatif yang berkualitas di dalam negeri	2. Kesamaan geografis dan budaya menyebabkan realtif kurangnya nilai keunikan karya kreatif	
			Dominasi ekonomi negara china dengan produk yang lebih murah	3. Birokrasi yang tidak efisien dan besarnya biaya di luar ongkos produksi		
				4. Ketergantungan bahan baku dan peralatan import dalam industri kreatif		
				5. Kebijakan prioritas Produk Dalam Negeri dan TKDN		
				6. Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya pencitraan negara (national branding) di mata dunia Internasional		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
				7. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable, high risk high return, cash flow* yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible;"		
				8. Asta cita 8: 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. 9. Program Prioritas 17: Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga		
	Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	-	-	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Pembinaan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi yang belum optimal		-	1. Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi. 2. Program priorotas 14: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	-	
	Tingginya tingkat pengangguran dan *underemployment* terutama di kalangan pemuda		Adanya kesenjangan antara keterampilan yang diminta oleh pasar global dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja	Transformasi Ekonomi Nasional RPJPN seperti penyiapan tenaga kerja yang terampil	Diperlukan adanya sinkronisasi antara pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja	
	Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan tuntutan pasar kerja			Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia		Adanya pengembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things,* dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang cepat dan transformasi ekonomi membutuhkan keterampilan baru yang relevan, dan mengatasi kesenjangan ini menjadi prioritas.	Transformasi Digital RPJPN		
	Rendahnya lapangan kerja formal bagi penyandang disabilitas			Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyrusui, anak, korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya melalui penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai.	-	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Banyak tenaga kerja terutama dalam sektor informal menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, termasuk kontrak sementara atau kontrak tanpa jaminan keamanan pekerjaan		Ketidakpastiaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Fluktuasi ekonomi global, perubahan teknologi, dan krisis keuangan dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan pekerjaan.	Hak dan Kondisi Kerja. Perlinduangan hak-hak tenaga kerja, termasuk hak untuk berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kondisi kerja yang layak, adalah aspek penting dalam memastikan kesejahteraan pekerja.	-	
	Banyak pekerja, terutama di sektor informal, bekerja dalam kondisi yang tidak memadai, termasuk jam kerja yang panjang, gaji rendah, lingkungan kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan keamanan kerja yang memadai.		Ketenagakerjaan Informal. Sebagian besar tenaga kerja di negara-negara berkembang bekerja dalam sektor informal, yangs ering kali tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, jaminan sosial, atau perlindungan hukum yang memadai. Meningkatkan kondisi pekerja disektor informal menjadi tantangan utama.	Ketenagakerjaan Informal. Jumlah besar pekerjaan informal adalah isu yang signifikan. Perlindungan sosial dan keamanan kerja bagi pekerja di sektor ini adalah yang perlu diperhatiakan.	Kondisi Ketenagakerjaan di Perdesaan dan Perkotaan. Isu khusus terkait dengan ketenagakerjaan di daerah perdesaaan dan perkotaan, termasuk urbanisasi, akses terhadap pekerjaan dan infrastruktur, serta tingkat pengangguran di kedua konteks ini.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Diskriminasi dan Ketidaksetaraan dalam pekerjaan, promosi, dan pendapatan yang adil		Persoalan Gender dan Ketenagakerjaan. Kesetaraan gender ditempat kerja, termasuk kesenjangan gaji dan partisipasi perempuan dalam sektor formal dan informal, tetap menajdi isu penting.	-	Kebijakan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial. Mendorong kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender, inklusi sosial dan akses kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat disuatu wilayah adalah isu kursial.	
	Migrasi Tenaga Kerja yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di negara asal dan negara tujuan		Migrasi Tenaga Kerja Internasional. Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena global yang signifikan, baik yang terkait dengan migrasi tingkat tinggi maupun buruh migran.	Migrasi Tenaga Kerja. Pengelolaan migrasi tenaga kerja, baik internal maupun internasional, termasuk perlindungan dan manfaat bagi pekerja migran serta integrasi mereka dalam masyarakat, adalah isu penting.	Migrasi Tenaga Kerja Regional. Pergerakan tenaga kerja antar negara atau wilayah disuatu kawasan dapat menciptakan keseimbangan anatar penawaran dan perminataan tenaga kerja, serta mempengaruhi kebijakan imigrasi dan integrasi sosial.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Tidak adanya insentif pada calon investor dan potensi daerah yang belum dipromosikan secara optimal	1.Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Peningkatan Perekonomian	Perubahan geopolitik dan geoekonomi akan merubah paradigma pembangunan global.	Pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi hijau *(Green Investment)*	-	6. Belum optimalnya pengembangan simpul ekonomi perdagangan dan jasa skala nasional
	Tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi rendah		Peran perdagangan internasional akan tumbuh 3,4%/th.	Hilirisasi komoditas unggulan berbasis ekspor	-	
tanaman lidah buaya, tanaman sayur	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;	1. Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.	Pengembangan pusat-pusat industri di wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batubara, migas, dan hasil hutan) dan (ii) berbasis teknologi tinggi berklanjutan seperti industri *oleochemicals*, *petrochemicals*, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik, dan bioteknologi.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
				2. Asta cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
			2. Green Industry	Penerapan ekonomi sirkular, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui industri hijau.		
1. Water Front Sungai Kapuas 2. Sarana prasarana Olah raga	Pemanfaatan destinasi wisata belum di kelola optimal serta belum sinkronnya acara acara seperti olah raga wisata, dan kebudayaan		ASEAN sebagai episentrum event (MICE) berskala internasional	1. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.	IKN memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke Ibu Kota.	
	Belum optimalnya pembangunan waterfront city pada seluruh tepian Sungai Kapuas dan sarana prasarana pariwisata lainnya		Pengembangan Program Pariwisata Digital dengan meningkatkan jumlah *start-up* atau perusahaan rintisan di bidang pariwisata	2. Peningkatan pariwisata berkelanjutan serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dan berorientasi ekspor.		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
			Digitalisasi nomadic tourism fenomena wisata di mana wisatawan lebih suk menjelajah dan bekunjung ke destinasi yang kurang konvensional.	3. Pengembangan destinasi wisata potensial seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam.		
			Pengembangan Virtual Tour yang memungkinkan wisatawan untuk mengunjungi destinasi melalui pengalaman virtual.			
			Kampanye staycation (tren di mana orang menghabiskan liburan mereka di daerah lokal daripada bepergian jauh). Konsep *Sustainable Tourism*			

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Penurunan jumlah produksi pertanian (Tanaman Pangan & Hortikultura)			1. Konversi lahan pertanian (59% lahan dikuasai RT dan kepemilikan < 0,5 Ha) 2. Program prioritas 1: Mencapai swasembada pangan, energi dan air 3. *Quick Wins*: 1) Memberi makanan bergizi sehat disekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	-Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sebagai sentra pembangunan di semua sektor	
1. Kedekatan dengan Laut Natuna potensi perikanan tangkap. 2. Sungai Kapuas memberi potensi sektor perikanan	Belum Optimalnya Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang inovatif, produktif, lestari dan berkelanjutan			Meningkatnya indeks kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	-	
	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil			1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk hasil peternakan	1. Pemasukan ternak	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	perikanan dan jaminan keamanan			2. Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat	2. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang proses pemasukn ternak. 3. Pembangunan rumah potong dengan standar	
	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya, sarana dan prasarana di bidang peternakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan			1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk peternakan yang memiliki jaminan ASUH/ASU. 2. Meningkatnya angka kesejahteraan masyarakat		
	Pengelolaan keuangan belum mengikuti perkemb teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif	Keuangan internasional akan mengalami pergeseran dari Dollar AS menjadi multi currencies	Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau.	-	7. Kemandirian Keuangan Daerah belum optimal
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih berada pada kategori menuju mandiri		Penguatan sektor keuangan global dgn peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi.	1. Transformasi digital dalam pengelolan keuangan negara. *Quick wins*: 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk di antaranya sektor keuangan	

	Penguatan Local Taxing Power melalui transformasi akselerasi, integrasi data, digitalisasi pengelolaan pajak daerah, sinergisitas dan kolaborasi belum optimal		Kemajuan dalam tegnologi keuangan seperti *blockchain*, *cryptocurrency* dan *fintech* membawa perubahan pada sistem keuangan global	Pembangunan yang efektif dan efisien dengan: (i) intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) peningkatan peran aktor pembangunan (nonpemerintah) dalam kerja sama pendanaan dan investasi daerah; (iii) peningkatan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada pemanfaatan Transfer ke Daerah dalam memenuhi penyediaan pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sektor unggulan serta optimalisasi APBD sebagai stimulan untuk mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif; dan (iv) kebijakan transfer ke daerah yang bersifat asimetris dan afirmatif untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih konvergen. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dan peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
	Pengelolaan dan pemanfaatan aset aset masih belum optimal		Aset negara punya peranan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan indeks daya saing infrastruktur dan global	Belum optimalnya pengelolaan aset negara baik dari segi administrasi dan pemanfaatannya yang memberi nilai tambah	Manajemen pengelolaan aset belum optimal.	
	Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Belum optimalnya pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial)	Salah satu tujuan SDG's Tahun 2030, yaitu kesejahteraan gender	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak,perempuan, pemuda, disabilitas,lansia 2. Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif 3. Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak	8. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis Sesuai Konteks			Isu Strategis Daerah
			Internasional	Nasional	Regional	
				4. Asta cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 5. Program prioritas 10: Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas.		
	Meningkatnya angka kriminalitas		Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	1. Asta cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi manusia (HAM. 2. Keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	

Sumber: Hasil Analisis BAPPERIDA, 2025

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa isu strategis yang ada di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya ketahanan daerah dan kualitas lingkungan hidup, dengan lingkup:
   a. Mitigasi dan Penanggulangan bencana
   b. Adaptasi Perubahan Iklim
   c. Ekonomi Sirkuler
   d. Pengelolaan sampah dan limbah domestik
   e. Peningkatan RTH
   f. Ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW
2. Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur berkelanjutan, dengan lingkup:
   a. Prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai termasuk sanitasi yang layak dan aman
   b. Transportasi umum yang terintegrasi
   c. Konektivitas wilayah sekaligus mengurangi kemacetan
   d. Penyediaan drainase dengan kapasitas yang memadai
   e. Penyediaan air bersih untuk air minum aman
   f. Penyediaan listrik dari energi terbarukan
   g. Hunian dan Perkantoran vertikal
3. Kemandirian Keuangan Daerah belum optimal.
4. Belum optimalnya tata kelola Pemerintah, dengan lingkup:
   a. Pencegahan korupsi melalui zona integritas
   b. Akuntabilitas kinerja
   c. Implementasi Managemen Talenta
   d. Kualitas pelayanan publik berbasis digital
5. Sumber daya manusia yang kurang berdaya saing, dengan lingkup:
   a. Kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
   b. Kualitas kesehatan masyarakat
   c. Pemenuhan hak anak
   d. Kesetaraan gender
   e. Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar
   f. Kepemudaan dan olahraga
6. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata, dengan lingkup:
   a. Pengentasan kemiskinan
   b. Pemerataan distribusi pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah
   c. Ketahanan pangan
   d. Pemberdayaan lansia dan disabilitas
7. Belum optimalnya pengembangan simpul ekonomi perdagangan dan jasa skala nasional, dengan lingkup:
   a. Peningkatan investasi

b. Industri dan perusahaan skala kecil dan menengah
c. Daya saing jasa sektor kesehatan dan pendidikan
d. Pariwisata
e. Ekonomi kreatif

8. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan lingkup:
   a. Perlindungan anak dan perempuan
   b. Penegakan peraturan daerah
   c. Kerukunan antar umat beragama



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAAN DAERAH

menyambut lebaran bikin kue sagu
lebih maknyus ditambahi keju
bersatu padu tak kenal ragu
menuju Pontianak semakin maju

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Daerah merupakan intisari dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak dan dijabarkan dalam turunan. Isi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2025-2045 adalah "KOTA PONTIANAK UNGGUL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN". Visi tersebut dapat di jelaskan dalam lima misi yang memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Berbasis Tegnologi Informasi.
3. Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Insfratruktur Hijau.
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif,Stabil,Produktif,Kreatif,dan Inovatif.
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Visi dan misi jangka panjang tersebut dapat diwujudkan melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Pontianak

3.1.1 Visi , Misi Kota Pontianak

Visi Kota Pontianak

Dengan memperhatikan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 adalah:

"MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS"

1. **Pontianak Maju**

   Kota Pontianak akan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan

insfratruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan kesehatan setara dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya.

2. Pontianak Sejahtera

   Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi, dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, penguatan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua.

3. Pontianak Berwawasan Lingkungan Yang Humanis

   Pontianak akan mengedepankan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan keharmonisan dalam komunitas. Kota ini akan ramah lingkungan dan menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

Misi Kota Pontianak

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarakan kepada tujuan dana sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah kot apontianak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.

   Misi ini sejalan dengan visi maju dengan berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang mudah diakses, serta pelatihan keterampilan kerja akan menciptakan masyarakat yang siap bersaing dan unggul. Perlindungan sosial bagi pekerja akan memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

   Misi ini mendukung visi maju dan sejahtera dengan mendorong pemerintahan yang transparan, efektif dan kolaboratif. Melalui penggunaan teknologi informasi, pelayanan publik akan lebih cepat dan efisien.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat hubungan humanis antar warga dan pemerintahan yang mendukung inklusivitas serta inovasi.

3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas.

   Misi ini bertujuan untuk menciptakan Kota yang ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali. Kota Pontianak akan semakin hijau dengan menambah taman dan ruang terbuka yang bisa dinikmati oleh warga sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Sistem drainase akan dibangun, dipelihara, dan direhabilitasi untuk mengurangi risiko genangan ketika hujan turun. Pengelolaan sampah juga akan ditingkatkan sehingga lingkungan tetap bersih dan limbah tidak mencemari udara maupun air. Insfratruktur dasar yang mendukung meliputi jalan-jalan yang baik dan memadai untuk memastikan mobilitas warga dan distribusi barang lebih efisien. Penyediaan fasilitas air bersih juga akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

   Selain itu, akses internet yang cepat dan stabil akan dibangun sebagai bagian dari insfratruktur digital yang penting untuk memfasilitasi aktivitas warga sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun komunikasi. Teknologi pintar akan diterapkan dalam berbagai aspek tata kelola kota, seperti pengelolaan lalu lintas, layanan publik, dan keamanan, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparansi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan insfratruktur dasar dan digital yang kuat, Kota Pontianak akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman, modern dan efisien sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.

4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif.

   Misi ini mendukung visi sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peneberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang e-commerce akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningktakan daya saing ekonomi masyarakat diera digital.

5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

   Misi ini mendukung visi humanis dengan menekankan pentingnya keharmonisan antar warga. Edukasi hukum, pemberdayaan keluarga sebagai pendidik utama, serta pembangunan fasilitas umum seperti taman bermain, ruang publik dan fasilitas olahraga secara merata di seluruh wilayah pontianak akan memperkuat ketahanan sosial dan budaya. Hal ini akan mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan ramah bagi semua.

Berikut ini program-program yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada saat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Program-program tersebut mendukung misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih selanjutya akan menjadi visi misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2025-2029. Adapun program tersebut adalah:

Tabel 3.1 Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Misi	Program Prioritas
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	a. Program Hidup Sehat dan Bersih, Tujuannya untuk mengajak semua warga Kota Pontianak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat.
		b. Program Integrasi Layanan Primer, program ini menyatukan layanan kesehatan.
		c. Program Antenatal berkualitas, program ini membantu ibu hamil agar mendapatkan perawatan kesehatan rutin dan baik.
		d. Program Penangan Stunting, program ini memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan mengedukasi orang tua agar memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya.
		e. Program Penanggulangan TBC, bertujuan untuk mengurangi penyebaran TBC dengan memberikan penyuluhanm memperbaiki fasilitas kesehatan untuk diagnosa, dan menyediakan pengobatan yang diperlukan.
		f. Program Jaminan Sosial Kesehatan, program ini menyediakan jaminan kesehatan bagi semua warga tanpa biaya mahal.
		g. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pekerja akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja.
		h. Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program ini mendorong semua anak di Pontianak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA.
		i. Program Pendidikan Karakter dan Akhlak, tujuannya menanamkan nilai-nilai moral yang baik pada siswa disekolah.
		j. Program Insentif PAUD, Tujuan memberikan bantuan kepada guru PAUD agar mereka bisa memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.
		k. Program Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya membantu mengurangi kemiskinan di pontianak dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja dan pembiayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa hidup lebih sejahtera.
		l. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat, melalui program ini, masyarakat akan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
		m. Program Olahraga Daerah, program ini mengajak masyarakat untuk lebih aktif berolahraga.

No	Misi	Program Prioritas
		n. Program Kota Layak Anak, tujuannya menjadikan pontianak kota yang ramah anak dengan menyediakan fasilitas seperti taman bermain, perpustakaan anak, dan area publik yang aman bagi anak-anak.
		o. Program Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu, anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan beasiswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir soal biaya sekolah.
		p. Program Pendidikan Berkualitas Global, program ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di pontianak agar setara dengan pendidikan dinegara maju.
		q. Program Pusat Layanan Kesehatan Terpadu, pemerintah akan membangun pusat layanan kesehatan yang menyediakan berbagai jenis perawatan dalam satu tempat.
		r. Program Beasiswa Luar Negeri, siswa berprestasi dan guru akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak dan kembali membangun pontianak dengan ilmu yang diperoleh.
		s. Program Kesehatan Masyarakat Berstandar Internasional, program ini menerapkan standar kesehatan internasional untuk mencegah penyakit menular dan memastikan semua warga pontianak sehat dan terhindar dari berbagai wabah penyakit.
		t. Program Makan Gratis, anak-anak sekolah dan keluarga kurang mampu akan mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari agar kesehatan mereka terjaga.
		u. Program Pengembangan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah akan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit agar lebih nyaman dan berkualitas dalam memberikan layanan.
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	a. Program Digitalisasi Pemerintahan, pemerintahan akan memanfaatkan teknologi digital agar layanan publik lebih cepat dan efisien.
		b. Program Pelayanan Prima, pemerintah akan melatih petugas pelayanan publik agar lebih ramah, cepat dan tepat dalam melayani masyarakat.
		c. Program Pengembangan Kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara), ASN akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam bidang teknis maupun manajerial, sehingga mereka bisa bekerja lebih profesional.
		d. Program Inovasi Pelayanan Publik, Program ini mendorong pemerintah untuk terus mencari cara baru dan kreatif dalam memberikan pelayanan.
		e. Program Pendidikan Anti-Korupsi, program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan ASN

No	Misi	Program Prioritas
		tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.
		f. Program ASN Ber-AKHLAK, ASN akan dididik untuk menerapkan nilai-nilai moral yang baik seperti disiplin, kejujuran dan tanggungjawab dalam bekerja.
		g. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3.	Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dan Humanis Melalui Penyediaan sarana,Prasarana Dasar,Dan Utilitas.	a. Program Ruang Terbuka Hijau, pemerintah akan memperbanyak taman dan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan warga untuk berolahraga, rekreasi atau bersantai.
		b. Program Pengelolaan Air Limbah Terpadu, program ini bertujuan untuk mengolah air limbah domestik (air kotor dari rumah tangga) agar tidak mencemari lingkungan.
		c. Program Tanpa Kantong Plastik, Pemerintah akan mengurangi penggunaan kantong palstik dengan mendorong masyarakat menggunakan tas atau wadah yang bisa dipakai berulang kali.
		d. Program bank Sampah Kelurahan, Disetiap kelurahan akan didirikan bank sampah, dimana warga bisa menukar sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik atau kertas dengan uang atau barang lainnya.
		e. Program Pegendalian Genangan, pemerintah akan memperbaiki dan membangun saluran air serta drainase didaerah-daerah yang sering mengalami genangan atau banjir saat hujan.
		f. Program Sungai Bersih, Pemerintah akan membersihkan sungai-sungai di pontianak dari sampah dan limbah.
		g. Program Subsidi Akses Air Bersih, program ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.
		h. Program Pembangunan *Inner/Outer Ring* Road, pemerintah akan membangun jalan lingkar dalam dan luar kota (ring road) untuk mengurangi kemacetandi pusat kota.
		i. Program Waterfront, program ini akan melanjutkan pembangunan kawasan tepi sungai (waterfront) di sepanjang sungai kapuas.
		j. Program Penanganan Genangan Air, Pemerintah akan memperbaiki sistem drainase di wilayah yang serig tergenang air saat hujan.
		k. Program Pembangunan Jembatan Garuda, pemerintah akan membangun jembatan garuda yang menghubungkan wilayah-wilayah di pontianak agar warga bisa bergerak lebih cepat dan lancar.
4.	Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil,	a. Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak, pemerintah akan memberikan pelatihan dana bantuan bagi warga yang ingin memulai budidaya ikan atau beternak hewan.

No	Misi	Program Prioritas
	Produktif, Kreatif, dan Inovatif	b. Program Gapoktan Aktif dan Produktif, program ini membantu kelompok tani (gapoktan) agar lebih produktif dalam mengelola lahan pertanian.
		c. Program Kawasan Kuliner Halal, pemerintah akan mengembangkan kawasan kuliner halal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
		d. Program Wisata Urban dan Budaya, program ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di pontianak melalui pengembangan destinasi wisata kota dan budaya.
		e. Program Pengembangan Kewirausahaan, program ini akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha.
		f. Program Koperasi Sehat, pemerintah akan membantu koperasi di pontianak agar lebih efektif dalam mengelola dana dan memberikan keuntungan bagi anggota.
		g. Program Pendampingan BUMD, pemerintah akan mendampingi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa beroperasi lebih efisien dan produktif.
		h. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (*E-Business dan E-Commerce*), pemerintah akan melatih tenaga kerja di bidang *e-business* dan *e-commerce* agar mereka bisa bersaing diera digital.
		i. Program Klinik Inovasi Daerah, program ini akan menyediakan tempat bagi warga yang punya ide-ide inovatif untuk mengembangkan produk baru atau teknologi yang bisa membantu masyarakat.
		j. Program Rumah Layak Huni, pemerintah akan membangun atau memperbaiki rumah-rumah bagi warga yang kurang mampu agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak dan nyaman.
5.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial Budaya	a. Program Kelurahan Tangguh Bencana, program ini bertujuan mempersiapkan setiap kelurahan agar lebih tanggap dalam menghadapi bencana alam seperti banjir atau kebakaran.
		b. Program Pendidikan Anti Kriminalitas, Pemerintah akan mengadakan program penyuluhan tentang cara-cara mencegah tindakan kriminal, seperti pencurian, narkoba dan tindakan kekerasan.
		c. Program Fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKUB akan didukung oleh pemerintah untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama
		d. Program Penguatan Bangga Kencana, program ini bertujuan untuk memperkuat program keluarga berencana (KB).
		e. Program Perempuan Sebagai Madrasatul Ula (Sekolah Utama dalam Keluarga), program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendidik utama di keluarga.
		f. Program Peningkatan Kualitas SDM Perempuan, program ini memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan, seperti keterampilan menjahit, memasak

No	Misi	Program Prioritas
		atau usaha kecil lainnya. Tujuanya adalah memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan bisa membantu perekonomian kelaurga.
		g. Program Koordinasi Penyalahgunaan Narkotika, program ini berfokus pada pencegahan dan rehabilitas bagi warga terkena dampak narkoba.
		h. Program Peningkatan Internal RT/RW, program ini memberikan insentif kepada RT dan RW agar mereka lebih semangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.
		i. Program Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Fardhu Kifayah, pemerintah akan memberikan insentif kepada guru ngaji dan mereka yang membantu pelaksanaan fardhu kifayah.
		j. Program Pengembangan Taman Bermain dan Area Publik, Pemerintah akan membangun lebih banyak taman bermain dan ruang publik di seluruh wilayah pontianak, terutama di Pontianak Utara dan Timur.
		k. Program Fasilitas Olahraga untuk Semua, Pemerintah akan membangun fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh semua warga. Lapangan bola, lapangan bulutangkis dan pusat kebugaran akan disediakan agar warga bisa berolahraga dengan mudah.
		l. Program Pemanfaatan Ruang Pubik Untuk Kegiatan Sosial dan Ekonomi, runga publik seperti taman dan alun-alun akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, seprti pasar rakyat, pertunjukkan seni dan acara budaya.
		m. Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan, Pemerintah akan memastikan pembangunan insfratruktur, seperti jalan, jemabatan dan fasilitas umum, tersebar secara merata diseluruh wilayah pontianak, baik di pusat kota maupun di pinggiran

Sumber data: Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Berikut ini tabel dukungan pemerintah Kota Pontianak terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Dukungan Pemerintah Kota Pontianak Terhadap Asta Cita /Prioritas Nasional

No.	Asta Cita/ Prioritas Nasional	Misi Kota Pontianak/ Prioritas Daerah
Cita 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

No.	Asta Cita/ Prioritas Nasional	Misi Kota Pontianak/ Prioritas Daerah
Cita 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi
Cita 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas
Cita 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif
Cita 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
Cita 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
Cita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM	5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya
Cita 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	

Sumber data:Data olahan,2025

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indicator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

Visi: "Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Yang Humanis"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,22	82,73	83,23	83,73	84,24	84,74	85,25	85,25	
			1.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1.Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)	%	22,30	21,00	19,60	18,20	16,80	15,40	14,00	14,00	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk,KB & Pemberdayaan Perempuan
				2.Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	77,68	Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.Rata-Rata lama sekolah	Tahun	10,47	10,56	10,65	10,74	10,83	10,92	11,01	11,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,06	15,12	15,18	15,24	15,30	15,36	15,42	15,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3.Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	82,55	83,00	83,15	83,30	83,45	84,00	84,15	84,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3.Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1.Indeks pembangunan keluarga (IPK)	Indeks	63,15	63,80	64,40	65,00	65,60	66,20	66,80	66,80	Dinas Pengendalian Penduduk,KB dan Pemberdayaan Perempuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				2.Indeks ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0,239	0,230	0,220	0,200	0,180	0,160	0,140	0,140	Dinas Pengendalian Penduduk,KB & Pemberdayaan Perempuan
				3.Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,04*	69,00	70,50	72,00	74,00	76,00	78,28	78,28	Dinas Pengendalian Penduduk,KB & Pemberdayaan Perempuan
			4.Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	55,00	55,55	56,00	56,75	57,00	57,85	57,85	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			Indeks	75,89	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	
			1.Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,54	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	Sekretariat Daerah
			2.Meningkatnya ASN Yang Berkualitas	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,81	0,81	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87	Badan kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3.Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1.Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,35	4,40	4,45	4,46	4,47	4,48	4,50	4,50	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan,

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				2.Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,29	61,40	61,80	62,00	62,30	62,40	62,80	62,80	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
			4.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Aset Daerah
			5.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,49	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,98	3,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.Indek Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
			6.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,04	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pemabngunan Riset dan Inovasi Daerah
			7.Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,72	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50	Inspektorat

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas.	1.Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infratruktur Kota			Indeks	77,77	78,68	79,34	79,86	81,16	81,66	82,41	82,41	
			1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kota	1. Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Indeks	85,30	86,52	87,16	87,50	89,60	89,90	90,40	90,40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				2. Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks	71,60	72,29	72,95	73,60	74,26	74,92	75,88	75,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2.Meningkatnya Kelancaran Transportasi	Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota	Km/Jam	26,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perhubungan
	2.Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.	1.Indeks Risiko Bencana (IRB)			Indeks	84,19	82,69	81,19	79,69	78,19	76,69	75,19	75,19	
			1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,55	0,60	0,63	0,66	0,69	0,70	0,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif			%	NA	25,11	26,87	28,63	30,38	32,14	33,99	33,99	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	60,71*	60,30	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	61,26	Dinas Lingk. Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2.Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87,50	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berdaya saing	1.PDRB Per Kapita			Rp Juta	75,42	77,86	84,50-101,75	125,64-130,64	149,53-157,03	173,40-183,40	192,51-204,51	192,51-204,51	
		2.Rasio Gini			Indeks	0,361	0,343	0,341	0,340	0,338	0,336	0,334	0,334	
		3.Tingkat kemiskinan			%	4,20	4,00	3,79	3,58	3,36	3,15	2,98	2,98	
		4.Indeks Daya Saing Daerah			Angka	4,18	4,20	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	4,26	
			1.Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65	81,65	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2.Meningkatnya produktivitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,01-5,20	5,28-5.70	5,30-5,75	5,40-5,80	5,45-5,60	5,50-6,00	5,50-6,00	Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
														Pintu, Dinas Tenaga Kerja
			3.Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	1.Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	0,249	Dinas Sosial
				2.Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	0,064	Dinas Sosial
			4.Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	30,65	35,02	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	40,88	Badan Pendapatan Daerah
				2. Tingkat inflasi	%	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Diskumdag
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial Dan Budaya	Mewujudkan kota yang aman, tertib dan harmonis	Angka konflik			Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1. Angka Kriminalitas	Angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,70	13,70	Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,251	5,300	5,440	5,580	5,720	5,860	6,000	6,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025
Catatan:
* Data tahun 2023

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun kedepan.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan hubungannya dengan visi dan misi Kota Pontianak tahun 2025-2029 secara matrik dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penjabaran Strategi pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Penguatan pelayanan kesehatan
		2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan
		3. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan
		4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		5. Peningkatan kesehatan ibu anak, KB, kesehatan reproduksi, serta percepatan perbaikan gizi masyarakat.
		6. Pembudayaan prilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat
		7. Penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting dan Peningkatan kesejahteraan keluarga
		8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.
		9. Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB
		10. Meningkatkan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan
		11. Meningkatkan status perkembangan kelurahan
	2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Masyarakat
		2. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya wajib belajar 13 tahun
		3. Meningkatkan mutu satuan pendidikan secara fisik dan non fisik
		4. Melakukan peningkatan anggaran pendidikan
		5. meningkatkan akses pendidikan
		6. Membiasakan siswa membaca sejak dini
		7. Memfasilitasi lingkungan belajar yang kondusif
		8. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran
		9. Mendorong diskusi dan refleksi
		10. Memberikan umpan balik dan dukungan
		11. Melakukan latihan-latihan soal
		12. Mengkaitkan pelajaran yang diajarkan
		13. Melaksanakan kegiatan literasi secara berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi
		14. Mengkolaborasikan atau mengaitkan pelajaran yang diajarkan
		15. Mengembangkan pelatihan numerasi yang berkesinambungan
		16. Integrasikan literasi dan numerasi
		17. Melakukan Pembelajaran Aktif
		18. Lakukan pelatihan numerasi berkelanjutan
		19. Perbaiki dan kembangkan kurikulum
		20. Mengintegrasikan literasi dalam pelajaran lintas mata pelajaran
	3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Menurunkan tingkat kelahiran yang tidak direncanakan
		2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana
		3. Meningkatkan Keluarga Sejahtera
		4. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		5. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan
		6. Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak
		7. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
		8. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
	4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	1. Melaksanakan pembinaan terhadap Atlet melalui Organisasi Olahraga (KONI, NPCI dan KORMI) serta melaksanakan Event olahraga secara berjenjang
		2. Melakukan Pembinaan kepada OKP terhadap kegiatan yang di laksanakan, serta mengadakan event Kepemudaan yang Inovatif dan berjenjang.

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	1. Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	1. Mengoptimalkan Peningkatan Kebijakan Produk Hukum
	2. Meningkatnya ASN yang Berkualitas	1. Meningkatkan kapastitas dan kompetensi ASN melalui pengembangan metode pelatihan mandiri yang dapat diakses seluruh ASN
		2. Penguatan assesment centre untuk pemetaan jabatan dan rencana suksesi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		3. Penataan promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan potensi,kompetensi, dan rencana suksesi
		4. Meningkatkan kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya.
		5. Meningkatkan integritas ASN serta Pemberian penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja.
		6. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui penataan sarana dan prasarana, evaluasi standar operasional prosedur , serta standar pelayanan
		7. Pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi secara optimal
		8. Meningkatkan disiplin pegawai degan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penguatan sanksi pelanggaran disiplin
		9. Penguatan kelembagaan managemen ASN, penyelenggaraan managemen ASN, serta sistem informasi managemen ASN untuk menciptakan budaya kerja yang optimal
	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Mengoptimalkan pemenuhan komponen penilaian Indeks Kepusan Masyarakat Perangkat Daerah
		2. Mengoptimalkan Peningkatkan Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		3. Mengoptimalkan rumusan kebijakan daerah terkait kebijakan Perekonomian dan SDA
		4. Mengoptimalkan rumusan kebijakan daerah terkait administrasi pembangunan ditetapkan menjadi kebijakan daerah
		5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi (pencatatan pada E-Pengadan Langsung, transaksional maupun non transaksional dan e-purchasing) dan pemenuhan SDM JF. PPBJ pada UKPBJ Kota Pontianak
		6. Peningkatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
		7. Pengembangan Sistem Informasi Rapat dan Risalah (SiPatRis)
		8. Melaksanakan Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk
		9. Melaksanakan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		10. Pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan prosedur standar yang jelas dan sistematis dalam pengelolaan arsip daerah.
		11. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
		12. Melaksanakan secara optimal pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan
		13. Meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan
		14. Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban secara efektif

Tujuan	Sasaran	Strategi
		15. Melaksanakan secara optimal penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan
		16. Meningkatkan Lembaga/Masyarakat yang Aktif
		17. Meningkatkan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum
		18. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		19. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		20. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai ketentuan
		21. Mewujudkan masyarakat kecamatan yang berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat
	4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel
	5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan Layanan Informasi Publik
		2. Meningkatkan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak
	6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam menindak lanjuti hasil rekomendasi Kemenpan-RB atas evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Pontianak
		2. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien
		3. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
		4. Mengoptimalkan pemenuhan komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak
		5. Menyusun rencana pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		7. Mengoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		8. Melaksanaan pembinaan (sosialisasi, asistensi dan pendampingan) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		9. Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		10. Melaporkan kepada pimpinan secara berkala perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
		11. Pengoptimalan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah antar Bidang dengan Arah Kebijakan Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Infrastruktur dan Kewilayahan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	7. Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2 Meningkatkan kualitas penanganan risiko fraud pada Perangkat Daerah

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Misi 3 : Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kota	1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana /Relokasi dan Pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		2. Penyediaan PSU Perumahan
		3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (luas di bawah 10 Ha) dan Pencegahan tumbuhnya Permukiman Kumuh Perkotaan
		4. Penyediaan Tanah untuk menunjang Pembangunan
		5. Meningkatkan Pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan kualitas saluran drainase
		6. Meningkatkan Pemeliharaan, Pembangunan dan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui intensifikasi pengawasan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala, rekonstruksi, rehabilitasi serta Pembangunan jalan baru
		7 Meningkatkan Pemeliharaan, Pembangunan dan Peningkatan kualitas prasarana sumber daya air kewenangan Kota
		8 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sanitasi aman melalui identifikasi wilayah dengan sanitasi buruk dan pembangunan sanitiasi berbasis masyarakat
		9 Meningkatkan ketersediaan air minum layak melalui peningkatan akses layanan air minum perpipaan
		10 Meningkatkan kualitas Bangunan Gedung Pemerintah melalui intensifikasi pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah, serta Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah
		11 Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikat kompetensi kerja
		12 Menambah Luasan RTH Publik dan Mempertahankan RTH Publik yang telah ditetapkan pada RTRW
		13 Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai RTRW Kota Pontianak
		14 Meningkatkan Koordinasi dan sinkroniasai perenecanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		15 Meningkatkan kualitas perencanaan bangunan gedung dan lingkungan
		16 Pembangunan, peningkatan infrastruktur persampahan serta pengelolaan sistem persampahan regional

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya kelancaran transportasi	1. Meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak
		2. Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan
		3. Meningkatkan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas
2. Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kota Pontianak melalui Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan bagi masyarakat terutama di daerah rawan bencana
		2. Meningkatkan Penanggulangan Bencana dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Sarana Prasarana
		3. Meningkatkan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Mengoptimalkan Kapasitas Petugas DAMKAR dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Non Kebakaran
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan koordinasi dan singkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
		2. Pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sistem persampahan regional
		3. Meningkatkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan dengan menitik-beratkan pada peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan pengendalian/ pencegahan pencemaran air dan udara serta peningkatan usaha pengelolaan sampah secara terpadu.
		4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Melaksanakan Program Keanekaragaman Hayati
		5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya
		6. Menambah Luasan RTH Publik dan Mempertahankan RTH Publik yang telah ditetapkan pada RTRW
		7. Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan
		8. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan Ruang terhadap RDTR

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis
Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inofatif

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan	1. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
		2. Penguatan Distribusi pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi
ekonomi yang merata dan berdaya saing		3. Menggiatkan Urban farming, sekolah pangan, dan pemanfaatan pekarangan produktif.
		4. Meningkatkan Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian
		5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		6. Meningkatkan Pelaksanaan penyuluhan Pertanian
		7. Pencegahan dan pengendalian dampak perubahan iklim dan organisme penganggu tanaman
		8. asilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		9. Pemanfaatan teknologi dan inovasi termasuk digitalisasi pertanian
		10. Terlaksananya pengelolaan program perikanan tangkap
		11. Terlaksananya pengelolaan program perikanan budidaya
		12. Terlaksananya pengelolaan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		13. Terlaksananya pengelolaan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	2. Meningkatnya produktivitas ekonomi	1. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan melalui Perijinan sesuai ketentuan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen dan Kebijakan Produk Dalam Negeri
		2. Peningkatan Investasi
		3. Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan
		4. Meningkatkan kualitas pendidik dan pemangku budaya
		5. Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat
		6. Melakukan Sosialisasi FGD Kebudayaan secara berkala
		7. Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata,Melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS, Pemandu wisata dan Pelaku Usaha Ekraf dengan mengadakan Workshop/Sosialisasi dan peningkatan sarana dan prasarana Destinasi Wisata
		8. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemitraan, dan Motivasi kewirausahaan
		9. Peningkatan Pengelolaan Usaha Koperasi melalui perijinan sesuai ketentuan, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan pengelolaan koperasi
		10. Mengoptimalkan Pertumbuhan pendapatan BUMD
		11. Mengumpulkan data lowongan pekerjaan dan mendorong Perusahaan untuk melaporkan data penempatan baik secara online maupun ofline

Tujuan	Sasaran	Strategi
		12. Memberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan keterampilan lunak (soft skills) pekerja. Program pelatihan yang terarah akan membuat pekerja lebih terampil dan lebih produktif.
		13. Menyediakan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan karier mereka melalui pendidikan lanjutan atau sertifikasi profesional, yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih efisien.
		14. Menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi pencari kerja. Strategi yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	1. Pembinaan dan monitoring evaluasi kompetensi PSKS
		2. Menjalin mitra kerja dan kerjasama dengan lembaga masyarakat
		3. Melakukan Optimalisasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal
		4. Meningkatkan taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		5. Penyaluran Bantuan sosial tepat sasaran
		6. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kpd korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan
		7. Hubungan industrial yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi perkembangan perusahaan serta kesejahteraan pekerja.
		8. Menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi pencari kerja. Strategi yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
	4. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Meningkatkan pengawasan pajak daerah
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak
		3. Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan melalui Perijinan sesuai ketentuan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen dan Kebijakan Produk Dalam Negeri
		4. Meningkatkan pengggunan teknologi informasi
		5. Meningkatkan kualitas basis data
		6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
		7. Penyelarasan dan Penguatan Regulasi
		8. Meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan akselerasi dalam rangka pemungutan pajak dengan Pihak Terkait
		9. Melakukan Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan
		10. Menyusun prosedur yang tertulis dan legal

Tujuan	Sasaran	Strategi
		11. Melalui UU Nomor 1 HKPD Tahun 2022 Pemerintah Daerah dapat menentukan tarif pajak dan retribusi disesuikan dengan kondisi ekonomi lokal
		12. Pemerintah Daerah dapat menggandeng investor untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PAD yang tidak dapat dibiayai Pemerintah
		13. Reformasi birokrasi dengan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaat teknologi digital dalam pelayanan terkoneksi saluran Perbankan dan market place
		14. Penyelarasan regulasi
		15. Melakukan pengawasan secara rutin baik dilakukan oleh OPD terkait maupun secara kolaborasi dengan opd dilingkungan Pemkot Pontianak dan bersinergi dengan instansi lain

Visi : Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis

Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	1. Melakukan Penindakan yang Tegas terhadap Pelanggaran
		2. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
		3. Melakukan Kolaborasi dengan Instansi Terkait
		4. Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Anggota Satpol PP
		5. Melakukan Penguatan Peran Masyarakat dalam Penegakan Ketertiban
		6. Melakukan Pendekatan Humanis dan Dialogis
	2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	1. Menilai tingkat toleransi dan harmoni antar umat beragama di suatu wilayah melalui Edukasi dan Penyuluhan, Kebijakan dan Regulasi, Kegiatan Sosial dan Kultural, Komunikasi dan Media, Peran Pemimpin dan Tokoh Agama, Monitoring dan Evaluasi dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan indeks kerukunan umat beragama dapat meningkat dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Sumber: Rekap data Perangkat Daerah

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Pontianak Tahun 2025-2045

VISI RPJPD TAHUN 2025-2045	VISI RPJMD TAHUN 2025-2029	MISI RPJPD TAHUN 2025-2045	Misi RPJMD TAHUN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RPJPD TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029				
					Tahap Konsolidasi (2026)	Tahap Percepatan (2027)	Tahap Pengembangan (2028)	Tahap Pemantapan (2029)	Tahap Penguatan (2030)
Kota Pontianak Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan dan daya saing sumber daya manusia	Melengkapi infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan, serta kolaborasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, diseluruh wilayah serta peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang didukung kompetensi sumber daya manusia yang handal	Optimalisasi pemantapan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi penguatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
		2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akuntabel berbasis teknologi informasi	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	Penataan pondasi regulasi, tata Kelola pemerintah berbasis teknologi informasi, kelembagaan tepat fungsi dan penguatan SDM ASN berbasis merit	Penyederhanaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur toknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana merit sistem	Harmonisasni regulasi, penerapan prinsip good governace dan pengembangan interoperabilitas data dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, penguatan kompetensi ASN untuk penerapan merit sistem	Peningkatan kualitas regulasi, pemanfaatan *Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence*, dan *Big Data Analytics* dalam penerapan *Good Governance*	Pemantapan *Good Governance*	Memperluas pemanfaatan *Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence*, dan *Big Data Analytics* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

VISI RPJPD TAHUN 2025-2045	VISI RPJMD TAHUN 2025-2029	MISI RPJPD TAHUN 2025-2045	Misi RPJMD TAHUN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RPJPD TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029				
					Tahap Konsolidasi (2026)	Tahap Percepatan (2027)	Tahap Pengembangan (2028)	Tahap Pemantapan (2029)	Tahap Penguatan (2030)
		3. Mewujudkan manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui penyediaan infrastruktur hijau	3. Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan yang Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar dan Utilitas	Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi dengan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mendukung resiliensi daerah dan pengembangan kawasan Kota Pontianak beserta hiterlandnya	Inisiasi regulasi pembangunan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana, transportasi publik dan energi baru terbarukan serta infrastruktur regional	Percapatan implementasi infrastruktur hijau, aglomerasi ekonomi, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan.	Pengembangan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	Pemantapan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	Penguatan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publikserta energi baru terbarukan
		4. Mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif dan inovatif	4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar serta peningkatan inovasi pada ekosistem industri digital, pariwisata dan ekonomi kreatif	Inisiasi regulasi pembangunan aglomerasi ekonomi, dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Percepatan implementasi pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif

VISI RPJPD TAHUN 2025-2045	VISI RPJMD TAHUN 2025-2029	MISI RPJPD TAHUN 2025-2045	Misi RPJMD TAHUN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RPJPD TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029				
					Tahap Konsolidasi (2026)	Tahap Percepatan (2027)	Tahap Pengembangan (2028)	Tahap Pemantapan (2029)	Tahap Penguatan (2030)
		5. Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang harmonis, taat hukum, tentram dan tertib untuk mencapai ketahanan social budaya	5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.	Penataan pondasi kehidupan Masyarakat yang harmonis melalui kolaborasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pondasi ketahanan sosial budaya	Penerapan pembangunan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	Percepatan penerapan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	Pemantapan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	Penguatan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya

Tabel 3.6 Tema Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2025-2029

Tahapan	Tahap Konsolidasi (Tahun I - 2026)	Tahap Percepatan (Tahun II - 2027)	Tahap Pengembangan (Tahun III - 2028)	Tahap Pemantapan (Tahun IV - 2029)	Tahap Penguatan (Tahun V - 2030)
Tema Pembangunan:	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan dengan Pendekatan yang humanis, dan Ramah Lingkungan Serta Mendukung Pemberdayaan masyarakat Seluruh Sektor	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Ramah Lingkungan Dengan Pengembangan Sektor-Sektor Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja	Pengembangan Infratruktur Ramah Lingkungan Dan Kota Cerdas Dengan Mengimplementasikan Teknologi Cerdas untuk Pengelolaan Kota yang Efisien dan Ramah Lingkungan Yang Mendukung Kehidupan Sehari-hari yang Lebih Sejahtera	Mewujudkan Kota Pontianak Yang Sejahtera, Ramah Lingkungan dan Humanis Dengan Menyelesaikan Program-program Pembangunan Jangka Panjang Yang Berfokus Pada Berkelanjutan, Kesejahteraan dan Penghargaan Terhadap Nilai-nilai Kemanusaan serta Memastikan Hasil Pembangunan dapat Dirasakan Seluruh Lapisan Masyarakat	Mewujudkan Kota Pontianak Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan Sebagai Model Pembangunan Kota Ramah Lingkungan dan Humanis

Sumber: Hasil olahan BAPPERIDA, 2025

Tabel 3.7 Sinkronisasi Arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan Rekomedasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
2026	Melengkapi infrastruktur pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan, serta kolaborasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia	• Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Adapun rekomendasi terhadap isu Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut: - **Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar**: Memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, jaminan kesehatan, dan pengurangan angka kematian ibu dan anak, serta menangani masalah gizi buruk dan stunting melalui kebijakan yang mendukung akses terhadap makanan bergizi.
2027	Pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, diseluruh wilayah serta peningkatan daya saing sumber daya manusia	
2028	Peningkatan Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang didukung kompetensi sumber daya manusia yang handal	
2029	Optimalisasi pemantapan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, daya saing sumber daya manusia	
2030	Optimalisasi penguatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi		
2026	Penyederhanaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur toknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana merit sistem	
2027	Harmonisasni regulasi, penerapan prinsip good governace dan pengembangan interoperabilitas data dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, penguatan kompetensi ASN untuk penerapan merit sistem	
2028	Peningkatan kualitas regulasi, pemanfaatan Internet of Things (IOT), *Artificial Intelligence*, dan *Big Data Analytics* dalam penerapan *Good Governance*	
2029	Pemantapan *Good Governance*	

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD
2030	Memperluas pemanfaatan *Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence*, dan *Big Data Analitycs* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
Misi 3 Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan yang Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar dan Utilitas		
2026	Inisiasi regulasi pembangunan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana, transportasi publik dan energi baru terbarukan serta infrastruktur regional	• Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Adapun rekomendasi terhadap isu pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan adalah sebagai berikut: - **Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan**: Memperkuat sistem pemantauan kualitas udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati dengan teknologi canggih dan data real-time. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sensor jarak jauh dan platform digital untuk mempercepat deteksi dan mitigasi masalah lingkungan. - **Penguatan Kebijakan dan Regulasi**: Mendorong pengembangan kebijakan yang lebih tegas untuk perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan hutan, lahan gambut, dan kawasan hijau, serta penerapan aturan yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah dan limbah berbahaya. Kebijakan yang mendukung pengurangan emisi dari sektor-sektor utama (industri, transportasi, pertanian) juga perlu diperkuat. - **Kolaborasi Multisektoral dan Pemberdayaan Masyarakat**: Meningkatkan keterlibatan sektor swasta, masyarakat lokal, dan berbagai pihak terkait dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, lahan gambut, dan kawasan hijau dapat meningkatkan keberlanjutan program-program tersebut. - **Restorasi dan Konservasi Ekosistem**: Menyusun program restorasi ekosistem yang komprehensif, termasuk pemulihan lahan gambut dan perlindungan kawasan konservasi untuk keanekaragaman hayati. Restorasi dan perlindungan harus dilakukan secara
2027	Percapatan implementasi infrastruktur hijau, aglomerasi ekonomi, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan.	
2028	Pengembangan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	
2029	Pemantapan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	
2030	Penguatan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publikserta energi baru terbarukan	

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD
		terintegrasi, memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. - **Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Berkelanjutan**: Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan untuk mendukung kualitas hidup, kesehatan, dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mendorong penambahan RTH, serta memastikan keberagaman fungsi ruang hijau untuk berbagai aktivitas sosial dan ekologis. • Penanggulangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Adapun rekomendasi terhadap isu Penanggulangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim adalah sebagai berikut: - **Penguatan Infrastruktur dan Sistem Peringatan Dini**: Membangun dan memperkuat infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana, seperti sistem drainase, waduk, dan tanggul, serta mempercepat respons bencana dengan sistem peringatan dini berbasis teknologi. - **Perencanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**: Mengembangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada pengurangan emisi dan penerapan energi terbarukan, serta perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. - **Pengelolaan Kerawanan Bencana**: Mengoptimalkan penggunaan Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk memetakan wilayah rawan bencana, memperkuat infrastruktur dan ketahanan bangunan, serta menerapkan pendekatan berbasis ekosistem untuk mengurangi risiko bencana. - **Rehabilitasi Lahan Kritis**: Melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis dengan program penghijauan dan konservasi untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta menghindari pembangunan di daerah rawan bencana.

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD
		- **Kolaborasi dan Edukasi Multisektoral**: Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penanganan risiko bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi bencana. • Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Akses Layanan Publik Adapun rekomendasi terhadap isu Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Akses Layanan Publik adalah sebagai berikut: - **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar:** Memperluas akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perumahan layak dengan membangun infrastruktur yang terjangkau dan ramah lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. - **Peningkatan Infrastruktur Perkotaan**: Meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur perkotaan seperti jalan, transportasi, drainase, dan fasilitas publik, yang mendukung kehidupan Kota yang lebih fungsional dan ramah lingkungan. - **Penataan Permukiman dan Pengelolaan Tata Ruang**: Mengidentifikasi dan menata kawasan permukiman kumuh, serta memperbaiki pengelolaan tata ruang Kota yang mengutamakan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. - **Kota yang Bersih dan Berwawasan Lingkungan**: Mewujudkan Kota bersih dengan kebijakan pengelolaan sampah, pengurangan polusi, dan peningkatan ruang terbuka hijau, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan keberlanjutan.
Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif, dan Inovatif		
2026	Inisiasi regulasi pembangunan aglomerasi ekonomi, dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	• Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Adapun rekomendasi terhadap isu Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
2027	Percepatan implementasi pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD	Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan KLHS RPJMD
2028	Pengembangan pembangunan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	- **Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Ekonomi**: Memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin, dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap peluang pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan usaha mikro. - **Perekonomian Inklusif dan Berkelanjutan**: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberikan dukungan kepada sektor UMKM, menciptakan peluang usaha, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
2029	Pemantapan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	
2030	Penguatan aglomerasi ekonomi dan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif	
Misi 5 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram dan Tertib untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya		
2026	Penerapan pembangunan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	
2027	Percepatan penerapan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	
2028	Pengembangan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	
2029	Pemantapan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya pelindungan dan pelestarian warisan budaya	
2030	Penguatan karakter dan jati diri bangsa pada masyarakat dengan didukung upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya	

Sumber: Hasil olahan BAPPERIDA, 2025

3.2.2 Program-Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:

1. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
   f. Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu:
   a. Tenaga Kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;
   d. Pertanahan;
   e. Lingkungan Hidup;
   f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan; dan
   e. Perindustrian.

   Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (2) urusan Kehutanan, dan (3) urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur yaitu:
   a. Unsur Sekretariat Daerah; dan
   b. Unsur Sekretariat DPRD.

5. Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi 7 (unsur) yaitu:
   a. Unsur Perencanaan;
   b. Unsur Keuangan;
   c. Unsur Kepegawaian;
   d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
   e. Unsur Penelitian dan Pengembangan;

   Terdapat 2 (dua) unsur penunjang yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) Unsur Penghubung, dan (2) Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah.
   f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Inspektorat Daerah
   g. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan
   h. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, sasaran dan program pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.8 Program-Program Prioritas Daerah Kota Pontianak 2025-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator			Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
VISI : MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS									
PRIORITAS PROVINSI: 1. Meningkatkan Insentif Tenaga Pendidikan dab Tenaga Kesehatan 2. Meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda									
PRIORITAS DAERAH : MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing									
	TUJUAN 1 :								
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang berdaya saing					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		SASARAN 1 :							
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat			1.	Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)			
					2.	Usia Harapan Hidup (UHH)			
DINAS KESEHATAN									
				Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang Ditanggung Pemerintah Daerah (%)	1. Program Hidup Sehat dan Bersih. 2. Program Integrasi Layanan Primer 3. Program Antenatal berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
					2	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					3	Prevalensi Depresi pada usia lebih dari 15 tahun (%)	4. Program Penangan Stunting 5. Program Penanggulangan TBC 6. Program Jaminan Sosial Kesehatan 7. Program Pusat Layanan Kesehatan Terpadu 8. Program Kesehatan Masyarakat Berstandar Internasional 9. Program Pengembangan Fasilitas Kesehatan Program Makan Gratis		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
					4	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)			
					5	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)			
					6	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)			
					7	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)			
					8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)			
					9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)			
					10	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)			
					11	Cakupan penemuan kasus TB (%)			
					12	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					13	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)			
				Meningkatnya kuantitas, kulitas dan pemerataan SDM kesehatan	1	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					2	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)			
					3	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)			
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	1	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
					2	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)			
					3	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)			
					5	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)			
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Puskesmas dengan minimal 75 % Posyandu siklus hidup yang aktif (%)		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
					2.	**Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)**			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
				Meningkatnya pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan		Persentase Kelurahan yang dilakukan Evaluasi terhadap tingkat perkembangannya (%)	Program Peningkatan Internal RT/RW	Program Administrasi Pemerintahan Desa	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				Meningkatnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dan Diberdayakan dalam Program Pembangunan (%)		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			1	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)(%)	Program Penguatan Bangga Kencana	Program Pengendalian Penduduk	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			2	Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal	2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)			
			1	Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB	1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			2	Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera	2	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)			
			1	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	1	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan (%)		Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			2	Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat	2	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif (%)			
		SASARAN 2 :							
		Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat			**1**	**Rata-Rata lama sekolah**			
					2	**Harapan Lama Sekolah (tahun)**			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
				Meningkatnya Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan dan Angka Melanjutkan	1.	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)	1. Program Wajib Belajar 13 Tahun 2. Program Pendidikan Karakter dan Akhlak 3. Program Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu 4. Program Pendidikan Berkualitas Global 5. Program Makan Gratis 6. Program Insentif PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					2.	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)			
					3.	Angka Partisipasi Kasar (SD) (%)			
					4.	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)			
					5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)			
					6.	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)			
					7.	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)			
					8.	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)			
					9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)			
					10	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					11	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)			
					12	Angka Partisipasi Kasar (SD) (%)			
					13	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)			
					14	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)			
				Meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S1 dan Jumlah Guru pada Satuan Pendidikan yang memiliki Sertifikat Pendidik.	1.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					2.	Persentase Jumlah Guru TK,SD, dan SMP yang bersertifikat (%)			
				Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Mengalami Perkembangan		Persentase Pengembangan Kebudayaan yang Dikelola dan Dilestarikan (%)	Program Wisata Urban dan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	ASTA CITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Berkembang		Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan (Aduan)	Program Wisata Urban dan Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
				Meningkatnya Objek Sejarah yang Dibina		Persentase Objek Kemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)		Program Pembinaan Sejarah	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
				Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya		Persentase Cagar Budaya yang Teregister (%)	Program Wisata Urban dan Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
					3.	**Indeks pembangunan literasi masyarakat**			
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatkan literasi membaca dan menulis di masyarakat	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	Program Kota Layak Anak	Program Pembinaan Perpustakaan	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			Peningkatan Akses Publik terhadap Koleksi dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi yang Dimiliki (%)		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Efisiensi pengelolaan arsip daerah yang lebih tinggi, keamanan arsip yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan dan transparansi pemerintahan. Semua ini berkontribusi pada pengelolaan arsip yang lebih profesional, akuntabel, dan mudah diakses, yang mendukung pembangunan		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat (%)		Program Pengelolaan Arsip	
				Peningkatan Kepuasan Publik terhadap Layanan Pemerintah		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat (%)		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
		SASARAN 3 :							
		Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif			**1.**	**Indeks pembangunan keluarga (IPK)**			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			1	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)(%)	Program Penguatan Bangga Kencana	Program Pengendalian Penduduk	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			2	Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal	2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)			
			1	Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB	1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			2	Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera	2	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)			
			1	Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	1	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan (%)		Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			2	Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat	2	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif (%)			
					2.	**Indeks ketimpangan gender (IKG)**			
					3.	**Indeks Perlindungan Anak**			
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1. Program Perempuan Sebagai Madrasatul Ula 2. Program Peningkatan Kualitas SDM Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Program Perlindungan Perempuan	
				Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak		Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	Program Kota Layak Anak	Program Pengelolaan Sistem dan data Gender dan Anak	
				Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak secara komperhensif		Indeks Pemenuhan HAK Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		Program Perlindungan Khusus Anak	
		SASARAN 4 :					
		Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA							
			Meningkatnya Jumlah Cabor yang menjuarai Event tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	Persentase Peningkatan Atlet berprestasi (%)	1. Program Olahraga Daerah 2. Program Fasilitas Olahraga untuk Semua	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang berpartisipasi dan aktif dalam event kepemudaan secara berjenjang	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	Program Beasiswa Luar Negeri	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (%)		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
PRIORITAS PROVINSI: 4. Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintah Yang Baik							
PRIORITAS DAERAH : MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi							
	TUJUAN 1 :						

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif					Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			
		SASARAN 1 :							
		Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum			1.	Indeks Reformasi Hukum			
SEKRETARIAT DAERAH									
				Meningkatnya jumlah pengunjungan yang mengakses JDIH dan Meningkatnya Implementasi Kebijakan produk Hukum	1	Persentase jumlah pengunjungan yang mengakses JDIH		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
					2	Persentase Implementasi Kebijakan produk Hukum			
		SASARAN 2 :							
		Meningkatnya ASN yang Berkualitas			1.	Indeks sistem Merit			
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
				Meningkatnya profesionalitas dan Pola Karir ASN berdasarkan sistem informasi	1.	Persentase pengisian formasi ASN sesuai Kompetensi	Program ASN Ber-AKHLAK	Program Kepegawaian Daerah	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
					2.	Indeks Profesionalitas ASN			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN	Persentase ASN yang memiliki kemampuan manjerial	1. Program Pengembangan Kapasitas ASN 2. Program ASN Ber-AKHLAK	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	judi, dan penyelundupan
		SASARAN 3 :					
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		**1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)**			
SEKRETARIAT DAERAH							
			Meningkatnya komponen penilaian Indeks Kepusan Masyarakat Perangkat Daerah	Persentase Unit Pelayanan Publik yang mengumpulkan Survey Kepusan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
			Meningkatnya Kajian Kebijakan yang dihasilkan	Persentase Kajian Kebijakan yang dihasilkan	Program Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Fardhu Kifayah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya Indeks Pengendalian Perekonomian	1. Indeks Pengendalian Perekonomian	1. Program Tanpa Kantong Plastik 2. Program Pembangunan Jembatan Garuda 3. Program Pendampingan BUMD	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya Indeks Pengendalian Pembangunan (IPP)	2. Indeks Pengendalian Pembangunan (IPP)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa (ITKP)	3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa (ITKP)			
				Meningkatnya Produktivitas Pengelolaan Keuangan BUMD	4.	Persentase Capaian Laba Bersih BUMD			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU									
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Prima	Program Pelayanan Penanaman Modal	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
				Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
SEKRETARIAT DPRD									
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD dengan baik		Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	Program Pelayanan Prima	Program Pendaftaran Penduduk	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
					2	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP-el			
					3	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA			
					4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital			
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1	Persentase Akte Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		Program Pencatatan Sipil	
					2	Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
					3	Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
					4	Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
KECAMATAN PONTIANAK BARAT							
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	Program Pelayanan Prima	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam		Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	
KECAMATAN PONTIANAK UTARA							
			Persentase penyelesaian layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	Persentase penyelesaian layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Program Pelayanan Prima	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Peningkatan jumlah persentase lembaga /masyarakat yang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Proram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam		Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	
KECAMATAN PONTIANAK KOTA							
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	Program Pelayanan Prima	Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)		Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN							
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	1. Program Pelayanan Prima 2. Program Inovasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%)	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)		Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum	
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	Program Pelayanan Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif (%)	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA							
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Timur	Program Pelayanan Prima	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	1. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 2. Program bank Sampah Kelurahan 3. Program Fasilitasi FKUB	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	1. Program Pendidikan Anti Kriminalitas 2. Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
					2.	**Indeks Inovasi Daerah**			
BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH									
				Meningkatnya Capaian Riset dan Inovasi Daerah	1	Persentase Riset yang ditindaklanjuti (%)	1. Program Inovasi Pelayanan Publik 2. Program Klinik Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
					2	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah			
		<u>SASARAN 4 :</u>							
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				**Opini Laporan Keuangan**			
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
			1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	1	Pemenuhan aspek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan (%)	Program Makan Gratis	Progam Pengelolaan Keuangan Daerah	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			2	Meningkatnya kinerja pengelolaan pajak dan retribusi	1	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi (%)			memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
					2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)			
			3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel		Pemenuhan Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan (%)		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		SASARAN 5 :							
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi				**1. Indeks Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)**			
						2. Indek Pemerintahan Digital			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
				Peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik		Pesentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	Program Digitalisasi Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	ASTA CITA 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
				Peningkatan keterpaduan layanan digital		Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah daerah melalui penerapan persandian oleh perangkat daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Persandian Untuk Keamanan Informasi		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		SASARAN 6 :					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			
SEKRETARIAT DAERAH							
			Meningkatnya Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah Komponen pelaporan kinerja	Nilai rata-rata evaluasi AKIP Perangkat Daerah Komponen pelaporan kinerja oleh Inspektorat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Katagori Tinggi dan Sangat Tinggi		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
INSPEKTORAT									
			1.	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Perangkat Daerah (%)		Program Penyelenggaraan Pengawasan	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			2.	Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak		Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Pontianak (%)			
BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH									
				Meningkatnya Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota dan Capaian	1.	Indeks Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota (Indeks)	1. Program Partisipasi Masyarakat	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Pengendalian serta Evaluasi	2.	Persentase Capaian Kinerja Program dengan Kategori Tinggi (%)	Dalam Perencanaan 2. Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan	Pembangunan Daerah	birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
				Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	1.	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Dokumen RKPD (%)	Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					2.	Persentase Cascading OPD yang Selaras Sesuai dengan Jenjang Jabatan (%)			
					3	Persentase Crosscutting yang Tersedia (%)			
		<u>SASARAN 7 :</u>							
		Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi				**Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)**			
INSPEKTORAT									
			1.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Program Pendidikan Anti-Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			2.	Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi		Persentase Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak			pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
PRIORITAS PROVINSI: 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan 6. Percepatan Pembangunan Serta Peningkatan Insfratruktur Secara Adil dan Berkelanjutan									
PRIORITAS DAERAH : MISI 3 Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dasar dan Utilitas									
	TUJUAN 1 :								
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan					Indeks Infratruktur Perkotaan			
		SASARAN 1 :							
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kota			1.	Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman			
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Pemerintah		Program Pengembangan Perumahan	ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan (di Bawah 10 Ha) kota yang ditangani		Program Kawasan Permukiman	ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
			Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah tidak layak huni	Program Rumah Layak Huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase jalan lingkungan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	ASTA CITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Meningkatnya penyelasaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi santunan tanah untuk pembangunan		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
			Meningkatnya Koordinasi redistribusi tanah	Persentase redistribusi tanah		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absantee	
				2. **Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan**			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan genangan (%)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara	1. Program Pegendalian Genangan 2. Program Sungai Bersih 3. Program Penanganan Genangan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Terpenuhinya pelayanan air bersih	Persentase peningkatan pelayanan air bersih (%)	Program Subsidi Akses Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Terpenuhinya jumlah KK yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang layak	Persentase KK yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang layak (%)	Program Pengelolaan Air Limbah Terpadu	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Terpenuhinya Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Terpenuhinya bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Program Waterfront	Program Penataan Bangunan Gedung	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Terpenuhinya bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik (%)	1. Program Kota Layak Anak 2. Program Ruang Terbuka Hijau 3. Program Kawasan Kuliner Halal 4. Program Pengembangan Taman Bermain dan Area Publik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Terpenuhinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	1. Program Pembangunan Inner/Outer Ring Road 2. Program Pembangunan Jembatan Garuda	Program Penyelenggaraan Jalan	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
			Terpenuhinya kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi (%)		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		SASARAN 2 :					
		Meningkatnya kelancaran transportasi		**Rata-rata Kecepatan Perjalanan dalam Kota (km/jam)**			
DINAS PERHUBUNGAN							
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1 Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
				2 Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar			
				3 Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan	1	Persentase fasilitas pelabuhan sungai dalam kondisi baik (%)		Program Pengelolaan Pelayaran	ASTA CITA 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
	TUJUAN 2 :								
	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim				1	Indeks Risiko Bencana (IRB)			
		SASARAN 1 :							
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
				Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	1	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	ASTA CITA 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
					2	Persentase kejadian bencana yang ditanangi dalam tingkat waktu tanggap (response time)			asasi manusia (HAM)
				Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	Program Kelurahan Tangguh Bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
					2	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)			
					2.	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kumulatif(%)**			
		SASARAN 2 :							
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			**1.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti (%)		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
							ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas taman kehati yang dikelola sesuai dengan ketentuan/standar (%)		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
							ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pemenuhan Penghasil Limbah B3 sesuai Persyaratan (%)	Program Makan Gratis	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang di Terbitkan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Persetujuan Lingkungan (%)		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
			Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan SDM dan Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Lembaga / Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	Program Tanpa Kantong Plastik	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	1.	Persentase Sampah yang dikurangi (%)	1. Program bank Sampah Kelurahan 2. Program Makan Gratis	Program Pengelolaan Persampahan	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
					2.	Persentase Sampah yang ditangani (%)			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Terpenuhinya infrastruktur pengelolaan persampahan yang memenuhi standar	Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan yang memenuhi standar (%)		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
				2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
			Terpenuhinya ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak (%)	Program Penataan Wilayah Untuk Pemertaan Pembangunan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
									tambah di dalam negeri
PRIORITAS PROVINSI: 7. Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat Yang Inklusif dan Berkelanjutan									
PRIORITAS DAERAH : MISI 4 Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif									
	TUJUAN 1 :								
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing				1.	PDRB Per Kapita (Rp Juta)			
					2.	Rasio Gini			
					3.	Tingkat kemiskinan			
					4.	Indeks Daya Saing Daerah			
		SASARAN 1 :							
		Meningkatnya ketahanan pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)		Persentase Capain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
				Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan		Persentase Kecamatan Status Rentan Rawan Pangan		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan		Persentase Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak Sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		<u>Sasaran 2:</u>							
		Meningkatnya produktivitas ekonomi			1.	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN									
				Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	ASTA CITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku (%)	Program Koperasi Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi (%)		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang Sehat (%)		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru (%)	1. Program Kawasan Kuliner Halal 2. Program Pengembangan Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya		Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	1. Program Kawasan Kuliner Halal 2. Program Pengembangan Kewirausahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distirbusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)		Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Fasilitasi Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN									
				Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	1	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
				Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis			
				Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian	1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terwujudmya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis	2	Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
				Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
				Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan		Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang memiliki izin (%)		Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	Program Gapoktan Aktif dan Produktif	Program Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan		Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskeswan	1	Persentase Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskeswan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya pelayanan RPH Sapi	2	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi			ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Budidaya Ikan dan Hewan Ternak	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan		Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (%)		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	ASTA CITA 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA							
			Meningkatya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Kota Pontianak	Persentase Destinasi Wisata dengan Kondisi Baik	1. Program Wisata Urban dan Budaya 2. Program Pemanfaatan Ruang Pubik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	ASTA CITA 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Pontianak	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pemanfaatan Ruang Pubik	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HKI	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat HKI (%)		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
								Kekayaan Intelektual	
				Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kraetif Yang dilatih	1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					2	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang terlatih			
DINAS TENAGA KERJA									
				Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja		Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja (%)		Program Perencanaan Tenaga Kerja	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
									ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
			1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang bersertifikasi setelah pelatihan (%)	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (E-Business dan E-Commerce)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi sesuai dengan kompetensinya (%)		Program Penempatan Tenaga Kerja	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
							ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			1.	Meningkatnya Pekerja		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi total terhadap target investasi		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi		Program Promosi Penanaman Modal	
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
		SASARAN 3 :							
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin			1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan			
DINAS SOSIAL									
			1.	Meningkatnya Kompetensi PSKS		Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)		Program Pemberdayaan Sosial	ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur		Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
							ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
			Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	
DINAS TENAGA KERJA							
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja (%)		Program Perencanaan Tenaga Kerja	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
									ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
			1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang bersertifikasi setelah pelatihan (%)	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga KerjaMeningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi sesuai dengan kompetensinya (%)		Program Penempatan Tenaga Kerja	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
							ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			1.	Meningkatnya Pekerja		Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB) (%)		Program Hubungan Industrial	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
					2.	Indeks Keparahan Kemiskinan			
DINAS SOSIAL									

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan		Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan (%)		Program Penanganan Bencana	ASTA CITA 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
									ASTA CITA 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		SASARAN 4 :							
		Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah			1.	Rasio kemandirian Keuangan Daerah			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
BADAN PENDAPATAN DAERAH									
				Meningkatnya kinerja pengelolaan pajak dan retribusi	1	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi (%)		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
					2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)			
					2.	**Tingkat Inflasi**			
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	1. Program Kawasan Kuliner Halal 2. Program Pengembangan Kewirausahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	ASTA CITA 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
				Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distirbusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Persentase Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)		Program Pengembangan Ekspor	
				Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase peningkatan Fasilitasi Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
PRIORITAS PROVINSI: 8. Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Pemerintah Yang Baik									
PRIORITAS DAERAH: MISI 5 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib Untuk Mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya									
	TUJUAN 1 :								
	Mewujudkan Kota yang aman tertib dan harmonis					Angka Konflik			
		SASARAN 1 :							

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
		Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif				Angka Kriminalitas			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
				Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah		Persentase Pelanggaran (Ketertiban Umum/Penegakan PERDA dan PERKADA) yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
		SASARAN 2 :							
		Meningkatkan Toleransi Kelompok Masyarakat Kota				Indeks Kota Toleran			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	ASTA CITA 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
							ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
							ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
					Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Koordinasi Penyalahgunaan Narkotika	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	ASTA CITA 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) ASTA CITA 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome		Indikator		Program Prioritas		Tagging Prioritas Nasional
							Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Program Nomenklatur	
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Fasilitasi FKUB	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	ASTA CITA 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025

Adapun beberapa pelaksanaan proyek infrastruktur strategis yang akan dilaksanakan 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Rencana Waktu Pelaksanaan Proyek Strategis/Multiyears Tahun 2025-2030

NO	PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS	RENCANA TAHUN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pembangunan SPALD-T (Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat) 2025-2029							*Asian Development Bank (ADB)*
	- Pembangunan Sambungan Rumah (SR) Untuk Mendukung SPALD-T							APBD
	- Penyertaan Modal Kepada PDAM							APBD
2	LSDP TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) *							BANK DUNIA
3	TPST Tiap Kecamatan (Tiga Kecamatan)							APBD
4	Waterfront City (Dari Gg. Kamboja – Gg. H. Mursid)*							APBN APBD
5	Turap Saluran Primer Dan Drainage							APBN APBD
6	Lanjutan Paralel Jl. Sungai Jawi							APBD
7	Pelebaran Jl. Rais A Rahman							APBD PROVINSI APBD KOTA
8	Paralel Jl. Ampera / Inner Ringroad (Jl. Parit Cahaya Baru, Jl. Purnama)*							APBN APBD
9	Pembangunan/ Rehap Sekolah Pembangunan Smp Nipah Kuning Dalam 2026-2027*							APBD
10	Penambahan Lokal Smp 21 Saigon Kec. Pontianak Timur							APBD

NO	PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS	RENCANA TAHUN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Pembangunan Masjid Terapung dan Taman Al Qur'an*							APBD
12	Pembangunan/ Rehab Puskesmas Dan Jaringannya							APBD
13	Pembangunan Sarana Olah Raga							APBD
14	Pembangunan Destinasi Wisata (Tugu Khatulistiwa, Wisata Budaya dan Religi)							APBN APBD
15	Pembangunan Troroar Yang Humanis							APBD
16	Jembatan Garuda (Bardan Nadi – Siantan)							KPBU
17	Pembangunan Sekolah Rakyat							APBN
18	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata							APBD
19	Master Plan Pendidikan							APBD
20	Master Plan Persampahan							APBD
21	Master Plan Drainage Kota							APBD
22.	Pembangunan *sanitary landfill*							APBD

Sumber : BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025

Keterangan : * Multiyears

Program Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Pontianak merumuskan dan menyelaraskan program pembangunan sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Program Strategis Nasional secara umum sebagai berikut:

Tabel 3.10 Dukungan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kota Pontianak	Perangkat Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
			Program Kawasan Permukiman	DPRKP
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP3A
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumdag
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DPPP
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disporapar

No	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kota Pontianak	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan UMKM	Diskumdag
		Sekolah Rakyat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				BKAD, Bidang Aset
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
			Program Kawasan Permukiman	DPRKP
				Bapenda
2.	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan)		DPPP
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	DPPP
		Pengadaan Dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DPPP
		Mencetak Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ Food Estate)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DPPP
3.	Kesehatan Untuk Semua	Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DP2KBP3A
			Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP3A
				Dinkes
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP3A
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR

No	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kota Pontianak	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
4.	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan Dan Revitalisasi PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
		Pembangunan Dan Revitalisasi Pendidikan Dasar Dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
			Program Pengelolaan Pendidikan	
			Program Pengelolaan Pendidikan	
		Makan Bergizi Gratis	Perogram Sesdiaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				DLH
5.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Satuan Tugas Ketahanan Pangan, Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan
				Diskumdag
				Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
				Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Diskumdag
				Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
				Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Dinas Perhubungan

No	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program Dukungan Pemerintah Kota Pontianak	Perangkat Daerah
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Diskumdag
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diskumdag
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
		Industrialisasi Dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Diskumdag
		Pelestarian Lingkungan Dan Pengelolaan Sampah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Perangkat Daerah Kota Pontianak

Program dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap Program Strategis Nasional diatas masih dapat berubah, sejalan dengan proses perumusan dan pendataan program yang sedang dilakukan, sehingga program final terhadap program dukungan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Pontianak.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kota Pontianak tidaklah luas
dilalui oleh garis khatulistiwa
kalau sudah minum air Sungai Kapuas
rindu tuk kembali pasti merasuk jiwa

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Rencana Program Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Rencana ini mencakup berbagai program prioritas yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Rencana Program Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program kerja yang lebih operasional. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, tantangan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara sistematis.

Adapun rencana program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dijabarkan dalam tabel IV.1 berikut:

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					492.063.453.344,00		494.519.534.276,00		496.853.504.664,00		508.394.574.330,00		508.763.107.097,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					325.125.465.967,00		327.833.648.399,00		325.739.828.399,00		327.058.523.399,00		326.888.003.399,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	325.125.465.967,00	100	327.833.648.399,00	100	325.739.828.399,00	100	327.058.523.399,00	100	326.888.003.399,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					166.790.589.742,00		166.538.488.242,00		170.966.278.630,00		181.188.653.296,00		181.727.706.063,00	
Meningkatnya Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan dan Angka Melanjutkan	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)	101.34	100	100	166.790.589.742,00	100	166.538.488.242,00	100	170.966.278.630,00	100	181.188.653.296,00	100	181.727.706.063,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)	132.44	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Kasar (SD) (%)	96.91	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)	94.52	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	27.37	27.37	27.40		27.45		27.50		27.55		27.60		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center
	Angka Partisipasi Kasar (SD) (%)	96.91	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center
	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)	94.52	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	27.37	27.37	27.40		27.45		27.50		27.55		27.60		1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center
	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0002 - UPT IPTEK DAN BAHASA
	Persentase Angka Melanjutkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0002 - UPT IPTEK DAN BAHASA
	Angka Partisipasi Kasar (SD) (%)	96.91	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0002 - UPT IPTEK DAN BAHASA
	Angka Partisipasi Kasar (SMP) (%)	94.52	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.02.0002 - UPT IPTEK DAN BAHASA
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	27.37	27.37	27.40		27.45		27.50		27.55		27.60		1.01.2.22.0.00.02.0002 - UPT IPTEK DAN BAHASA
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					147.397.635,00		147.397.635,00		147.397.635,00		147.397.635,00		147.397.635,00	
Meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S1 dan Jumlah Guru pada Satuan Pendidikan yang memiliki Sertifikat Pendidik.	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	88.89	88.91	88.95	147.397.635,00	88.98	147.397.635,00	89.01	147.397.635,00	89.05	147.397.635,00	89.08	147.397.635,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Jumlah Guru TK,SD, dan SMP yang bersertifikat (%)	60	60	60.50		61.00		61.50		62.00		62.50		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
														1.01.2.22.0.00.02.0001 - UPT Layanan Disabilitas dan AsesmenÂ Center
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					480.589.153.973,00		509.066.316.222,00		516.319.395.315,00		522.741.230.834,00		528.555.913.378,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					333.448.542.007,00		346.274.444.940,00		350.904.463.748,00		362.421.776.277,00		365.608.942.786,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	96.25	100	100	333.448.542.007,00	100	346.274.444.940,00	100	350.904.463.748,00	100	362.421.776.277,00	100	365.608.942.786,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Gg.Sehat
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					144.659.082.403,00		160.583.811.203,00		163.070.587.420,00		157.964.637.330,00		160.618.557.198,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang Ditanggung Pemerintah Daerah (%)	12.84	21	21	144.659.082.403,00	21	160.583.811.203,00	21	163.070.587.420,00	21	157.964.637.330,00	21	160.618.557.198,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)	18.9	20	25		30		35		40		40		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.40	1.40	1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan	-	-	6.90		6.90		10.34		13.79		20.69		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	sanitasi total berbasis masyarakat (%)													
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	48	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	80	80		80		80		85		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	81.84	81.84	81.84		81.84		88.90		88.90		88.90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	12.40	12.00		11.50		11.00		10.00		10.00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	26.62	25	25		25		23		23		23		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	74.30	75	77		79		81		83		83		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Gg.Sehat
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.088.580.146,00		1.019.728.129,00		1.075.914.535,00		1.135.455.262,00		910.079.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kuantitas, kulitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	100	100	100	1.088.580.146,00	100	1.019.728.129,00	100	1.075.914.535,00	100	1.135.455.262,00	100	910.079.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2.3	2.3	2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Gg.Sehat
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.107.681.878,00		860.523.950,00		939.367.612,00		888.920.965,00		1.086.376.094,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	100	1.107.681.878,00	100	860.523.950,00	100	939.367.612,00	100	888.920.965,00	100	1.086.376.094,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah Daerah (%)													
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Gg.Sehat
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					285.267.539,00		327.808.000,00		329.062.000,00		330.441.000,00		331.958.300,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Puskesmas dengan minimal 75 % Posyandu siklus hidup yang aktif (%)	52	56	58	285.267.539,00	60	327.808.000,00	62	329.062.000,00	64	330.441.000,00	66	331.958.300,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Gg.Sehat
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					349.424.232.453,00		371.714.435.042,00		387.833.806.680,00		423.799.508.508,00		454.850.771.744,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.921.155.381,00		32.908.568.892,00		33.154.303.892,00		33.976.657.492,00		34.797.059.892,00	
Terpenuhinya layanan admininistrasi urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah (%)	100.00	100.00	100.00	33.921.155.381,00	100.00	32.908.568.892,00	100.00	33.154.303.892,00	100.00	33.976.657.492,00	100.00	34.797.059.892,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					27.440.000.000,00		26.054.500.000,00		25.404.500.000,00		24.554.500.000,00		24.554.500.000,00	
Terwujudnya peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan genangan	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan genangan (%)	40.39	42.00	42.75	27.440.000.000,00	43,50	26.054.500.000,00	44,25	25.404.500.000,00	45,00	24.554.500.000,00	45,75	24.554.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					11.050.000.000,00		13.175.681.889,00		13.175.681.889,00		13.175.681.889,00		13.175.681.889,00	
Terpenuhinya pelayanan air bersih	Persentase peningkatan pelayanan air bersih (%)	93.16	94.16	95.16	11.050.000.000,00	96.16	13.175.681.889,00	97.16	13.175.681.889,00	98.16	13.175.681.889,00	99.16	13.175.681.889,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					700.000.000,00		665.000.000,00		680.000.000,00		1.420.000.000,00		785.000.000,00	
Terpenuhinya infrastruktur pengelolaan persampahan yang memenuhi standar	Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan yang memenuhi standar (%)	65.00	70.00	70,00	700.000.000,00	70,00	665.000.000,00	71,50	680.000.000,00	72,00	1.420.000.000,00	72,00	785.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.578.678.000,00		6.578.678.000,00		6.578.678.000,00		11.578.678.000,00		11.578.678.000,00	
Terpenuhinya jumlah KK yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang layak	Persentase KK yang memiliki fasilitas pengolahan limbah yang layak (%)	98.42	98.47	98.52	6.578.678.000,00	98.57	6.578.678.000,00	98.62	6.578.678.000,00	98.67	11.578.678.000,00	98.72	11.578.678.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					27.100.000.000,00		31.390.000.000,00		31.340.000.000,00		30.809.300.000,00		30.319.836.000,00	
Terpenuhinya Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	49.91	51.00	51.20	27.100.000.000,00	51.80	31.390.000.000,00	52.40	31.340.000.000,00	53.00	30.809.300.000,00	53.60	30.319.836.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					54.968.509.442,00		55.291.225.500,00		63.019.392.899,00		48.832.625.500,00		64.332.625.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik (%)	84.86	85.86	86.86	54.968.509.442,00	87.86	55.291.225.500,00	88.86	63.019.392.899,00	89.86	48.832.625.500,00	90.86	64.332.625.500,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					31.041.200.000,00		33.395.781.761,00		33.800.000.000,00		33.050.000.000,00		41.800.000.000,00	
Terpenuhinya bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik (%)	85.00	85.00	87.00	31.041.200.000,00	88.00	33.395.781.761,00	90.00	33.800.000.000,00	93.00	33.050.000.000,00	95.00	41.800.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					152.644.689.630,00		168.524.999.000,00		176.951.250.000,00		222.922.065.627,00		229.977.390.463,00	
Terpenuhinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%)	95.81	96.15	96.49	152.644.689.630,00	96.83	168.524.999.000,00	97.17	176.951.250.000,00	97.51	222.922.065.627,00	97.85	229.977.390.463,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00		930.000.000,00	
Terpenuhinya kualitas tenaga kerja jasa konstruksi	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi (%)	58.00	61.00	64,20	930.000.000,00	65,20	930.000.000,00	66.20	930.000.000,00	68.20	930.000.000,00	70.00	930.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.050.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.550.000.000,00		2.600.000.000,00	
Terpenuhinya ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak (%)	85.00	85.00	85,20	3.050.000.000,00	85,40	2.800.000.000,00	85,60	2.800.000.000,00	85,80	2.550.000.000,00	86,00	2.600.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					167.798.964.959,00		152.667.766.646,00		153.322.549.029,00		153.032.229.490,00		152.925.308.011,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					10.694.338.229,00		11.789.864.880,00		12.233.472.880,00		11.931.265.880,00		11.895.687.880,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100	10.694.338.229,00	100	11.789.864.880,00	100	12.233.472.880,00	100	11.931.265.880,00	100	11.895.687.880,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.923.330.000,00		2.923.330.000,00		2.853.330.000,00		2.923.330.000,00		2.993.330.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penanganan rumah korban bencana / relokasi program pemerintah (%)	100	100	93.50	2.923.330.000,00	94.00	2.923.330.000,00	94.50	2.853.330.000,00	95.00	2.923.330.000,00	95.50	2.993.330.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					7.589.500.000,00		6.349.221.766,00		6.830.396.149,00		7.072.283.610,00		6.930.940.131,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan (di Bawah 10 Ha) (%)	77.99	7.77	8.42	7.589.500.000,00	8.28	6.349.221.766,00	9.03	6.830.396.149,00	8.72	7.072.283.610,00	8.26	6.930.940.131,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.700.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)	0.29	0.25	0.16	1.700.000.000,00	0.15	1.000.000.000,00	0.15	800.000.000,00	0.14	500.000.000,00	0.14	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					144.891.796.730,00		130.605.350.000,00		130.605.350.000,00		130.605.350.000,00		130.605.350.000,00	
Meningkatnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	74.40	76.60	85.00	144.891.796.730,00	85.50	130.605.350.000,00	86.00	130.605.350.000,00	86.50	130.605.350.000,00	87.00	130.605.350.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dalam Kondisi Baik (%)													
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					38.829.686.252,00		39.050.323.152,00		39.608.908.345,00		40.264.952.627,00		40.919.743.980,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.633.888.802,00		34.450.513.152,00		34.422.633.752,00		34.649.867.440,00		34.824.937.404,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan sekretariatan (%)	0	95	95	27.310.149.000,00	95	27.291.342.000,00	95	27.375.568.500,00	95	27.542.802.188,00	95	27.886.082.152,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	7.323.739.802,00	100	7.159.171.152,00	100	7.047.065.252,00	100	7.107.065.252,00	100	6.938.855.252,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.095.000.000,00		2.345.000.000,00		2.560.000.000,00		2.770.000.000,00		2.970.000.000,00	
Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi (%)	0	100	100	2.095.000.000,00	100	2.345.000.000,00	100	2.560.000.000,00	100	2.770.000.000,00	100	2.970.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.408.978.450,00		1.304.810.000,00		1.861.274.593,00		1.454.425.000,00		1.530.925.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	1.408.978.450,00	100	1.304.810.000,00	100	1.861.274.593,00	100	1.454.425.000,00	100	1.530.925.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					691.819.000,00		950.000.000,00		765.000.000,00		1.390.660.187,00		1.593.881.576,00	
Meningkatnya Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran (%)	0	100	100	691.819.000,00	100	950.000.000,00	100	765.000.000,00	100	1.390.660.187,00	100	1.593.881.576,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time) (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.822.139.277,00		16.603.293.850,00		17.474.913.381,00		18.410.811.052,00		19.351.471.024,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.329.361.877,00		8.449.335.192,00		8.964.336.100,00		9.124.952.277,00		9.124.952.277,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	180	100	100	8.329.361.877,00	100	8.449.335.192,00	100	8.964.336.100,00	100	9.124.952.277,00	100	9.124.952.277,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.112.465.700,00		2.120.000.000,00		2.120.000.000,00		2.120.000.000,00		2.620.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi PSKS	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	2.112.465.700,00	100	2.120.000.000,00	100	2.120.000.000,00	100	2.120.000.000,00	100	2.620.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	60	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.200.250.400,00		1.905.527.658,00		1.962.146.281,00		1.962.146.281,00		1.962.146.281,00	
Meningkatnya taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	1.200.250.400,00	100	1.905.527.658,00	100	1.962.146.281,00	100	1.962.146.281,00	100	1.962.146.281,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					3.759.380.700,00		3.707.750.900,00		4.007.750.900,00		4.783.032.394,00		5.223.692.366,00	
Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (%)	100	100	100	3.759.380.700,00	100	3.707.750.900,00	100	4.007.750.900,00	100	4.783.032.394,00	100	5.223.692.366,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					410.680.600,00		410.680.100,00		410.680.100,00		410.680.100,00		410.680.100,00	
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana	100	100	100	410.680.600,00	100	410.680.100,00	100	410.680.100,00	100	410.680.100,00	100	410.680.100,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan	sosial sesuai ketentuan (%)													
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.202.534.000,00		6.776.988.900,00		6.910.722.218,00		7.180.466.784,00		7.384.276.643,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.833.584.200,00		4.361.564.200,00		4.395.842.218,00		4.502.897.784,00		4.587.050.743,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah (%)	95	95	100	4.833.584.200,00	100	4.361.564.200,00	100	4.395.842.218,00	100	4.502.897.784,00	100	4.587.050.743,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					28.000.000,00		30.800.000,00		33.880.000,00		37.268.000,00		40.994.800,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Cakupan pemenuhan rencana tenaga kerja (%)	0	0	312638	28.000.000,00	319225	30.800.000,00	325906	33.880.000,00	332642	37.268.000,00	339466	40.994.800,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					871.000.000,00		903.624.700,00		1.000.000.000,00		1.159.301.000,00		1.275.231.100,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikasi setelah pelatihan (%)	0	100	100	871.000.000,00	100	903.624.700,00	100	1.000.000.000,00	100	1.159.301.000,00	100	1.275.231.100,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					481.000.000,00		481.000.000,00		481.000.000,00		481.000.000,00		481.000.000,00	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi sesuai dengan kompetensinya (%)	0	100	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					988.949.800,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	Besaran Kasus yang diselesaikan derngan perjanjian bersama (PB) (%)	39.00	39.15	39.30	988.949.800,00	39.45	1.000.000.000,00	39.65	1.000.000.000,00	39.85	1.000.000.000,00	40.00	1.000.000.000,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.065.482.000,00		16.034.168.863,00		9.051.631.299,00		9.298.567.315,00		9.381.523.438,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.681.672.724,00		14.973.342.911,00		7.937.764.051,00		8.151.284.059,00		8.199.821.693,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	7.681.672.724,00	100	14.973.342.911,00	100	7.937.764.051,00	100	8.151.284.059,00	100	8.199.821.693,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					140.750.000,00		185.590.000,00		194.869.499,00		200.715.582,00		206.737.048,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	20.44	28.58	29.08	140.750.000,00	30.58	185.590.000,00	31.08	194.869.499,00	32.58	200.715.582,00	33.08	206.737.048,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					49.559.800,00		53.524.584,00		56.200.813,00		57.886.834,00		59.623.436,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)	4.07	7.20	7.10	49.559.800,00	7.00	53.524.584,00	6.90	56.200.813,00	6.80	57.886.834,00	6.70	59.623.436,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					11.130.000,00		12.020.400,00		12.621.420,00		13.000.062,00		13.390.063,00	
Meningkatkan updating dan validitas data gender dan anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak (%)	100	100	100	11.130.000,00	100	12.020.400,00	100	12.621.420,00	100	13.000.062,00	100	13.390.063,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					2.594.889.976,00		216.757.108,00		227.594.963,00		234.422.810,00		241.455.493,00	
Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak secara komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	62.77	64.47	2.594.889.976,00	66.17	216.757.108,00	67.87	227.594.963,00	69.57	234.422.810,00	71.27	241.455.493,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					587.479.500,00		592.933.860,00		622.580.553,00		641.257.968,00		660.495.705,00	
Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	86.88	87.72	587.479.500,00	88.56	592.933.860,00	89.4	622.580.553,00	90.24	641.257.968,00	91.08	660.495.705,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14.411.975.566,00		15.021.519.919,00		14.930.122.400,00		15.350.880.131,00		15.775.670.604,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					13.874.652.326,00		14.463.019.919,00		14.323.622.400,00		14.689.380.131,00		15.061.670.604,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	13.874.652.326,00	100	14.463.019.919,00	100	14.323.622.400,00	100	14.689.380.131,00	100	15.061.670.604,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					396.286.940,00		410.500.000,00		458.500.000,00		513.500.000,00		566.000.000,00	
Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP)	Persentase Capain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPH), Cadangan Pangan (CPP) dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan (KP). (%)	0	100	100	396.286.940,00	100	410.500.000,00	100	458.500.000,00	100	513.500.000,00	100	566.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					39.709.300,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terwujudnya Peningkatan Tahan Pangan	Persentase Kecamatan Status Rentan Rawan Pangan (%)	0	0	0	39.709.300,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					101.327.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00	
Terwujudnya mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar yang ditetapkan	Persentase Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak Sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan (%)	0	5	4.5	101.327.000,00	4	108.000.000,00	3.5	108.000.000,00	3	108.000.000,00	2.5	108.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					17.950.000.000,00		5.160.000.000,00		10.160.000.000,00		6.160.000.000,00		22.160.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi (%)	100	100	90	140.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					17.800.000.000,00		5.000.000.000,00		10.000.000.000,00		6.000.000.000,00		22.000.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi santunan tanah untuk pembangunan (%)	80	80	85	17.800.000.000,00	86	5.000.000.000,00	87	10.000.000.000,00	88	6.000.000.000,00	89	22.000.000.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Koordinasi redistribusi tanah	Persentase redistribusi tanah (%)	0	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					147.000.884.230,00		161.487.538.601,00		154.631.779.948,00		87.384.163.621,00		72.873.971.869,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.747.583.278,00		17.902.808.024,00		17.759.205.024,00		17.761.181.024,00		17.533.526.024,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang	100	100	100	17.747.583.278,00	100	17.902.808.024,00	100	17.759.205.024,00	100	17.761.181.024,00	100	17.533.526.024,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Urusan Pemerintahan (%)													
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					70.780.000,00		70.780.000,00		470.780.000,00		470.780.000,00		570.780.000,00	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	70.780.000,00	100	70.780.000,00	100	470.780.000,00	100	470.780.000,00	100	570.780.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.142.961.450,00		1.142.961.450,00		1.142.961.450,00		1.542.961.450,00		1.642.961.450,00	
Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	1.142.961.450,00	100	1.142.961.450,00	100	1.142.961.450,00	100	1.542.961.450,00	100	1.642.961.450,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					598.103.000,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00		875.632.625,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas taman kehati yang dikelola sesuai dengan ketentuan/standar (%)	100	100	100	598.103.000,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	100	875.632.625,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					133.384.400,00		133.384.400,00		133.384.400,00		133.384.400,00		250.847.648,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah	Persentase Pemenuhan Penghasil Limbah B3	100	100	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	133.384.400,00	100	250.847.648,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	sesuai Persyaratan (%)													
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					294.232.500,00		294.232.500,00		294.232.500,00		394.232.500,00		394.232.500,00	
Meningkatkan Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang di Terbitkan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Persetujuan Lingkungan (%)	100	100	100	294.232.500,00	100	294.232.500,00	100	294.232.500,00	100	394.232.500,00	100	394.232.500,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		673.544.100,00		773.544.100,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan SDM dan Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	673.544.100,00	100	773.544.100,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					227.723.700,00		227.723.700,00		448.568.047,00		548.568.047,00		548.568.047,00	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Lembaga / Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	227.723.700,00	100	227.723.700,00	100	448.568.047,00	100	548.568.047,00	100	548.568.047,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					148.378.500,00		148.378.500,00		148.378.500,00		215.786.173,00		315.786.173,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	148.378.500,00	100	148.378.500,00	100	148.378.500,00	100	215.786.173,00	100	315.786.173,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					125.964.193.302,00		140.018.093.302,00		132.685.093.302,00		64.768.093.302,00		49.968.093.302,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Sampah yang dikurangi (%)	25.03	27.00	30.00	125.964.193.302,00	31.00	140.018.093.302,00	31.00	132.685.093.302,00	32.00	64.768.093.302,00	33.00	49.968.093.302,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Sampah yang ditangani (%)	74.81	73.00	70.00		69.00		69.00		68.00		67.00		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					13.624.764.368,00		14.104.915.516,00		14.370.232.028,00		14.810.437.753,00		15.177.991.883,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.766.583.748,00		13.166.075.865,00		13.314.450.393,00		13.651.867.037,00		13.956.492.632,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95.00	100.00	100.00	12.766.583.748,00	100.00	13.166.075.865,00	100.00	13.314.450.393,00	100.00	13.651.867.037,00	100.00	13.956.492.632,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					122.775.000,00		157.413.750,00		205.284.438,00		225.548.659,00		241.826.092,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga (%)	100.00	100.00	100.00	122.775.000,00	100.00	157.413.750,00	100.00	205.284.438,00	100.00	225.548.659,00	100.00	241.826.092,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP-el (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	-	5.00	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					421.561.000,00		451.889.050,00		504.483.503,00		539.707.678,00		566.693.062,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100.00	100.00	100.00	421.561.000,00	100.00	451.889.050,00	100.00	504.483.503,00	100.00	539.707.678,00	100.00	566.693.062,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					275.548.020,00		289.325.421,00		303.791.692,00		348.981.277,00		366.430.340,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Hak Akses Data Kependudukan (%)	53.13	53.13	56.25	275.548.020,00	59.38	289.325.421,00	62.50	303.791.692,00	65.63	348.981.277,00	68.75	366.430.340,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					38.296.600,00		40.211.430,00		42.222.002,00		44.333.102,00		46.549.757,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan (%)	100.00	100.00	100.00	38.296.600,00	100.00	40.211.430,00	100.00	42.222.002,00	100.00	44.333.102,00	100.00	46.549.757,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.252.470.000,00		2.270.103.952,00		2.359.199.149,00		2.455.395.313,00		2.529.057.169,00	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					314.071.100,00		314.071.100,00		329.774.655,00		339.667.894,00		349.857.930,00	
Meningkatnya pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang dilakukan Evaluasi terhadap tingkat perkembangannya (%)	100	100	100	314.071.100,00	100	314.071.100,00	100	329.774.655,00	100	339.667.894,00	100	349.857.930,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.938.398.900,00		1.956.032.852,00		2.029.424.494,00		2.115.727.419,00		2.179.199.239,00	
Meningkatnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dan Diberdayakan dalam Program Pembangunan (%)	-	45	50	1.938.398.900,00	55	1.956.032.852,00	60	2.029.424.494,00	65	2.115.727.419,00	70	2.179.199.239,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.300.137.900,00		3.321.563.908,00		3.355.041.627,00		3.376.192.875,00		3.403.828.657,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					339.500.000,00		345.060.000,00		352.063.000,00		356.774.890,00		367.478.135,00	
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) (%)	80.44	82.49	84.14	75.000.000,00	85.79	75.000.000,00	87.44	78.250.000,00	89.09	80.597.500,00	90.74	83.015.425,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatkan kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga melalui pernikahan pada usia yang ideal	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	22.7	22.4	22.5	264.500.000,00	22.6	270.060.000,00	22.7	273.813.000,00	22.8	276.177.390,00	22.9	284.462.710,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.862.593.100,00		1.865.552.548,00		1.867.949.700,00		1.869.220.191,00		1.870.528.796,00	
Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	63.11	60.83	62.38	1.819.393.100,00	63.93	1.822.352.548,00	65.48	1.824.749.700,00	67.03	1.826.020.191,00	68.58	1.827.328.796,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Menurunkan angka kelahiran remaja untuk mendukung keluarga yang lebih terencana dan sejahtera.	Angka Kelahiran Remaja (ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	15	19.40	19	43.200.000,00	18.6	43.200.000,00	18.2	43.200.000,00	17.8	43.200.000,00	17.4	43.200.000,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.098.044.800,00		1.110.951.360,00		1.135.028.927,00		1.150.197.794,00		1.165.821.726,00	
Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan (%)	66	90	91	600.600.000,00	92	600.600.000,00	93	600.600.000,00	94	600.600.000,00	95	600.600.000,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok ketahanan keluarga sebagai pilar pembinaan keluarga berkualitas di tingkat masyarakat	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif (%)	100	100	100	497.444.800,00	100	510.351.360,00	100	534.428.927,00	100	549.597.794,00	100	565.221.726,00	2.08.2.13.2.14.06.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					54.635.527.138,00		56.403.639.576,00		67.517.284.386,00		68.585.448.319,00		70.033.702.471,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.016.388.172,00		17.402.318.102,00		17.414.326.285,00		17.293.504.713,00		17.693.537.961,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100	17.016.388.172,00	100	17.402.318.102,00	100	17.414.326.285,00	100	17.293.504.713,00	100	17.693.537.961,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					36.817.017.986,00		37.970.492.494,00		49.072.129.121,00		50.259.114.626,00		51.232.335.530,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas (Indeks)	83	84	84.5	36.817.017.986,00	85	37.970.492.494,00	85,5	49.072.129.121,00	85,5	50.259.114.626,00	86	51.232.335.530,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar (%)	85	86	87		88		89		90		91		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	82	83	83.5		84		84.5		85		85.5		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					802.120.980,00		1.030.828.980,00		1.030.828.980,00		1.032.828.980,00		1.107.828.980,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase fasilitas pelabuhan sungai dalam kondisi baik (%)	87	88	88	802.120.980,00	88	1.030.828.980,00	88	1.030.828.980,00	92	1.032.828.980,00	92	1.107.828.980,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.993.602.014,00		13.659.067.161,00		13.739.145.936,00		13.489.874.669,00		13.868.663.932,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.541.941.014,00		8.823.502.161,00		8.906.080.936,00		8.956.324.669,00		9.317.803.932,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100	8.541.941.014,00	100	8.823.502.161,00	100	8.906.080.936,00	100	8.956.324.669,00	100	9.317.803.932,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					705.000.000,00		775.500.000,00		853.000.000,00		878.300.000,00		912.560.000,00	
Peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik	Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik (%)	70.00	80.00	85.00	705.000.000,00	87.50	775.500.000,00	90.00	853.000.000,00	93.00	878.300.000,00	95.00	912.560.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.746.661.000,00		4.060.065.000,00		3.980.065.000,00		3.655.250.000,00		3.638.300.000,00	
Peningkatan keterpaduan layanan digital	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE (%)	95.52	97.01	97.50	2.746.661.000,00	97.80	4.060.065.000,00	98.00	3.980.065.000,00	98.50	3.655.250.000,00	98.50	3.638.300.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					16.341.730.352,00		16.213.139.783,00		16.668.621.700,00		16.868.923.062,00		16.875.554.925,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					13.602.793.787,00		13.153.203.218,00		13.458.685.135,00		13.307.986.497,00		13.421.118.360,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	13.602.793.787,00	100	13.153.203.218,00	100	13.458.685.135,00	100	13.307.986.497,00	100	13.421.118.360,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha sesuai ketentuan (%)	1.47	1.47	1.47	-	1.47	-	1.47	-	1.47	-	1.47	-	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					21.500.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang Berlaku (%)	13.33	13.33	14.44	21.500.000,00	15.56	22.000.000,00	16.67	23.000.000,00	17.78	24.000.000,00	18.89	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					3.000.000,00		5.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	21.01	21.01	22.06	3.000.000,00	23.11	5.000.000,00	24.16	17.000.000,00	25.21	25.000.000,00	26.26	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					778.058.000,00		878.058.000,00		878.058.000,00		878.058.000,00		878.058.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Kenaikan Kualitas SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi (%)	50	50	50	778.058.000,00	50	878.058.000,00	50	878.058.000,00	50	878.058.000,00	50	878.058.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					105.500.000,00		15.000.000,00		38.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang Sehat (%)	14.71	14.71	14.92	105.500.000,00	15.13	15.000.000,00	15.34	38.000.000,00	15.55	35.000.000,00	15.76	35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					113.000.000,00		322.000.000,00		361.000.000,00		686.000.000,00		553.500.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru (%)	44.31	37.88	39.54	113.000.000,00	41.20	322.000.000,00	42.87	361.000.000,00	44.53	686.000.000,00	46.19	553.500.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.717.878.565,00		1.817.878.565,00		1.892.878.565,00		1.912.878.565,00		1.932.878.565,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya (%)	7.00	7.00	7.30	1.717.878.565,00	7.50	1.817.878.565,00	7.70	1.892.878.565,00	8.00	1.912.878.565,00	8.20	1.932.878.565,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.875.893.997,00		10.783.758.497,00		11.207.398.435,00		12.118.283.792,00		11.934.512.552,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.239.578.997,00		10.088.722.297,00		10.511.253.435,00		10.920.138.792,00		11.234.367.552,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	98	100	100	10.239.578.997,00	100	10.088.722.297,00	100	10.511.253.435,00	100	10.920.138.792,00	100	11.234.367.552,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					44.444.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		600.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	100	100	44.444.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	600.000.000,00	100	100.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					60.000.000,00		63.920.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	63.920.000,00	100	65.000.000,00	100	67.000.000,00	100	69.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					463.574.000,00		462.848.000,00		462.848.000,00		462.848.000,00		462.848.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	463.574.000,00	100	462.848.000,00	100	462.848.000,00	100	462.848.000,00	100	462.848.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					57.950.000,00		57.921.200,00		57.950.000,00		57.950.000,00		57.950.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	57.950.000,00	100	57.921.200,00	100	57.950.000,00	100	57.950.000,00	100	57.950.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.347.000,00		10.347.000,00		10.347.000,00		10.347.000,00		10.347.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi	100	100	100	10.347.000,00	100	10.347.000,00	100	10.347.000,00	100	10.347.000,00	100	10.347.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penanaman Modal (Persentase)													PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					21.132.933.250,00		16.670.611.000,00		15.633.200.900,00		16.071.163.250,00		16.579.667.619,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.037.495.084,00		8.886.352.934,00		8.708.942.834,00		8.838.905.184,00		8.945.409.553,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95	9.037.495.084,00	95	8.886.352.934,00	95	8.708.942.834,00	95	8.838.905.184,00	95	8.945.409.553,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.111.388.266,00		1.031.388.266,00		1.131.388.266,00		1.271.388.266,00		1.391.388.266,00	
Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang berpartisipasi dan aktif dalam event kepemudaan secara berjenjang	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	-	2.26	2.28	1.111.388.266,00	2.30	1.031.388.266,00	2.32	1.131.388.266,00	2.34	1.271.388.266,00	2.36	1.391.388.266,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.834.049.900,00		6.602.869.800,00		5.642.869.800,00		5.810.869.800,00		6.092.869.800,00	
Meningkatnya Jumlah Cabor yang menjuarai Event tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional	Persentase Peningkatan Atlet berprestasi (%)	2.3	2.5	2.7	10.834.049.900,00	2.9	6.602.869.800,00	3.2	5.642.869.800,00	3.5	5.810.869.800,00	3.8	6.092.869.800,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina setiap Tahun	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					445.333.500,00		520.000.000,00		601.000.000,00		641.140.000,00		696.130.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					445.333.500,00		520.000.000,00		601.000.000,00		641.140.000,00		696.130.000,00	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral di daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (%)	53.85	61.54	75.00	445.333.500,00	80.00	520.000.000,00	85.00	601.000.000,00	90.00	641.140.000,00	90.00	696.130.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					141.118.000,00		155.229.000,00		186.270.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					141.118.000,00		155.229.000,00		186.270.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah daerah melalui penerapan persandian oleh perangkat daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Persandian Untuk Keamanan Informasi (%)	21.88	28.13	50.00	141.118.000,00	70.00	155.229.000,00	80.00	186.270.000,00	90.00	210.000.000,00	95.00	230.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.463.607.435,00		3.463.607.435,00		3.463.607.435,00		3.463.607.435,00		3.463.607.435,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.057.567.500,00		3.057.567.500,00		3.057.567.500,00		3.057.567.500,00		3.057.567.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Mengalami Perkembangan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang Dikelola dan Dilestarikan (%)	100	100	100	3.057.567.500,00	100	3.057.567.500,00	100	3.057.567.500,00	100	3.057.567.500,00	100	3.057.567.500,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					218.936.235,00		218.936.235,00		218.936.235,00		218.936.235,00		218.936.235,00	
Meningkatnya Kesenian Tradisional yang Berkembang	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan (Aduan)	100	100	100	218.936.235,00	100	218.936.235,00	100	218.936.235,00	100	218.936.235,00	100	218.936.235,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					78.435.000,00		78.435.000,00		78.435.000,00		78.435.000,00		78.435.000,00	
Meningkatnya Objek Sejarah yang Dibina	Persentase Objek Kemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (%)	100	100	100	78.435.000,00	100	78.435.000,00	100	78.435.000,00	100	78.435.000,00	100	78.435.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					108.668.700,00		108.668.700,00		108.668.700,00		108.668.700,00		108.668.700,00	
Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Teregister (%)	100	100	100	108.668.700,00	100	108.668.700,00	100	108.668.700,00	100	108.668.700,00	100	108.668.700,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.913.068.991,00		10.890.068.089,00		10.927.080.964,00		10.863.904.630,00		11.222.987.170,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.790.834.891,00		9.188.423.029,00		8.982.932.029,00		9.059.064.029,00		9.117.903.029,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang	0	100	100	9.790.834.891,00	100	9.188.423.029,00	100	8.982.932.029,00	100	9.059.064.029,00	100	9.117.903.029,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Urusan Pemerintahan (%)													
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					3.057.234.100,00		1.636.645.060,00		1.879.148.935,00		1.739.840.601,00		2.040.084.141,00	
Meningkatkan literasi membaca dan menulis di masyarakat	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	69.90	71.50	72.00	3.057.234.100,00	72.50	1.636.645.060,00	73.00	1.879.148.935,00	73.50	1.739.840.601,00	74.00	2.040.084.141,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Peningkatan Akses Publik terhadap Koleksi dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi yang Dimiliki (%)	-	100	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					543.208.700,00		249.622.700,00		249.622.700,00		549.622.700,00		549.622.700,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					529.648.700,00		230.062.700,00		230.062.700,00		530.062.700,00		530.062.700,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	90.74	90.79	90.84	529.648.700,00	90.89	230.062.700,00	90.94	230.062.700,00	90.99	530.062.700,00	91.04	530.062.700,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					13.560.000,00		19.560.000,00		19.560.000,00		19.560.000,00		19.560.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Peningkatan Kepuasan Publik terhadap Layanan Pemerintah	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100	13.560.000,00	100	19.560.000,00	100	19.560.000,00	100	19.560.000,00	100	19.560.000,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					730.000.000,00		811.000.000,00		834.500.000,00		865.000.000,00		868.950.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					245.000.000,00		268.000.000,00		273.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	795,19	742	764	245.000.000,00	772	268.000.000,00	780	273.000.000,00	788	275.000.000,00	796	275.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					455.000.000,00		458.000.000,00		466.500.000,00		475.000.000,00		478.950.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	255,38	249	264	455.000.000,00	280	458.000.000,00	297	466.500.000,00	315	475.000.000,00	319	478.950.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sesuai	0	0	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	kewenangan kabupaten/kota (%)													
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					15.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	1984	1764	1800	15.000.000,00	1820	70.000.000,00	1830	80.000.000,00	1850	100.000.000,00	1860	100.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.620.000.000,00		1.505.000.000,00		1.688.890.100,00		1.775.000.000,00		1.775.000.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					525.000.000,00		355.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00		455.000.000,00	
Meningkatya Jumlah Destinasi wisata yang tingkatan sarprasnya serta pembinaan terhadap pelaku usaha wisata di Kota Pontianak	Persentase Destinasi Wisata dengan Kondisi Baik (%)	15	15	16	525.000.000,00	16.5	355.000.000,00	17	455.000.000,00	18	455.000.000,00	18.5	455.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan lama tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Pontianak	Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	18	20	22	500.000.000,00	24	550.000.000,00	25	550.000.000,00	28	600.000.000,00	30	600.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					115.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HKI	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat HKI (%)	23	25	30	115.000.000,00	32	110.000.000,00	35	130.000.000,00	40	130.000.000,00	42	130.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					480.000.000,00		490.000.000,00		553.890.100,00		590.000.000,00		590.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kraetif Yang dilatih	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	23	25	27	480.000.000,00	30	490.000.000,00	33	553.890.100,00	35	590.000.000,00	40	590.000.000,00	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlatih (%)	23	25	27		30		33		35		40		2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.715.223.805,00		9.037.652.500,00		4.295.967.500,00		4.473.554.750,00		4.486.954.500,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					765.000.000,00		2.065.052.500,00		2.080.052.500,00		2.149.052.500,00		2.149.052.500,00	
Meningkatnya jumlah petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/rekomendasi	Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi (%)	30	40	42	390.000.000,00	43	1.689.552.500,00	44	1.704.552.500,00	45	1.738.552.500,00	46	1.738.552.500,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis	Persentase peningkatan jumlah kunjungan di UPTD Agribisnis (%)	15.5	2	2	265.000.000,00	2	265.000.000,00	2	265.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	110.500.000,00	100	110.500.000,00	100	110.500.000,00	100	110.500.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.431.188.305,00		6.417.000.000,00		1.642.000.000,00		1.732.000.000,00		1.732.000.000,00	
Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian merupakan bahan berupa output yang dipergunakan untuk budidaya pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	20	30	32	289.945.875,00	33	292.000.000,00	34	292.000.000,00	35	292.000.000,00	36	292.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Terwujudnya Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT	Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Prasarana di UPT Agribisnis (%)	5	2	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Terwujudnya Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskeswan	Persentase Pelayanan yang diberikan ke pengunjung Puskeswan (%)	0	0	100	717.605.869,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	720.000.000,00	100	720.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Pelayanan RPH Sapi	Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi (Nilai)	95	95	95	423.636.561,00	95	425.000.000,00	95	430.000.000,00	95	500.000.000,00	95	500.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					307.500.600,00		329.600.000,00		339.915.000,00		352.502.250,00		365.902.000,00	
Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (%)	0	10	10	307.500.600,00	10	329.600.000,00	10	339.915.000,00	10	352.502.250,00	10	365.902.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN					40.000.000,00		53.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BENCANA PERTANIAN														
Terfasilitasinya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	0	60	62	40.000.000,00	63	53.000.000,00	64	60.000.000,00	65	60.000.000,00	66	60.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan perizinan usaha obat hewan	Persentase peningkatan unit usaha obat hewan yang memiliki izin (%)	0	5	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00	5	14.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					159.534.900,00		160.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluh petani dan pelaku usaha	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis (%)	20	30	42	159.534.900,00	43	160.000.000,00	44	160.000.000,00	45	165.000.000,00	46	165.000.000,00	2.09.3.25.3.27.03.0000 - DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.027.703.680,00		2.589.295.800,00		2.655.295.800,00		2.865.295.800,00		3.405.295.800,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					33.407.880,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	50	33.407.880,00	60	50.000.000,00	70	55.000.000,00	70	65.000.000,00	80	65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.000.000.000,00		413.000.000,00		413.000.000,00		413.000.000,00		413.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distirbusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)	100	100	100	3.000.000.000,00	100	413.000.000,00	100	413.000.000,00	100	413.000.000,00	100	413.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.117.000.000,00		1.304.000.000,00		1.305.000.000,00		1.310.000.000,00		1.310.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu (%)	2	2	2	1.117.000.000,00	2	1.304.000.000,00	3	1.305.000.000,00	3	1.310.000.000,00	3	1.310.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					300.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		395.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Ekspor (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	340.000.000,00	100	350.000.000,00	100	395.000.000,00	100	700.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					377.295.800,00		282.295.800,00		282.295.800,00		312.295.800,00		317.295.800,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100	377.295.800,00	100	282.295.800,00	100	282.295.800,00	100	312.295.800,00	100	317.295.800,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		370.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Fasilitasi Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	370.000.000,00	100	600.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.985.000.000,00		3.139.828.000,00		3.199.828.000,00		3.279.828.000,00		3.359.828.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.915.000.000,00		3.049.328.000,00		3.109.328.000,00		3.119.328.000,00		3.199.328.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil (%)	23.39	18	18	2.915.000.000,00	23	3.049.328.000,00	23	3.109.328.000,00	24	3.119.328.000,00	27	3.199.328.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Kepatuhan Usaha Industri Kecil Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku (%)	30	30	30	40.000.000,00	35	60.000.000,00	40	60.000.000,00	45	60.000.000,00	50	60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					30.000.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		100.500.000,00		100.500.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Ketersediaan Data Industri Kecil Menengah pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	50	50	50	30.000.000,00	50	30.500.000,00	50	30.500.000,00	50	100.500.000,00	50	100.500.000,00	2.17.3.30.3.31.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					65.284.045.688,00		67.625.058.810,00		70.162.836.500,00		73.138.755.717,00		76.140.663.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.790.322.234,00		47.400.710.605,00		49.938.488.295,00		52.914.407.512,00		55.916.315.195,00	
Meningkatnya komponen penilaian Indeks Kepusan Masyarakat Perangkat Daerah	Persentase Unit Pelayanan Publik yang mengumpulkan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	100	100	100	1.089.827.931,00	100	1.169.343.275,00	100	1.169.343.275,00	100	1.169.343.275,00	100	1.169.343.275,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	100	100	100	2.924.928.319,00	100	3.138.335.108,00	100	3.138.335.108,00	100	3.138.335.108,00	100	3.138.335.108,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah Komponen pelaporan kinerja	Nilai rata-rata evaluasi AKIP Perangkat Daerah Komponen pelaporan kinerja oleh Inspektorat (Nilai)	11.82	11.85	11.88	283.434.200,00	11.91	304.113.950,00	11.94	304.113.950,00	11.97	304.113.950,00	12.00	304.113.950,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	41.492.131.784,00	100	42.788.918.272,00	100	45.326.695.962,00	100	48.302.615.179,00	100	51.304.522.862,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.461.073.755,00		15.897.470.840,00		15.897.470.840,00		15.897.470.840,00		15.897.470.840,00	
Meningkatnya jumlah pengunjungan yang mengakses JDIH dan Meningkatnya Implementasi Kebijakan produk Hukum	Persentase Implementasi Kebijakan Produk Hukum (%)	100	100	100	1.273.748.778,00	100	1.366.683.240,00	100	1.366.683.240,00	100	1.366.683.240,00	100	1.366.683.240,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Jumlah Pengunjung yang Mengakses JDIH (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kajian Kebijakan yang dihasilkan	Persentase Kajian Kebijakan yang dihasilkan (%)	100	100	100	12.001.749.050,00	100	12.185.749.050,00	100	12.185.749.050,00	100	12.185.749.050,00	100	12.185.749.050,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi (%)	100	100	100	2.185.575.927,00	100	2.345.038.550,00	100	2.345.038.550,00	100	2.345.038.550,00	100	2.345.038.550,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.032.649.699,00		4.326.877.365,00		4.326.877.365,00		4.326.877.365,00		4.326.877.365,00	
Meningkatnya Indeks Pengendalian Perekonomian	Indeks Pengendalian Perekonomian (Indeks)	80	80	81	644.445.890,00	82	691.465.550,00	83	691.465.550,00	84	691.465.550,00	85	691.465.550,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Indeks Pengendalian Pembangunan (IPP)	Indeks Pengendalian Pembangunan (IPP) (Indeks)	80	80	81	1.131.291.866,00	82	1.213.832.475,00	83	1.213.832.475,00	84	1.213.832.475,00	85	1.213.832.475,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa (ITKP)	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa (ITKP) (Indeks)	64.30	64.30	75.00	1.738.462.618,00	80.00	1.865.303.240,00	85.00	1.865.303.240,00	88.00	1.865.303.240,00	90.00	1.865.303.240,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Produktifitas Pengelolaan Keuangan BUMD	Persentase Capaian Laba Bersih BUMD (%)	100	100	100	518.449.325,00	100	556.276.100,00	100	556.276.100,00	100	556.276.100,00	100	556.276.100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					66.064.527.698,00		67.772.274.440,00		69.671.677.564,00		71.778.849.946,00		74.011.644.707,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					51.431.445.345,00		51.483.713.738,00		51.939.767.982,00		52.784.890.032,00		54.953.645.332,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	90.95	100	100	51.431.445.345,00	100	51.483.713.738,00	100	51.939.767.982,00	100	52.784.890.032,00	100	54.953.645.332,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					14.633.082.353,00		16.288.560.702,00		17.731.909.582,00		18.993.959.914,00		19.057.999.375,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD dengan baik	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi (%)	100	100	100	14.633.082.353,00	100	16.288.560.702,00	100	17.731.909.582,00	100	18.993.959.914,00	100	19.057.999.375,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					12.615.752.206,00		13.555.169.579,00		13.205.396.642,00		13.579.061.784,00		14.181.061.537,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.574.511.206,00		10.853.693.579,00		10.659.300.642,00		10.627.300.784,00		10.921.208.537,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	0	100	10.574.511.206,00	100	10.853.693.579,00	100	10.659.300.642,00	100	10.627.300.784,00	100	10.921.208.537,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.354.923.000,00		1.769.982.000,00		1.621.600.000,00		1.902.200.000,00		2.007.000.000,00	
Meningkatnya Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota dan Capaian Pengendalian serta Evaluasi	Indeks Penyusunan Dokumen Perencanaan Tingkat Kota (Indeks)	84	86	88	1.354.923.000,00	90	1.769.982.000,00	92	1.621.600.000,00	94	1.902.200.000,00	96	2.007.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Capaian Kinerja Program dengan Kategori Tinggi (%)	75	78	81		84		87		90		93		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					686.318.000,00		931.494.000,00		924.496.000,00		1.049.561.000,00		1.252.853.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Dokumen RKPD (%)	100	100	100	686.318.000,00	100	931.494.000,00	100	924.496.000,00	100	1.049.561.000,00	100	1.252.853.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Cascading OPD yang Selaras Sesuai dengan Jenjang Jabatan (%)	66	68	70		72		74		76		78		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Crosscutting yang Tersedia (%)	70	72	74		76		78		80		82		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					52.812.567.896,00		54.260.482.218,00		56.423.058.639,00		58.761.364.091,00		61.343.452.377,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.052.884.597,00		34.204.600.719,00		35.336.369.987,00		36.947.289.271,00		37.945.512.904,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	12.378.507.938,00	100	12.908.083.803,00	100	13.509.219.525,00	100	14.399.590.073,00	100	14.832.533.114,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	89.27	100	100	21.674.376.659,00	100	21.296.516.916,00	100	21.827.150.462,00	100	22.547.699.198,00	100	23.112.979.790,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					8.301.429.474,00		8.601.429.474,00		9.203.700.909,00		9.543.987.077,00		10.238.168.556,00	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	Pemenuhan aspek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	8.301.429.474,00	100	8.601.429.474,00	100	9.203.700.909,00	100	9.543.987.077,00	100	10.238.168.556,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.412.058.125,00		3.512.058.125,00		3.513.193.843,00		3.513.193.843,00		3.887.902.017,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel	Pemenuhan Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	3.412.058.125,00	100	3.512.058.125,00	100	3.513.193.843,00	100	3.513.193.843,00	100	3.887.902.017,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.046.195.700,00		7.942.393.900,00		8.369.793.900,00		8.756.893.900,00		9.271.868.900,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan pajak dan retribusi	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi (%)	90	90	91	7.046.195.700,00	92	7.942.393.900,00	93	8.369.793.900,00	94	8.756.893.900,00	95	9.271.868.900,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	-	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.160.035.263,00		16.312.199.689,00		16.626.773.505,00		16.887.866.000,00		17.137.207.689,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.766.635.958,00		10.827.113.689,00		10.915.366.644,00		10.943.060.689,00		10.929.944.689,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	10.766.635.958,00	100	10.827.113.689,00	100	10.915.366.644,00	100	10.943.060.689,00	100	10.929.944.689,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6.393.399.305,00		5.485.086.000,00		5.711.406.861,00		5.944.805.311,00		6.207.263.000,00	
Meningkatnya profesionalitas dan pola karir ASN berdasarkan sistem informasi	Persentase Pengisian formasi ASN sesuai Kompetensi (%)	85	75	80	6.393.399.305,00	83	5.485.086.000,00	85	5.711.406.861,00	87	5.944.805.311,00	90	6.207.263.000,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78	80	82		84		86		88		90		5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.246.629.772,00		1.370.909.000,00		1.733.585.184,00		2.137.800.439,00		2.587.053.781,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.246.629.772,00		1.370.909.000,00		1.733.585.184,00		2.137.800.439,00		2.587.053.781,00	
Meningkatnya kompetensi dasar dan manajerial ASN	Persentase ASN yang Memiliki Kemampuan Manjerial (%)	80	85	100	1.246.629.772,00	100	1.370.909.000,00	100	1.733.585.184,00	100	2.137.800.439,00	100	2.587.053.781,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					974.851.050,00		1.244.000.000,00		1.257.500.000,00		1.371.000.000,00		1.434.500.000,00	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					974.851.050,00		1.244.000.000,00		1.257.500.000,00		1.371.000.000,00		1.434.500.000,00	
Meningkatnya Capaian Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Riset yang ditindaklanjuti (%)	71	73	75	974.851.050,00	77	1.244.000.000,00	79	1.257.500.000,00	81	1.371.000.000,00	83	1.434.500.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Pertumbuhan Inovasi (%)	15.00	17.50	20.00		22.50		25.00		27.50		30.00		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Inovasi yang Berkelanjutan (%)	76	78	80		82		84		86		88		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					25.084.928.000,00		24.852.291.000,00		25.007.419.000,00		24.789.826.000,00		24.900.844.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.894.222.000,00		20.146.795.200,00		20.301.923.200,00		20.084.330.200,00		20.195.348.200,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	9.62	95	95	20.894.222.000,00	95	20.146.795.200,00	95	20.301.923.200,00	95	20.084.330.200,00	95	20.195.348.200,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.439.615.000,00		2.563.992.200,00		2.563.992.200,00		2.563.992.200,00		2.563.992.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Perangkat Daerah (%)	100	70	73	2.035.005.000,00	76	1.923.662.200,00	79	1.923.662.200,00	82	1.923.662.200,00	85	1.923.662.200,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pontianak	Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kota Pontianak (%)	100	80	83	404.610.000,00	86	640.330.000,00	89	640.330.000,00	92	640.330.000,00	95	640.330.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.751.091.000,00		2.141.503.600,00		2.141.503.600,00		2.141.503.600,00		2.141.503.600,00	
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	1.744.441.000,00	3	2.121.703.600,00	3	2.121.703.600,00	3	2.121.703.600,00	3	2.121.703.600,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
Meningkatnya efektifitas penanganan anti korupsi	Persentase Risk Register Fraud yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak (%)	0	18.75	37.5	6.650.000,00	56.25	19.800.000,00	75	19.800.000,00	93.75	19.800.000,00	100	19.800.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					108.934.683.677,00		111.025.060.443,00		112.807.207.507,00		114.789.423.222,00		118.071.791.067,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					64.660.559.998,00		65.464.202.115,00		66.363.956.729,00		67.274.120.687,00		68.706.611.107,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	94.04	100	100	10.361.037.606,00	100	10.564.339.804,00	100	10.778.070.762,00	100	10.919.547.796,00	100	11.475.950.093,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	94.04	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	94.04	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	94.04	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN SUNGAIBELIUNG
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	94.04	100	100	11.531.019.770,00	100	11.830.442.581,00	100	12.007.468.958,00	100	12.254.184.882,00	100	12.569.595.509,00	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN PALLIMA
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PONTIANAK KOTA
														7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN SUNGAIBANGKONG
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	-	95	100	10.808.219.584,00	100	10.941.405.671,00	100	10.982.789.604,00	100	10.956.311.119,00	100	11.066.020.785,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	100	9.212.792.000,00	100	9.263.337.100,00	100	9.198.138.383,00	100	9.469.520.210,00	100	9.582.190.307,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100	13.184.385.985,00	100	13.198.061.782,00	100	13.318.113.098,00	100	13.636.953.737,00	100	13.677.610.524,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95	9.563.105.053,00	95	9.666.615.177,00	95	10.079.375.924,00	95	10.037.602.943,00	95	10.335.243.889,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95		95		95		95		95		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95		95		95		95		95		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95		95		95		95		95		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR
	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95		95		95		95		95		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					830.096.500,00		858.841.815,00		1.014.759.988,00		1.043.288.579,00		1.130.691.892,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di	99.69	95	100	177.286.600,00	95	177.286.600,00	96	207.286.600,00	96	207.286.600,00	96	257.286.600,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PONTIANAK BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Barat	Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)													
														7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	100	100	100	206.506.200,00	100	211.668.855,00	100	214.843.888,00	100	219.140.766,00	100	225.714.989,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PONTIANAK KOTA
														7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN SUNGAIBANGKONG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	-	100	100	8.354.200,00	100	8.771.910,00	100	9.400.000,00	100	9.500.000,00	100	9.600.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
														7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	0	96.00	96.00	101.000.000,00	97.00	107.060.000,00	97.00	115.089.500,00	98.00	123.721.213,00	99.00	133.000.303,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
														7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai	90	92	95	115.900.000,00	96	120.900.000,00	97	229.640.000,00	98	239.640.000,00	99	254.640.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan Pontianak Timur	dengan Ketentuan/SOP (%)													
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)													
	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan/SOP (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pontianak Utara	Persentase penyelesaian layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	100	221.049.500,00	100	233.154.450,00	100	238.500.000,00	100	244.000.000,00	100	250.450.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA
														7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					37.864.626.909,00		38.833.405.466,00		39.314.596.824,00		39.926.749.742,00		41.244.222.054,00	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	96.38	95	95	7.727.780.200,00	95	7.727.780.200,00	96	7.757.780.200,00	96	7.757.780.200,00	96	7.681.261.200,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	96.38	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	96.38	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	96.38	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN SUNGAIBELIUNG
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	96.38	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN PALLIMA
Meningkatnya Partisipasi Lembaga	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100	6.802.703.210,00	100	6.977.164.290,00	100	7.081.821.755,00	100	7.223.458.190,00	100	7.441.117.139,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PONTIANAK KOTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota														
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN SUNGAIBANGKONG
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN MARIANA
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN TENGAH
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN DARATSEKIP
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	-	90	100	6.109.945.999,00	100	6.430.341.676,00	100	6.496.626.469,00	100	6.586.626.469,00	100	7.128.312.769,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	0	96.00	96.70	2.542.093.400,00	97.00	2.556.361.400,00	97.60	2.594.206.500,00	98.00	2.614.836.983,00	98.00	2.727.421.046,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.60		98.00		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.60		98.00		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.60		98.00		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.60		98.00		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90	6.694.090.900,00	91	6.896.997.900,00	92	7.090.147.900,00	93	7.176.347.900,00	94	7.501.347.900,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	85	88	90		91		92		93		94		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	100	100	100	7.988.013.200,00	100	8.244.760.000,00	100	8.294.014.000,00	100	8.567.700.000,00	100	8.764.762.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR
	Persentase Lembaga/Masyarakat yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.275.839.970,00		1.384.411.410,00		1.490.472.973,00		1.647.682.673,00		1.742.359.553,00	
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	99.98	95	95	153.210.000,00	96	153.210.000,00	96	183.210.000,00	96	203.210.000,00	96	263.210.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	99.98	95	95		96		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	99.98	95	95		96		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	99.98	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN SUNGAIBELIUNG
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	99.98	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN PALLIMA
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	369.943.600,00	100	379.192.190,00	100	384.880.073,00	100	392.577.673,00	100	404.355.003,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PONTIANAK KOTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN SUNGAIBANGKONG
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN MARIANA
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN TENGAH
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN DARATSEKIP
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	-	90	100	212.686.370,00	100	240.909.220,00	100	289.737.900,00	100	358.101.000,00	100	358.101.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96.00	96.70	160.000.000,00	97.00	169.600.000,00	97.40	182.320.000,00	97.60	195.994.000,00	98	210.693.550,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT
	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti (%)	90	92	95	150.000.000,00	96	200.000.000,00	97	200.000.000,00	98	250.000.000,00	99	250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
														7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON
Meningkatnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	100	100	230.000.000,00	100	241.500.000,00	100	250.325.000,00	100	247.800.000,00	100	256.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR
	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.303.560.300,00		4.484.199.637,00		4.623.420.993,00		4.897.581.541,00		5.247.906.461,00	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Barat	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	95.56	95	95	488.305.300,00	95	488.305.300,00	96	495.720.700,00	96	490.944.500,00	96	578.305.300,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	95.56	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	95.56	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat	95.56	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN SUNGAIBELIUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Ditangani oleh Forkompimcam (%)													
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	95.56	95	95		95		96		96		96		7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN PALLIMA
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Kota	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100	685.217.900,00	100	707.150.437,00	100	717.757.693,00	100	732.112.846,00	100	754.076.231,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN SUNGAIBANGKONG
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN SUNGAIJAWI
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN MARIANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN TENGAH
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang dapat Ditangani oleh Forkompimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN DARATSEKIP
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	-	90	100	414.196.400,00	100	425.125.900,00	100	450.000.000,00	100	589.514.400,00	100	589.514.400,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0001 - KELURAHAN PARIT TOKAYA
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0002 - KELURAHAN AKCAYA
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0003 - KELURAHAN KOTABARU
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	90	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Tenggara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96.00	96.70	538.800.000,00	97.00	571.128.000,00	97.40	613.962.600,00	97.60	660.009.795,00	98.00	733.510.530,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0001 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0002 - KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0003 - KELURAHAN BANSIR DARAT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	0	96.00	96.70		97.00		97.40		97.60		98.00		7.01.0.00.0.00.04.0004 - KELURAHAN BANSIR LAUT
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95	1.145.000.000,00	96	1.205.000.000,00	97	1.255.000.000,00	98	1.322.000.000,00	99	1.475.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN SAIGON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN TANJUNG HULU
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN TANJUNG HILIR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN DALAM BUGIS
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN PARITMAYOR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN BANJAR SERASAN
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	90	92	95		96		97		98		99		7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN TAMBELANSAMPIT
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pontianak Utara	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam (%)	100	100	100	1.032.040.700,00	100	1.087.490.000,00	100	1.090.980.000,00	100	1.103.000.000,00	100	1.117.500.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN SIANTAN HULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Ditangani oleh Forkopimcam (%)													
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN SIANTAN TENGAH
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN SIANTAN HILIR
	Persentase Permasalahan Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pemerintahan Umum Yang Dapat Ditangani oleh Forkopimcam (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN BATULAYANG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.300.720.000,00		9.319.065.000,00		25.782.666.500,00		44.791.636.738,00		10.278.520.368,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.311.614.774,00		3.329.959.774,00		3.443.561.274,00		3.422.246.274,00		3.612.129.904,00	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	3.311.614.774,00	100	3.329.959.774,00	100	3.443.561.274,00	100	3.422.246.274,00	100	3.612.129.904,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					970.050.000,00		970.050.000,00		1.010.050.000,00		1.010.050.000,00		1.020.050.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90	90	90	970.050.000,00	90	970.050.000,00	90	1.010.050.000,00	90	1.010.050.000,00	90	1.020.050.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.692.849.500,00		3.692.849.500,00		19.982.849.500,00		38.952.849.500,00		4.172.849.500,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	90	90	90	3.692.849.500,00	90	3.692.849.500,00	90	19.982.849.500,00	90	38.952.849.500,00	90	4.172.849.500,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					662.580.726,00		662.580.726,00		672.580.726,00		722.865.964,00		732.865.964,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	85	85	85	662.580.726,00	85	662.580.726,00	85	672.580.726,00	85	722.865.964,00	85	732.865.964,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					125.825.000,00		125.825.000,00		125.825.000,00		125.825.000,00		150.825.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	K	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	90	90	90	125.825.000,00	90	125.825.000,00	90	125.825.000,00	90	125.825.000,00	90	150.825.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					537.800.000,00		537.800.000,00		547.800.000,00		557.800.000,00		589.800.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	537.800.000,00	100	537.800.000,00	100	547.800.000,00	100	557.800.000,00	100	589.800.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					**2.271.378.570.434,00**		**2.321.226.498.567,00**		**2.372.727.640.980,00**		**2.390.805.640.977,00**		**2.413.489.851.527,00**	

Sumber: Perangkat Daerah Kota Pontianak, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil. Dalam konteks pembangunan daerah, kinerja pemerintahan dievaluasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai dasar untuk pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerinatah daerah perlu dilakukan penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk menetapkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap kesatu dan/atau isu strategis aktual. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari keberhasilan pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah setiap tahun.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kota Pontianak lima tahun kedepan.

Pemerintah Kota Pontianak cukup optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34% pada akhir tahun perencanaan (2030). Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak meningkat cukup signifikan dimana indeks Tahun 2024 mencapai sebesar 82,22, lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 71,19 dan IPM nasional sebesar 75,02, sehingga Pemerintah Kota Pontianak berani menetapkan target 85,25 pada akhir tahun perencanaan (2030).

Peningkatan IPM ini dipicu oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan yaitu semakin meratanya sarana dan prasarana kesehatan dan kemudahan untuk mengakses persalinan medis. Bidang pendidikan didukung oleh peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan IPM Kota Pontianak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Pontianak semakin baik.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pontianak Tahun 2025-2030

No.		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,22	82,73	83,23	83,73	84,24	84,74	85,25	85,25
	1	Prevalensi Stunting Pada Balita (SSGI)	%	22,30	21,00	19,60	18,20	16,80	15,40	14,00	14,00
	2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,46	75,83	76,2	76,57	76,94	77,31	77,68	77,68
	3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,47	10,56	10,65	10,74	10,83	10,92	11,01	11,01
	4	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	15,06	15,12	15,18	15,24	15,3	15,36	15,42	15,42
	5	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	82,55	83	83,15	83,3	83,45	84	84,15	84,15
	6	Indeks pembangunan keluarga (IPK)	Indeks	63,15	63,80	64,40	65,00	65,60	66,20	66,80	66,80
	7	Indeks ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0,239	0,230	0,220	0,200	0,180	0,160	0,140	0,140
	8	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,04*	69,00	70,50	72,00	74,00	76,00	78,28	78,28
	9	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	55	55,55	56	56,75	57	57,85	57,85
2		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	75,89	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
	1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,54	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	80,50
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,81	0,81	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,35	4,40	4,45	4,46	4,47	4,48	4,50	4,50
	4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,29	61,40	61,80	62,00	62,30	62,40	62,80	62,80
	5	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,49	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,98	3,98
	7	Indek Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50

No.		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,04	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
	9	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	77,72	78,00	78,5	79,00	79,5	80,00	80,5	80,5
3		Indeks Infrastruktur Kota	Indeks	77,77	78,68	79,34	79,86	81,16	81,66	82,41	82,41
	1	Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Indeks	85,30	86,52	87,16	87,50	89,60	89,90	90,40	90,40
	2	Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks	71,60	72,29	72,95	73,60	74,26	74,92	75,88	75,88
	3	Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (Km/Jam)	Km/Jam	26,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	84,19	82,69	81,19	79,69	78,19	76,69	75,19	75,19
	1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,55	0,6	0,63	0,66	0,69	0,70	0,70
5		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	%	N/A	25,11	26,87	28,63	30,38	32,14	33,99	33,99
	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	60.71*	60,3	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	61,26
	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87,50	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,00
6		PDRB Per Kapita	Rp Juta	75,42	77,86	84,50-101,75	125,64-130,64	149,53-157,03	173,40-183,40	192,51-204,51	192,51-204,51
7		Rasio Gini	Indeks	0,361	0,343	0,341	0,34	0,338	0,336	0,334	0,334
8		Tingkat kemiskinan	%	4,20	4,00	3,79	3,58	3,36	3,15	2,98	2,98
9		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,18	4,2	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	4,26
	1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65	81,65
	2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,01-5,20	5,28-5,70	5,30-5,75	5,40-5,80	5,45-5,60	5,50-6,00	5,50-6,00
	3	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	0,249

No.		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target Capaian						Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	0,064
	5	Rasio kemandirian Keuangan Daerah	%	30,65	35,02	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	40,88
	6	Tingkat inflasi	%	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
10		Angka konflik	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Angka Kriminalitas	Angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,70	13,70
	2	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,251	5,3	5,44	5,58	5,72	5,86	6,00	6,00

Sumber: BAPPERIDA Kota Pontianak, 2025

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Selain adanya penetapan indikator kinerja utama terdapat juga penetapan Indikator Kinerja Daerah. Indikator kinerja daerah merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan yang berbasis kinerja. Indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai keberhasilan pencapaian daerah yang didukung oleh kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, perangkat daerah dapat menilai efektivitas dan efisiensi berbagai program serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kota Pontianak ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pontianak tahun 2025-2030

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65	DPPP	Inmen No 2 Th 2025
2	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	6,75	DPPP	Inmen No 2 Th 2026
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	(Megawatt)	1,84	1,99	2,05	2,12	2,19	2,25	2,32	BAPPERIDA	Inmen No 2 Th 2025
4	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan	%	93,16	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	DPUPR	Inmen No 2 Th 2025
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	60,71*	60,30	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	DLH	IKK (PMDN 18/2020)
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,39	6,69	6,99	7,29	7,59	7,89	13,99	DPUPR	Inmen No 2 Th 2025
7	Persentase Luasan ruang terbuka hijau (RTH)	%	31,30	31,33	31,36	31,39	31,42	31,46	31,50	PUPR	Inmen No 2 Th 2025
8	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	84,19	82,69	81,19	79,69	78,19	76,69	75,19	BPBD	Inmen No 2 Th 2025
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,55	0,60	0,63	0,66	0,69	0,70	BPBD	Inmen No 2 Th 2025
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	67,62	69,23	70,84	72,45	74,06	75,67	DLH	Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	%	N/A	25,11	26,87	28,63	30,38	32,14	33,09	BAPPERIDA	RPJPD
12	Proyeksi Penduduk Kota Pontianak	Jiwa	687.031	691.978	695.953	699.977	704.050	708.171	712.341	DISDUKCAPIL	
13	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,06	0,720	0,574	0,578	0,582	0,585	0,589	DISDUKCAPIL	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
14	Kepadatan Penduduk	Orang/Km^2	5.812,00	5.853, 85	5.887,48	5.921,52	5.955,98	5.990,84	6.026,11	DISDUKCAPIL	Inmen No 2 Th 2025
15	Rasio Penduduk (Jenis kelamin)	%	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	DISDUKCAPIL	Inmen No 2 Th 2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,01-5,20	5,28-5,70	5,30-5,75	5,40-5,80	5,45-5,60	5,50-6,00	BAPPERIDA	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,20	4,00	3,79	3,58	3,36	3,15	2,98	DINSOS	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2026
3	Indeks kedalaman kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	DINAS SOSIAL	IKU
4	Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	DINAS SOSIAL	IKU

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	PDRB per kapita	Rp Juta	75,42	77,86	84,50-101,75	125,64-130,64	149,53-157,03	173,40-183,40	192,51-204,51	BAPPERIDA	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
6	Rasio gini	Indeks	0,361	0,343	0,341	0,340	0,338	0,336	0,334	BAPPERIDA	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,22	82,33	82,56	82,78	83,01	83,23	83,45	DISDIKBUD	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,29	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,66	DISNAKER	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
9	Kontribusi PDRB Kota Pontianak Terhadap Provinsi	%	17,11	16,63	16,53	16,43	16,33	16,23	16,15	BAPPERIDA	RPJPD
10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,210	0,32	0,40	0,47	0,55	0,62	0,68	DISKUMDAG	RPJPD
11	Proporsi jumlah usaha mikro	%	80,56	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00	95,00	DISKUMDAG	RPJPD
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	DINKES	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
13	Prevalensi stunting pada Balita (SSGI)	%	22,30	21,00	19,60	18,20	16,80	15,40	14,00	DINKES	Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
14	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	118,57	182,42	173,29	164,17	155,05	145,93	136,81	DINKES	RPJPD
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	117,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINKES	RPJPD
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	89,38	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINKES	RPJPD
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,61	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	DINKES	RPJPD
18	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,47	10,56	10,65	10,74	10,83	10,92	11,01	DISDIKBUD	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
19	Harapan lama Sekolah	Tahun	15,06	15,12	15,18	15,24	15,30	15,36	15,42	DISDIKBUD	Inmen No 2 Th 2025
	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:										
20	Literasi membaca	%	74,88	75,67	76,45	77,24	78,02	78,81	79,59	DISDIKBUD	Inmen No 2 Th 2025
21	Numerasi	%	39,09	43,97	48,85	53,73	58,61	63,49	68,37	DISDIKBUD	Inmen No 2 Th 2025
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional										
22	Literasi membaca	%	54,43	56,69	57,75	58,80	59,86	60,91	61,75	DISDIKBUD	Inmen No 2 Th 2025
23	Numerasi	%	39,09	41,02	42,95	44,88	46,81	48,74	50,67	DISDIKBUD	Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	82,55	83,00	83,15	83,30	83,45	84,00	84,15	DISPERPUSIP	Inmen No 2 Th 2025
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Pontianak	%	40,86	42,00	45,00	47,00	49,00	50,00	51,00	DISNAKER	Inmen No 2 Th 2025
26	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	%	8,70	10,00	11,88	13,75	15,63	17,50	19,00	DISNAKER	RPJPD
27	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75,55	76,00	76,88	77,75	78,63	79,50	80,20	KESBANGPOL	Inmen No 2 Th 2025
28	Indeks perlindungan anak	Indeks	66,04*	69,00	70,50	72,00	74,00	76,00	78,28	DP2KBP3A	Inmen No 2 Th 2025
29	Indeks pembangunan keluarga	Indeks	63,15	63,80	64,40	65,00	65,60	66,20	66,80	DP2KBP3A	Inmen No 2 Th 2025 (Proxcy)
30	Indeks Ketimpangan gender	Indeks	0,239	0,230	0,220	0,200	0,180	0,160	0,140	DP2KBP3A	Inmen No 2 Th 2025
31	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,80	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25	DP2KBP3A	Inmen No 2 Th 2025
32	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	N/A	55,00	55,55	56,00	56,75	57,00	57,85	DISPORAPAR	Inmen No 2 Th 2025
33	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	95,80	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00	DINSOS	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
34	Jumlah penduduk miskin	Ribu orang	28,56	27,44	26,26	25,04	23,80	22,54	21,25	DINSOS	
35	Prevalensi balita gizi buruk (SSGI)	%	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	DINKES	PMDN 52
36	Prevalensi balita gizi kurang (SSGI)	%	6,80	6,80	6,44	6,08	5,72	5,36	5,00	DINKES	PMDN 52
37	Rasio penduduk yang bekerja	%	91,70	91,90	92,05	92,25	92,46	92,90	93,01	DISNAKER	PMDN 52
38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	%	90,197 (SANGAT BAIK)	90,300 (SANGAT BAIK)	90,500 (SANGAT BAIK)	90,700 (SANGAT BAIK)	90,900 (SANGAT BAIK)	91,100 (SANGAT BAIK)	91,300 (SANGAT BAIK)	SETDA	PMDN 52
39	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,38	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	SETDA	Surat Bappenas No. 12830/ D.03/ PR.01.02/ 08/2025
40	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Nilai	88,60	89,00	89,60	90,60	91,60	92,60	93,60	DPPP	PMDN 52
41	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINAS SOSIAL	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Ketergantungan	%	44,92	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	DISDUKCAPIL	Inmen No 2 Th 2025
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	15,50	14,55	14,27	13,98	13,7 0	13,41	12,96	DISKUMDAG	RPJPD; Inemendagri 2/2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	%	3,19	3,20	3,23	3,29	3,35	3,41	3,46	DISPORAPAR	Inmen No 2 Th 2026
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,90	4,97	5,04	5,12	5,19	5,26	5,33	DISKUMDAG	Inmen No 2 Th 2025
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,53	64,77	65,00	65,24	65,48	65,71	65,95	DISNAKER	Inmen No 2 Th 2025
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,29	61,40	61,80	62,00	62,30	62,40	62,80	BAPPERIDA	Inmen No 2 Th 2025
7	Jumlah wisatawan macanegara yang berkunjung ke kota pontianak	orang	34.715	35.000	35.200	35.500	35.750	36.000	36.300	DISPORAPAR	
8	Retun on asset (BUMD)	%	5,58	6,15	6,18	6,20	6,23	6,25	6,27	SETDA	
9	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	65,70	66,00	66,25	66,50	66,75	67,00	67,20	DISNAKER	
10	Nilai Smart City	nilai	3,36	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	DISKOMINFO	proxcy
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,03	31,00	31,25	31,50	31,75	32,00	32,20	DPMPTSP	Inmen No 2 Th 2025
12	Indeks Infrastruktur Kota	Indeks	77,77	78,68	79,34	79,86	81,16	81,66	82,41	BAPPERIDA	Inmen No 2 Th 2025
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	89,74	89,77	89,856	89,862	89,869	89,875	89,88	DPRKP	Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	terjangkau dan berkelanjutan										
14	Rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota	km/jam	26,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	DISHUB	
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,75	0,98	1,03	1,03	1,04	1,07	1,07	BAPENDA	Inmen No 2 Th 2025
16	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	30,65	35,02	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	BAPENDA	
17	Tingkat Inflasi	%	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	DISKUMDAG	Inmen No 2 Th 2025
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	6,04	6,04	6,05	6,05	6,05	6,06	6,06	SETDA	
19	Total dana pihak ketiga / PDRB	%	84,12*	85,00	85,31	85,63	85,94	86,25	86,56	SETDA	Inmen No 2 Th 2026
20	Total kredit /PDRB	%	87,98	88,00	88,44	88,88	89,31	89,75	90,19	SETDA	Inmen No 2 Th 2027
21	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	18,48	18,50	18,92	19,42	19,92	20,42	20,92	DISKUMDAG	
22	Kontribusi PDRB Pertanian dan Perikanan	%	1,06	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	DPPP	
23	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	894.524	940.000	990.000	1.040.000	1.090.000	1.140.000	1.190.000	DPPP	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025
24	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	57,14	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	DPPP	PMDN 52 dan Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
25	Angka Konflik	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	KESBANGPOL	IKU
26	Angka kriminalitas;	angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,70	SATPOL PP	IKU
27	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,251	5,300	5,440	5,580	5,720	5,860	6,000	KESBANGPOL	IKU
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,54	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	SETDA	Inmendagri No 2 Th 2025
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	N/A	75	75	77	77	79	79	SETDA	LAN
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,40	4,45	4,46	4,47	4,48	4,50	SETDA	Inmenzx No 2 Th 2025
4	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	75,89	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	SETDA	Inmen No 2 Th 2025
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,04	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	SETDA	Inmen No 2 Th 2025
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,49	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,98	DISKOMINFO	Inmen No 2 Th 2025
7	Indek Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	DISKOMINFO	
8	Hasil Survey penilaian integritas (SPI)	Indeks	77,72	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	INSPEKTORAT	Proxcy
9	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,18	4,20	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	BAPPERIDA	Inmen No 2 Th 2025

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
10	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP	Inmen No 2 Th 2025
LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan										
1	Angka Partisipasi Murni (APM)									DISDIKBUD	PMDN 52
	-SD	%	90,98	92,48	93,98	95,48	96,98	98,48	99,98		
	-SMP	%	80,91	82,41	83,91	85,41	86,91	88,41	89,91		
	-SMA	%	82,65	90,82	91,82	92,82	93,82	94,82	95,82		
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)									DISDIKBUD	PMDN 52
	-PAUD	%	27,37	27,37	27,40	27,45	27,50	27,55	27,60		
	-SD	%	96,91	100	100	100	100	100	100		
	-SMP	%	94,52	100	100	100	100	100	100		
	-SMA	%	109,69	100	100	100	100	100	100		
3	Angka Putus Sekolah									DISDIKBUD	PMDN 52
	-SD	%	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11		
	-SMP	%	0,05	0,045	0,04	0.035	0,03	0,025	0,02		
	-SMA	%	2,14	2,1	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05		
4	Angka Kelulusan (siswa)									DISDIKBUD	PMDN 52
	-SD	Siswa	13.064	12.267	12.571	12.096	11.769	11.792	12.056		
	-SMP	Siswa	11.898	11.883	12.471	12.951	12.267	12.571	12.096		
	-SMA	Siswa	12.833	11.527	11.980	12.155	11.883	12.471	12.951		

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	Angka Melanjutkan									DISDIKBUD	PMDN 52
	SD (ke SMP)	%	101,34	100	100	100	100	100	100		
	SLTP (ke SMA)	%	132,44	100	100	100	100	100	100		
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	70,54	73,58	76,62	79,66	82,7	85,67	88,64	DISDIKBUD	IKK (PMDN 18/2020)
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,66	98,01	98,37	98,72	99,08	99,43	99,65	DISDIKBUD	IKK (PMDN 18/2020)
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,25	96,85	97,41	97,98	98,54	99,1	99,44	DISDIKBUD	IKK (PMDN 18/2020)
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	%	17,55	21,65	25,75	29,85	33,95	38,05	42,14	DISDIKBUD	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	pendidikan kesetaraan										
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	Siswa	12.604	12.700	12.750	12.800	12.850	12.900	12.950	DISDIKBUD	PMDN 52
11	Angka pendidikan yang ditamatkan;	%	100	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD	PMDN 52
12	Fasilitas Pendidikan;									DISDIKBUD	PMDN 52
	- SD (Negeri dan Swasta)	Unit	2.253	2.255	2.257	2.259	2.261	2.263	2.265		
	- SMP (Negeri dan Swasta)	Unit	1.298	1.300	1.302	1.304	1.306	1.308	1.310		
13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1 : 333	1 : 333	1 : 330	1 : 325	1 : 318	1 : 306	1 : 288	DISDIKBUD	PMDN 52
14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah;	Rasio	1 : 327	1 : 330	1 : 335	1 : 342	1 : 346	1 : 347	1 : 339	DISDIKBUD	PMDN 52
15	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	1 : 25	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	DISDIKBUD	PMDN 52
16	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1 : 23	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	DISDIKBUD	PMDN 52
17	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 25	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	DISDIKBUD	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
18	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	1 : 23	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	DISDIKBUD	PMDN 52
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	88,89	88,91	88,95	88,98	89,01	89,05	89,08	DISDIKBUD	PMDN 52
20	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	60	63	66	69	72	75	78	DISDIKBUD	
2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan										
1	Angka kematian bayi	Per 1.000 KH	7,87	10,03	9,85	9,67	9,49	9,30	9,12	DINKES	PMDN 52
2	Angka kematian balita		7,96	10,03	9,85	9,67	9,49	9,30	9,12	DINKES	PMDN 52
3	Angka kematian neonatal		7,78	10,03	9,85	9,67	9,49	9,30	9,12	DINKES	PMDN 52
4	Jumlah Kematian Ibu	orang	12	20	19	18	17	16	15	DINKES	IRBK
5	Jumlah Kematian Balita	orang	84	110	108	106	104	102	100	DINKES	IRBK
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0,23	36	36	55	61	70	70	DINKES	IRBK
7	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	20,84	80	85	90	93	95	95	DINKES	IRBK
8	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	0	62,8	64,3	65,8	66,8	77,8	77,8	DINKES	IRBK
9	Insiden rate DBD per 100.000 penduduk	%	3,66	< 49	< 49	< 49	< 49	< 49	< 49	DINKES	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11	Prevalensi wasting (SSGI)	%	8,20	8,20	7,96	7,72	7,48	7,24	7,00	DINKES	
12	Prevalensi underweight (SSGI)	%	17,50	17,50	16,70	15,90	15,10	14,30	13,50	DINKES	
13	Akreditasi fasilitas kesehatan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	
14	Ketersediaan fasilitas kesehatan:									DINKES	
	– Rumah sakit umum	Unit	12	12	12	12	12	12	12		
	– Rumah sakit khusus	Unit	1	1	1	1	1	1	1		
	– Rumah sakit bersalin	Unit	1	1	1	1	1	1	1		
	– Puskesmas	Unit	23	23	23	23	23	23	23		
	– Klinik/balai kesehatan	Unit	82	81	81	81	81	81	81		
15	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	2,76	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
16	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
17	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
18	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
19	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
21	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
22	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
23	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	pelayanan TBC sesuai standar										
24	Persentase orang dengan risiko terinfesi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
25	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
26	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,57	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
27	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,79	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
28	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95,73	100	100	100	100	100	100	DINKES	IKK (PMDN 18/2020)
29	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk;	Rasio Per Jumlah Penduduk	0,1527	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	DINKES	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
30	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk;	Per 1.000 Penduduk	2,92	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	DINKES	PMDN 52
31	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis)	Per 1.000 Penduduk	N/A	1,5276	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	DINKES	PMDN 52
32	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;	%	97,09	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
33	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan:	%	92,79	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
34	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);	%	13,79	80	80	80	80	80	80	DINKES	PMDN 52
35	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
36	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak;	%	53,2	85	88	91	93	95	95	DINKES	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
37	Non Polio AFP rate pada penduduk berusia <15 tahun	Per 100.000 Penduduk	12	10	10	10	10	10	10	DINKES	PMDN 52
38	Cakupan balita pneumonia yang ditangani;	%	N/A	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
39	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC;	%	106	90	90	90	90	90	90	DINKES	PMDN 52
40	Tingkat Insiden Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);	Per 100.000 Penduduk	363	308	263	231	206	188	174	DINKES	PMDN 52
41	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);	Per 100.000 Penduduk	7	7	7	7	6	6	6	DINKES	PMDN 52
42	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS;	Orang	2.375	1.903	1.636	1.446	1.303	1.188	1.106	DINKES	PMDN 52
43	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS;	%	90	90	90	90	90	90	90	DINKES	PMDN 52
44	Cakupan penemuan dan penanganan	%	26	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	penderita penyakit DBD;										
45	Penderita diare yang ditangani;	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
46	Angka kejadian Malaria;	%	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DINKES	PMDN 52
47	Tingkat kematian akibat malaria;	Kematian per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	DINKES	PMDN 52
48	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat;	%	0	0	0	0	0	0	0	DINKES	PMDN 52
49	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	%	98	95	95	95	95	95	95	DINKES	PMDN 52
50	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;	%	N/A	100	100	100	100	100	100	DINKES	PMDN 52
51	Posyandu Aktif bidang kesehatan	Unit	300	308	310	312	314	316	318	DINKES	
3	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:										
1	Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks	71,60	72,29	72,95	73,60	74,26	74,92	75,88	DPUPR	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	87,50	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	DPUPR	
3	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	88,29	89,19	89,53	89,87	90,21	90,55	90,89	DPUPR	
4	Persentase saluran berkualitas baik	%	53,96	54,46	54,86	55,26	55,66	56,06	56,46	DPUPR	
5	Rata - rata lama genangan	Jam	3	3	3	3	3	3	3	DPUPR	
6	Indeks infrastruktur keciptakaryaan	indeks	69,48	70,67	71,87	73,06	74,26	75,45	77,52	DPUPR	
7	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	14,19	14,90	15,35	15,80	16,30	16,70	17,00	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
8	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	%	93,16	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	tangga di seluruh kabupaten/kota										
9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,42	98,47	98,52	98,57	98,62	98,67	98,72	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
10	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	97,69	97,89	98,09	98,29	98,49	98,69	98,89	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
11	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	90,64	91,74	92,14	92,54	92,94	93,34	93,74	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
12	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	60,48	62,95	65,45	67,95	70,45	72,95	75,45	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPR	IKK (PMDN 18/2020)
4	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman:										
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Indeks	85,3	86,52	87,16	87,5	89,6	89,9	90,4	DPRKP	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Persentase Perumahan yang layak huni	%	90,00	90,50	91,00	91,35	92,00	92,50	93,50	DPRKP	
3	Persentase Luas kawasan Permukiman tidak kumuh	%	99,07	99,25	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55	DPRKP	
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ Kota yang ditangani	%	77,99	7,77 (beda rumus)	8,42	8,28	9,03	8,72	8,26	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,29	0,25	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	92,70	93,50	94,25	96,00	96,80	97,00	97,30	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
5	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:										
1	Indeks Trantibunlinmas	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SATPOL PP	
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP	IKK (PMDN 18/2020)
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	IKK (PMDN 18/2020)
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,92	10	10	10	10	10	10	BPBD	IKK (PMDN 18/2020)
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	474.074	478.289	480.799	483.379	486.038	488.773	491.584	BPBD	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	951	500	500	500	500	500	500	BPBD	IKK (PMDN 18/2020)
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	243	250	250	250	250	250	250	BPBD	IKK (PMDN 18/2020)
9	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD	
6	Urusan Pemerintah Bidang Sosial										
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(Indikator SPM)										
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	IKK (PMDN 18/2020)
5	Persentase PMKS yang tertangani;	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	PMDN 52
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap;	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	PMDN 52
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja										
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	%	39,00	39,15	39,30	39,45	39,65	39,85	40,00	DISNAKER	PMDN 52
2	Besaran pekerja/buruh yang	%	23,97	24,44	24,93	25,43	25,94	26,46	26,99	DISNAKER	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	menjadi peserta aktif BPJS										
3	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan;	%	50,68	50,93	51,19	51,44	51,70	51,95	52,21	DISNAKER	PMDN 52
4	Tingkat Partisipasi angkatan kerja laki-laki;	%	79,00	78,82	79,06	79,29	79,53	79,76	80,00	DISNAKER	
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	19,93	20,25	20,95	21,15	21,45	22,00	22,30	DISNAKER	IKK (PMDN 18/2020)
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	81,25	83,15	84,05	84,90	85,20	85,70	86,00	DISNAKER	IKK (PMDN 18/2020)
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,57	1,00	1,43	1,86	2,29	2,72	3,15	DISNAKER	IKK (PMDN 18/2020)
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakeijaan).	%	66,12	67,44	68,79	70,16	71,57	73,00	74,46	DISNAKER	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/Kota	%	30,16	31,66	33,24	34,90	36,64	38,47	40,39	DISNAKER	IKK (PMDN 18/2020)
2	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Tingkat capaian kota layak anak	%	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	KLA	DP2KBP3A	
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20,44	28,58	29,08	30,58	31,08	32,58	33,08	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	4,07	7,20	7,10	7,00	6,90	6,80	6,70	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)
3	Urusan Pemerintah Bidang Pangan										
1	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (PoU)	%	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	6,75	DPPP	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kapita/ hari	3.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	DPPP	
3	Konsumsi Energi Perkapita	kcal/kapita/ hari	N/A	1.950	1.990	2.030	2.070	2.100	2.100	DPPP	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	105,52	100	100	100	100	100	100	DPPP	IKK (PMDN 18/2020)
4	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan										
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan dengan mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahriya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Lokasi	0	6	9	9	11	11	14	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Lokasi	5	6	6	8	8	14	14	DPRKP	IKK (PMDN 18/2020)
5	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup										
1	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	51,40*	66,07	66,22	66,37	66,52	66,67	66,82	DLH	PMDN 52
2	Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	81,76*	65,49 (rumus baru)	65,79	66,09	66,39	66,69	66,99	DLH	PMDN 52
3	Indeks kualitas Lahan (IKL)	Indeks	37,75*	40,78(rumus baru)	40,85	40,92	40,98	41,05	41,13	DLH	PMDN 52
4	Persentase penanganan sampah	%	74,81	73,00	70,00	69,00	69,00	68,00	67,00	DLH	PMDN 52
5	Persentase Pengurangan Sampah pada Sumbernya	%	25,03	27	30	31	31	32	33	DLH	RPJPD (Proxcy)
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,84	100	100	100	100	100	100	DLH	IKK (PMDN 18/2020)
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	%	41,32	50	50	55	55	60	60	DLH	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pemerintah Daerah Kab/Kota										
6	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga (KK)	%	99,98	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	99,75	DISDUKCAPIL	
2	Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	%	98,45	98,12	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	DISDUKCAPIL	
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	65,00	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	DISDUKCAPIL	Inmen No 2 Th 2025
4	Persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98,10	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	DISDUKCAPIL	
5	Persentase penduduk yang memiliki akta kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL	
6	Peresentase pemenuhan dan pemanfataan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL	
7	Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Indeks	4,46	4,20	4,25	4,30	4,35	4,49	4,50	DISDUKCAPIL	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Perekaman KTP elektronik	%	98,29	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	DISDUKCAPIL	IKK (PMDN 18/2020)
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	62,73	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	DISDUKCAPIL	IKK (PMDN 18/2020)
10	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,46	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50	DISDUKCAPIL	IKK (PMDN 18/2020)
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	DISDUKCAPIL	IKK (PMDN 18/2020)
7	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
1	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A	
2	Persentase posyandu aktif	%	84,00	87,58	91,16	94,74	96,32	97,90	100	DP2KBP3A	
8	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,06	1,04	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94	DP2KBP3A	
2	Total Fertlity Rate (Angka Kelahiran Total)	%	1,93	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,09	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	%	63,11	60,83	62,38	63,93	65,48	67,03	68,58	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)										
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,49	11,94	11,39	10,84	10,29	9,74	9,19	DP2KBP3A	IKK (PMDN 18/2020)
5	Persentase masyarakat yang terapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	%	80,44	82,49	84,14	85,79	87,44	89,09	90,74	DP2KBP3A	
6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tahun	22,7	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	22,9	DP2KBP3A	
9	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan										
1	Tingkat kinerja pelayanaan kelancaran lalu lintas Kota Pontianak	rasio	0,60	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72	DISHUB	
2	Tingkat kinerja pelayanan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	%	80,56	80	80	85	85	85	85	DISHUB	
3	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	0,949	DISHUB	IKK (PMDN 18/2020)
4	V/C ratio dijalan kab/kota	Rasio	0,60	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72	DISHUB	IKK (PMDN 18/2020)
10	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika										

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang terintegrasi ke-E-goverment	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	
2	Persentase pelayanan online yang bisa diakses masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	
3	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	
4	Indeks layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks	100	80	85	87,50	90	93	95	DISKOMINFO	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	%	88,79	88,79	88,80	88,82	88,85	88,87	90	DISKOMINFO	
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	75,00	81,25	84,37	87,50	90,62	93,75	100	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)
7	Persentase Layanan Publik yang	%	47,73	48,89	51,11	53,33	55,56	57,78	60,00	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	diselenggarakan secara online dan terintegrasi										
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	96,48	97,23	98,50	96,34	97,52	96,75	96,80	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)
11	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	%	44,31	44,31	45,00	45,53	45,8	46,00	46,50	DISKUMDAG	
2	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	42,53	42,53	43,68	44,83	45,98	47,13	48,28	DISKUMDAG	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKUMDAG	IKK (PMDN 18/2020)
4	Persentase koperasi aktif	%	21,01 (rumus baru)	21,01	22,06	23,11	24,16	25,21	26,26	DISKUMDAG	PMDN 52
5	Persentase Usaha Mikro	%	80,56	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00	95,00	DISKUMDAG	PMDN 52
12	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal										

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP	%	99,28	99,30	99,31	99,32	99,33	99,34	99,35	DPMPTSP	
2	Persentase peningkatan investasi di Kota Pontianak	%	97,86	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP	IKK (PMDN 18/2020)
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);	Orang	902	769	776	788	800	812	824	DPMPTSP	PMDN 52
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA);	Rp	1.666.922.661.024	876.900.000.000	943.900.000.000	1.010.900.000.000	1.077.900.000.000	1.144.900.000.000	1.211.900.000.000	DPMPTSP	PMDN 52
5	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).	Milyar Rupiah	1.458,34	643,122	649,553	659,296	669,185	679,223	689,412	DPMPTSP	PMDN 52
13	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga										
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional	%	10,25	11,50	11,80	12,00	12,70	13,00	13,50	DISPORAPAR	
2	Persentase peningkatan pemuda dan olahraga yang berprestasi di tingkat Kota/Prov/Nasional	%	9,85	9,95	10,30	10,70	11,00	11,40	11,90	DISPORAPAR	
3	Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat nasional	%	45,71	46,20	46,70	47,00	47,50	47,90	50,20	DISPORAPAR	
4	Tingkat partisipasi kasar pemuda dalam	%	2,20	2,50	2,80	3,00	3,50	3,70	3,90	DISPORAPAR	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	kegiatan ekonomi mandiri										
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,30	3,70	DISPORA PAR	IKK (PMDN 18/2020)
6	Peningkatan prestasi olahraga	%	43,00	43,50	43,80	44,20	44,80	45,00	45,60	DISPORA PAR	IKK (PMDN 18/2020)
14	Urusan Pemerintah Bidang Statistik										
1	Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal satu data Kota Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	
2	Persentase tingkat terselenggaranya kegiatan statistik Kota Pontianak	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	pembangunan daerah										
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)
15	Urusan Pemerintah Bidang Persandian										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	95,66	96,00	96,25	96,25	96,75	97,15	97,65	DISKOMINFO	IKK (PMDN 18/2020)
16	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan										
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	70,50	70,82	71,16	71,33	71,50	72,70	73,55	DISDIKBUD	
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD	IKK (PMDN 18/2020)
17	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan										
1	Persentase pengunjung pada perpustakaan dan tempat baca	%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	DISPERPUSIP	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	69,90	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	DISPERPUSIP	IKK (PMDN 18/2020)
18	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan										
1	Indeks kearsipan	%	84,78	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	DISPERPUSIP	Pengumuman ANRI

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
											Nomor: AK.01.00/28/2024
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	90,74	90,79	90,84	90,89	90,94	90,99	91,04	DISPERPUSIP	IKK (PMDN 18/2020)
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	DISPERPUSIP	IKK (PMDN 18/2020)
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola	%	37,50	53,12	56,25	65,62	78,13	90,63	100	DISPERPUSIP	PMDN 52

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	arsip secara baku; dan										
5	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	80	72	72	72	72	72	72	DISPERPUSIP	PMDN 52
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
1	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan										
1	Kontribusi sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	1,06	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	DPPP	
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kola (sumber data: one data KKP)	ton	1.044,16 ton	991 ton	1.028 ton	1.052 ton	1.077 ton	1.103 ton	1.115 ton	DPPP	IKK (PMDN 18/2020)
2	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata										
1	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3,19	3,22	3,25	3,29	3,33	3,37	3,4	DISPORAP	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	21,27	21,45	21,70	22,00	22,35	22,75	22,90	DISPORAP	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	18,52	18,78	18,96	19,30	19,68	19,90	20,25	DISPORAPAR	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	yang datang ke Kabupaten/Kota										
4	Tingkat hunian akomodasi	%	56,73	56,95	57,45	57,80	58,00	58,35	58,85	DISPORAPAR	IKK (PMDN 18/2020)
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	23,72	23,95	24,30	24,75	25,20	25,75	26,00	DISPORAPAR	IKK (PMDN 18/2020)
3	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian										
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	%	1,06	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	DPPP	
2	Produktivitas tanaman pangan:										
	-padi	Kuintal/ha	28,60	34,42	34,42	34,60	34,60	34,70	34,70	DPPP	
	-ubi kayu	Kuintal/ha	223,46	223,00	223,64	223,64	224,30	225,00	225,50	DPPP	
	-keladi	Kuintal/ha	143,00	142,10	143,08	143,08	143,50	143,50	144,00	DPPP	
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	28,60	34,42	34,42	34,6	34,60	34,70	34,70	DPPP	IKK (PMDN 18/2020)
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-74,29	-5.55	-5.88	-6,25	-6,67	-7,14	-7,69	DPPP	IKK (PMDN 18/2020)
4	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan										
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	18,84	18,50	18,92	19,42	19,92	20,42	20,92	DISKUMDAG	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	73,12	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
4	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	117,80	100	100	100	100	100	100	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
5	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian										
1	Kontribusi PDRB industri Pengolahan	%	15,50	14,55	14,27	13,98	13,70	13,41	12,96	DISKUM DAG	
2	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan jumlah izin yang dikeluarkkan	%	20,50	22,50	23,50	25,50	26,50	27,50	28,50	DISKUM DAG	
3	Persentase pertumbahan jumlah industri kecil dan	%	23,39	24,59	24,78	24,89	25,00	25,45	25,80	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	menengah di Kabupaten/Kota										
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terrnasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	20,50	22,50	23,50	25,50	26,50	27,50	28,50	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)
7	Tersedianya informasi industri	%	125	100	100	100	100	100	100	DISKUM DAG	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	secara lengkap dan terkini										
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	Sekretariat Daerah										
1	Nilai LPPD (EPPD)	Nilai	3,1046* (sedang)	3,42 (tinggi)	3,45 (tinggi)	3,48 (tinggi)	3,51 (tinggi)	3,54 (tinggi)	3,57 (tinggi)	SETDA	
2	Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH	Nilai	78,00*	78,30	78,60	78,90	79,20	79,50	80,00	SETDA	RPJPD
2	Sekretariat DPRD										
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	93,50	89,00	89,05	90,00	90,05	91,00	91,05	SETWAN	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	Perencanaan										
1	Indeks Kinerja Perencanaan	Indeks	N/A	88,00	89,00	90,50	92,00	93,50	95,00	BAPPERIDA	
2	Keuangan										
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	59,50	56,60	56,61	60,00	60,00	60,00	60,00	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
2	Rasio PAD	%	30,65	35,15	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	BAPENDA	IKK (PMDN 18/2020)
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi	%	67,28	68,00	68,00	69,00	69,00	70,00	70,00	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	transfer expenditures)										
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	66,67	70,00	75,00	80,00	80,00	100	100	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
5	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,30	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,87	5,87	5,90	5,90	5,90	6,00	6,00	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
8	Manajemen Aset	Nilai	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
9	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,54	3,55	3,55	3,57	3,57	3,77	3,77	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	BKAD	IKK (PMDN 18/2020)
3	Pengadaan										
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	SETDA	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama										
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	0,77	0,78	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85	SETDA	IKK (PMDN 18/2020)
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	60,30	60,31	60,32	60,33	60,34	60,35	60,36	SETDA	IKK (PMDN 18/2020)
4	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan										
1	Indeks Profesional ASN	%	78	80	82	84	86	88	90	BKPSDM	
2	Indeks Sistem Merit	%	0,80	0,81	0,81	0,85	0,85	0,87	0,87	BKPSDM	
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,42	80,97	84,52	88,07	91,62	95,17	98,72	BKPSDM	IKK (PMDN 18/2020)
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,87	23,22	24,57	25,92	27,27	28,62	29,97	BKPSDM	IKK (PMDN 18/2020)
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk	%	29,19	30,54	31,89	33,24	34,59	35,94	37,29	BKPSDM	IKK (PMDN 18/2020)

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	guru dan tenaga kesehatan)										
5	Penelitian dan Pengembangan										
1	Indeks Kinerja Inovasi Daerah	Indeks	N/A	72,50	74,00	75,50	77,00	78,50	80,00	BAPPERIDA	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
1	Inspektorat Daerah										
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT	IKK (PMDN 18/2020)
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT	IKK (PMDN 18/2020)
UNSUR KEWILAYAHAN											
1	Kecamatan										
1	IPP Kecamatan Pontianak Tenggara	Indeks	N/A	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Pontianak Tenggara	
2	IPP Kecamatan Pontianak Kota	Indeks	N/A	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	Pontianak Kota	
3	IPP Kecamatan Pontianak Timur	Indeks	N/A	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	Pontianak Timur	
4	IPP Kecamatan Pontianak Utara	Indeks	N/A	3,57	3,75	3,81	3,88	3,95	4,03	Pontianak Utara	
5	IPP Kecamatan Pontianak Barat	Indeks	N/A	3,68	3,71	3,73	3,82	3,85	3,89	Pontianak Barat	
6	IPP Kecamatan Pontianak Selatan	Indeks	N/A	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	Pontianak Selatan	

No.	Aspek/Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET SASARAN						Sumber Data	Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7	IKM Pontianak Tenggara	Nilai	91,69	92,30	92,35	92,45	92,65	93,00	93,55	Pontianak Tenggara	
8	IKM Pontianak Kota	Nilai	92,03	92,20	92,35	92,50	95,00	95,00	95,00	Pontianak Kota	
9	IKM Pontianak Timur	Nilai	94,15	94,56	94,66	94,76	94,86	94,96	95,06	Pontianak Timur	
10	IKM Pontianak Utara	Nilai	88.25	99,59	99,61	99,65	99,66	99,68	99,70	Pontianak Utara	
11	IKM Pontianak Barat	Nilai	89.00	93,50	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	Pontianak Barat	
12	IKM Pontianak Selatan	Nilai	86,00	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	Pontianak Selatan	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik										
1	Persentase penyelesaian konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	N/A	72,68	73,13	74,59	75,34	76,84	77,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sumber: BAPPERIDA Kota Pontianak, diolah dari seluruh Perangkat daerah

Catatan:

* Data tahun 2023



BAB V
PENUTUP

pergi ke laut mencari rajungan
rajungan ditangkap dengan pukat
bersama kita bergandangan tangan
majukan kota sejahterakan masyarakat

BAB V
PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Pontianak selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2025-2029. Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak, serta terpadu dan searah dengan pembangunan provinsi Kalimantan Barat dan Nasional selama lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 hingga Tahun 2030 serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkembang di masyarakat dari segala aspek serta kinerja pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang berpotensi muncul di masa mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisikan kebijakan jangka menengah yang berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang diselaraskan dengan pencapaian Asta Cita, dan Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Dan untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah, Kota Pontianak telah memanfaatkan Portal Satu Data dalam mendokumentasikan data pembangunan sektoral.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran periode pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, unsur Pemerintahan Daerah baik eksekutif maupun legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mendukung implementasi program-program RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Dengan Pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, maka Kota Pontianak akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya yaitu Kota Pontianak Bersinar, Sejahtera dan Berkelanjutan.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

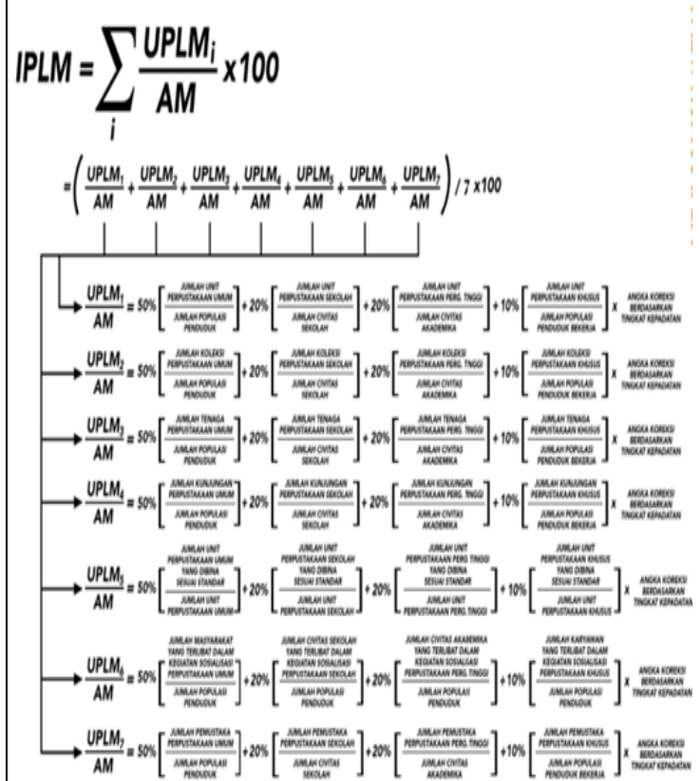


LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Ada tingkat pembangunan manusia dari dimensi dasar yaitu: usia harapan hidup, pengetahuan, standar hidup layak (sumber: Badan Pusat Statistik)	Indeks Pembangunan Manusia = (⅓ x indeks umur panjang) + (⅓ x indeks pengetahuan) + (⅓ x indeks standar hidup layak)
			1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Prevalensi Stunting pada balita	Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (Tinggi Badan/Umur) dibandingkan dengan menggunakan standar *World Health Organization* tahun 2005 (sumber: Survei Status Gizi Indonesia)	Prevalensi stunting = (jumlah balita stunting / jumlah total balita) X 100%
				2. Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun. (Sumber: Proyeksi dari Survei Penduduk Antar Sensus dan Sensus Penduduk)	UHH = Σ (Px * x) Dimana: Σ = simbol penjumlahan Px = probabilitas seseorang hidup sampai usia x x = usia

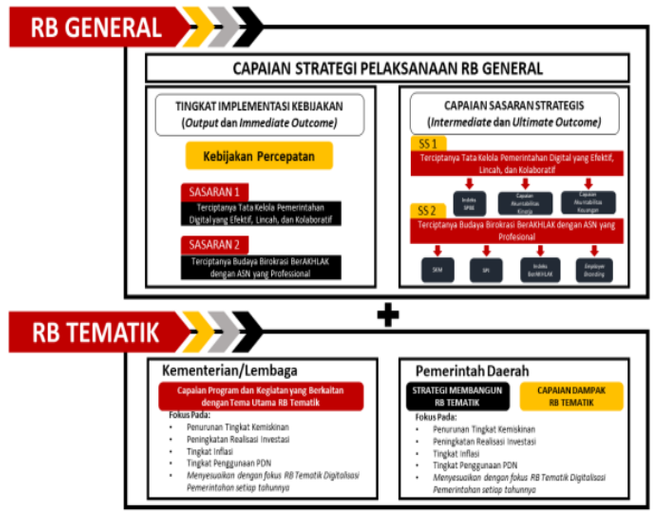
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah di jalani. (sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik)	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
				2. Harapan Lama Sekolah	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang (sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik)	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi dalam suatu masyarakat. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Definisi operasional dari variabel ini dapat dipecah menjadi beberapa komponen utama: Tingkat Melek Huruf: Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis pada usia tertentu. Akses ke Pendidikan: Kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan bahan bacaan. Kualitas Pendidikan: Kualitas pengajaran dan kurikulum yang berfokus pada pengembangan literasi. Infrastruktur Literasi: Ketersediaan perpustakaan, pusat belajar, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan literasi. Partisipasi dalam Kegiatan Literasi: Jumlah dan jenis kegiatan literasi yang diikuti oleh masyarakat, seperti klub buku, seminar, dan lokakarya. Penggunaan Teknologi untuk Literasi: Akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan literasi.	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks yang mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Keluarga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.

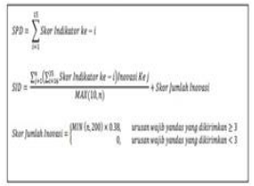
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				2. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun, dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat keatas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik dan Sekretaris Dewan)	**Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:** 1. **Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki** $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{3}} \times (PR_P \times SE_P)^{\frac{1}{3}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{3}} \times TPAK_L}$ 2. **Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic** $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. **Menghitung indeks masing – masing dimensi** $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. **Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik** $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. **Menghitung Indeks Kesetaraan Gender** $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. **Menghitung Indeks Ketimpangan Gender** $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ **Keterangan:** G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15--49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15--49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P =Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender

<table>
<tr><th>MISI</th><th>TUJUAN</th><th>INDIKATOR TUJUAN</th><th>SASARAN</th><th>INDIKATOR SASARAN</th><th>DEFENISI OPERASIONAL</th><th>RUMUS PERHITUNGAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td>3. Indeks Perlindungan Anak</td><td>Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat perlindungan dan kesejahteraan anak di suatu daerah, yang dihitung berdasarkan sejumlah indikator, seperti hak sipil dan kebebasan (20%), lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (22%), kesehatan dasar dan kesejahteraan (18 %), pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (18 %) dan perlindungan khusus (22 %).</td><td>Metode Perhitungan
Bobot masing-masing klaster:
<table><tr><th>Klaster</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1. Hak Sipil dan Kebebasan</td><td>20%</td></tr><tr><td>2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</td><td>22%</td></tr><tr><td>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>18%</td></tr><tr><td>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td><td>18%</td></tr><tr><td>5. Perlindungan Khusus</td><td>22%</td></tr></table>Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks klaster IPA adalah sebagai berikut:
$Indeks\ K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) x\ 100$
dimana
$Indeks\ K_j$: nilai indeks klaster ke-j
SX_{ji} : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi
n_j : banyaknya indikator pada klaster ke-j</td></tr>
<tr><td>4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda</td><td>Indeks Pembangunan Pemuda</td><td>Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender.</td><td>Indeks Pembangunan Pemuda =
$\frac{Jumlah\ organisasi\ kepemudaan\ yang\ dibina}{Jumlah\ organisasi\ kepemudaan\ di\ Kota\ Pontianak}$ X 100%</td></tr>
</table>

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi			Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.	 Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
			1. Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan	Dinilai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
					deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.	
			2. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang Berkualitas	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang dipergunakan untuk menilai penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Penilaian atas penerapan prinsip sistem merit mencakup 8 aspek penilaian, yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.	Penilaian nya dikeluarkan oleh Badan kepegawaian Negara, yang dipublikasikan adalah nilai dan indeks. Terdiri dari 8 aspek: Perencanaan kebutuhan (20%), Pengadaan (10%), Pengembangan karir (25%), Promosi dan mutasi (10%), Manajemen kinerja (15%), Penggajian (10%), Perlindungan dan pelayanan (5%), Sistem informasi (5%)
			3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. (Sumber: Kementerian	Tahapan Perhitungan Indeks Pelayanan Publik : 1. Menentukan Nilai Untuk setiap Indikator - Nilai per indikator F02 = Nilai F02 x bobot per indikator - Nilai per indikator F03 = Nilai F03 x bobot per indikator 2. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai per aspek = ∑nilai per indikator 3. Menentukan Nilai Indeks Formulir Nilai Indeks Formulir = $\sum$(nilai per aspek$_n$ x bobot aspek$_n$) 4. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Nilai Indeks Pelayanan Publik = (75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03) Keterangan :

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
					Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	Formulir F-02 : Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif. Formulir F-03 : Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi. Sumber : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah suatu ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi.	 $SPD = \sum_{i=1}^{n} Skor\ Indikator\ ke-i$ $SID = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\sum_{j=1}^{10} Skor\ Indikator\ ke-i\ (Inovasi\ Ke\ j)}{MAX(10,n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN\ (n, 200) \times 0{,}38, & urusan\ wajib\ yandasi\ yang\ dikirimkan \geq 3 \\ 0, & urusan\ wajib\ yandasi\ yang\ dikirimkan < 3 \end{cases}$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Catatan: a) Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan. b) Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut. c) Skor Indikator Jumlah Inovasi hanya dihitung jika urusan wajib pelayanan dasar yang dikirimkan 3 atau lebih urusan. d) Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). e) Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). f) Skala IID adalah 0 s.d. 100. 2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} x\ 100$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 1) 3 Variabel; 2) 15 Indikator; dan 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari: 1) 5 Variabel; 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%). Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2025: **Kategori** | **Rentang Skor** **Sangat Inovatif** | 65,01 - 100,00 **Inovatif** | 40,01 – 65,00 **Kurang Inovatif** | 0,01 – 40,00 **Tidak Dapat Dinilai** | 0

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.	Dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki 4 jenis opini, antara lain Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat, dan Tidak Wajar.
			6. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara keseluruhan (sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	$Indeks\ Domain_j = \frac{1}{BD_j} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				2. Indeks Pemerintahan Digital	Ukuran untuk menilai tingkat perkembangan dan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintah	35 indikator dengan masing-masing bobot dibagi 9 aspek yang dinilai yang memiliki masing-masing bobot
			7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pontianak	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen pelaporan kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			8. Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Indeks Integritas : 0,305 (X1) + 0,328 (X2)+0,367(X3)-0,20(0,58 (X4)+ 0,42(X5)) X1 : Indeks Penilaian Internal X2 : Indeks Penilaian Eksternal X3 : Indeks Penilaian Ekspert X4 : Prevalensi Korupsi X5 : Integritas Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
3	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur Kota			Indeks yang mencerminkan kualitas, ketersediaan, aksesibilitas dan kinerja sistem infrastruktur dasar di suatu wilayah perkotaan yang dibangun dari sejumlah indikator yang terukur.	(55% * Indeks kualitas sarana sarana prasarana dasar perkotaan) + (45% * Indeks kualitas infrastruktur lingkungan permukiman)
			1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota	1. Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Kondisi dan kemampuan fasilitas serta sistem pendukung suatu kawasan permukiman, yang mencakup aspek kenyamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan bagi penghuninya.	[(60% * (Jumlah ruas ialan kondisi mantap dan baik/ Jumlah ruas jalan))+ (40% * (Jumlah ruas saluran kondisi mantap dan baik/ Jumlah ruas saluran)] x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				2. Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indikator untuk menghitung tingkat capaian kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (bobot 35%) + Persentase saluran berkualitas baik (bobot 30%) + indeks keciptakaryaan (bobot 35%)
			2. Meningkatnya kelancaran transportasi	Rata - rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (kilometer/ jam)	Rata-rata waktu tempuh adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain.	Rata-rata jarak tempuh / Rata-rata kecepatan (Lokasi survei 12 Jalan).
	2.Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Indeks Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah (sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan** Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Sebagai komponen utama dalam pengukuran Indeks Risiko Bencana Kota Pontianak, Indeks Ketahanan Daerah memuat indikator-indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana.	Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner Indeks Kapasitas Daerah yang sesuai dengan Pedoman teknis dan Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kumulatif			Intensitas emisi gas rumah kaca adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi (sumber: Sistem Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)	**a. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan** $\%PE_t = PE_t / EB_t$ $\%PE_t$ = persentase penurunan emisi GRK total sektora daerah pada tahun *t* PE_t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun *t* EB_t = emisi GRK total sektoral *baseline* tahun *t* t = titik tahun perhitungan **b. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif** $\%PEK = \sum^{t}_{i\ -\ base\ year} PE_t / \sum^{t}_{i\ -\ base\ year} EB_t$ %PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif $\sum^{t}_{i\ -\ base\ year} PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun *t* $\sum^{t}_{i\ -\ base\ year} EB_t$ = akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun *t* t = titik tahun perhitungan i = *base year* tahun 2010

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (Sumber: Data yang dipergunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi)	IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut: IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG) IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut: IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL) IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut: IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)
				2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	% luas pemanfaatan lahan sesuai tata ruang/luas wilayah Kota Pontianak * 100%	(% luas pemanfaatan lahan sesuai tata ruang / luas wilayah Kota Pontianak) x 100%
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing	1. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita			Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto per kepala atau per satu orang penduduk. Produk Domestik Regional Bruto per kapita dihitung dengan cara membagi total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
					tahun (sumber: Badan Pusat Statistik)	
		2. Rasio Gini			Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *lorenz* dan apsek metematis. (Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional)	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
		3. Tingkat kemiskinan			Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4. Indeks Daya Saing Daerah			Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang berkelanjutan. **Indeks Daya Saing Daerah** juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya **Indeks Daya Saing Daerah** sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.	 https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			1. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Suatu ukuran komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain Indeks Ketahanan Pangan memberikan gambaran tentang kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau bagi seluruh penduduknya (Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian)	**3.3. Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan** 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0–100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $Y_j = \sum a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. 3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 3). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Tabel 3. *Cut off Point* Indeks Ketahanan Pangan : Kelompok IKP | Kabupaten | Kota | Provinsi 1 | <= 41,52 | <= 28,84 | <= 37,61 2 | > 41,52 – 51,42 | > 28,84 – 41,44 | > 37,61 – 48,27 3 | > 51,42 – 59,58 | > 41,44 – 51,29 | > 48,27 – 57,11 4 | > 59,58 – 67,75 | > 51,29 – 61,13 | > 57,11 – 65,96 5 | > 67,75– 75,68 | > 61,13 – 70,64 | > 65,96– 74,40 6 | > 75,68 | > 70,64 | > 74,40

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Meningkatnya produktivitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.	$Laju\ Pertumbuhan\ ekonomi = (\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}})$x 100% $PDRB_t$ = Produk Domestik regional Bruto tahun berjalan $PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik regional Bruto tahun sebelumnya
			3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (Sumber: Badan Pusat Statistik)	P1 = (1/n) * Σ [(z - yi)/z] Dimana: P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan n = Jumlah penduduk z = Garis kemiskinan (jumlah rupiah minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar) yi = Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin ke-i. Σ = Notasi sigma yang menunjukkan penjumlahan untuk semua penduduk miskin. (z – yi) = Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. (z - yi)/z = Proporsi kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
				2. Indeks keparahan kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan, juga dikenal sebagai Indeks Keparahan Kemiskinan, adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketidaksetaraan dalam pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin mungkin memiliki tingkat pengeluaran yang jauh lebih rendah daripada yang lain (Sumber: Badan Pusat Statistik)	IKK (P1) = (1/N) * Σ [(Garis Kemiskinan - Pendapatan Rumah Tangga Miskin) / Garis Kemiskinan] Dimana: N = Jumlah total penduduk Garis Kemiskinan = Batasan pendapatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk miskin Pendapatan Rumah Tangga Miskin = Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari rumah tangga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan Σ = Jumlah dari seluruh rumah tangga miskin yaitu rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan
			4. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Rasio kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Sumber: Badan Pusat Statistik, Badan Kuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = $\frac{Total\ PAD}{Total\ Pendapatan}$ x 100%
				2. Tingkat Inflasi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam	Tingkat Inflasi (%) = $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
					wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (Sumber: Badan Pusat Statistik)	
5	Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis	Angka konflik			Angka konflik adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat atau intensitas konflik dalam suatu wilayah atau masyarakat tertentu.	Angka Konflik = $\frac{Jumlah\ kejadian\ konflik\ sosial\ yang\ terlaporkan}{10.000\ \ penduduk}$
			1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	Angka kriminalitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat kejahatan dalam suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan jumlah kejahatan yang dilaporkan dan direkam oleh otoritas penegak hukum. Angka kriminalitas sering digunakan oleh pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum untuk menilai keamanan suatu wilayah dan efektivitas kebijakan penegakan hukum.	Angka Kriminalitas = $\frac{Jumlah\ seluruh\ tindak\ kriminalitas\ pada\ tahun\ n}{Jumlah\ penduduk\ pada\ tahun\ n}\ x\ 10.000$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	Indeks Kota Toleran	Merujuk pada kriteria dan indikator yang digunakan oleh Setara Institute untuk menilai tingkat toleransi suatu kota di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong praktik tata kelola kota yang inklusif dan menghargai keberagaman (Setara Institute yang melakukan perhitungan).	**8 Indikator Penilaian IKT :** **1. Regulasi Pemerintah Kota** Apakah kota memiliki produk hukum yang mendukung toleransi, seperti Perda Toleransi atau Perda Pendidikan Pancasila. **2. Tindakan Pemerintah Kota** Respons terhadap kasus intoleransi, serta inisiatif promotif untuk membangun kerukunan. **3. Regulasi Sosial** Norma sosial yang berlaku di masyarakat, termasuk penerimaan terhadap kelompok minoritas. **4. Inklusi Sosial Keagamaan** Keterlibatan semua kelompok agama dalam kegiatan sosial dan pemerintahan. **5. Kepemimpinan Politik yang Inklusif** Komitmen dan tindakan nyata dari kepala daerah dalam mendorong toleransi. **6. Kebijakan Pendidikan yang Mendukung Toleransi** Implementasi nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman dalam kurikulum lokal. **7. Keterlibatan Masyarakat Sipil** Peran aktif organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan advokasi toleransi. **8. Ketersediaan Anggaran untuk Program Toleransi** Alokasi dana APBD untuk kegiatan yang mendukung inklusi dan kerukunan[1].

TARGET TAHUNAN DAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	82,22	82,73	83,23	83,73	84,24	84,74	85,25	
			1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Prevalensi Stunting Pada Balita	%	22,30	21,00	19,60	18,20	16,80	15,40	14,00	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
				2. Usia Harapan Hidup	Tahun	75,46	75,83	76,20	76,57	76,94	77,31	77,68	Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata lama sekolah	Tahun	10,47	10,56	10,65	10,74	10,83	10,92	11,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,06	15,12	15,18	15,24	15,30	15,36	15,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	82,55	83,00	83,15	83,30	83,45	84,00	84,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3. Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	1. Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,15	63,80	64,40	65,00	65,60	66,20	66,80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
				2. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,239	0,230	0,220	0,200	0,180	0,160	0,140	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
				3. Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66,04*	69,00	70,50	72,00	74,00	76,00	78,28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
			4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	NA	55,00	55,55	56,00	56,75	57,00	57,85	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	75,89	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	
			1. Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,54	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	Sekretariat Daerah
			2. Meningkatnya ASN yang Berkualitas	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,81	0,81	0,85	0,85	0,87	0,87	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,40	4,45	4,46	4,47	4,48	4,50	Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,29	61,40	61,80	62,00	62,30	62,40	62,80	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
			4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Aset Daerah
			5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks	3,49	3,55	3,60	3,70	3,80	3,90	3,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2. Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	
			6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	71,04	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7. Meningkatnya Integritas dan Upaya Pencegahan Korupsi	Hasil Survei Penilaian Integritas	Indeks	77,72	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,50	Inspektorat
3	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Infrastruktur Kota			Indeks	77,77	78,68	79,34	79,86	81,16	81,66	82,41	
			1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kota	1. Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Indeks	85,30	86,52	87,16	87,50	89,60	89,90	90,40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				2. Indeks Kualitas Sarana Prasarana Dasar Perkotaan	Indeks	71,60	72,29	72,95	73,60	74,26	74,92	75,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Meningkatnya kelancaran transportasi	Rata - Rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota	kilometer / jam	26,36	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perhubungan
	2. Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Indeks risiko bencana			Indeks	84,19	82,69	81,19	79,69	78,19	76,69	75,19	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,55	0,55	0,60	0,63	0,66	0,69	0.70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca kumulatif			%	N/A	25,11	26,87	28,63	30,38	32,14	33,99	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,71*	60,30	60,49	60,68	60,87	61,07	61,26	Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	87,50	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing	1. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita			Rupiah Juta	75,42	77,86	84,50 - 101,75	125,64 - 130,64	149,53 - 157,03	173,40 - 183,40	192,51 - 204,51	
		2. Rasio Gini			Indeks	0,361	0,343	0,341	0,340	0,338	0,336	0,334	
		3. Tingkat kemiskinan			%	4,20	4,00	3,79	3,58	3,36	3,15	2,98	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Indeks Daya Saing Daerah			Angka	4,18	4,20	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
			1. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,55	74,15	75,65	77,15	78,65	80,15	81,65	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			2. Meningkatnya produktivitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5,01-5,20	5,28-5,70	5,30-5,75	5,40-5,80	5,45-5,60	5,50-6,00	Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja
			3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,279	0,274	0,269	0,264	0,259	0,254	0,249	Dinas Sosial
				2. Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,139	0,089	0,084	0,079	0,074	0,069	0,064	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						Perangkat Daerah
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	1. Rasio kemandirian Keuangan Daerah	%	30,65	35,02	36,22	37,09	37,99	40,42	40,88	Badan Pendapatan Daerah
				2. Tingkat inflasi	%	1,58	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan
5	Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis	Angka konflik			Nilai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	Angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,70	Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,521	5,300	5,440	5,580	5,720	5,860	6,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAPPERIDA
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak

Jl. Zainuddin No. 5 Pontianak 78111
Telp.0561 - 734294
Fax.0561 - 733045
Emailbapperida@pontianak.go.id
Websitehttps://bapperida.pontianak.go.id